



# PANCASILA, Merdeka Belajar dan Kemerdekaan Pendidik



# PANCASILA, Merdeka Belajar dan Kemerdekaan Pendidik

Buku antologi yang berjudul Pancasila, Merdeka Belajar, dan Kemerdekaan Pendidik berisikan pemikiran para akademisi dalam merespon tantangan baru yaitu konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang digagas dan diluncurkan oleh Mas Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pancasila yang merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang membentuk perilaku masyarakat dalam berbangsa dan bernegara juga dikaji dan dijabarkan bagaimana implementasinya di dalam pendidikan tinggi yang menerapkan konsep MBKM.

Dengan meluasnya penerapan konsep MBKM, akan semakin banyak perguruan tinggi dan institusi pendidikan lain yang melakukan inovasi pendidikan. Hasil pemikiran ketigapuluh penulis yang dituangkan di dalam buku ini, kami yakin dapat menginspirasi para akademisi lain dalam mengembangkan berbagai model pembelajaran yang dilandasi oleh kemerdekaan - baik bagi peserta didik, pendidik, maupun institusinya. Kemerdekaan pembelajaran itu tentu saja dilakukan dalam koridor berbagai regulasi pendidikan tinggi yang ada dengan tetap berpusat pada mahasiswa (*student-centred learning*). Karena tugas utama pendidikan tinggi adalah menghasilkan lulusan yang akan menggerakkan perekonomian bangsa, melakukan perubahan-perubahan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan berbagai ragam aktivitas dan produk kebudayaan yang dapat berkontribusi pada pengembangan peradaban kemanusiaan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberikan manfaat kepada peningkatan kualitas hidup manusia.



Gedung Umar bin Khattab Kantor Pusat LT. 3,  
Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono 193 Malang, 65144  
Telp. 0341-551932  
unismapress@unisma.ac.id

PENDIDIKAN

ISBN 978-623-99161-0-7



9 786239 916107  
Harga P. Jawa  
Rp. 63.000

PANCASILA, MERDEKA BELAJAR DAN KEMERDEKAAN PENDIDIK



Kata Pengantar  
Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., IPU, ASEAN Eng.  
(Rektor Universitas Gadjah Mada  
Ketua Forum Rektor Indonesia 2021-2022)



# PANCASILA, Merdeka Belajar dan Kemerdekaan Pendidik

Marinda Sari Sofiyana | Supriyono | Madya Ahdiyat | Herman | Abdul Malik Iskandar | Andiyani | Nanis Hairunisya | Lailatul Usriyah | Lukas Dwiantara | Betty Ariani | Firda Aulia Izzati | Endang Muryani | Bambang Panji Gunawan | Nur Aida | Hairuddin K | Muchamad Taufiq | Sita Acetylena | Rumsari Hadi Sumarto | Asri Widiatsih | Tining Haryanti | La Selo | Sulistyani Eka Lestari | Endang Tri Wahyurini | Minto Santoso | Indrati Rini | Harry Yulianto | Puji Asmaul Chusna | Endang Fatmawati | Jamila Lestyowati | Diah Puji Nali Brata | Ifdlolul Maghfur | Wiwik Heny Winarsih | Mustika Dewi | Siti Marwiyah | Hasanah | Mahmud | Karwanto | M. Daimul Abror | Agung Purnomo | Titi Savitri Prihatiningsih







# **PANCASILA**

## **Merdeka Belajar Dan Kemerdekaan Pendidik**



Marinda Sari Sofiyana, Supriyono, Madya Ahdiyat, Herman, Abdul Malik Iskandar, Andiyan, Nanis Hairunisya, Lailatul Usriyah, Lukas Dwiantara, Betty Ariani, Firda Aulia Izzati, Endang Muryani, Bambang Panji Gunawan, Nur Aida, Hairuddin K, Muchamad Taufiq, Sita Acetylena, Rumsari Hadi Sumarto, Asri Widiatsih, Tining Haryanti, La Selo, Sulistyani Eka Lestari, Endang Tri Wahyurini, Minto Santoso, Indrati Rini, Harry Yulianto, Puji Asmaul Chusna, Endang Fatmawati, Jamila Lestyowati, Diah Puji Nali Brata, Ifdlolul Maghfur, Wiwik Heny Winarsih, Mustika Dewi, Siti Marwiyah, Hasanah, Mahmud, Karwanto, M. Daimul Abror, Agung Purnomo, Titi Savitri Prihatiningsih

# PANCASILA

## Merdeka Belajar dan Kemerdekaan Pendidik

### Author:

Marinda Sari Sofiyana, Supriyono, Madya Ahdiyati, Herman, Abdul Malik Iskandar, Andiyan, Nanis Hairunisya, Lailatul Usriyah, Lukas Dwiantara, Betty Ariani, Firda Aulia Izzati, Endang Muryani, Bambang Panji Gunawan, Nur Aida, Hairuddin K, Muchamad Taufiq, Sita Acetylena, Rumsari Hadi Sumarto, Asri Widiatsih, Tining Haryanti, La Selo, Sulistyani Eka Lestari, Endang Tri Wahyurini, Minto Santoso, Indrati Rini, Harry Yulianto, Puji Asmaul Chusna, Endang Fatmawati, Jamila Lestyowati, Diah Puji Nali Brata, Ifdlolul Maghfur, Wiwik Heny Winarsih, Mustika Dewi, Siti Marwiyah, Hasanah, Mahmud, Karwanto, M. Daimul Abror, Agung Purnomo, Titi Savitri Prihatiningsih

### Layouter:

**Hery Suro**

### Editor:

**Dr. Hayat, S.A.P., M.Si., CIQaR**

### Design Cover:

**Hery Suro**

copyright © 2021

### Penerbit



Unisma Press  
Gedung Umar bin Khattab Kantor Pusat LT. 3,  
Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono 193 Malang, 65144  
Telp. 0341-551932 ext 232  
unismapress@unisma.ac.id

Cetakan Pertama : Desember 2021  
Ukuran : 15,5 cm x 23 cm  
Jumlah Halaman : 222 halaman

**Anggota IKAPI No.303/JTI/2021**

**ISBN: 978-623-99161-0-7**

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari Penerbit

# KATA PENGANTAR

**Rektor Universitas Gadjah Mada**  
**Ketua Forum Rektor Indonesia 2021-2022**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Salam Sejahtera untuk Kita Semua.

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, serta dengan kesehatan yang dianugerahkan, maka kita semua dapat melakukan tugas-tugas sebagai akademisi dengan sebaik-baiknya. Selaku Rektor Universitas Gadjah Mada kami mengucapkan selamat kepada ketiga puluh penulis yang berasal dari berbagai perguruan tinggi yang telah menyelesaikan sebuah karya berupa buku antologi yang berjudul **Pancasila, Merdeka Belajar, dan Kemerdekaan Pendidik**. Buku ini berisikan pemikiran para akademisi dalam merespon tantangan baru yaitu konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang digagas dan diluncurkan oleh Mas Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pancasila yang merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang membentuk perilaku masyarakat dalam berbangsa dan bernegara juga dikaji dan dijabarkan bagaimana implementasinya di dalam pendidikan tinggi yang menerapkan konsep MBKM.

Dengan meluasnya penerapan konsep MBKM, akan semakin banyak perguruan tinggi dan institusi pendidikan lain yang melakukan inovasi pendidikan. Hasil pemikiran ketigapuluh penulis yang dituangkan di dalam buku ini, kami yakin, dapat menginspirasi para akademisi lain dalam



mengembangkan berbagai model pembelajaran yang dilandasi oleh kemerdekaan – baik bagi peserta didik, pendidik, maupun institusinya. Kemerdekaan pembelajaran itu tentu saja dilakukan dalam koridor berbagai regulasi pendidikan tinggi yang ada dengan tetap berpusat pada mahasiswa (*student-centred learning*). Karena tugas utama pendidikan tinggi adalah menghasilkan lulusan yang akan menggerakkan perekonomian bangsa, melakukan perubahan-perubahan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan berbagai ragam aktivitas dan produk kebudayaan yang dapat berkontribusi pada pengembangan peradaban kemanusiaan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberikan manfaat kepada peningkatan kualitas hidup manusia.

Akhir kata, UGM sebagai universitas nasional, universitas perjuangan, universitas Pancasila, universitas kerakyatan, dan universitas pusat kebudayaan akan selalu mendukung upaya-upaya pencerdasan kehidupan bangsa dalam berbagai bentuk publikasi. Tak lupa, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada UNISMA Press dan segenap dewan redaksi yang telah bersedia untuk memfasilitasi proses penulisan buku ini dan melakukan penerbitan sehingga buku ini dapat diakses oleh kalangan akademisi dan masyarakat umum secara luas. Semoga upaya ketigapuluh penulis ini akan diikuti pula dengan berbagai karya publikasi dari para akademisi di seluruh Indonesia.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

30 November 2021

---

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., IPU,  
ASEAN Eng.Rektor Universitas Gadjah Mada  
Ketua Forum Rektor Indonesia 2021-2022

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii

### BAGIAN I

Peran Pendidik dalam Mewujudkan Merdeka Belajar Pelajar Pancasila ..... <b>Marinda Sari Sofiyana</b>	1
Ruh Pancasila dalam Arah Gerak Pendidikan Tinggi Di Indonesia ..... <b>Betty Ariani</b>	5
Relevansi Pancasila Dan Globalisasi Bagi Generasi Muda ..... <b>Firda Aulia Izzati</b>	10
Pancasila Spirit Kesuksesan Adaptasi Teknologi dalam MBKM ..... <b>Tining Haryanti</b>	15
Eksistensi Pancasila Sebagai Moral Force Dalam Merdeka Belajar ..... Di Perguruan Tinggi <b>Muchamad Taufiq</b>	21
Membangkitkan Mahasiswa Menjadi Pancasila-lis Pada Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ..... <b>Rumsari Hadi Sumartono</b>	29
Membangun Karakter Bangsa Berdasarkan Pancasila Melalui Perpustakaan ..... <b>Endang Fatmawati</b>	34
Peran Keterampilan Manajerial Kepala Sekolah Dalam Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila ..... <b>Karwanto</b>	42

## **BAGIAN II**

Memaknai Merdeka Belajar dan Kemerdekaan Pendidik Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila .....	50
<b>Herman</b>	
Adaptasi Kurikulum Arsitektur Terhadap Kebijakan MBKM .....	55
<b>Andiyan</b>	
Mengaktualisasi Pancasila Dengan Membangun Komunitas Inklusif Di Kalangan Generasi Muda .....	60
<b>Lukas Dwiantara</b>	
Batasan Nilai-nilai Pancasila Dalam Merdeka Belajar Di Kampus merdeka ..	64
<b>Bambang Panji Gunawan</b>	
Pancasila, Kesejahteraan dan Pendidikan Karakter .....	70
<b>Nur Aida</b>	
Nilai Kearifan local Bersesuaian Dengan Landasan Aksiologis Filsafat Pancasila Sebagai Pondasi Pendidikan Karakter Dalam Merdeka Belajar .....	75
<b>Asri Widiatsih</b>	
Bahasa Indonesia Dan Persatuan : Quo Vadis Sumpah Pemuda .....	80
<b>Jamila lestyowati</b>	
Merdeka Belajar Dalam Pengelolaan Plasma Nutfah Sumber Pangan Berkelanjutan .....	86
<b>Wiwik Heny Winarsih</b>	
Power Of Spiritual Pancasila .....	91
<b>Ifdlolul Maghfur</b>	
Kewirausahaan Berlandaskan nilai-nilai Pancasila .....	96
<b>Agung Purnomo</b>	

## **BAGIAN III**

Pancasila Dari Dalam Ruang Ruang Pembelajaran .....	100
<b>Madya Ahdiyati</b>	



Manajemen Instruksional Masyarakat Kelas Pelajar Pancasila .....	106
<b>Supriyono</b>	
Merdeka Belajar program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN KYAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER .....	114
<b>Lailatul Usriyah</b>	
Merdeka Belajar Di Kampus Merdeka Berdasarkan Pancasila .....	119
<b>Endang Muryani</b>	
Merdeka Belajar dan Tantangannya .....	127
<b>Hairuddin K</b>	
Merdeka Belajar Dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan .....	132
<b>Endang Tri Wahyurini</b>	
Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi Di Era Merdeka Belajar Kampus Merdeka .....	137
<b>Diah Puji Nali Brata</b>	
Pancasila Merangkai merdeka Belajar dan Kemerdekaan Pendidik Mewujudkan Keunggulan .....	142
<b>La Selo</b>	
Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Dalam Proses Merdeka Belajar Kampus Merdeka .....	147
<b>Indrati Rini</b>	
Dengan Semangat Pancasila Kita Majukan Pendidikan Profesi Bidan Di Indonesia .....	152
<b>Mustika Dewi</b>	
Pancasila Untuk” Kemerdekaan Edukasi” Berbasis Ketuhanan, Keadilan Dan Kemanusiaan .....	158
<b>Siti Marwiyah</b>	
Relevansi Pancasila dan Kitab Ta’limul Muta’lim Dalam mewujudkan Merdeka Belajar.....	165
<b>Khasanah</b>	

Merdeka Belajar untuk Pendidikan Profesi Kesehatan : Menyongsong Era Kenormalan Baru .....	170
<b>Titi Savitri Prihatiningsih</b>	

#### **BAGIAN IV**

Merdeka Belajar Dalam konteks era Mendikbud Ki Hadjar Dewantara dan Nadiem Makarim .....	176
<b>Abdul Malik Iskandar</b>	

Merdeka Belajar berbasis Pancasila Di Era Society 5.0 .....	181
<b>Nanis Hairunisya</b>	

Pendidikan Merdeka Ki Hadjar Dewantara Sebagai Jalan membumikan Pancasila .....	184
<b>Sita Acetylena</b>	

Pentingnya penanaman Karakter usia Sekolah Dasar Untuk mensukseskan Merdeka Belajar .....	189
<b>Puji Asmaul Chusna</b>	

Digitalisasi pendidikan (tantangan dan peluang mewujudkan pelajar Pancasila) .....	194
<b>Minto Santoso</b>	

Pancasila Sebagai Fundamental Pembangunan Karakter Bangsa .....	199
<b>Harry Yulianto</b>	

Pancasila, Sumber Kekuatan Filosofis Edukatif Yang Mewujudkan Era Pencerahan .....	204
<b>Sulistiyani Eka Lestari</b>	

Penguatan Profil Pelajar Pancasila Melalui Merdeka Belajar .....	211
<b>Mahmud</b>	

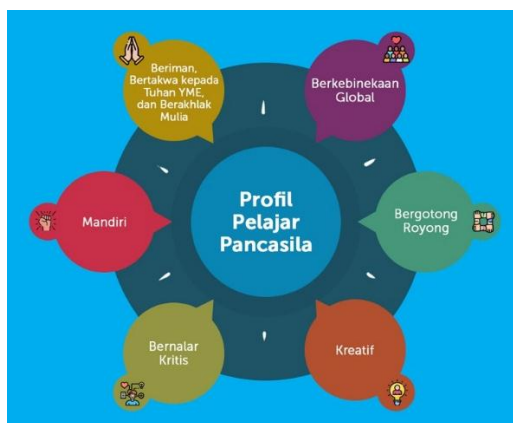
Pancasila, Pesantren dan Nasionalisme: Konsep <i>Mur-Baut</i> Dalam Mencetak Santri-Mahasiswa berkarakter Religius-Nasionalis .....	217
<b>M. Daimul Abror</b>	

## **Bagian I**

# **PERAN PENDIDIK DALAM MEWUJUDKAN MERDEKA BELAJAR PELAJAR PANCASILA**

Oleh Marinda Sari Sofiyana, S.Si., M.Pd.

Pelajar Pancasila merupakan wujud dari pelajar Indonesia yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai Pancasila. Profil Pelajar Pancasila sesuai dengan Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Enam ciri utama Pelajar Pancasila yaitu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif (Gambar 1). Profil pelajar ini sesuai dengan kebutuhan siswa saat ini yang mengedepankan karakter sebagai siswa pembelajar seumur hidup. Pada masa Orde Baru, pelaksanaan nilai-nilai Pancasila tertuang dalam program Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Profil Pelajar Pancasila lebih adaptif dan sesuai dengan kebutuhan Era Revolusi Industri 4.0.



Gambar 1. Profil Pelajar Pancasila yang diambil dari website [cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id](https://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id)



Pengembangan karakter profil Pelajar Pancasila tak lepas dari peran guru sebagai pendidik. Guru diberikan kesempatan dalam kebijakan merdeka belajar untuk mengupayakan pembelajaran kepada siswa. Kemerdekaan guru dalam proses pembelajaran dapat mendorong guru menyelesaikan tantangan pendidikan di masa pandemi. Dengan merdeka belajar, guru mampu menghadirkan inovasi pembelajaran agar siswa dapat memenuhi kompetensi yang menjadi syarat berdasarkan jenjang pendidikan. Standar Kompetensi Minimal (SKM) yang dikeluarkan Kemendikbud telah menyederhanakan kompetensi. Sekolah juga diberikan kemerdekaan dalam memilih kurikulum yang relevan untuk diterapkan sesuai kebutuhan siswa. Dalam hal ini, guru dan lingkungan sekolah juga berperan dalam pembentukan karakter anak. Peran guru dalam mewujudkan Profil Pelajar Pancasila dapat dijabarkan sebagai berikut.

### **Guru sebagai Fasilitator dalam Peningkatan Prestasi Akademik Siswa**

Peran fasilitator dalam mendorong peningkatan prestasi akademik siswa selaras dengan tujuan Merdeka Belajar yaitu menciptakan pembelajar tangguh di masa yang akan datang. Peran ini juga sesuai dengan aspek Profil Pelajar Pancasila yang mengharuskan siswa bernalar kritis dan berakhlak mulia agar prestasi akademik meningkat. Selain itu, guru diharapkan memiliki kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik.

Guru perlu melakukan penelitian, pendekatan, pemilihan strategi dan metode yang cocok dengan karakteristik siswa. Selain itu, penggunaan media pembelajaran juga menjadi poin penting dalam pemahaman siswa terhadap materi. Pemilihan tes dan pemberian motivasi perlu diperhatikan guru agar siswa dapat tetap fokus dalam meningkatkan prestasi akademik.

### **Guru Mengajar dengan Kreatif**

Kreativitas guru dalam mengajar diperlukan dalam Merdeka Belajar. Pengajaran dengan metode yang kreatif secara tidak langsung mencontohkan kepada siswa untuk selalu berinovasi dalam mencari ilmu. Selain memahami materi, siswa diharapkan dapat menerapkan ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh ketika mempelajari pemanasan global, selain memahami, siswa juga dapat berpartisipasi aktif merawat lingkungan dengan kegiatan sederhana sebagai contoh siswa dapat memilah sampah dan mengurangi penggunaan plastik.

Cara untuk melatih kreativitas guru adalah dengan memperluas wawasan dan referensi mengajar. Referensi mengajar dapat diperoleh dari mengikuti webinar dan juga kolaborasi dan refleksi dengan rekan guru.

### **Guru Mengembangkan Diri Secara Aktif**

Selain siswa, guru juga diharuskan mengembangkan diri secara aktif. Guru diharapkan mampu berusaha dalam meningkatkan kemampuan yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan aspek mandiri dalam Profil Pelajar Pancasila. Sebagai contoh, guru meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi secara digital dengan mengikuti pelatihan yang banyak diselenggarakan oleh berbagai institusi pendidikan. Guru juga diharapkan dapat aktif mengikuti berbagai program yang bertujuan meningkatkan kompetensi guru seperti Guru Penggerak, beasiswa pendidikan, dan Diklat peningkatan kompetensi guru.

### **Guru Mendorong Tumbuh Kembang Siswa secara Holistik**

Peran guru dalam mendorong tumbuh kembang siswa secara holistik penting dilakukan, baik di kelasnya, ataupun di kelas lain. Guru tidak terpaku dengan kurikulum yang ditentukan, melainkan juga melihat standar pencapaian Profil Pelajar Pancasila yang disesuaikan dengan metode pengajarannya. Selain di kelas, guru dapat mendorong peningkatan kepemimpinan siswa di sekolah.

Tumbuh kembang secara holistik dapat diterapkan melalui enam aspek, yakni perkembangan fisik, spiritual dan moral, teknologi dan artistik, kognitif dan intelegensi, siswa lebih memahami lingkungan dan komunitas di sekitar, serta siswa dapat mengembangkan kemampuan afektif yang mempengaruhi keadaan perasaan dan emosi. Metode belajar yang cocok dapat membantu siswa memecahkan masalah dengan mengaplikasi pengetahuan yang diterima.

### **Guru sebagai Mentor bagi Guru Lain untuk Pembelajaran yang Berpusat pada Siswa**

Potensi sebagai *mentorship* dan kepemimpinan guru untuk membantu guru lain menjadi salah satu langkah dalam mewujudkan Merdeka Belajar. Guru diharapkan mampu melakukan perubahan di masing-masing institusi pendidikan melalui kolaborasi. Kolaborasi dapat optimal dengan adanya refleksi di setiap akhir pembelajaran. Proses refleksi, berbagi, dan kolaborasi dilakukan secara aktif dan mandiri. Guru dengan inisiatif tinggi dapat menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan wilayah. Guru juga dapat menjadi pengajar praktik bagi rekan guru lain terkait dengan pengembangan pembelajaran di sekolah.

## Guru menjadi Teladan dan Agen Transformasi bagi Ekosistem Pendidikan

Guru diharapkan menjadi teladan dan agen perubahan di ekosistem pendidikan. Guru harus memberikan dampak kepada guru dan lingkungan sekolah, bahkan di luar unit pendidikannya. Kolaborasi penting dilakukan antara guru dengan orang tua dan komunitas untuk mengembangkan sekolah dan menumbuhkan kepemimpinan siswa. Guru juga berperan dalam mengembangkan serta mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada siswa dan relevan dengan kebutuhan komunitas di sekitar sekolah. Hal ini dapat dilakukan dengan rutin membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antar guru dan pemangku kepentingan di dalam maupun di luar sekolah.

### Profil Penulis



Marinda Sari Sofiyana, lahir di Probolinggo, 29 Maret 1990. Magister Pendidikan ini menekuni bidang Pendidikan Biologi yang meliputi botani dan ilmu pendidikan.

Dosen di Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Islam Balitar ini juga aktif dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan aktif menjadi Dosen Pembimbing Lapangan Kampus Merdeka Batch 2 tahun 2021. Ia juga berpartisipasi aktif menyukseskan Program Sekolah Penggerak (PSP) dengan menjadi asesor kepala sekolah dan pelatih ahli PSP. Di Universitas Islam Balitar, Marinda berkontribusi sebagai auditor halal di Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Universitas Islam Balitar. Ia aktif di berbagai asosiasi profesi dosen dan komunitas peneliti di bidang botani dan pendidikan. Ia aktif menulis buku di berupa buku referensi, buku antologi, dan atlas botani. Penelitian dan

pengabdian juga diterbitkan di prosiding dan jurnal nasional.

Marinda dapat dihubungi melalui *e-mail* : [sarisofiyana@gmail.com](mailto:sarisofiyana@gmail.com) | | instagram: @marindasari



# **RUH PANCASILA DALAM ARAH GERAK PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA**

**Betty Ariani**

**Universitas Muhammadiyah Surabaya**

## **Pendahuluan**

Pancasila merupakan nilai luhur budaya bangsa yang telah terangkum sempurna menggambarkan nilai – nilai pedoman hidup mulia yang dijadikan pegangan bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Pancasila lahir dari pemikiran otentik pendiri bangsa yang berlandaskan pada aspek pemenuhan kebutuhan pandangan dalam segala tindakan manusia Indonesia untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Pancasila adalah ruh bangsa yang sudah final dan terbukti mampu berperan secara sempurna menjadi pandangan hidup berbangsa dan bernegara, merangkum segala aspek keberagaman unsur bangsa dalam satu harmoni yang indah dan humanis. Sebagai pedoman dan pandangan hidup bangsa dan negara tentu saja pancasila harus hadir dan mewarnai segala aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Dalam peraturan perundang – undangan tentang sistem pendidikan nasional nomer 20 tahun 2003 jelas dinyatakan bahwa:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai – nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan jaman.

Dari penjabaran pasal dalam undang – undang tersebut telah jelas menegaskan bahwa pendidikan sebagai salah satu sistem pengembangan diri manusia Indonesia terikat secara dasar dengan pancasila dalam landasan pelaksanaannya.

## **Pancasila dalam kurikulum pendidikan tinggi**

Kurikulum yang berlaku pada sistem pendidikan di Indonesia mulai dari tingkat paling dasar hingga pendidikan tinggi secara otomatis mengikuti ideologi pancasila. Tentu saja menjadi sebuah bentuk tindakan pelanggaran besar jikalau ada satuan pendidikan di negara kita ini dalam penyelenggaraan pembelajarannya menggunakan ideologi lain selain pancasila. Pancasila adalah ruh bangsa yang secara spiritual maupun rohaniah menjadi arah gerak pendidikan nasional.

Pendidikan tinggi adalah satuan pendidikan penyelenggara proses pembelajaran setelah pendidikan menengah yang mencakup pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor. Penyelenggara pendidikan tinggi adalah perguruan tinggi sedangkan peserta didiknya mendapat sebutan sebagai mahasiswa. Dalam perguruan tinggi, mahasiswa mendapatkan haknya untuk mengembangkan potensi diri seluas – luasnya termasuk adanya kebebasan mimbar akademik yang menjadi hak istimewa dalam penyelenggaraan proses pembentukan karakter para calon pemimpin bangsa ini. Penanaman pancasila tetap menjadi satu prioritas didalamnya.

Pendidikan pancasila menjadi salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh para mahasiswa di perguruan tinggi sesuai amanat perundang – undangan nomer 12 tahun 2012 pasal 35 ayat 5 tentang kewajiban memasukkan mata kuliah pancasila, agama, kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia dalam kurikulum pendidikan tinggi. Adapun tujuan secara umum dari keempat mata kuliah wajib tersebut adalah selain untuk memperkuat pondasi karakter spiritual mental pada mahasiswa juga agar dapat menumbuhkembangkan rasa kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa Indonesia. Semangat dan jiwa nasionalisme yang perlu terus – menerus dirawat dan digaungkan sebagai bangsa yang besar dan berpengaruh.

Adapun secara spesifik pada kewajiban penyelenggaraan mata kuliah pancasila di perguruan tinggi memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai yaitu :

1. Sebagai pandangan bangsa maka pemahaman terhadap keluhuran nilai pancasila wajib terus dikembangkan, secara historis perumusan pancasila diambil dari nilai – nilai luhur yang menjadi pandangan bangsa kita. Sejarah telah mencatat bagaimana nilai – nilai luhur itu terbentuk sejak jaman dahulu, masa prasejarah, sebelum kemerdekaan maupun era mempertahankan dan mengisi kemerdekaan seperti saat ini.
2. Pancasila merupakan warisan luhur budaya bangsa sehingga wajib diturunkan pada generasi bangsa. Secara kultural bangsa Indonesia terbentuk dari beragam suku, budaya, agama dan lingkungan alam yang

berbeda – beda, tetapi semuanya menjadi suatu harmoni kesatuan dalam rangkuman nilai dalam pancasila.

3. Sebagai bentuk ketaatan terhadap amanat perundang – undangan dimana pendidikan pancasila secara yuridis telah ditetapkan sebagai salah satu unsur yang harus ada dalam pembentukan karakter penerus bangsa yang kuat dan berwawasan kecintaan terhadap bangsa dan negara Indonesia
4. Pembentukan kepribadian pancasila dalam gerak laku yang merupakan penjabaran dan pengejawantahan sila – sila dalam pancasila, generasi muda yang memiliki keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki sikap kemanusiaan dan menghargai kemajemukan, menciptakan persatuan bangsa agar semakin kokoh, kepribadian kerakyatan yang mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi maupun golongan serta selalu menciptakan dukungan terhadap usaha penciptaan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

### **Pentingnya pemahaman Pancasila bagi mahasiswa**

Mahasiswa adalah sebutan bagi seseorang yang secara administrative terdaftar sebagai peserta didik di sebuah perguruan tinggi baik akademi, universitas maupun institute. Mahasiswa yang berasal dari kata maha yang artinya paling dan siswa yang berarti pelajar memiliki pengertian luas sebagai kalangan paling terpelajar yang tidak hanya memiliki kewajiban menuntut ilmu di bangku kuliah tetapi mengemban tugas besar sebagai pelaku perubahan atau *agent of change*. Sebagai seorang agen perubahan maka mahasiswa memiliki tanggung jawab membawa masyarakat menuju kearah yang lebih baik dengan ilmu, pengetahuan maupun wawasannya yang luas. Tentu saja tuntutan memiliki moral yang baik sebagai seorang yang terpelajar menjadi bagian dari proses pembentukannya. Berikut adalah beberapa peran mahasiswa yang menjadi harapan luaran proses pendidikan tinggi:

1. Mahasiswa diharapkan menjadi pembawa pesan moral baik kepada masyarakat, menjaga budaya luhur bangsa seperti kejujuran, keadilan, gotong royong, integritas dan kepedulian yang tinggi
2. Mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat diharapkan memiliki peranan sosial, dimana keberadaannya dapat membawa kebaikan dan bermanfaat bagi sekitarnya.
3. Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat intelektual diharapkan mampu menyadari betul akan peranannya membawa sumbangsih keilmuannya bagi perubahan di masyarakat yang lebih baik.

Dalam menjaga peranannya tersebut mahasiswa perlu memiliki pedoman dan cara pandang yang benar akan diri dan peranannya dalam konteks berbangsa dan bernegara. Bagaimana tidak, derasnya arus informasi dan pengaruh dari

berbagai aspek yang menghantam dari segala arah menjadikan mahasiswa sebagai sasaran paling strategis. Jiwa muda yang butuh tantangan, proses pencarian identitas, dan hasrat pemenuhan eksistensi diri menjadikan mahasiswa terbentuk menjadi jiwa pencari. Apabila tidak diperkuat dengan benteng yang kuat yaitu nilai – nilai Pancasila maka sangat dimungkinkan masa pencarian tersebut melabuhkan mahasiswa pada tempat yang salah. Tidak kurang banyaknya paham liar dan merongrong nilai luhur Pancasila dan budaya bangsa yang berkembang pesat di sekitar kita saat ini. Disadari maupun tidak paham liar tersebut sebagian besar tidak lagi selaras dengan nilai – nilai Pancasila. Semakin lunturnya penghargaan dan toleransi terhadap ajaran agama lain, runtuhnya penghormatan terhadap keanekaragaman suku dan budaya bangsa yang seharusnya memperkaya dan tidak menjadi sumber permasalahan karena perbedaan, termasuk diantaranya semakin lemahnya jiwa gotong royong termasuk banyaknya hasutan tentang rusaknya bangsa kita ini sehingga menurunkan kebanggaan dalam berbangsa.

Mahasiswa secara khusus sangat membutuhkan Pancasila sebagai pandangan, pedoman dan ideologi karena merupakan penerus bangsa. Bangsa ini akan tetap tegak gagah jika para penerus bangsa ini mewarisi dan merawat secara terus menerus nilai – nilai luhur bangsa dalam Pancasila. Memahami dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari – hari dapat menjadikan mereka sebagai pribadi unggul. Generasi penerus dengan keunggulan dan ketinggian budi pekerti akan membawa bangsa ini dalam kegemilangan. Pancasila sebagai arah gerak pendidikan sudah sempurna, tidak perlu lagi mencari – cari ideologi lain yang belum tentu cocok dengan karakteristik bangsa kita yang meskipun berbeda – beda tetapi tetap satu jua.

## **Penutup**

Dengan tetap menghadirkan pendidikan Pancasila dalam pembelajaran di perguruan tinggi menjadi sebuah ikhtiar bersama dalam merawat keunggulan bangsa melalui keluhuran budi dan ketinggian akhlak para penerus bangsa. Perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan kemajuan teknologi dan pemikiran - pemikiran hebat akan tetapi juga karakter penerus bangsa yang kuat dan unggul. Dengan keunggulan tersebut generasi tangguh akan muncul, anti korupsi, mampu menghargai keberagaman dan peduli terhadap nilai luhur bangsa kita.

## Daftar Pustaka

Undang – undang no 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional.  
Yoga Putra Semadi, 2019. Filsafat pancasila dalam pendidikan di Indonesia menuju bangsa berkarakter. Jurnal Filsafat Indonesia, vol 2 no 2.

## Profil Penulis



Menjadi seorang Dosen, Peneliti sekaligus penulis merupakan cita – cita dari perempuan kelahiran Jember 42 tahun silam. Dr. Betty Ariani, S.T, M.T meraih gelar Doktornya pada tahun 2021 setelah menempuh pendidikan S3 Doktoral di Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember – Surabaya. Pendidikan sarjana dan Pasca Sarjana ditempuh pada universitas yang sama yaitu Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. Saat ini beliau merupakan salah satu pengajar di Program Studi Teknik Perkapalan, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Beberapa riset yang dilakukan berdasarkan kepada bidang keahlian

beliau yaitu pada topik terkait Eco Friendly Vessel, Alternatif Fuels for ship, Emission Control Technology Marine Power Plant serta efisiensi energi di kapal.. Saat ini menjadi dosen pengampu mata kuliah korosi, permesinan kapal, teknologi bahan bakar, dan kelistrikan kapal di program studi Teknik Perkapalan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Beliau sangat tertarik dalam dunia tulis menulis dan mulai menekuninya. Untuk korespondensi dapat melalui email [betty.ariani@ft.um-surabaya.ac.id](mailto:betty.ariani@ft.um-surabaya.ac.id)

# RELEVANSI PANCASILA DAN GLOBALISASI BAGI GENERASI MUDA

**Firda Aulia Izzati**

IAIN Pekalongan

## **Pancasila**

Kata Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta, “Panca” yang memiliki arti lima dan “sila” yang berarti dasar. Secara etimologi, Pancasila memiliki arti lima dasar. Dalam hal ini maksudnya adalah lima dasar Negara. Sila-sila Pancasila merupakan kalimat pernyataan. Makna Pancasila memiliki arti penting dan fundamental dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan jatidiri bangsa. Makna Pancasila memiliki arti penting dan fundamental dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan jatidiri bangsa. Pancasila merupakan realitas nilai-nilai yang menjadi dasar fundamental setiap elemen kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai Ideologi, falsafah dan dasar Negara yang diyakini kebenarannya dan diakui keberadaannya oleh seluruh komponen bangsa Indonesia.

Keberadaan Pancasila bukanlah ideologi dari hasil perenungan dalam waktu singkat, melainkan berasal dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religious yang sudah diyakini kebenarannya dalam fungsinya sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia jauh sebelum kemerdekaan. Sebagai suatu ideologi bangsa dan Negara Indonesia maka Pancasila pada hakikatnya merupakan ideologi yang menjadi dasar dalam mencapai tujuan Negara diberbagai bidang pembangunan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan atas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori dan tujuan yang merupakan satu program sosial politi (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, hlm. 517)

Pancasila hakekatnya sebagai ideologi bangsa harus siap dengan segala perubahan dan tantangan yang dihadapi di era serba pesat ini. Pancasila

merupakan pandangan hidup dan falsafah bangsa, nilai-nilai yang ada pada setiap sila diyakini kebenarannya oleh seluruh komponen bangsa. Nilai moral dan norma berkembang dimasyarakat merupakan warisan jatidiri bangsa yang sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya. Dari hal tersebut, Pancasila senantiasa mampu bertahan dan mengimbangi setiap perubahan zaman, membuktikan bahwa Pancasila adalah ideologi yang terbuka dan dinamis. Ideologi terbuka merupakan ideologi yang mampu mengikuti dan menyesuaikan diri terhadap perubahan dan perkembangan zaman, akan tetapi secara utuh dan tetap isi dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya tidak mengalami perubahan.

Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat selaras dengan perkembangan zaman dan tentunya dijadikan sebagai pelindung dan dasar pedoman. Sebagai acuan dan alat pemersatu bangsa yang harus selalu dijaga dan diimplementasikan dalam kehidupan, secara realitas keberadaan Pancasila menghadapi tantangan-tantangan baik dari dalam maupun dari luar. Relevansi Pancasila di era global semakin bergejolak terutama di kalangan generasi muda. Kenyataan yang di hadapi bangsa saat ini antara lain, semakin bias batas-batas dalam berinteraksi baik tingkat local maupun global, mengakibatkan semakin luas pula berbagai pandangan dan informasi yang didapat oleh warga negara. Banyaknya ideologi yang mencuat melalui media informasi yang semakin mudah untuk didapati tanpa perlu membatasi setiap hal yang ingin dicari. Kewaspadaan diperlukan bagi Pancasila sebagai identitas dan ideologi bangsa dari banyaknya ideologi baru yang bermunculan yang mudah dijangkau oleh generasi muda seperti paham radikalisme, konsumtif, hedonism dan lainnya. hal tersebut mengakibatkan masyarakat mengalami degradasi dalam pemahamannya tentang Pancasila, serta kurangnya daya tarik terhadap Pancasila bagi generasi muda.

Keberadaan Pancasila di era global tentunya perlu tetap dijaga dan dipertahankan. Terkait perlunya memaknai dan menjalankan fungsi dan kedudukan Pancasila secara utuh yang harus dipahami secara menyeluruh dari pemahaman sila-sila hingga fungsi dan kedudukannya. Nilai keutuhan dalam Pancasila yang menjadi pedoman sekaligus mengarahkan cara berpikir warga negara untuk mencapai upaya-upaya agar fungsi dan kedudukan Pancasila dapat dilaksanakan.. (Fais & Sri, 2019:131)

Dari berbagai hal yang dihadapi, memunculkan pertanyaan. Bagaimana Relevansi Pancasila di era Global bagi generasi muda. Sikap dan perilaku warga Negara terutama generasi muda dalam mengimplementasi dan merealisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadi ujung tombak dan penggerak, agar ideologi bangsa tetap bertahan dan utuh sesuai dengan fungsi



dan kedudukannya. Selain itu, menjaga Pancasila dari generasi ke generasi merupakan warisan yang menjaga jatidiri bangsa agar tetap kokoh dan tumbuh dalam hati setiap warga Negara yang diyakini sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila harus dihayati dan dipahami sebagai *filter* (penyaring) segala bentuk informasi dan segala perubahan yang dapat mengganggu stabilitas nasional di era global. Sebagai ideologi yang ideal, tentunya di masa sekarang perlu reaktualisasi kembali dalam penghayatan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila bagi segala komponen bangsa Indonesia.

## **Globalisasi**

Kata globalisasi merupakan terjemahan bebas dari kata bahasa Inggris *globalization*. Kata ini berasal dari dua kata yaitu *globe* yang berarti bumi atau dunia dan *ization* yang berarti proses. (Hery dan Foky,2019:313) secara etimologis, globalisasi dapat dipahami sebagai proses mendunia. Globalisasi memunculkan perubahan yang cukup signifikan dari berbagai aspek kehidupan. Perubahan ini semakin bergeser dari lingkup yang kecil atau lingkungan local menjadi lebih luas lagi. Era globalisasi merupakan era dimana semua serba cepat, bias dan bahkan tak terbatas. Individu, kelompok, bahkan Negara tidak bisa lagi menutup diri terhadap perkembangan yang pesat. Hal ini ditandai dengan adanya pergeseran budaya, baik budaya local yang terkait dengan kebudayaan global. Contoh lainnya yaitu kemajuan teknologi, komunikasi, transportasi, dan informasi yang semakin pesat yang membuat setiap kegiatan di berbagai belahan dunia jauh menjadi lebih dekat dan mudah.

Arus globalisasi yang kian pesat harus dibarengi dengan kesiapan oleh warga dunia dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi dalam waktu yang cepat. Proses globalisasi ini merupakan realisasi kemajuan peradaban yang berjalan beriringan dengan kemajuan pembangunan. Melalui berbagai aktifitas, manusia berkembang dan meningkatkan kualitas kehidupannya dengan berbagai interaksi yang dilakukan tidak hanya pada lingkup local atau nasional saja melainkan dengan berbagai manusia di belahan dunia.

Kemajuan teknologi dan komunikasi telah memperlancar arus informasi tanpa adanya batasan oleh masyarakat dunia baik secara ekonomi,geografi, budaya, dan politik termasuk pula Indonesia. Perkembangan yang pesat membuat masyarakat Indonesia menghadapi berbagai dampak baik positif maupun negative. Kekhawatiran nyata dari dampak globalisasi adalah perubahan cepat yang ditimbulkan oleh globalisasi dapat mengganggu kestabilan sosial dan mempengaruhi keadaan sosial budaya di Indonesia. Kurangnya perhatian dan kesiapan dalam menghadapi terjangan arus globalisasi mengakibatkan gempuran perubahan secara signifikan diberbagai bidang kehidupan. Salah satu contohnya di bidang sosial-budaya, adanya degradasi nilai, moral, perilaku pada

masyarakat mengalami pembauran dalam kehidupan antara budaya local dan budaya asing. Lebih lanjut, memudarnya rasa kecintaan terhadap bangsa yang mengakibatkan menurunnya karakter dan budaya bangsa yang diwariskan untuk generasi muda.

Maraknya budaya asing yang masuk dikawatirkan akan membuat generasi muda mengalami dilema dan tidak mengenali identitas bangsa sendiri, dapat dilihat dengan adanya pengikisan penggunaan bahasa nasional. Sebagai bangsa yang berpegang teguh pada Ideologi Pancasila dan menjunjung tinggi nilai-nilai baik yang ada, dampak yang timbul karena globalisasi juga bisa mengancam eksistensi Ideologi karena penyebaran paham-paham atau ideologi baru yang bermunculan. Generasi muda dengan rasa ingin tahu tinggi sangat rawan dalam menerima ideologi ideologi baru, dilihat dari sikap kebebasan yang bisa dikatakan “mbablas”.

Di era globalisasi, segala tantangan dan dampak yang terjadi menuntut masyarakat untuk bersikap bijak dalam menghadapi segala perubahan pesat. Interaksi yang tak lagi memandang jarak, keadaan, dan segala perubahan yang berpengaruh di berbagai lini kehidupan. Upaya nyata dalam menghadapi gempuran globalisasi adalah dengan memegang teguh jatidiri dan kepribadian bangsa. Meskipun perubahan begitu pesat, akan tetapi masyarakat mampu menyikapinya dengan peningkatan kemampuan secara kreatif dan inovatif. Ketika globalisasi diyakini sebagai kesempatan untuk berkembang demi kemajuan, maka segala yang yang menjadi dampak dari globalisasi digunakan sebagai wadah dalam meningkatkan kompetensi pada lingkup global dibarengi dengan tetap menjaga marwah dari idenntitas bangsa dan menjunjung tinggi falsafah bangsa yaitu Pancasila.

## DAFTAR PUSTAKA

- Yonas F. dan Handayani S. 2019. *Memahami Pancasila*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Herdianto , Fokky dan Hamdayama. 2019. *Kewarganegaraan dan Masyarakat Madani*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Saidurrahman dan Arifinsyah. 2020. *Pancasila : Moderasi Negara dan Agama sebagai Landasan Moral Bangsa*. Jakarta : Kencana Press.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. Jakartas

## PROFIL PENULIS



Firda Aulia Izzati, lahir di Pekalongan 29 tahun yang lalu. Magister Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, lulus pada tahun 2017 ini memiliki hobi *travelling*, memasak, berwirausaha. Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan IAIN Pekalongan, Jawa Tengah, Ia juga berkiprah sebagai wirausaha di bidang kuliner. Moto hidupnya adalah “Peluang adalah Kesempatan, Ambil dan nyatakan”. Cita-citanya mampu tumbuh dan belajar tanpa mengenal waktu, menjadikan generasi muda mencintai Pancasila sesuai dengan tuntutan zaman. Bukan tidak mungkin kesuksesan sudah menunggumu didepan, maju, yakin dan terus kejar mimpi, buatlah mimpi itu nyata adanya. Firda dapat dihubungi melalui *e-mail* : [bufirppkn92@gmail.com](mailto:bufirppkn92@gmail.com) || Instagram : [@firda\\_faida](https://www.instagram.com/@firda_faida). Semoga tulisan ini bermanfaat bagi sesama.

# Pancasila spirit Kesuksesan adaptasi Teknologi dalam MBKM

Tining Haryanti  
Universitas Muhammadiyah Surabaya

## MBKM dalam Pembelajaran Jarak Jauh

Untuk meningkatkan daya saing lulusan, inovasi program pembelajaran yang *adaptive* dalam menghadapi perubahan perlu dilakukan. Program Merdeka Belajar atau Kampus merdeka yang diluncurkan tahun 2020 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengusung spirit dalam menyiapkan lulusan tangguh tersebut. Perubahan yang dimaksud berkenaan dengan revolusi Industri 4.0 sebagaimana yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 18. Melalui program Merdeka Belajar mahasiswa dimungkinkan untuk mengikuti pembelajaran dari kampus yang berbeda atau bahkan dari industri. Secara langsung maupun tidak, pembauran kebudayaan terjadi manakala proses pembelajaran yang diselenggarakan pada lokasi tertentu diikuti oleh mahasiswa dari lokasi lain yang mungkin berbeda adat istiadat dan kebudayaan. Demikian halnya pada model MBKM dengan industri. Industri dengan keterlibatan pekerja yang majemuk dari berbagai latar belakang, memberikan pengalaman tersendiri bagi mahasiswa yang magang di Industri.

Program MBKM membawa konsep baru yang relatif berbeda dengan pembelajaran regular sebelumnya. Pelibatan teknologi mutlak dilakukan dalam penyelenggaraan program tersebut. Pemerintahpun telah menyiapkan platform pembelajaran terpusat melalui *Learning Management System* (LMS) yang dikenal dengan nama SPADA. Pada dasarnya istilah LMS telah ada jauh-jauh hari sebelum program MBKM itu lahir. Secara umum e-learning yang lebih dikenal para pendidik dan siswa dalam penyelenggaraan pembelajaran yang dilakukan secara online dan jarak jauh. LMS itu sendiri merupakan aplikasi yang membantu pengorganisasian proses pembelajaran, baik penyampaian materi, penugasan maupun penilaian. Jika sebelumnya proses pembelajaran tersebut dilakukan secara langsung, dengan LMS proses pembelajaran dapat diselenggarakan secara *synchronous* dan *asynchronous*. Meskipun kehadiran

pandemic tidak direncanakan, namun agaknya pandemik memberikan dorongan penggunaan teknologi semakin kuat untuk diimplementasikan dalam pembelajaran.

Penggunaan sistem LMS memberikan banyak kemudahan bagi pendidik dalam pembelajaran. Misalnya pengelolaan nilai, absensi ataupun pengolahan transkrip nilai tidak perlu lagi dilakukan secara manual. Karena LMS secara umum berbasis website, hal ini memungkinkan pembelajaran dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Oleh karenanya waktu yang diperlukan untuk proses pembelajaran lebih efisien. Selain proses pembelajaran yang efisien, penggunaan LMS juga cenderung lebih murah daripada pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka. Perlunya akses ruang pembelajaran, sarana prasarana, kebutuhan elektrik, pengeluaran transportasi dapat ditekan dengan pola pembelajaran berbasis teknologi. LMS sekaligus sebagai alternatif pembelajaran disaat tatap muka belum memungkinkan dilakukan. Pendidikan merupakan salah satu bidang yang sangat terkena dampak pandemi (Ramzan, 2021). Setidaknya 188 negara menutup sekolah untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19 (Edit Inotai, 2021; UNESCO, 2020). Penyebaran Covid-19 yang cepat telah memaksa Pemerintah Indonesia untuk menutup seluruh aktivitas sekolah dan memberlakukan pembelajaran jarak jauh (Nadia Fairuza Azzahra, 2020; Simamora, 2020). LMS hadir menjawab kebutuhan pembelajaran jarak jauh tersebut. Dalam hal analisa pembelajaran, penggunaan teknologi memberi kemudahan dalam mengumpulkan atau mengolah hasil pembelajaran dengan cepat dan akurat. Materi pembelajaranpun lebih mudah dicari, diatur, didokumentasikan dan dapat menghasilkan visualisasi tampilan yang menarik misalnya dengan penambahan animasi, video, suara, gambar dan lain-lain.

Berbagai fitur unggulan dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran telah disajikan secara apik melalui LMS. Fitur tersebut anatar lain kemudahan tampilan (UI) untuk digunakan, sehingga pengguna tidak akan kebingungan. Banyak platform LMS yang telah ada dan untuk mendapatkannya bisa dengan mendaftar online. Kelas daring menjadi inti dari fitur LMS, kelas ini dapat menyajikan pembelajaran digital berupa rekaman dosen dalam pemberian materi, video, animasi, dan dokumen tersebut dapat diunduh secara mandiri. Fitur Forum Diskusi dan Kelas memungkinkan pengajar dan siswa untuk berdiskusi secara interaktif hingga fitur laporan yang *ter-generate* secara otomatis untuk memudahkan pelacakan perkembangan proses pembelajaran dan memonitoring tahapan-tahapannya.

Secara prinsip pendidikan jarak jauh merupakan pendidikan formal kelembagaan yang penyelenggaraannya berada pada lokasi terpisah antara peserta didik dan pengajar sehingga memerlukan teknologi interaktif dalam

pelaksanaanya. secara khusus model pembelajaran ini menerapkan penggabungan teknologi elektronika dan teknologi *cloud* atau internet. Kehadiran teknologi yang semakin maju menciptakan peluang dan juga tantangan baru dalam pendidikan. Akses pembelajaran tanpa batasan ruang dan waktu, luasnya jangkauan, konten bahan ajar yang lebih menarik merupakan peluang baru. Namun berbagai inovasi digital tersebut memunculkan masalah baru seperti perlunya penyesuaian lembaga pendidikan untuk terus menerus beradaptasi terhadap infrastruktur yang ada.

Meskipun banyak kemudahan yang ditawarkan teknologi dalam membantu pekerjaan, namun kenyataannya tidak mudah beradaptasi dengan teknologi. “Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang paling banyak berbicara tentang transformasi digital, tetapi termasuk sektor dengan digitalisasi yang rendah,” kata Pakar Pengembangan Teknologi Data dan Pendidikan Kemendikbud, Gogot Suharwoto, dalam webinar Pintek EduTalk. Perubahan metode pembelajaran dari *offline* menjadi pembelajaran *online* menunjukkan kebutuhan peningkatan kapasitas pengajar (Nadia Fairuza Azzahra, 2020). Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kompetensi informasi, komunikasi, dan teknologi (ICT) guru-guru Indonesia tidak tersebar merata di seluruh wilayah (Hwee et al., 2018; Widodo & Riandi, 2013).

Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 51 persen pendidikan usia dini hingga siswa sekolah menengah yang tinggal di daerah terluar, tidak memiliki kecukupan sistem dan infrastruktur yang dapat diandalkan dalam pembelajaran *online* (Eisya A. Eloksari, 2020) (Fauziah Mursid & Esthi Maharani, 2021; indonesia.go.id, 2021).

Adaptasi pengajar dengan cara pembelajaran yang jauh berbeda dari sebelumnya, seperti mengajar didepan kamera, kemampuan dasar menggunakan laptop/ komputer, video, Whatsapp dan segala teknologi yang memungkinkan untuk digunakan sebagai media daring menjadi penting untuk dikenali dan dipahami. Sedangkan disisi lain hambatanpun terjadi mungkin pada sisi orang tua, yang harus menggantikan guru dan menjelaskan materi pembelajaran, mendampingi anak sekolah, yang mungkin orang tua juga bekerja atau bahkan tidak memiliki *smartphone* untuk mengakses materinya. Banyak riset yang menunjukkan dampak negatif bagi anak didik dengan pola pembelajaran online yang jika tidak segera diatasi akan menjadi semakin buruk. Dampak tersebut misalnya putus sekolah karena harus bekerja, persepsi masyarakat yang berubah terhadap tidak optimalnya lembaga pendidikan dan mungkin terjadinya penurunan capaian pembelajaran karena kesenjangan akses terhadap teknologi.

Beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan untuk penyelesaian masalah tersebut misalnya memperbaiki cara pembelajaran online dengan tidak hanya memberikan tugas pada siswa. Berikutnya adalah belajar untuk mampu menggunakan teknologi dasar. Level tenaga pengajar dalam bidang teknologi menurut Unesco minimal berada pada level 2 sehingga mampu menyiapkan materi bahan ajar dengan metode online.

## **Merdeka**

Kemerdekaan menjadi titik balik Bangsa dalam pengakuan dunia. Namun demikian kemerdekaan haruslah *dimaintenance*, melalui berbagai upaya untuk tetap mempertahankan existensi bangsa di dunia. Salah satunya adalah dengan adaptasi dan fleksibilitasi dalam menghadapi perubahan dan tuntutan zaman. Agar tidak tertinggal dan tergerus zaman digital yang terus berkembang secara eksponensial, adaptasi terhadap teknologi tentu mutlak untuk dilakukan. Semangat kebersamaan dan patriotisme bangsa sebagai pengejawantahan Pancasila membawa andil besar dalam memompa spirit pendidik, siswa dan seluruh elemen masyarakat untuk tangguh dalam menghadapi perubahan. Dalam konteks pendidikan misalnya, memang tidak mudah dan berproses untuk bisa beradaptasi dengan baik terhadap perubahan pola pembelajaran konvensional secara tatak muka langsung yang telah bertahun-tahun mengakar, kemudian berubah menjadi *online*.

Tidak dapat dipungkiri kondisi saat ini menuntut kerja keras lembaga pendidikan berperan lebih lagi dibidang teknologi. Adanya kebijakan kerja dari rumah, penghapusan Ujian Nasional, sekolah online merupakan bagian dari layanan pendidikan yang tidak terlepas dari peranan teknologi. Implikasinya, para pendidik dan peserta didik harus bisa beradaptasi dengan teknologi. Meskipun kenyataannya lebih dari 60% pengajar memiliki gagap dalam menggunakan teknologi, dikutip dari Ikatan Guru Indonesia (IGI) melalui pernyataan Lestari Moerdijat, wakil ketua MPR. Tentunya fakta tersebut tidak bisa tidak diindahkan, permasalahan harus teratasi. Disinilah peranan seluruh elemen masyarakat akan membantu mengatasi masalah tersebut.

Namun, dengan karakter kebersamaan, *tepo seliro*, saling membantu yang merupakan bagian kecil dari keluasan ideologi Pancasila, mampu menyingkirkan hambatan dalam penggunaan teknologi. *Sharing-session* sebagai salah satu *tools* berbagi pemahaman dalam menggunakan teknologi, seperti cara mengoperasikan LMS misalnya. Model-model peningkatan pengetahuan melalui langkah informal yang sejatinya membawa dampak besar keberhasilan adaptasi. Peran dan tanggung jawab melekat pada masing-masing individu untuk saling peduli, saling membantu manakala ada sebagian yang belum



mampu menerapkan teknologi karena mungkin kurangnya *skill* dan pengetahuan. Maka pelatihan dalam kebersamaan diluar *formal training* justru menciptakan peluang untuk menunjang keberhasilan adaptasi yang lebih. Oleh karenanya diperlukan kehadiran kebersamaan sebagai bentuk strategi kebangsaan berlandaskan Pancasila untuk bersama sama keluar dari ketertinggalan akibat lambatnya adaptasi teknologi. Pada akhirnya, Indonesiapun mampu melewati berbagai tantangan yang ada.

## Referensi

- Edit Inotai. (2021). *Learning Losses May Lead to Earning Losses Governments around the world are tackling the COVID-19 pandemic imposing partial or full lockdown measures , often including school closures . However , researchers warn about the long-term negative effects of th.* Visegradinsight.Eu. <https://visegradinsight.eu/learning-losses-may-lead-to-earning-losses/>
- Eisya A. Eloksari. (2020, December 1). Poor internet connection, lack of devices hinder online learning: Ministry. *Jakarta Post*. <https://www.thejakartapost.com/news/2020/12/01/poor-internet-connection-lack-of-devices-hinder-online-learning-ministry.html>
- Fauziah Mursid, & Esthi Maharani. (2021, June 23). Kominfo: Pengguna Internet Indonesia Terbesar Ke-4 di Dunia. *Republika.Co.Id*. <https://www.republika.co.id/jadwal-s>
- Hwee, J., Koh, L., Chai, C. S., & Natarajan, U. (2018). Developing Indonesia teachers' technological pedagogical content knowledge for 21 st century learning (TPACK-21CL) through a multi-prong approach. In *Journal of International Education and Business* (Vol. 3, Issue 1).
- indonesia.go.id. (2021). Internet, Primadona Kala Pandemi. *Kominfo*. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/36448/internet-primadona-kala-pandemi/0/artikel>
- Kemendikbud. (2021). JUMLAH DATA SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) PER PROVINSI. In *Kemendikbud dan Kebudayaan*. <https://referensi.data.kemendikbud.go.id/index11.php>
- Nadia Fairuza Azzahra. (2020). Ringkasan Kebijakan | Mengkaji Hambatan Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia di Masa Covid-19. In *CIPS Indonesia*. <https://id.cips-indonesia.org/post/ringkasan-kebijakan-mengkaji-hambatan-pembelajaran-jarak-jauh-di-indonesia-di-masa-covid-19-3>
- Ramzan, M. (2021). Evolution of situational factors in blended learning systems

interfaces during COVID-19: An analytical study. *International Journal of Advanced and Applied Sciences*, 8(9).  
<https://doi.org/10.21833/ijaas.2021.09.002>

Sensus Penduduk. (2021). BERITA RESMI STATISTIK Hasil Sensus Penduduk 2020. In *Badan Pusat Statistik*.  
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>

Simamora, R. M. (2020). The Challenges of Online Learning during the COVID-19 Pandemic: An Essay Analysis of Performing Arts Education Students. *Studies in Learning and Teaching*, 1(2).  
<https://doi.org/10.46627/silet.v1i2.38>

UNESCO. (2020). *COVID-19 Impact on Education*. UNESCO Institute for Statistics Data. <https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/>

Widodo, A., & Riandi. (2013). Dual-mode teacher professional development: challenges and re-visioning future TPD in Indonesia. *Teacher Development*, 17(3). <https://doi.org/10.1080/13664530.2013.813757>

## RIWAYAT HIDUP



Tining Haryanti, S.Kom, M.M, M.Kom. Lulus S1 di Program Studi Sistem Informasi STIKOM Surabaya tahun 2008, lulus S2 di Program Magister Management Universitas Terbuka tahun 2015, lulus S2 di Program Magister Sistem Informasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya tahun 2018, dan sedang studi lanjut S3 Program Studi Sistem Informasi ITS. Saat ini adalah dosen tetap Program Studi Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surabaya. Sebagai Chief Editor Jurnal *Computing Insight: Journal of Computer Science Universitas Muhammadiyah Surabaya*. Pernah berkontribusi sebagai Mitra Bestari pada *Journal KERNEL: Jurnal Riset Inovasi Bidang Informatika dan Pendidikan Informatika* pada tahun 2019-sekarang, mitra Bestari pada *Journal Sistem Informasi Teknokrat* pada tahun 2020-sekarang dan sebagai temporary reviewer pada *International Journal of Electronic Commerce Studies*, Q3 Scopus Index, pada tahun 2020. Dapat dihubungi melalui email: [tinging.haryanti@gmail.com](mailto:tinging.haryanti@gmail.com), nomor Hp. 08155104644 dan bertempat tinggal di Surabaya

# **EKSISTENSI PANCASILA SEBAGAI *MORAL FORCE* DALAM MERDEKA BELAJAR DI PERGURUAN TINGGI**

Oleh Muchamad Taufiq, S.H.,M.H.,CLMA\*

Perjalanan Mata Kuliah Pancasila di perguruan tinggi mengalami dinamika yang luar biasa. Mata Kuliah Pancasila sangat mendapat tempat di Era Orde Baru. Waktu bergulir sedemikian rupa memposisikan Mata Kuliah Pancasila mengalami berbagai perubahan baik substansi maupun eksistensinya di perguruan tinggi. Puncaknya bahwa Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang SISDIKNAS No. 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat Sekolah Dasar sampai perguruan tinggi. Satu hal yang pasti bahwa Pancasila di perguruan tinggi harus mampu menjadi *moral force* bagi mahasiswa yang dianggap *agen of change*.

Kedudukan Mata Kuliah Pancasila menjadi perbincangan hangat kembali ketika pemerintah meluncurkan program 4 Pilar Kebangsaan. Program yang dilahirkan dari ide-ide di Senayan itu mampu membangkitkan gairah kembali untuk memposisikan Pancasila menjadi diskusi-diskusi yang menarik. Berbagai seminar digelar dengan sertifikat yang ditandatangani oleh pimpinan DPR RI. Salah satu hal menarik bagi dunia pendidikan tinggi adalah ketika Pancasila menjadi salah satu Pilar bersama Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Satu hal yang pasti adalah membicarakan Pancasila sebagai Dasar Negara harus memahami sejarah. Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia harus tetap menjadi pedoman dalam memahami Pancasila sebagai Dasar Negara. Memahami dengan baik sejarah perjuangan termasuk didalamnya eksistensi Pancasila dalam perjalanan berbangsa dan bernegara.

Salah satu sejarah penting berkaitan dengan eksistensi Pancasila adalah Gerakan 30 September 1965. Fakta sejarah menunjukkan adanya upaya-upaya yang terstruktur untuk mengganti Pancasila sebagai Dasar Negara dengan Ideologi Komunis. Polarisasi substansi mungkin masih terus diperdebatkan hingga

sekarang. Namun sejarah juga mencatat terjadinya sebuah usaha *coup de'tat* terhadap pemerintahan yang sah, yang tentunya itu tidak akan terjadi hanya dengan satu malam saja.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila setiap satu Oktober tidak dapat dipisahkan dengan peringatan setiap tanggal 30 September, satu hari sebelumnya. Adanya satu Oktober adalah bentuk kemenangan atas tragedi 30 September. Dua hal ini tidak dapat dipisahkan.

Menteri Nadiem Makarim mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 64262/MK.F/TU.02.03/2021 tertanggal 22 September 2021 perihal Penyelenggaraan Upacara Bendera Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2021. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang setiap tanggal 1 Oktober selalu didahului dengan pengibaran bendera setengah tiang pada tanggal 30 September.

Kita biasanya melakukan pengibaran bendera setengah tiang pada tanggal 30 September dan satu tiang penuh pada 1 Oktober 2021 dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Bendera setengah tiang menandai bangsa ini sedang berkabung memperingati atas meninggalnya putra-putra terbaik bangsa sebagai Pahlawan Revolusi. Memang tidak serentak gerakan pengibaran bendera setengah tiang tahun ini, namun masih banyak daerah yang pemerintah daerahnya justru menginstruksikan pengibaran bendera setengah tiang pada tanggal 30 September.

Jasmerah istilah akronim dari "jangan sekali-kali melupakan sejarah" adalah kalimat sakti yang pernah disampaikan oleh *founding fathers* kita Ir. Soekarno sang Proklamator. Kalimat itu maknanya sangat dalam. Bahwa sejarah bangsa tidak boleh dilupakan dan sejarah bangsa harus selalu tertulis dengan tinta emas dilubuk hati rakyat Indonesia.

Benar kata Bung Karno "Jasmerah" tersebut perlu kita pedomani sebagai anak bangsa. Karena bangsa akan dapat kehilangan jatidiriya jika melupakan sejarah, apapun bentuk sejarah itu. Bahwa hanya bangsa yang besar yang mampu menghargai jasa para pahlawannya. Meminjam istilah Kerajaan Majapahit, pernah "*kencana rusmini*" yaitu zaman keemasan dan "*sirna ilang kertaning bumi*" masa suram sekitar tahun 1400. Artinya sejarah gemilang dan kelim haruslah mendapat ruang yang sama guna diambil hikmahnya dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.

Romantika perjuangan bangsa Indonesia adalah tahapan sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Era ini dimulai sejak 20 Mei 1908 ditandai dengan berdirinya

Boedi Utomo yang kita kenal sampai saat ini sebagai Hari kebangkitan Nasional. Selanjutnya Kongres Pemuda Indonesia II pada 28 Oktober 1928 melahirkan Sumpah Pemuda yang kita peringati setiap tanggal 28 Oktober. Puncak kulminasi kemerdekaan Indonesia pada Tanggal 17 Agustus 1945 saat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan adalah jembatan emas bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bangsanya.

Demikian pula sejarah telah mencatat beberapa masa pemerintahan di Indonesia. Pemerintahan era Orde Lama sejak Tahun 1945 telah dipandegani oleh Ir. Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Selanjutnya lahir Orde Baru sejak Tahun 1966 yang berkuasa selama tiga puluh dua tahun. Akhirnya 1998 terjadi reformasi yang melahirkan beberapa periode pemerintahan hingga saat ini. Itu adalah sejarah yang tidak dapat kita simpangi. Tidak akan pernah ada Orde Baru jika tidak didahului oleh Orde Lama. Demikian pula tidak akan pernah ada Reformasi tanpa melalui Orde Baru. Itulah fakta sejarah yang wajib diketahui khususnya oleh generasi muda saat ini agar mengetahui sejarah bangsa Indonesia. Karena rangkaian sejarah itu pula yang telah berhasil mengantarkan rakyat Indonesia sampai ke Kabinet Gotong Royong Jilid II ini.

Membicarakan Partai Komunis Indonesia (PKI) tentunya tidak boleh lepas dari rangkaian sejarah tahun 1948 ketika Muso mencoba memberontak tepatnya tiga tahun setelah Indonesia merdeka. Bisa dibayangkan pada masa-masa sulit awal kemerdekaan justru PKI menusuk dari belakang namun bangsa Indonesia saat itu mampu mematahkannya. Tentunya ini pukulan keras bagi bangsa Indonesia yang baru merangkak tertatih-tatih menata sebuah kemerdekaan.

Tepatnya tujuh belas tahun kemudian PKI mampu bangkit dengan memiliki kekuatan yang lebih dahsyat di era Orde Lama. Terjadilah Gerakan 30 September yang sangat mengguncang sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara kala itu di tahun 1965. Insiden seputar 1965 yang melahirkan banyak kontroversi telah nyata menelan korban. Makna berkabung itulah yang harus dimiliki semangatnya oleh generasi sekarang agar mereka memahami secara utuh atas sebuah pengorbanan dalam menjaga keutuhan NKRI. Namun bagaimana jika fenomena pengibaran bendera setengah tiang sudah tidak menjadi hal yang penting bagi masyarakat ? masih adakah kesadaran mencintai dan memaknai sebuah sejarah perjuangan?

Bersyukur tahun ini masih ada tayangnya film “Pengkhianatan Gerakan 30 September” di beberapa televisi nasional. Memang media televisi juga memiliki fungsi pendidikan. Pembuatan film ini bertujuan untuk mengenang peristiwa kelam itu. Meskipun saat ini masih *debatable* atas kebenaran isi cerita dalam

film tersebut namun substansi sejarahnya telah membuktikan adanya suatu gerakan yang dinamakan 30 September. Referensi media sejarah di sekolah utamanya sangat minim. Sementara cara melihat sejarah haruslah komprehensif dari berbagai aspek.

Apalagi saat ini sejarah bangsa tidak lagi memiliki ruang khusus seperti dulu dalam bentuk Mata Pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Siswa-siswa di sekolah hingga perguruan tinggi saat ini menjadi kering dan tidak menguasai dengan baik terhadap sejarah bangsanya. Entah seperti apa dimasa mendatang pemahaman generasi muda kita terhadap sejarah bangsanya. Pada hal Sejarah bukanlah beban ingatan melainkan penerangan jiwa (John Dalberg-Acton).

Ada yang mengatakan bahwa “Sejarah ditulis oleh para pemenang” demikian banyak disebut oleh orang. Biarkan setiap generasi akan mengambil hikmah dari tulisan sejarah. Yang terpenting bahwa sejarah itu terjadi sebagai fenomena bangsa yang nyata. Bukankah sampai saat ini masih ada pendapat bahwa cikal bakal kerajaan Majapahit bukanlah Singhasari tapi Tumapel. Bahkan ada pendapat yang menolak Ken Arok sebagai peletak dasar Kerajaan Singhasari. Namun kenyataannya dalam berbagai buku diantaranya Kitab *Pararaton* dan *Negarakertagama* jelas mengaitkan nama Ken Arok sebagai pendiri kerajaan Singhasari. Kerajaan Singhasari merupakan cikal bakal berdirinya Majapahit oleh Raden Wijaya yang masih keturunan dari Ken Arok.

Demikian pula sejarah mencatat bahwa pernah berkembang paham komunis di Indonesia. Dr. Mumuh (Univ. Padjajaran) menekankan bahwa komunisme merupakan ideologi yang bersifat utopis, tidak bisa dibumikan. Definisi kesejahteraan dalam komunisme sulit untuk dipraktikkan dan hanya akan melahirkan sebuah ketertinggalan. Salah satu problem meluasnya paham komunis adalah faktor kesejahteraan. Kemiskinan merupakan ladang sukses lahirnya komunisme.

“Ideology tidak pernah mati” demikian dikatakan Mustafa Rejai dalam buku *Political Ideologies*, Siklus ideology berada pada 3 segmen yaitu : 1) kemunculan (*emergence*), 2) Kemunduran (*decline*), dan 3) Kebangkitan kembali suatu ideologi (*resurgence of ideologies*).

Bersyukur bahwa bangsa Indonesia telah memiliki Pancasila sebagai Dasar Negara yang telah mengakar dan relevan untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bung Karno dalam Pidatonya di HUT Proklamasi Tahun 1963 mengatakan, “Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka”.

Ketetapan (Tap) MPRS No.XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia sebagai Organisasi Terlarang dan Larangan Setiap Kegiatan yang Menyebarkan Paham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme sudah final. Pasal 2 Tap MPR No. I/MPR/2003 menegaskan bahwa Tap MPRS No. XXV/1966 masih tetap berlaku. tidak ada ruang hukum untuk mengubah atau mencabut TAP MPRS XXV Tahun 1966 yang melarang paham ajaran komunisme/marxisme-leninisme. Hal ini pernah disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD ketika polemik Draft RUU HIP mengemuka (2020).

Bahwa Pancasila sebagai Dasar Negara yang kita anut adalah Pancasila yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945 sebagaimana nilai-nilai Pancasila itu terdapat dalam Pembukaan UUD Negara RI 1945. Pancasila sebagai landasan filosofi bangsa artinya Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia, merupakan suatu keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikannya dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal mana akan sangat berguna dalam mewujudkan tujuan nasional Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia (Alinea Keempat UUD Negara RI 1945).

Memaknai Kesaktian Pancasila saat ini bukanlah pada konteks heroik dalam penumpasan setiap gerakan makar dan ingin mengubah Pancasila sebagai Dasar Negara. Konteks pemaknaan Kesaktian Pancasila era sekarang adalah bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam setiap kehidupan dan aktifitas kita sehari-hari. Masing-masing kita haruslah mampu menjadi subyek model manusia yang Pancasilais sehingga tercipta harmoni kehidupan.

Penting untuk dilakukan adalah penguatan nilai-nilai Pancasila melalui jalur pendidikan sehingga mampu memberi bekal yang kuat kepada anak dan generasi muda saat ini. Sehingga suatu saat nanti ketika mereka menjadi pemimpin, nilai-nilai Pancasila itu telah terintegrasi dalam pola berpikir, sikap dan perilakunya. Hal ini akan selaras dengan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Tujuan Pendidikan Pancasila adalah mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan terwujud dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan taqwa terhadap Tuhan YME dalam masyarakat yang



terdiri atas berbagai golongan agama kebudayaan dan beraneka ragam kepentingan , perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran, diarahkan pada perilaku yang mendukung upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka diperlukan format pembelajaran yang tepat disetiap jenjang pendidikan sehingga Pendidikan Pancasila memiliki efek kuat pada perubahan sikap dan perilaku generasi saat ini dan berikutnya.

Bahan kajian Mata Kuliah Pancasila saat ini meliputi : Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia, Pancasila sebagai Dasar Negara, Pancasila sebagai Ideologi Negara, Pancasila sebagai Sisten Filsafat, Pancasila sebagai Sistem Etika, dan Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu. Sebagaimana Bahan Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila yang diterbitkan oleh Direktorat Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Depdiknas Kemendikbud RI Tahun 2013, pembahasan seputar 1965 sudah tidak muncul lagi. Pada halaman 11 hanya membahas demikian : Manipol/USDEK". Manifesto politik (manipol) adalah materi pokok dari pidato Soekarno tanggal 17 Agustus 1959 berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita" yang kemudian ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Agung (DPA) menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Belakangan, materi pidato tersebut dikukuhkan dalam Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 1 tahun 1960 dan Ketetapan MPRS No. 1/MPRS1960 tentang GBHN (Ali,2009: 30). Manifesto politik Republik Indonesia tersebut merupakan hasil perumusan suatu panitia yang dipimpin oleh D.N. Aidit yang disetujui oleh DPA pada tanggal 30 September 1959 sebagai haluan negara (Ismaun, 1978:105).

Sementara didalam Buku Ajar Mata Kuliah Umum Pendidikan Pancasila yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia cetakan I Tahun 2016, pembahasan tragedi 1965 hanya implisit di halaman 130 yaitu : Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu 1945--1960. Namun seiring dengan perjalanan waktu, pada kurun waktu 1960--1965, Soekarno lebih mementingkan konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia.

Sebagai anak bangsa hendaknya bijaksana dalam melihat dan memaknai sejarah. Setiap sejarah yang terjadi dalam romantikan perjuangan bangsa Indonesia pasti terdapat hikmah luhur yang bisa dipetik. Bagi masyarakat Indonesia saat ini adalah senantiasa belajar dari sejarah. Sejarah mengajarkan

jika kita terpecah belah maka akan mudah diadu domba sehingga tidak akan dapat mewujudkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika masyarakat centang perenang saling gasak, gesek dan gosok tidak akan dapat berbuat banyak untuk membangun.

Pancasila merupakan sebuah kesepakatan dan konsensus untuk membangun Bangsa Indonesia, membangun Negara Indonesia dengan tanpa mempersoalkan perbedaan latar belakang yang ada, baik agama, ras, suku, budaya, bahasa dan lain-lain. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah modal dasar terkuat untuk mengisi kemerdekaan dan menjaga keutuhan NKRI.

Sebagai pendidik yang mengajarkan Pancasila agar menjadi *moral force* bagi mahasiswa dan masyarakat ilmiah khususnya, berkewajiban untuk menyampaikan sejarah seputar 1965 ini dengan tegas dan utuh. Karena sampai saat ini pemerintah masih belum menerbitkan referensi baru terkait seputar 1965 seperti Buku 30 tahun Indonesi Merdeka yang telah terbit di era Orde Baru. Sementara didalam hukum terdapat konsep *lex posteriori derogate legi priory*. Pengajar di era disruptif ini perlu memperhatikan teknis penyampaian yang harus berorientasi kekinian namun tidak menghilangkan sejarahnya sebagai substansi.

Pengajar Pancasila saat ini dituntut memiliki pemahaman yang komprehensif dalam menyampaikan materi Mata Kuliah Pancasila kepada mahasiswa. Komitmen keilmuan, idealisme keilmuan perlu dipegang dengan setia. Sehingga mahasiswa menerima kebenaran akademik sebagai bekal kehidupannya kelak dimasyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

Pada akhirnya biarkan sejarah menemukan jalannya. Kita menjadi ingat kata Eduardo Galeano, "Sejarah tidak pernah benar-benar mengucapkan selamat tinggal. Sejarah mengatakan, 'Sampai jumpa'."

#### **REFERENSI :**

*Bahan Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila* yang diterbitkan oleh Direktorat Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Depdiknas Kemendikbud RI Tahun 2013.

*Buku Ajar Mata Kuliah Umum Pendidikan Pancasila* yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia cetakan I pta.Tahun 2016.

*Kansil, C.S.T. dan Christine. 4 Pilar Berbangsa dan Bernegara*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015

Tzu, Sun dkk. *Perang dan Manajemen*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 1992.  
Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945  
Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003  
<https://nasional.kontan.co.id/news/menkopolhukam-mahfud-md-tegaskan-pemerintah-minta-dpr-menunda-penbahasan-ruu-hip>  
<https://www.facebook.com/unpad/posts/sejarawan-fakultas-ilmu-budaya-fib-unpad-dr-mumuh-muhsin-z-mhum-berpendapat-bahw/769514829751943/>

## Profil Penulis



Muchamad Taufiq, SH, MH. Dosen STIE Widya Gama Lumajang-Peneliti dan Legal Drafter. Sedang menempuh pendidikan S3 di FH. Universitas Jember, bidang ilmu HTN. Telah menerbitkan 4 Karya Buku Mandiri dan 7 karya bersama. Mengikuti Pendidikan Profesi Advokat (2008) di Unmer-Malang. Pengalaman pendidikan luar negeri : CPG HAM di Thammasat Univ. Thailand (2015), Profesor Program Technique di ICTK Thailand (2018), LPU Phillipina dan Chitkara University India (2019). Mata Kuliah yang diampu : dan *Deveopment Organization*. Organisasi Profesi : ADRI dan APHTN-HAN. Aktifitas organisasi, tingkat Nasional : Kepala Bangdiklat Argawana.

Tingkat Jawa Timur : Ketua Bidang Organisasi PMI, Wakil Sekretaris PD.PPM.  
Tingkat Kabupaten : Wakil Ketua Kwarcab Lumajang dan Plt. Ketua PMI Bondowoso. Profesi lain sebagai *Trainer* Bersertifikat bidang *Leaderships* dan bidang Diklat Kewirausahaan. Putra dari (alm.) Kusno dan (alm) Kuniainah. Istri : Anik Suwarsih, S.H.. Memiliki 2 anak : Nadiyah Asmaranti Anitaufiq Putri (Smt.7 Sampoerna *University&University of Arizona*) dan Beta Justifyani Taufiq Putri (Kls.9 SMPN 1 Lumajang). Saat ini Pemegang Sabuk Hitam DAN III Karate-do, Bintang Pancawarsa V dan Bintang Dharma Bakti (2020). Pernah Juara I Penyuluh Pariwisata se-Jawa Timur (1998) Email korespondensi penulis muchamadtaufiq1009@gmail.com, HP.085707066688, Alamat Jl. Brantas 21 Lumajang.

# **MEMBINGKAI MAHASISWA MENJADI PANCASILAIS PADA PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

**Rumsari Hadi Sumarto, ASMI DESANTA Yogyakarta**

Pada era modern saat ini, Pancasila tetap relevan untuk diaplikasikan dalam setiap sisi kehidupan. Pancasila seyogyanya tetap berakar pada setiap sanubari insan Indonesia. Namun demikian, tidaklah mudah untuk menginternalisasi Pancasila dalam kehidupan di era global saat ini terutama pada generasi muda yang lekat dengan pemanfaatan teknologi informasi. Mahasiswa menjadi bagian dari generasi muda yang juga tidak pernah lepas dari penggunaan piranti teknologi informasi. Teknologi informasi menjadikan arus informasi semakin terbuka lebar baik informasi yang berdampak positif maupun negatif.

## **Mahasiswa dan Dampak Teknologi Informasi**

Gaya hidup mahasiswa saat ini semakin tenggelam di dalam pusaran dunia maya. Fenomena seperti itu secara tidak langsung mempengaruhi perilaku mahasiswa yang menjadi “asyik” dengan dirinya sendiri melalui konten yang disukai. Media Indonesia menyoroti tentang teknologi informasi yang memberi dampak negatif terutama bagi generasi muda.

Era komunikasi terbukti memberi jaminan akses dan kecepatan memperoleh informasi namun sering menciptakan jarak serta membuat tidak komunikatif. Teknologi informasi telah mengubah perang konvensional menjadi perang modern. Sasarannya yaitu ketahanan ekonomi, pertahanan dan keamanan, budaya, ideologi, lingkungan, politik, karakter, dll. Kita sering menerima gempuran dan pola serangan pintar melalui F-7, food, fashion, film dan fantasi, filosofi, dan finansial. Serangan terhadap filosofi yang paling mengkhawatirkan merupakan bentuk perang ideologi dan pikiran agar terjebak pada pola ideologi liberalis, kapitalis, sosialis, dan radikal (Media Indonesia. 2018)

Tidak dapat dipungkiri gempuran informasi dari berbagai penjuru dunia memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan saat ini. Namun yang lebih mengerikan adalah serangan terhadap filosofi dalam bentuk

ideologi yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini semakin diperparah dengan fenomena mahasiswa tidak hafal teks Pancasila.

Sebanyak 40 persen mahasiswa tidak hafal Pancasila, kata Anggota DPD dari Jawa Barat Eni Sumarni. Hasil penelitian dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Barat menyebutkan sebanyak 40 persen mahasiswa tidak hafal Pancasila (Republika. 2016 ).

Walaupun hasil penelitian tersebut belum dapat dikatakan merepresentasi mahasiswa di seluruh wilayah di Indonesia, namun melalui hasil penelitian tersebut setidaknya menjadi catatan khusus tentang melemahnya penghayatan Pancasila di kalangan mahasiswa. Apabila teks Pancasila saja tidak hafal, bagaimana mungkin mahasiswa akan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mereka. Tentu saja fenomena seperti ini menjadikan miris dunia pendidikan di mana mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa seharusnya perlu menghadirkan Pancasila dalam kehidupannya sehingga mereka memiliki karakter yang sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, menghargai perbedaan, bersikap adil dan lain-lain. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila perlu diinternalisasi secara intensif kepada mahasiswa sehingga menjadi landasan kehidupannya dan menjadi filter bagi keterbukaan informasi di era global.

### **Mahasiswa sebagai Pancasilais pada Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka**

Pancasilais menurut KBBI adalah penganut ideologi Pancasila yang baik dan setia. <https://kbbi.web.id/Pancasilais>. Dengan demikian Pancasilais dimaknai sebagai penganut ideologi Pancasila yang baik dan setia. Setiap butir-butir dalam sila-sila yang ada dalam Pancasila menjadi pedoman dalam bertindak mahasiswa. Dalam kurikulum di perguruan tinggi, Pancasila menjadi mata kuliah wajib bagi mahasiswa. Dengan adanya kewajiban mahasiswa menempuh mata kuliah Pendidikan Pancasila, diharapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat terinternalisasi pada setiap mahasiswa.

Seiring dengan perubahan proses pendidikan yang terjadi di Indonesia, maka perguruan tinggi saat ini menerapkan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Implementasi program ini dijelaskan sebagai berikut:

Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi, diantaranya melakukan magang di tempat kerja, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti

pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi atau proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Kampus Merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru (LLDIKTI. 2020).

Program MBKM memberi kebebasan mahasiswa untuk menjalankan proses pendidikan di luar kampus dan menambah wawasan melalui berbagai saluran informasi. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dan menjadikan mahasiswa mandiri dengan menciptakan lapangan kerja baru. Berkaitan dengan program tersebut, penguatan Pancasila sangat dibutuhkan saat mahasiswa mengikuti Program MBKM. Kemajuan teknologi dan informasi perlu disikapi secara positif oleh mahasiswa dan mahasiswa diharapkan mampu menyaring informasi secara bijak, sehingga saat mahasiswa belajar di luar kampus, pengaruh negatif dari arus keterbukaan informasi dapat diminimalisir. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Dikti, Nizam menyampaikan bahwa:

Upaya pembangunan karakter pelajar Pancasila dapat dilakukan salah satunya melalui program Kampus Merdeka. Oleh sebab itu, Indonesia menyusun strategi terbaik untuk membangun generasi masa depan dengan tetap menanamkan karakter Pancasila sebagai generasi penerus bangsa tetapi tetap dalam konteks kekinian (Dikti. 2021 ).

Pancasila yang menjadi bagian dari kurikulum pada dunia pendidikan tinggi seyogyanya diterapkan dengan konteks kekinian sehingga mampu menjawab tantangan yang ada di era saat ini. Mahasiswa tidak hanya dididik dan dibentuk menjadi insan yang cerdas dan mampu menguasai teknologi, tetapi mahasiswa harus memiliki kepribadian yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila sehingga mampu menghadirkan nilai tersebut di perkuliahan, di tengah masyarakat dan di manapun berada. Pemanfaatan teknologi informasi yang dikuasai mahasiswa tidak berarti menafikan nilai-nilai Pancasila dalam realisasinya. Nizam menambahkan bahwa:

Memberi kebebasan belajar bagi mahasiswa dengan tetap menanamkan karakter Pancasila melalui program MBKM dapat menciptakan mahasiswa menjadi pembelajar mandiri, adaptif, kreatif (Humas Ditjen Dikti. Kemdikbud. 2020).

Kebebasan belajar bagi mahasiswa melalui Program MBKM menjadikan mahasiswa mandiri, adaptif dan kreatif dengan tetap menghadirkan karakter

Pancasila dalam kehidupan mahasiswa atau dengan kata lain menjadi Pancasilais di manapun mahasiswa berada.

Penanaman karakter Pancasila setidaknya juga menjadi sarana pemersatu dari keberagaman. Keberagaman budaya, suku, agama, dan ras tidak hanya menjadikan Indonesia semakin dikenal secara global, namun rawan memunculkan konflik. Berbagai kasus yang terjadi di Indonesia sangat mudah menyulut konflik dengan mengadu domba melalui keberagaman tersebut. Kasus SARA merupakan kasus yang paling mudah menyulut konflik. Untuk itu, mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa harus mampu meminimalisir tersulutnya konflik dari keberagaman yang ada. Kebebasan dalam mengakses informasi dan penguasaan teknologi digital dapat dijadikan media untuk meredam konflik dan bukan untuk menyulut konflik.

Hal ini sejalan dengan yang ditekankan oleh Kemdikbud untuk menanamkan nilai atau karakter Pancasila dalam Program MBKM.

Kemdikbud menerapkan karakter Pancasila pada program Kampus Merdeka. Karakter Pancasila juga menumbuhkan mahasiswa berjiwa Bhineka Tunggal Ika dalam menerima keanekaragaman (Humas Ditjen Dikti. Kemdikbud. 2020).

Mahasiswa berjiwa Bhineka Tunggal Ika sangat dibutuhkan saat ini. Program MBKM menjadikan mahasiswa terbuka untuk mendapatkan informasi dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencapai kompetensi mahasiswa. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan interaksi dengan pihak lain pada saat pemenuhan pencapaian kompetensi dapat menjadi peluang masuknya pengaruh negatif pada mahasiswa, termasuk juga melalui akses informasi yang berdampak negatif pada mahasiswa. Untuk itu, penghayatan dan penerapan Pancasila yang benar-benar merasuk dalam diri mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa dan mahasiswa yang berjiwa Bhineka Tunggal Ika dapat menjadi peredam untuk masuknya pengaruh negatif pada mahasiswa.

Mahasiswa seyogyanya menjadi Pancasilais yang setia kepada nilai-nilai Pancasila di era modern dan era keterbukaan informasi saat ini. Program MBKM dapat menjadikan mahasiswa menjadi output yang kompeten, namun mampu mencegah paham-paham atau perbedaan yang bertentangan dengan Pancasila merasuk ke dalam diri mahasiswa. Mahasiswa sebagai Pancasilais perlu menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap pikiran dan tindakan sehingga kesetiaannya terhadap Pancasila akan mampu meredam dampak negatif dari keterbukaan informasi pada saat menjalani Program MBKM.

## Daftar Pustaka

- Dikti. Kemdikbud. (2021). Kampus Merdeka Sebagai Upaya Penguatan Karakter Pelajar Pancasila. <https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kabar/kampus-merdeka-sebagai-upaya-penguatan-karakter-pelajar-pancasila/>.
- Humas Ditjen Dikti. Kemdikbud. (2020). Dirjen Dikti Tekankan Pentingnya Penanaman Karakter Pancasila dalam Menghadapi Tantangan Global. <https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kabar/dirjen-dikti-tekankan-pentingnya-penanaman-karakter-pancasila-melalui-kampus-merdeka-dalam-menghadapi-tantangan-global/>
- KBBI. Pancasilais. <https://kbbi.web.id/Pancasilais>
- LLDIKTI 12. (2020). Implementasi Konsep Kampus Merdeka Belajar. <https://lldikti12.ristekdikti.go.id/2020/10/12/implementasi-konsep-kampus-merdeka-belajar.html>
- Media Indonesia. (2018) Nilai-nilai Pancasila Bagi Generasi Milenial di Zaman Now. <https://mediaindonesia.com/opini/163965/nilai-nilai-pancasila-bagi-generasi-milenial-di-zaman-now>
- Republika. (2016). 40 Persen Mahasiswa Tidak Hafal Pancasila. <https://www.republika.co.id/berita/o57gup284/40-persen-mahasiswa-tidak-hafal-pancasila>.

## Biodata Penulis



Rumsari Hadi Sumarto. Pendidikan S1, S2 Ilmu Administrasi Negara FISIPOL UGM, S3 Ilmu Administrasi Publik, FIA, Universitas Brawijaya Malang. Penulis sebagai Staf Pengajar Prodi Sekretari/Administrasi Perkantoran ASMI DESANTA Yogyakarta. Karya publikasi: beberapa buku referensi Kesekretarian, Etika, dan Manajemen Logistik. Artikel ilmiah dipublikasikan di jurnal nasional dan internasional, serta proceeding internasional. Aktivitas lain: Instruktur training untuk pegawai Pemda, BUMN/BUMD, swasta dan masyarakat dengan materi Pelayanan Publik, Humas, MC, Public Speaking. Kesekretariatan, Korespondensi, Kearsipan, Customer Service. Penulis juga menjadi Penguji UKK dan Juri Lomba di SMK DIY dan Jawa Tengah Prodi Sekretaris/Administrasi Perkantoran.



# MEMBANGUN KARAKTER BANGSA BERDASARKAN PANCASILA MELALUI PERPUSTAKAAN

Oleh: Endang Fatmawati

## Pendahuluan

Saat ini bangsa Indonesia sedang mengalami berbagai permasalahan disintegrasi bangsa dengan merebaknya berbagai konflik vertikal maupun horizontal. Ironis, mempunyai dasar negara Pancasila tetapi masih miskin karakter. Kenyataan ini menunjukkan merosotnya nilai karakter bangsa Indonesia tengah terpuruk begitu dalam. Nilai-nilai Pancasila seolah-olah mulai pudar dan luntur. Persoalan bagaimana membangun karakter bangsa erat kaitannya dengan jati diri, karakter warga negara, dan keteladanan pemimpin bangsa Indonesia.

Sumber Daya Manusia (SDM) nasional menjadi faktor kunci dalam pembangunan karakter bangsa. Multikulturalisme menjadi realitas utama yang dialami masyarakat Indonesia. Keberagaman dan kemajemukan menjadi ciri masyarakat Indonesia. Penetrasi budaya Barat sangat berpengaruh. Kesaktian Pancasila mendorong terciptanya *good governance*, dan ketidakefektifan *good governance* memunculkan disintegrasi. Dampak perkembangan global mendorong perubahan dalam status dan peran warga negara Indonesia, baik sebagai pengolah, penyedia, maupun pemakai informasi. Kemajuan teknologi dan informasi dalam era *cyberspace* saat ini memungkinkan generasi penerus bangsa dapat dengan mudah mengakses informasi secara instan. Terpaan informasi yang tidak tersaring inilah yang memicu merosotnya karakter bangsa. Sepertinya pengawasan orang tua terhadap anak-anak tidaklah cukup, karena waktu kebersamaan dengan anak-anak hanya terbatas saat di rumah. Padahal pendidikan karakter sangat kondusif dimulai dari rumah. Saya berpikir seperti ini perlu ditumbuhkan kesadaran moral dari setiap anak agar berkepribadian dan tumbuh menjadi anak yang berkarakter.

Gejolak sosial yang terjadi di Indonesia sedikit banyak terkait dengan transformasi sosial sebagai akibat terpaan teknologi informasi yang semakin mengglobal. Apalagi saat ini hampir tidak ada satupun bagian dunia yang tak

terkait dengan situasi global. Jadi berbagai perubahan di tingkat global juga berpengaruh terhadap masyarakat Indonesia. Apalagi bangsa Indonesia yang masyarakatnya sangat majemuk. Nah inilah konsekuensi yang timbul dari pluralitas masyarakat kita yang tidak luput dari ancaman konflik.

Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Kondisi saat ini nampak bahwa nilai Pancasila belum sepenuhnya diaktualisasikan dalam kehidupan setiap warga negara. Permasalahannya sangat kompleks dan beragam, misalnya terlihat adanya berbagai fenomena, misalnya: degradasi moral, teror bom, hedonisme, tawuran antar warga, budaya serba instan, tingginya para pejabat memperkaya diri sendiri dengan korupsi, masyarakat mudah tersulut emosi dan aksi brutal dengan demo anarkis, para wakil rakyat lupa dengan nasib dan aspirasi rakyat yang diwakili, para penegak hukum yang tidak konsekuen menegakkan aturan, banyak orang pintar hanya bisa berkomentar dan berdiskusi tapi tidak memberikan sebuah tindakan solusi dari berbagai permasalahan, dan lain sebagainya. Selain itu, yang namanya tawuran para pelajar maupun mahasiswa menjadi hiasan berita media.

Perilaku menghalalkan segala cara, membakar rumah, menggunakan senjata tajam, mencuri, memperkosa, saling membunuh dengan tidak mengedepankan nilai kemanusiaan, main hakim sendiri, menyerang aparat tanpa perhitungan, dan merusak fasilitas umum. Nampak juga adanya politisi yang tidak bisa menerima kekalahan dengan ikhlas/legowo, sehingga nekat berbuat curang hanya demi popularitas dan meraih simpati rakyat. Belum lagi krisis sosial budaya dalam bentuk disorientasi dan dislokasi, seperti euphoria yang kebablasan, aksi protes dan demonstrasi, kesabaran sosial yang pudar sehingga menyebabkan amuk massa, kenakalan remaja, pergolakan daerah yang mempermasalahkan isu lokal/daerah, maupun kriminalitas yang ditandai dengan merosotnya penghargaan dan kepatuhan terhadap hukum. Saya rasa selain yang saya sebutkan tersebut masih banyak lagi fenomena lainnya yang terjadi di masyarakat Indonesia.

Isu sosial yang menggejala di masyarakat Indonesia saat ini adalah 'disintegrasi'. Lalu pertanyaannya siapa yang salah? "Apa yang salah dengan negara ini?" Padahal jelas bahwa realitas utama negara Indonesia adalah adanya keragaman, kebhinnekaan, atau multikulturalisme. Hal ini mengandung pengakuan bahwa masyarakat Indonesia memang pluralitas, sangat beragam dan sangat majemuk. Namun, saya rasa pluralisme akan menjadi konflik apabila keragaman masyarakat tidak dikelola dengan baik.

## Karakter Bangsa

Bangsa Indonesia sebenarnya dihadapkan pada berbagai agenda pemecahan terkait persoalan bangsa. Hal ini termasuk bagaimana menciptakan SDM nasional yang unggul dan berkarakter berdasarkan Pancasila. Aspek pembangunan karakter SDM sangat vital menuju kemandirian bangsa. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena munculnya berbagai perbedaan kepentingan dan orientasinya terkadang hanya untuk kepentingan individu dan kelompok saja. Upaya dalam menanamkan nilai-nilai karakter bangsa bisa dilakukan melalui pendidikan Pancasila dan pengamalan kelima sila dalam kehidupan sehari-hari.

Saya juga berpandangan bahwa salah satu penyebab terjadinya kemunduran moral bangsa adalah terletak pada lemahnya pendidikan karakter, baik yang informal maupun melalui pendidikan formal. Oleh karena itu, membangun karakter melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila harus diinternalisasikan pula melalui tingkat dan jenjang pendidikan maupun forum temu ilmiah yang bertema nasionalisme. Jadi upaya-upaya itulah yang saya pikir menjadi langkah preventif dan kuratif untuk mengatasi krisis karakter bangsa Indonesia. Membentuk watak (*character building*) dan membangun karakter bangsa diawali dari unsur terkecil pribadi, kemudian keluarga, lingkungan, masyarakat, dan bangsa. Dalam lingkungan keluarga peran orang tua untuk membentuk karakter anak sangat dominan. Orang tua harus lebih intens dalam menanamkan rasa nilai (*sense of value*) kepada anak.

Untuk memahani persoalan karakter bangsa, menurut pemahaman saya sangat erat kaitannya dengan yang namanya jati diri atau diri yang sesungguhnya. Ada kehidupan bersama dalam sebuah bangsa dengan imajinasi kebersamaan. Agar bangsa mampu bekerja sama dan bersaing, maka dapat dilakukan dengan cara mempersiapkan warganya untuk belajar (*learning*). Hal ini melalui proses untuk mengetahui (*to know*), melakukan (*to do*), hidup bersama (*to live together*), serta berusaha menjadi (*to be*) warga yang memiliki karakter unggul.

Sebelum membahas tentang gejala disintegrasi bangsa (*disintegration nation*), maka perlu saya jabarkan dulu makna disintegrasi. Tidak adanya kepemimpinan yang kuat dan adanya kecurigaan antar sesama, rawan menjadi pemicu pergolakan tersendiri. Dikatakan disintegrasi karena sudah tidak ada bentuk kerukunan dan kebersamaan sehingga muncul pertikaian. Perlu strategi untuk menanggulangi disintegrasi bangsa Indonesia. Langkah konkretnya yaitu dengan membangun karakter dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila, memegang teguh dan melaksanakan/mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, bertekad

dalam menyebarkan dan memasyarakatkan wawasan kebangsaan dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.

Struktur birokrasi Indonesia cenderung mulai melemah, bahkan sikap hormat terhadap kepemimpinan yang berkuasa mulai luntur. Saat ini berbagai respon masyarakat Indonesia dengan bentuk kecurigaan, pembantahan, maupun perlawanan sudah menggejala. Jadi bisa ditebak pasti konflik antarelite menjadi tak terkendali lagi dan ini menyebabkan benturan sosial antarkelompok yang jelas menjadi ancaman disintegrasi. Pemerintah Indonesia sekiranya perlu menganalisis faktor yang menyebabkan gejala disintegrasi, agar dalam mengambil kebijakan menjadi lebih akuntabel.

Sumber Daya Manusia (SDM) nasional yang berkarakter merupakan faktor penentu kemajuan bangsa. Jadi saya pikir pembangunan manusia melalui pendidikan Pancasila harus mendapat tempat utama. Urgensi adanya pendidikan Pancasila diharapkan agar menjadi SDM nasional yang berkarakter sehingga dapat menjadi pilar utama dalam pembangunan. Pancasila dapat dikaji melalui berbagai pendekatan, misalnya: historis, kultural, filosofis, maupun yuridis. Jadi sepertinya Pancasila harus dijadikan pelajaran wajib dalam pengertian tidak diintegrasikan dalam mata pelajaran ataupun mata kuliah lain.

### **Pemaknaan Pancasila**

Pancasila yang merupakan falsafah hidup bangsa sebenarnya sudah lama ada dan berkembang bersama-sama sejak lahirnya bangsa Indonesia, walaupun kenyataannya dari segi penamaan Pancasila baru tanggal 1 Juni 1945. Pancasila sebagai nilai dasar fundamental memiliki kekuatan untuk membangun *good governance*. Kaitannya dengan disintegrasi, maka ketidak optimalnya *good governance* juga akan memicu munculnya disintegrasi. Hal ini disebabkan karena setiap masyarakat merasa berkuasa, menang sendiri, dan memiliki kekuatan untuk menginjak dan menyerang kelompok lain. Belum lagi pada fenomena bahwa masyarakat Indonesia memang heterogen.

Nilai dalam Pancasila mendukung terciptanya *good governance*, karena memiliki muatan yang mendorong pembangunan *good governance* di tingkat nasional. Hal ini karena dalam Pancasila terkandung nilai dasar/fundamental dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila harus menjadi kebanggaan nasional. Parameter yang mengindikasikan bahwa kesaktian Pancasila dapat mendukung *good governance*, antara lain: citra, komitmen, dan kekuatan untuk memajukan Indonesia dengan berhimpun dalam satu bahasa kebangsaan dan kebhinnekaan. Jadi *good governance* menjadi harapan masyarakat Indonesia. Harapannya adalah dapat menekan radikalisme dan

menciptakan pembangunan nasional masyarakat Indonesia yang berkarakter berdasarkan Pancasila.

Pandangan saya walaupun negara dalam kondisi krisis multidimensi seperti saat ini, namun dengan pelaksanaan secara normatif ideologi negara Pancasila, maka saya yakin insyaAllah akan dapat membantu dan mengatasi berbagai krisis melalui berbagai solusi yang bermartabat. Asumsinya bahwa agar mempunyai urgensi yang jelas, maka warga negara yang baik harus memaknai nilai Pancasila secara lahir dan batin. Jadi untuk mewujudkan lima sila dalam Pancasila perlu mengimplementasikan dalam kehidupan bernegara. Langkah konkret yang sekiranya bisa dilakukan adalah:

1. Mensosialisasikan dan mengajarkan penerapan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan khususnya di sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia. Harapannya adalah agar siswa dan mahasiswa mampu untuk:
  - a. Menganalisis landasan dari pendidikan Pancasila.
  - b. Mengungkapkan kembali tujuan dari pendidikan Pancasila
  - c. Menerima bahwa pendidikan Pancasila sebagai pendidikan yang dapat mengembangkan kepribadian dan nilai budaya bangsa.
2. Menghayati nilai-nilai Pancasila dari berbagai aspek kehidupan dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
3. Membentuk karakter dengan wujud sikap dan perilaku sesuai nilai-nilai luhur Pancasila, karena pembangunan karakter adalah sebuah kebutuhan dasar.
4. Hidup bersama dengan cara Pancasila, terlebih pada proses globalisasi yang ditandai oleh dorongan kerja sama dalam kebersamaan dan menjaga kelangsungan hidup.

Dalam pandangan saya, sepertinya saat ini perlu pemaknaan Pancasila yang menghasilkan pemikiran baru. Intinya Pancasila harus dimaknai terus-menerus oleh setiap warga negara sebagai ideologi negara. Pemahaman saya dikatakan ideologi pasti mengandung unsur yang sangat prinsip, yaitu merupakan konsensus nasional sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Ideologi negara harus diletakkan di atas moral dan etika agama.

Ideologi Pancasila adalah ideologi terbuka, maksudnya bahwa ideologi Pancasila memiliki dimensi realitas. Selain itu, juga memiliki dimensi idealisme. Artinya bahwa ideologi Pancasila juga memberikan harapan dan optimisme mewujudkan tujuan nasional, maupun cita-cita luhur bangsa. Lalu bagaimana menghadapi perkembangan di era global yang tanpa batas? Dalam konteks ini berarti berdimensi fleksibilitas. Dengan demikian, masyarakat Indonesia harus mampu bersikap objektif dalam mencermati dan menginterpretasikannya dalam era perkembangan yang lebih mengglobal.

Butir-butir Pancasila sebenarnya merupakan nilai karakter. Fenomena Pancasila yang seolah “lenyap” dari kehidupan bangsa Indonesia harus disikapi dengan bijak dan tegas. Lalu bagaimana mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan untuk membangun karakter bangsa? Saya berpendapat bahwa sebenarnya penjabaran kelima sila Pancasila yang menjadi 36 butir dalam P4 itu sudah terkandung nilai karakter bangsa. Dalam konteks ini, misalnya: tidak memaksakan kehendak, saling menghormati, tenggang rasa, kekeluargaan, kegotongroyongan, musyawarah mufakat, kebersamaan, tepo sliro, toleransi, menghargai perbedaan, adil, ramah, saling menolong, dan lain sebagainya.

Bayangkan saja bukankah hampir setiap hari masyarakat Indonesia disuguhi dengan seabrek berita dari media massa maupun televisi dan radio yang menyesak dada dan tak sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Ironis memang, karena di tengah bangsa yang seharusnya berkarakter, namun tayangan televisi yang tidak mendidik serta kekerasan tetap saja menghiasi layar kaca. Inilah potret negeri ini yang mengindikasikan lunturnya nilai-nilai Pancasila terutama oleh generasi muda.

Renungan kita sebagai warga negara apakah kalau rakyat dan pejabatnya sudah bertindak demikian berarti karakter bangsa perlu dipertanyakan? Lalu masihkah Pancasila ada dalam sanubari masyarakat Indonesia? Bagi Indonesia norma dasar yang berlaku adalah Pancasila. Pancasila bukan saja merupakan falsafah hidup bangsa dan dasar negara, namun juga paradigma ilmu. Kebersamaan dan asas kekeluargaan yang disebut ‘ukhuwah’ (*mutualism and brotherhood*) menjadi suatu titik tolak dan tuntutan hidup untuk melaksanakan dan mewujudkan misi nasional.

Falsafah hidup Pancasila tercermin dalam falsafah hidup orang Jawa. Dalam hal ini, dapat dijelaskan misalnya “*ponokawan*” melambangkan kepribadian bangsa. Maksudnya bahwa dalam menerima kebudayaan luar, bangsa dilukiskan sebagai *ponokawan* atau abdi yang bertingkah laku selalu melayani tuannya (bendoronya). Jadi walaupun masyarakat Indonesia menganggap meskipun kebudayaan yang datang dari luar mempunyai pengaruh positif dalam arti memperkaya dan melengkapi kebudayaan bangsa, namun jika ternyata kebudayaan yang datang dari luar tersebut merugikan kebudayaan dan kepribadian bangsa maka harus ditolak dengan tegas.

Sebagai filsafat hidup bangsa dan dasar negara, Pancasila mengandung maksud bahwa yang bhinneka (pluralistik) akan menjadi ‘tunggal ika’, sehingga bangsa Indonesia akan menjadi kukuh bersatu apabila menyatukan diri dalam *platform* nasional yang jelas, yaitu Pancasila. Kita harus meyakini sedalam-dalamnya akan keampuhan dan kesaktian Pancasila. Bagaimanapun Pancasila sebagai ideologi

negara menjadi salah satu komponen pemersatu bangsa bagi negara Indonesia dalam menghadapi persaingan global.

### **Perpustakaan: Solusi Cerdas Kualitas Bangsa**

Pendidikan karakter juga dapat diinternalisasikan melalui pemanfaatan sumber informasi di perpustakaan. Bahan perpustakaan yang topiknya tentang Pancasila apabila dibaca dan dipahami akan menumbuhkan rasa kebangsaan dan menumbuhkan jiwa nasionalisme, sehingga akan melahirkan warga negara yang berkarakter. Dengan demikian, sangat diperlukan bukti nyata para pustakawan untuk mengelola informasi yang ada di perpustakaan untuk membangun karakter masyarakat yang berdasarkan Pancasila. Agar tidak timpang, maka juga diperlukan kesadaran dengan pembiasaan diri setiap warga negara untuk memasukkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini misalnya dengan melalui pemberdayaan literasi masyarakat berbasis inklusi sosial dengan mengoptimalkan peran perpustakaan.

SDM nasional yang rendah dalam penguasaan TIK akan tergeser dan menjadi tidak bisa menciptakan peluang global. Mengapa? Saya rasa strategi yang sebenarnya menjadi kunci pembukanya adalah dengan ‘membaca’. Hemat saya membaca itu sangat penting dan banyak sekali manfaatnya dalam pembentukan karakter. Jika dikontekstualisasikan bahwa membaca memperluas cakrawala berpikir, membangun kepribadian, memperkaya khazanah keilmuan, dan masih banyak yang lainnya. Semakin banyak membaca, maka masyarakat semakin cerdas, sehingga kualitas bangsa menjadi unggul.

Mengenai proses terbentuknya karakter dari kebiasaan membaca, diawali dengan aktivitas membaca berbagai sumber informasi tentang Pancasila sehingga dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme yang tinggi, sikap bela negara, maupun cinta tanah air dalam upaya membentuk karakter. Praksisnya mulai dari selera, lalu akan tumbuh minat membaca, dan kemudian kebiasaan membaca yang sudah menjadi perilaku akan sampai dengan terbentuknya karakter bangsa. Titian peradaban masyarakat yang mampu berdaya saing harus dilakukan secara berkelanjutan dengan pemberdayaan dan peningkatan literasi masyarakat Indonesia melalui media cerdas yaitu pemanfaatan perpustakaan.

Perpustakaan sebagai penyedia sumber informasi harus mampu mengakomodir berbagai kebutuhan informasi masyarakat dalam membentuk karakter bangsa yang berdasarkan Pancasila. Kaitannya dengan perpustakaan, internet yang berfungsi sebagai *superhighway communication* telah memberikan kemudahan bagi pemakai perpustakaan (pemustaka) dalam berselancar untuk mengakses informasi apapun. Sepertinya era Gutenberg telah tergantikan oleh era

*cyberspace*. Seolah-olah tidak ada masalah batas jarak dan waktu di era sekarang, kapanpun, dimanapun, dan dari manapun akses informasi dapat dilakukan dengan alat teknologi. Namun ternyata dampak negatif juga timbul, fenomena yang tampak bahwa anak-anak yang tidak ada filter dalam akses informasi akan mudah terperosok dan terpengaruh, sehingga akan memerosotkan sikap dan perilaku anak menjadi generasi yang tidak berkarakter.

Selanjutnya apabila saya kaitkan dengan perpustakaan, maka apakah membangun karakter bangsa dapat dilakukan melalui perpustakaan? Memaknai perpustakaan secara mendalam ibarat menyalakan lilin di kegelapan. Apalagi saat ini nilai-nilai Pancasila sudah demikian luntur. Jadi seharusnya perlu revitalisasi peran perpustakaan secara optimal dalam membangun bangsa yang berkarakter berdasarkan Pancasila. Literatur kebangsaan bisa dilakukan dengan memanfaatkan sumber informasi di perpustakaan.

## Penutup

Agar nilai-nilai dalam Pancasila menjadi ruh bangsa maka harus ada pengamalan dari masyarakat Indonesia. Akar permasalahan dari merosotnya nilai karakter bangsa disebabkan karena belum diimplementasikannya nilai-nilai Pancasila secara lebih komprehensif. Pancasila merupakan simbol negara yang harus dipertahankan. Seharusnya semua warga negara Indonesia mampu mengkaji, menganalisis kemudian mengimplementasikan di tengah kehidupan bermasyarakat yang beragam dan majemuk. Apabila setiap warga negara memegang teguh prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka penyelenggaraan negara akan menjadi semakin *fair* dan kredibel. Kesaktian Pancasila menjadi semakin jelas dengan semangat nasionalisme dan patriotisme masyarakat Indonesia dalam upaya mewujudkan *good governance*. Perpustakaan melalui kiprah pustakawannya harus bisa menunjukkan eksistensi kemajuan dan komitmen untuk menjadi agen perubahan karakter masyarakat Indonesia dalam menyediakan sumber informasi yang bertopik Pancasila.

## PROFIL ANTOLOGI PANCASILA



Dr. Endang Fatmawati, M.Si., M.A. mengajar mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan di Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, mulai tahun 2018 sampai sekarang. Kontak silaturahmi bisa dilakukan melalui email [endangfatmawati@live.undip.ac.id](mailto:endangfatmawati@live.undip.ac.id).



# **PERAN KETERAMPILAN MANAJERIAL KEPALA SEKOLAH DALAM MEWUJUDKAN PROFIL PELAJAR PANCASILA**

**Karwanto**

**Universitas Negeri Surabaya**

Prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi Covid-19 mengedepankan pada kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Hikmah pandemi Covid-19 dalam pembelajaran meliputi: (1) guru bisa melakukan pembelajaran melalui daring/*online* dengan menggunakan *tools*/perangkat baru; (2) membangun kesadaran bagi orang tua bahwa tugas guru itu sangat sulit; (3) menumbuhkan rasa empati orang tua kepada guru; (4) pendidikan itu bukan suatu yang hanya bisa di lakukan di sekolah saja; (5) kolaborasi siswa, orang tua dan guru; (6) pentingnya menjaga kesehatan dan menghargai lingkungan dengan menjaga kebersihan; (7) timbulnya empati dan solidaritas di tengah masyarakat; (8) beradaptasi, berinovasi dan eksperimen untuk menciptakan cara kerja baru; (9) peran penting teknologi dalam mendukung pembelajaran dan bekerja keras agar teknologi bisa sampai ke sekolah-sekolah. Semua masalah ini bisa diselesaikan dengan saling bahu-membahu, membantu, mendukung dengan semangat kebersamaan gotong-royong (Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, 2021).

Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karakteristik profil pelajar Pancasila yaitu meliputi: (1) beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia; (2) kreatif, (3) gotong royong; (4) berkebhinnekaan global; (5) bernalar kritis dan (6) mandiri. Untuk mengelola proses pembelajaran yang dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila dibutuhkan keterampilan manajerial kepala sekolah yang tangguh untuk meningkatkan kinerja guru dalam melaksanakan proses pembelajaran dalam upaya meningkatkan prestasi akademik dan non akademik yang tinggi dan

kompetitif (Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, 2021).

Peran keterampilan manajerial kepala sekolah sangat strategis dalam upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apapun bentuk dan bagaimanapun ragam inovasi pendidikan, semua itu tidak akan banyak memberi makna terhadap peningkatan mutu layanan kepada peserta didik termasuk mewujudkan profil pelajar Pancasila apabila kepala sekolah tidak memiliki keterampilan manajerial, dan kompetensi profesional yang baik dalam mencapai tujuan pendidikan. Keberhasilan suatu sekolah sangat ditentukan oleh kepala sekolah dalam mengoordinasikan dan menyelaraskan semua sumber daya pendidikan.

Kenyataan di lapangan menunjukkan. *Pertama*, keterampilan manajerial kepala sekolah dalam mengelola sekolah benar-benar dituntut dan membutuhkan seni dalam proses pengelolaannya, termasuk dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Disamping itu, menurut Danim & Suparno, (2009: v-vi), masih banyak sekolah yang prestasi belajar siswanya rendah, guru dan siswanya kurang disiplin, kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran rendah, serta lambannya staf tata usaha dalam melayani kebutuhan siswa. Masalah-masalah ini merupakan cerminan kurangnya keterampilan kepala sekolah dalam memberdayakan stafnya, disamping rendahnya etos kerja komunitas sekolah secara keseluruhan. *Kedua*, setiap kepala sekolah memiliki keterampilan yang bervariasi, unik dan menarik dalam menata dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Peran keterampilan manajerial kepala sekolah dalam upaya meningkatkan kinerja guru dalam mengawal dan mengembangkan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, menyenangkan, gembira dan berbobot sangatlah penting dalam upaya meningkatkan prestasi akademik dan non akademik dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. *Ketiga*, dunia pendidikan saat ini masih menghadapi tantangan yaitu Degradasi moral. Riset yang dilakukan KPAI menemukan fakta bahwa pada tahun 2018 terjadi kenaikan kasus pelajar tawuran di Indonesia sejumlah 1,1%. Sementara itu, berdasarkan data KPAI bahwa pada tahun 2020, banyaknya kasus bullying menambah catatan masalah anak. Fenomena tersebut menggambarkan bahwa perilaku dan karakter bangsa yang menyimpang marak terjadi sehingga perlu diciptakan kesadaran untuk menanamkan karakter. Karakter bangsa yang baik perlu dibentuk dan dibina sebagai upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia. Oleh sebab itu, pendidikan karakter menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan. Salah satu pendidikan karakter adalah melalui Profil Pelajar Pancasila. Profil Pelajar Pancasila telah dijadikan sebagai salah satu visi dan misi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Juliani & Bastian, 2021). Pertanyaan yang muncul adalah. *Pertama*, bagaimana peran keterampilan manajerial kepala

sekolah dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila?. Kedua, bagaimana kinerja guru dan proses pembelajaran dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila?.

### **Peran Keterampilan Manajerial Kepala Sekolah dalam Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.**

Keterampilan manajerial memungkinkan seseorang kepala sekolah sukses dan berhasil gemilang dalam pekerjaannya (Sion, 2007). Karena itu, ia dituntut memiliki keterampilan manajerial yang tangguh yang meliputi keterampilan konseptual, keterampilan manusiawi dan keterampilan teknis (Katz, 1974; Hersey & Blanchard, 1976; Elsbree, McNally & Wynn, 1976; Wiles, 1980; Sergiovanni & Carver, 1980). Artinya, kepala sekolah harus mampu mengelola dan mengembangkan kurikulum, meningkatkan pembelajaran, memberikan pelayanan yang baik kepada siswa, mengelola keuangan dan sarana-prasarana serta membina hubungan yang baik kepada masyarakat (Ubben & Hughes, 1992). Peran kepala sekolah secara manajerial terhadap kemajuan sekolah, pada hakikatnya adalah seorang perencana, organisator dan pengendali sekolah (Bafadal, 2007). Kepala sekolah harus mampu bekerja bersama dengan dan melalui orang lain untuk mencapai tujuan (Mantja, 2007). Kepala sekolah dalam pandangan Murphy's & Daresh (Ghaleei, 2006), tugas utamanya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengelola aktivitas pembelajaran secara profesional, termasuk dalam hal ini adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila.

Sergiovanni (1987), peran kepemimpinan dibagi menjadi dua yaitu: (1) *education leadership* dan (2) *manager of school*. Antara kepemimpinan (*leadership*) dan manajer (*manager*), ibarat dua sisi mata uang. Adapun perbedaan yang paling mendasar antara kepemimpinan dan manajerial adalah sebagai berikut. *Pertama*, kepemimpinan, lebih ditekankan pada aspek interaksi dengan orang-orang, mempengaruhi, menggerakkan, mengembangkan dan memberdayakan seseorang untuk mencapai tujuan. *Kedua*, manajerial, lebih ditekankan pada aspek penataan, baik penataan aspek manusia maupun non manusia. Dalam penataan tersebut melibatkan proses manajemen yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan (monitoring dan evaluasi).

Hasil penelitian Mazibuko (2007), menunjukkan bahwa peran keterampilan manajerial kepala sekolah yaitu. *Pertama*, memberikan dukungan dan mampu mengelola pembelajaran. *Kedua*, memfasilitasi perubahan yang berarti. *Ketiga*, melakukan supervise *Keempat*, melakukan evaluasi. *Kelima*, membangun dan memelihara tim pemenang. *Keenam*, mengembangkan sumber daya manusia. *Ketujuh*, melakukan penilaian terhadap guru dan tenaga kependidikan.

Kedelapan, monitoring pelaksanaan kebijakan pendidikan. Kesembilan, monitoring kemajuan peserta didik. Kesepuluh, mengelola kurikulum dan pembelajaran. Kesebelas, mempromosikan iklim sekolah yang positif. Hasil penelitian ini dapat diimplementasikan oleh kepala sekolah yang memiliki keterampilan manajerial yang menonjol dalam upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan mengedepankan pada komunikasi, koordinasi, kolaborasi/kerjasama, dan sinergi dengan guru dan tenaga kependidikan dalam upaya mengelola, meningkatkan dan mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa keterampilan manajerial kepala sekolah dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila diwujudkan melalui keterampilan yang dimiliki kepala sekolah antara lain, keterampilan dalam perencanaan, keterampilan dalam pelaksanaan dan keterampilan dalam evaluasi. Hal ini tentunya membutuhkan keterampilan konseptual, keterampilan manusiawi dan keterampilan teknis. Ketiga keterampilan ini sama pentingnya, namun kepentingan itu sangat tergantung pada kedudukan kepala sekolah dalam tingkat atau tangga organisasi, sehingga dapat mewarnai tindakan/perilaku, pemikiran/wawasan kelimuan kepala sekolah dalam menata aspek manusia (guru, siswa, staf tata usaha, dan karyawan) dan aspek non manusia (kebijakan, peraturan, pedoman, kurikulum, dana, dan fasilitas fisik) dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara profesional.

### **Kinerja Guru dan Proses Pembelajaran dalam Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila**

*Me-manage* orang pada kenyataannya tidak selalu mudah. Hal ini disebabkan, karena setiap manusia memiliki karakteristik, watak, perilaku, kebutuhan dan keinginan yang berbeda. Sifat dan ciri-ciri yang berbeda-beda itulah yang menyebabkan mereka tidak sedemikian mudah diajak mencapai tujuan yang sama (Suprayogo, 2007). Dalam kaitan ini, seorang kepala sekolah dalam menata aspek manusia (siswa, guru, staf tata usaha) dan non manusia (kebijakan, peraturan, pedoman, kurikulum, pembelajaran, dana, dan fasilitas fisik) membutuhkan suatu strategi (Usman, 2008), yaitu cara yang paling tepat dan efisien untuk mencapai tujuan sekolah yang mengandung perhitungan-perhitungan dan pertimbangan berbagai faktor yang mungkin memberikan pengaruh secara sistematis dan menghindari kerugian yang mungkin terjadi dengan cara memahami kekuatan yang dimiliki sekolah baik kekuatan internal maupun kekuatan eksternal dan mampu memberdayakan kekuatan tersebut dengan baik (Arifin, 2007).

Suatu sekolah, semuanya akan menjadi tidak efektif dan efisien jika keterampilan manajerial pengelolanya berada pada level yang rendah. Artinya, keterampilan manajerial kepala sekolah tersebut harus terus dibangun dan ditingkatkan dengan cara yang paling tepat dan efisien, antara lain dengan menambah wawasan keilmuan, memilih konsep, teori dan prinsip manajerial yang relevan dengan situasi dalam sekolah tersebut dan yang lebih penting adalah pengaplikasiannya (Usman, 2008); dan juga diperoleh melalui pengalaman, pendidikan dan latihan (Hersey & Blanchard, 1976); adanya ketekunan dan motivasi untuk berkembang (Danim, 2002). Hasil penelitian Ismail, Suhana, Zakiah (2021) menunjukkan bahwa penguatan pendidikan karakter dalam mewujudkan Pelajar Pancasila pada dasarnya adalah mendorong lahirnya manusia yang baik, yang memiliki enam ciri utama, yaitu bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global dengan harapan agar peserta didik memiliki kemampuan secara mandiri dalam meningkatkan, menggunakan pengetahuannya, mengkaji, dan meninternalisasi serta memersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia yang dapat diwujudkan dalam perilaku sehari-hari.

Peran manajerial kepala sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja guru dan proses pembelajaran dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, dibutuhkan profil guru yang meliputi: guru sebagai pemilik dan pembuat kurikulum, guru sebagai fasilitator dari berbagai sumber pengetahuan, kompetensi dan tujuan sebagai penentu kualitas pembelajaran, pelatihan guru berdasarkan praktik, dan kinerja guru dinilai secara holistik. *Kedua*, diperlukan kemampuan pedagogi guru yang mengedepankan pada pendekatan heterogen, siswa ikut menentukan kegiatan belajar, pembelajaran berorientasi pada siswa, pembelajaran memanfaatkan teknologi, penggunaan kegiatan kelompok dalam proses pembelajaran, dan pembelajaran berdasarkan level kemampuan siswa (Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, 2021). *Ketiga*, kinerja guru dalam meningkatkan, mengembangkan dan mengelola proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, gembira dan berbobot perlu didukung antara lain: kesiapan dan motivasi siswa dalam mengikuti dan melaksanakan proses pembelajaran, peran serta masyarakat, pengelolaan dan inovasi sekolah. Diharapkan apabila ketiga hal ini dilakukan dapat meningkatkan prestasi hasil belajar peserta didik yang tinggi dan kompetitif serta dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila.

Pada akhir tulisan ini dapat dipahami bahwa. *Pertama*, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dibutuhkan peran keterampilan manajerial kepala sekolah yang menonjol dalam meningkatkan kinerja guru dalam melaksanakan proses

pembelajaran. *Kedua*, keterampilan manajerial kepala sekolah, kinerja guru dalam mengelola proses pembelajaran, pengelolaan dan inovasi sekolah yang baik sangat diperlukan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. *Ketiga*, kinerja guru dalam mengelola proses pembelajaran dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, guru perlu bertindak sebagai fasilitator, fokus pada pengembangan karakter dan penanaman rasa senang belajar serta memiliki kompetensi yang baik yang dapat diwujudkan melalui kinerja guru yang berkualitas.

## Referensi

- Arifin, I. (2007). *Strategi Kepala Sekolah Capai Prestasi Juara UKS Nasional*. Malang: Aditya Media.
- Bafadal, I. (2007). *Sistem Seleksi Kepala Sekolah*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Danim, S. (2002). *Inovasi Pendidikan: Dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*. Cet. I. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Danim, S & Suparno. (2009). *Manajemen dan Kepemimpinan Transformasional Kekepalasekolahan: Visi dan Strategi Sukses Era Teknologi, Situasi Krisis, dan Internasionalisasi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan. (2021). *Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Elsbree, W.S., McNally, H.J., & Wynn, R. (1976). *Elementary School Administration and Supervision*. (3<sup>rd</sup> Edition) New York : American Book Company.
- Ghaleei, A. (2006). *The Principal's Role in Teacher Professional Learning*. Disertasi. Faculty of Education University of Wollongong.
- Hersey, P & Blanchard, K.H. (1976). *Management of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources*. (2<sup>nd</sup> Edition). New Jersey: Englewood Cliffs, Prentice-Hall, Inc.
- Ismail, S., Suhana, S. And Zakiah, Q.Y., (2021). Analisis Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter Dalam Mewujudkan Pelajar Pancasila Di Sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), Pp.76-84. <https://dinastirev.org/JMPIS/article/download/388/264>
- Juliani, A.J. And Bastian, A., (2021). *Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Wujudkan Pelajar Pancasila*. Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Prosidingpps/article/download/5621/4871>

- Katz, R. (1974). *Skills of an effective administrator*, dalam *Harvard Business Review* (online), ([http://telecollege.dcccd.edu/mgmt1374/book\\_contents/1overview/management\\_skills/mgmt\\_skills.htm](http://telecollege.dcccd.edu/mgmt1374/book_contents/1overview/management_skills/mgmt_skills.htm), di akses tanggal 7 Januari 2006).
- Mantja, W. (2007). *Profesionalisme Tenaga Kependidikan: Manajemen Pendidikan dan Supervisi Pengajaran*. Malang: Wineka Media.
- Mazibuko, S.P. (2007). *The Managerial Role of The Principal in Whole-School Evaluation In The Context of Disadvantage Schools In Kwazulu-Natal*. Doctor of Education in the subject Education Management at the University of South Africa.
- Sergiovanni, T.J. & Carver, F.D. (1980). *The School Executive: A Theory of Administration*. (2<sup>nd</sup> Edition). New York: Harper & Row, Publishers.
- Sergiovanni, T.J. (1987). *The Principalship: A Reflective Practice Perspective*. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- Sion, H. (2007). *Hubungan Keterampilan Manajerial Kepala Sekolah dan Kepuasan Kerja Guru dengan Performansi Mengajar Guru*. Dalam Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP), Jilid 14 Nomor 2, Juni 2007. ISSN 0215-9643. Malang: LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan), dan ISPI (Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia) dan UM Press.
- Suprayogo, I. (2007). *Menjadi Manajer Pendidikan Islam* dalam Said, M.M. (Ed.), 2007. *Kepemimpinan: Pengembangan Organisasi, Team Building & Perilaku Inovatif*. Cet. I. Malang: UIN Malang Press.
- Ubben, G.C. & Hughes, L.W. (1992). *The Principal: Creative Leadership for Effective Schools*. Boston: Allyn and Bacon.
- Usman, H. (2008). *Manajemen: Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wiles, K. (1980). *Supervision for Better School*. Dalam Tahalele, J.F., & Sahertian, P.A. Malang: Sub Proyek Penulisan Buku Pelajaran Proyek Peningkatan/Pengembangan Perguruan Tinggi IKIP Malang.

## Profil Penulis



Dr. Karwanto, M.Pd. Lahir di Indramayu Jawa Barat, 16 Mei 1977. Anak ketiga dari sembilan bersaudara ini menamatkan Program Strata 1 di IAIN Walisongo (Universitas Islam Negeri Walisongo) Semarang Jurusan Pendidikan Agama Islam, Program Minor Pendidikan Matematika (2000), Program Magister Program Studi Manajemen Pendidikan di Pascasarjana Universitas Negeri Semarang (2004) dan Program Doktor Program Studi Manajemen Pendidikan di Pascasarjana Universitas Negeri Malang (UM) (2009). Penulis menekuni bidang ilmu Manajemen Pendidikan dan sub bidang ilmu lainnya meliputi Kepemimpinan Pendidikan dan Keterampilan Manajerial, Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan, dan Manajemen sekolah. Saat ini tercatat sebagai Dosen Tetap Jurusan Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) (2010-sekarang). Penulis dapat dihubungi melalui Email. [karwanto@unesa.ac.id](mailto:karwanto@unesa.ac.id). Pengalaman penulisan publikasi ilmiah dapat dilihat pada Scopus ID: 57211533290. Sinta ID: 6010248. Orchid ID: 0000-0002-9062-7602 dan Google Scholar: [uaxbD1wAAAAJ](https://scholar.google.com/citations?user=uaxbD1wAAAAJ).



## **Bagian II**

# **Memaknai Merdeka Belajar dan Kemerdekaan Pendidik Berlandaskan Nilai-nilai Pancasila**

**Herman**

**Universitas HKBP Nommensen**

Pada awal tahun 2021, sekitar di bulan Maret 2021, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Markariem, secara resmi meluncurkan sebuah ide dan gagasan baru dalam dunia Pendidikan dalam bentuk Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (atau yang lebih biasa dikenal dengan istilah MBKM). Ada tantangan dan peluang untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian dan kebutuhan mahasiswa di Kampus Merdeka. Mahasiswa juga dapat mengembangkan kemandirian mereka dalam mengejar pengetahuan dengan berinteraksi dengan situasi dunia nyata dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan dan masalah dunia nyata. Program MBKM ini memuat tentang hak mahasiswa dalam belajar dan menguasai serta menambah pengalaman serta ilmu dari berbagai keilmuan dengan memilih mata kuliah yang mereka inginkan secara bebas yang bertujuan untuk mempersiapkan diri mereka memasuki dunia kerja setelah menyelesaikan studinya dari kampus. Tentu merdeka belajar perlu disikapi dengan lebih baik dan paham

### **Merdeka Belajar**

Merdeka Belajar bertujuan untuk memberikan kebebasan dan otonomi lembaga pendidikan, serta kebebasan dari birokrasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang memberatkan, dan mahasiswa bebas untuk menekuni bidang yang diminatinya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan kebijakan pemerintah yang dikenal dengan nama Kampus Merdeka bertujuan untuk mendorong mahasiswa mempelajari berbagai disiplin ilmu yang akan berguna ketika mereka memasuki dunia kerja. Mahasiswa di Kampus Merdeka dapat memilih dan memilih kelas yang ingin mereka ambil. Pembelajaran Merdeka

bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk belajar jauh dari kampus. Kemendikbud berkomitmen untuk melanjutkan konsep tersebut guna mengembangkan calon pemimpin masa depan yang berkualitas.

Presiden Joko Widodo memiliki tujuan agar Kampus Merdeka dapat membantu membangun sumber daya manusia Indonesia. Perubahan peraturan menteri adalah semua yang diperlukan untuk mewujudkan konsep Kampus Merdeka. Ide Kampus Merdeka akan segera diwujudkan dalam rangka meningkatkan standar pendidikan. Setelah mengajukan program ini, mahasiswa akan memiliki dua semester fleksibilitas tanpa batas untuk mengejar minat di luar kelas. Konsep ini pada dasarnya mendorong siswa untuk berinteraksi dengan lingkungannya di luar kelas. Akibatnya, siswa secara tidak langsung akan diajak untuk belajar bagaimana hidup bermasyarakat. Pada dasarnya, kebijakan tersebut bertujuan untuk mengekspos mahasiswa pada dunia kerja di usia muda. Alhasil, setelah lulus dari perguruan tinggi, mahasiswa akan jauh lebih siap bekerja. Menteri Nadiem pada dasarnya membuat terobosan dengan mendorong mahasiswa untuk belajar di luar kampus selama dua semester. Penyelenggaraan Kampus Merdeka merupakan upaya untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan diambil nantinya. Tujuan diluncurkannya Kampus Merdeka adalah agar mahasiswa mampu menguasai berbagai ilmu yang akan berguna di dunia kerja nantinya.

### **Kemerdekaan Pendidik**

Setelah peluncuran gagasan Kampus Merdeka dimana mahasiswa diberikan kemerdekaan (dalam arti kebebasan) dalam belajar, muncullah sebuah pertanyaan baru. Bagaimana dengan kemerdekaan dari pendidik? Tentu kata pendidik ini mengerucut dan mengarah kepada dosen yang mengajar di sebuah Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta. Istilah Kampus Merdeka diawal telah dijelaskan bahwa memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidik, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Tentu memaknai istilah dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit masih menjadi tanda tanya besar. Dalam kacamata saya pribadi sebagai seorang penulis, saya memaknai bahwa seorang pendidik diberikan kebebasan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yang berhubungan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian.

Pada Tri Dharma Pertama yakni Pengajaran, seorang tenaga pendidik diberikan kebebasan dalam bereksplorasi baik dan mengajar menggunakan metode yang dianggap baik untuk mencapai keberhasilan dalam suatu pembelajaran. Sejak Covid-19 masuk ke Indonesia di bulan Maret 2020, semua elemen dalam

pendidikan menjadi kewalahan dalam mengajar dan melanjutkan proses pembelajaran yang tidak tatap muka (dikenal dengan istilah online/daring). Semua tenaga pendidik menjadi harus adaptasi diri dalam pembelajaran secara daring menggunakan berbagai aplikasi seperti Zoom Meeting, Google Meet, Cisco Webex, dan aplikasi lainnya yang dapat mendukung proses pembelajaran dan hasilnya tercapai maksimal. Oleh sebab itu, para pendidik diberikan kebebasan dalam pelaksanaan pengajaran sesuai dengan motto dari Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)

Untuk poin Penelitian sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi menjadi poin terpenting selain poin pengajaran. Selama ini penelitian selalu menjadi unsur utama bagi dosen dalam pengajuan untuk kenaikan jabatan fungsional (jafung) baik dari tingkat Asisten Ahli (AA), Lektor, Lektor Kepala (LK) maupun Guru Besar (GB). Selama ini yang menjadi topik utama dan perdebatan dalam penelitian adalah keharusan pendidik/dosen dalam menerbitkan hasil penelitian mereka. Sebagai contoh, seorang pendidik/dosen harus menerbitkan karyanya ke Jurnal Internasional Bereputasi baik yang terindeks Scopus maupun Web of Science (WoS). Syarat terbit artikel di Scopus atau WoS inilah yang menjadi syarat utama untuk kenaikan ke Lektor Kepala dan Guru Besar yang dianggap berlebihan. Selama ini kita dijajah dan menjadi bahan sapi perahan dalam proses penerbitan ke Scopus maupun WoS yang terkadang harus dibayar begitu mahal. Dan belum lagi tiba-tiba jurnal tersebut hilang (discontinued) dari baik Scopus atau WoS. Namun dibalik semua itu, tetap menerbitkan tulisan/karya ke Jurnal Internasional Bereputasi (baik Scopus maupun WoS) merupakan hal penting karena itu yang menjadi tolak ukur dalam sebuah penelitian yang diakui dan dibaca oleh semua orang. Oleh sebab itu, dosen wajib merdeka dan bebas dalam menerbitkan karya mereka sesuai kebutuhan pendidik masing-masing. Suka tidak suka, pendidik/dosen wajib membuat penelitian dan dipublikasikan baik di jurnal Nasional biasa, Jurnal Nasional Terakreditasi, Jurnal Internasional biasa maupun Jurnal Internasional Bereputasi.

Tri Dharma terakhir adalah Pengabdian kepada Masyarakat atau yang lebih akrab dengan istilah PkM. PkM ini menjadi salah satu Tri Dharma yang wajib dilaksanakan oleh para pendidik/dosen dalam menyalurkan ilmu dan pengetahuan kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencerdaskan dan memajukan kehidupan bermasyarakat. Program Merdeka yang diluncurkan ini bahkan mewajibkan mahasiswa melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ke tempat-tempat yang lebih terpencil khususnya di desa seperti KKN, magang, PPL/PKL dan lain sebagainya. Tentu harapannya dosen juga dapat menerapkan pelaksanaan PkM berbasis program MBKM dan dapat menyalurkan ilmu dan pengetahuan untuk kesejahteraan masyarakat dan juga negara.

## Landasan Nilai-nilai Pancasila dalam Merdeka Belajar

Program MBKM yang telah diluncurkan dan berorientasi dengan kebebasan dan kemerdekaan dalam belajar, tentu membuat banyak pihak khawatir akan dampak buruk dari kebebasan yang tidak terarah. Oleh sebab itu, perlu kembali semua kemerdekaan yang digaungkan tersebut diimplementasikan dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang merupakan semboyan dan panutan dari negara kita, Indonesia. Bapak Pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan bahwa “Pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya sejak lahir, sedang merdekanya hidup batin itu terdapat dari pendidikan. Manusia merdeka yaitu manusia yang hidupnya lahir batin ... tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar akan kekuatannya sendiri”. Dari kutipan penggalan kalimat, kita dapat memaknai bahwa Merdeka Belajar yang sekarang lagi gencar-gencarnya ini wajib berlandaskan nilai-nilai Pancasila agar generasi penerus bangsa ini menjadi generasi yang berprofil nilai-nilai Pancasila seperti

1. Beriman, berakhlak mulia dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (TYME)
2. Memiliki sifat dalam mau mengamalkan kebhinnekaan secara meng-*global* seperti tetap melestarikan budaya lokal serta memiliki rasa berkeadilan sosial yang rukun dan baik
3. Mempunyai sikap yang suka membantu dalam perwujudan gotong royong antar sesama dalam kolaborasi, mau berbagi dan kepedulian kepada sesama manusia
4. Mampu me-*manage* diri dengan baik dalam menciptakan sikap kemandirian
5. Memiliki karakter dan sifat yang kritis dalam memecahkan setiap permasalahan serta kreatif dalam menciptakan/menghasilkan karya tanpa melakukan jiplakan (plagiat).

## Kesimpulan

Dengan adanya program MBKM dalam merdeka belajar bagi mahasiswa maupun kemerdekaan pendidik, maka diharapkan tujuannya dapat tercapai yaitu pendidik yang kreatif dan juga terampil yang dapat menghasilkan *fresh-graduation* (lulusan) yang memiliki kemampuan sesuai tuntutan dunia industri, dunia usaha, kemajuan IPTEK, dan kritis terhadap segala masalah dinamika masyarakat yang sesuai dengan perkembangan zaman yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang merupakan cerminan dan semboyan dari negara kita, Indonesia.

## Profil Penulis



Herman, lahir pada tanggal 31 Maret 1986 di kota Pematangsiantar. Dia memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) dan Magister Pendidikan dalam bidang Pendidikan Bahasa Inggris. Gelar Doktor (Dr.) diperoleh dalam lingkup Linguistik Terapan Bahasa Inggris (LTBI) pada tahun 2020 di Universitas Negeri Medan. Disamping kegiatan sehari-hari dalam mengajar, Herman juga aktif dalam menulis di berbagai Jurnal baik Nasional, Nasional Akreditasi maupun Jurnal Internasional biasa dan Jurnal Internasional Bereputasi. Pada tahun 2021, ia berhasil lulus uji sertifikasi dan memperoleh predikat Penulis dan Editor Profesional berstandar BNSP. Ia juga menjadi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) pada Program Kampus Mengajar Angkatan II pada tahun 2021. Selain aktivitas dalam menerbitkan tulisan, ia juga menjadi Editorial Board dan Reviewer di beberapa jurnal terakreditasi SINTA dan jurnal internasional. Ia juga ikut aktif dalam menulis buku seperti buku monograf dan juga buku Antologi. Herman dapat dihubungi melalui *e-mail*: herman@uhn.ac.id || FB: Herman Fukada || IG: @Herman Fukada.

# Adaptasi Kurikulum Arsitektur Terhadap Kebijakan MBKM

Andiyan  
Universitas Faletihan

## Latar Belakang

- Kegiatan pariwisata tanpa wawasan ekowisata akan memberi dampak negative berupa kerusakan lingkungan, terpengaruhnya budaya lokal secara tidak terkontrol.
- berkurangnya peran masyarakat setempat dan persaingan bisnis yang mulai mengancam lingkungan, budaya dan ekonomi masyarakat setempat.
- Kunci keberhasilan ekowisata dalam sebuah daerah terletak pada pemahaman pemangku kepentingan di daerah terhadap konsep pariwisata berbasis ekowisata tersebut.
- Pengembangan ekowisata utamanya pada KBI, menjadi indikator kinerja UF untuk mengakselerasi transformasi pendidikan sehingga menjadi katalisator transformasi ekonomi untuk mampu berdaya saing global di era digital, dan mencapai visi UF.
- Kampus Merdeka merupakan suatu program yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam rangka menyiapkan mahasiswa dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dan kemajuan teknologi di dunia Kerja.
- Peran Perguruan tinggi untuk merencanakan dan melaksanakan metode yang Inovatif dalam pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap.
- Program kegiatan Kampus Merdeka sebagai upaya dalam peningkatan ***Student Centered learning*** sehingga setiap mahasiswa mampu mengembangkan inovasi, kreatifitas, dan kepribadian dalam memenuhi kebutuhan yang menjadi permasalahan krusial di masyarakat.
- Peningkatan kolaborasi antar lembaga dan industri dalam hal riset dan penyelesaian yang nantinya mampu diimplementasikan dengan baik.

## **Tujuan dan Sasaran**

1. Meningkatkan potensi, inovasi, dan wawasan untuk membangun kualitas mahasiswa yang unggul dalam menghadapi persaingan global.
2. Sebagai wadah kegiatan di luar kampus yang bertujuan untuk memahami kondisi dan situasi lapangan terutama dunia praktik perencanaan dan pelaksanaan.
3. Membangun hubungan antara lembaga, program studi, universitas dan perusahaan.
4. Menjadi program yang mampu menjembatani dunia akademis dengan kondisi lapangan yang bermuara pada pengembangan riset dan pengembangan Desa di Kawasan Indonesia Barat.
5. Pengembangan kekayaan Arsitektur khususnya di wilayah Indonesia Barat sebagai wujud pengembangan Pusat Studi Arsitektur Indonesia Barat.
6. Meningkatkan sinergi antar tenaga pendidik, profesional, mahasiswa dan masyarakat dalam meningkatkan nuansa akademik yang mampu diimplementasikan.

## **Indikator Kinerja Utama (IKU)**

**IKU 1** : Lulusan Mendapatkan Pekerjaan yang Layak

**IKU 2** : Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus

**IKU 3** : Dosen Berkegiatan di Luar Kampus

**IKU 4** : Praktisi Mengajar di Dalam Kampus

**IKU 5** : Hasil Kerja Dosen Digunakan Oleh Masyarakat Atau Mendapat Rekognisi Internasional

**IKU 6** : Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia

**IKU 7** : Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif

**IKU 8** : Program Studi Berstandar Internasional

## **Indikator Kinerja Tambahan (IKT)**

Berwawasan Ekowisata

## **Program Kampus Merdeka**

- **Wastu Student Exchange Program**

Pertukaran pelajar dengan PT di Indonesia khususnya di wilayah Kawasan Barat Indonesia (KBI), diselenggarakan untuk membentuk sikap mahasiswa yang termasuk di dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020.

- **Power of Experience Program**  
Magang/praktik kerja dibagi menjadi dua yaitu perencanaan dan pelaksanaan.
- **Village Development Program**

Aktivitas yang dirancang untuk membantu pengembangan desa di KBI dengan bentuk kegiatan seperti riset desa dan proyek di desa.

### 1. Faletahan Architecture Student Exchange Program

- Pertukaran Pelajar
- Joint Workshop (1)  
aktivitas:  
Pertukaran Pelajar
  - Mitra: Prodi Arsitektur, ITB, UNPAR, UPI, UNLA, ITENAS, UK, UNIKOM, UKM
  - Jumlah mhs: 10 mhs + 2 Dosen pembimbing UF +1 Tutor/pendamping dari mitra
  - Durasi 1 semester (4-6bulan)
  - Target sasaran mahasiswa Semester 3-6
- Joint Workshop 1 (material bambu, Bandung)
  - Mitra: Konsultan dan praktisi bamboo dari dosen UF
  - Jumlah mhs: 20 mhs
  - Durasi 2 bulan
  - Target sasaran Mahasiswa Semester 3-6

### Sasaran IKU

**IKU 1:** Lulusan Mendapatkan Pekerjaan yang Layak

**IKU 2:** Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus

**IKU 7:** Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif

### Faletahan Architecture Student Exchange-Wastu

Latar belakang

- Tingkat pertukaran pelajar di UF masih sangat rendah. Kegiatan didominasi diskusi presentasi seperti studio perancangan. Pertukaran pelajar yang dilaksanakan dengan mitra nasional dan internasional dapat membentuk inovasi, potensi, wawasan dan kualitas mahasiswa dalam menghadapi persaingan global.



- Kegiatan join workshop masih jarang dilakukan, sebab belum adanya kesiapan dan belum mamahami material serta implementasinya. Aktivitas ini dapat dilakukan dengan cara joint workshop dengan mitra (PT serta konsultan).
- **WASTU** yang berarti tata bangunan dalam bahasa sanskerta merupakan salah satu aktivitas untuk meningkatkan wawasan dan skill mahasiswa Prodi Arsitektur dan PT mitra. Pertukaran pelajar dengan PT di Indonesia khususnya di wilayah KBI, diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa terhadap kasus nyata serta membentuk sikap mahasiswa yang termasuk di dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020.
- Selain PT di Indonesia, aktivitas ini juga bertujuan untuk melanjutkan & memperluas kerja sama dengan 2 mitra luar negeri yaitu Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

### **Tujuan dan Sasaran**

- Pertukaran pelajar/ mahasiswa bertujuan untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya wawasan mahasiswa terhadap nilai kebudayaan dan keberagaman suku bangsa.
- Sebagai jembatan dalam mengenalkan keberagaman nusantara melalui pemahaman terhadap nilai-nilai luhur.
- Sebagai landasan dalam peningkatan ilmu pengetahuan antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri Meningkatkan persentase lulusan S1 yang berkualitas dan mampu bersaing secara global.
- Meningkatkan persentase lulusan S1 yang menghabiskan paling sedikit 20 SKS diluar kampus Meningkatkan kemitraan prodi dengan lembaga, perusahaan, dan perguruan tinggi yang kredibel.
- Meningkatkan persentase mata kuliah yang menerapkan team-based project ,khususnya dengan mahasiswa dari kampus lain.
- Meningkatkan persentase mata kuliah yang berlatar belakang studi kasus.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Permendikbud nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi – 2020

Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pembelajaran di Luar Program Studi di Lingkungan UF (atau yang lebih populer disebut sebagai Kebijakan Merdeka Belajar)

## Profil Penulis



Andiyan, lahir di Bandung 33 tahun yang lalu. S1 Teknik Arsitektur dilanjutkan S2 Magister Teknik Sipil Pendidikan ini menekuni bidang ilmu Sipil dan sub bidang Manajemen Rekayasa Konstruksi. Dosen dan Kaprodi di Prodi Arsitektur FST Universitas Faletehan, ia juga tengah berkiprah sebagai praktisi di bidang Konsultan Arsitektur dan *Engineering* tahun 2006, Serta aktif di organisasi profesi dimana sebagai Wakil III ATAKI Jawa Barat, Wakil Sekretaris INTAKINDO Jawa barat. Menjadi *Chief Editor* pada Jurnal Arsitektur *Archicentre* serta Assoc Editor *Civilla* : Jurnal Teknik Sipil Universitas Islam Lamongan SINTA 5 dan reviewer di beberapa jurnal nasional terakreditasi Sinta 3,4 dan 5 dan Nasional tidak terakreditasi serta aktif menulis buku di genre Teknik khususnya arsitektur, mulai referensi, *bookchapter*, dan buku populer lainnya. Andiyan dapat dihubungi melalui *e-mail*: [andiyanarch@gmail.com](mailto:andiyanarch@gmail.com) || IG: @andiyanarch

# **MENGAKTUALISASI PANCASILA DENGAN MEMBANGUN KOMUNITAS INKLUSIF DI KALANGAN GENERASI MUDA**

**Lukas Dwiantara, ASM Marsudirini Santa Maria Yogyakarta**

Perjalanan bangsa Indonesia, baik dalam meraih kemerdekaan maupun mengisi kemerdekaan tidak bisa dipisahkan dari perjuangan dan peran serta generasi muda. “Generasi muda adalah harapan bangsa”, kiranya bukan ungkapan yang berlebihan karena sejarah dan pengalaman empiris telah membuktikan atas peran besar generasi muda dalam proses pembangunan bangsa dari waktu ke waktu. Generasi mudalah penerus kepemimpinan bangsa, sekaligus merekalah yang akan menentukan arah dan langkah dalam membawa kejayaan bangsa dan negara. Lebih dari itu, orang muda memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan mempertahankan empat konsensus dasar berbangsa dan bernegara yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang senantiasa menjadi suluh dan pandu untuk menjawab problema dan tantangan berbangsa kini dan masa datang.

Dalam memikul tanggung jawab besar itu, tentu generasi muda tidak berada dalam ruang vakum, namun senantiasa dihadapkan pada tantangan-tantangan nyata seiring dengan dinamika problema dalam hidup berbangsa dan bernegara. Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut dibutuhkan dukungan habitus dan milieu yang kondusif.

## **Tantangan dan Arah Penguatan Karakter**

Persaudaraan tulus yang saling menghargai, saling menghormati, menjunjung harkat dan martabat, dan penuh tenggang rasa di antara anak bangsa yang tumbuh alami, yang membawa ketenangan dan kedamaian dalam hidup bersama, serasa kian hari kian menjauh dan memudar, serta semakin mengalami distorsi karena tergerus dan terkikis atas hasrat dominasi oleh sebagian warga bangsa berliterasi keberagaman yang kurang memadai. Gerakan dan aksi intoleransi, diskriminasi, persekusi, dan negasi, yang menafikan dan menihilkan hakiki nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan semakin nyata.

Inilah tantangan riil di depan mata bagi generasi muda, sekaligus membutuhkan peran besar orang muda untuk turut ambil bagian dalam menghadapi dan memecahkan persoalan/masalah bangsa. Untuk menghadapi persoalan bangsa itu dibutuhkan generasi muda yang konsisten mengedepankan kepentingan bersama; mengutamakan keutuhan bangsa dan negara dalam bingkai NKRI; menjaga dan menghidupi hakiki ideologi Pancasila; dan senantiasa menghargai perbedaan dan keberagaman serta merawat kebersamaan dan persaudaraan dengan menjunjung tinggi nilai dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Tak dapat dipungkiri, tugas dan tanggung jawab orang muda itu tidak ringan, terlebih sebagian orang muda telah dan berpotensi menjadi bagian persoalan bangsa itu sendiri. Namun demikian, tetap dijaga optimisme, mengingat masalah bangsa itu akan dihadapi dan diatasi bersama dengan bersatu padu oleh segenap elemen masyarakat yang ada. Selain itu, masih besar orang muda yang mencitakan keutuhan NKRI, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok, setia pada Pancasila, menjunjung nilai Bhinneka Tunggal Ika, serta hasrat yang mengedepankan kejayaan bangsa dan negara Indonesia tercinta ini.

Untuk mampu turut serta ambil bagian dalam menghadapi dan memecahkan masalah bangsa, sekaligus membebaskan diri dari bagian persoalan bangsa, dibutuhkan habitus personal yang memadai, yakni pandangan hidup (*world view*) dan karakter personal yang menjunjung tinggi dan menghidupi nilai religiusitas, nasionalisme, integritas, kemandirian, dan gotong royong. Karakter tersebut lahir dan bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Generasi muda yang dibutuhkan, sekaligus yang mampu turut ambil bagian dalam mengatasi persoalan bangsa hanyalah Generasi Pancasila, yakni generasi muda yang memiliki integritas dalam menjunjung dan menghidupi nilai-nilai Pancasila di dalam hidup bersama, berbangsa, dan bernegara.

Untuk mampu membangun Generasi Pancasila demikian dibutuhkan proses penguatan *olah rasa* yang baik. Yudi Latif (2020) menegaskan bahwa melalui *olah rasa*, memungkinkan generasi muda mengasah daya afektifnya, yang dapat memperkuat kepekaan estetik, kehalusan perasaan, keindahan budi pekerti, kepekaan empati dan solidaritas sosial, sensitivitas daya spritualitas, ketajaman rasa keadilan, semangat kebangsaan, dan gotong royong. Selain dibutuhkan penguatan *olah rasa*, dibutuhkan milieu (lingkungan) yang kondusif, yang mampu mengasah daya afektif dan mampu menumbuhkan Generasi Pancasila. Membangun komunitas inklusif di kalangan kaum muda kiranya menjadi milieu yang mampu memperkuat karakter pancasilais dan mengembangkan Generasi Pancasila, sekaligus untuk mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila oleh orang-orang muda pada tataran praksis.

## **Komunitas Inklusif**

Komunitas/masyarakat inklusif merupakan masyarakat yang memposisikan dirinya ke dalam posisi yang sama dengan orang lain atau kelompok lain sehingga komunitas inklusif mengedepankan relasi egaliter dan empati dengan berusaha memahami perspektif orang lain atau kelompok lain dalam memandang sebuah realitas dan menyelesaikan suatu permasalahan. Komunitas inklusif juga menghargai dan menghormati keragaman dan perbedaan, yang diakomodasinya dalam berbagai norma dan tatanan kehidupan bersamanya. Lebih dari itu, komunitas inklusif senantiasa membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang terbuka dan menjunjung tinggi kebersamaan, keguyuban, hidup harmoni, dan hasrat melibatkan warga lain, dengan tanpa memandang dan mempertimbangkan berbagai perbedaan latar belakang apapun, baik agama, ras, etnik, budaya, status sosial ekonomi, kemampuan, kondisi, dan sekat-sekat lainnya.

Bangunan komunitas inklusif inilah yang krusial untuk senantiasa dibangun dan diperkuat terus menerus di antara dan di lingkungan generasi muda secara lintas batas, baik yang dilakukan secara personal, komunal, maupun institusional, yang diaktualisasi dalam tataran aksi, selaras dengan tantangan, problema, dan harapan warga dan masyarakat lintas batas. Melalui komunitas inklusif ini generasi muda mampu membuka ruang-ruang perjumpaan dan kebersamaan di tengah keberagaman, sekaligus mengasah olah rasa atas nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Komunitas inklusif menjadi milieu untuk mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata dalam sebuah kebersamaan yang berlatar belakang kebhinekaan.

Sebagai ilustrasi empiris, ketika Provinsi Kongregasi Carolus Borromeus/CB (biarawati Katolik) membuka shelter Syantikara (Yogyakarta), sebagai tempat untuk membantu masyarakat umum penyintas Covid 19 (siapapun yang tidak bisa melakukan isolasi mandiri di rumah karena segala macam keterbatasannya), anak-anak muda yang berasal dari beberapa organisasi: Srikandi Lintas Iman, Gusdurian, Solidaritas Perempuan, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), dan Universitas Sanata Dharma (USD) bergabung dan bersatu padu mengelola aktivitas kasih itu dan melayani penyintas Covid 19, lintas batas. Sungguh pengalaman empiris yang menumbuhkan optimisme bahwa rasa persaudaran dan solidaritas sosial antar anak bangsa ini masih ada, utamanya di kalangan anak muda yang berlatar belakang perbedaan dan keragaman.

Guna mengembangkan dan memperkuat komunitas inklusif di kalangan generasi muda pun bisa dengan memperluas lingkup dan aktivitas kebersamaan. Selain dalam lingkup dan aktivitas sosial, juga bisa dikembangkan ke lingkup dan aktivitas ekonomi, pendidikan, dan budaya. Melalui berbagai aktivitas tersebut, generasi muda selain mampu mengasah olah pikir untuk melihat dan mengidentifikasi problema, tantangan, dan harapan nyata masyarakat, juga mampu mengasah olah rasa (simpati dan empati), yang kemudian melakukan aksi bersama. Selain itu, melalui perjumpaan itu akan mampu membangun kognisi bersama, yang kemudian akan menumbuhkan dan membangun sikap saling mengerti, saling memahami, saling empati, saling menghargai, dan saling percaya. Muaranya, sikap saling curiga pun terhapus dengan sendirinya dan menghasilkan buah solutif yang sinergis atas problema, tantangan, dan harapan bersama.

Ruang perjumpaan dan kebersamaan dalam komunitas inklusif pun dimungkinkan sebagai media belajar dan berbagi kebaikan satu sama lain. Berbagi kebaikan tidak sekadar dan sebatas dalam bentuk materi semata, namun dimungkinkan pula dalam bentuk *sharing* pengetahuan dan keterampilan selaras dengan kebutuhan masing-masing pihak.



## Profil Penulis



Lukas Dwiantara. Pendidikan S1 dan S2 diselesaikan di FISIPOL Universitas Gadjah Mada, Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Staf Pengajar Prodi Sekretari/Administrasi Perkantoran, Akademi Sekretari dan Manajemen Marsudirini (ASMI) Santa Maria Yogyakarta, sejak tahun 1995. Karya publikasi: beberapa buku referensi tentang Kesekretarisan, Manajemen, Organisasi, Komunikasi, Etika, dan Pengembangan Diri; hasil penelitian yang dipublikasikan di beberapa jurnal nasional; artikel ilmiah populer yang telah publikasikan di harian Bisnis Indonesia, Harian Jogja, dan Majalah PRABA (kontributor tetap kolom Opini dan Wacana sampai saat ini). Aktivitas lain: fasilitator Diklat bidang Kesekretarisan, Manajemen Perkantoran, dan Public Relations untuk Institusi Pemerintah, Swasta, dan Organisasi Nirlaba. E-mail: lukasdwiantara@gmail.com

# **BATASAN NILAI NILAI PANCASILA DALAM MERDEKA BELAJAR DI KAMPUS MERDEKA**

Oleh:

**Bambang Panji Gunawan**

**bambang.panji@dosen.umaha.ac.id**

**UNIVERSITAS MAARIF HASYIM LATIF (UMAHA)**

## **BATASAN NILAI NILAI PANCASILA**

Pasal 2 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang undang Nomor 15 Tahun 2019 menyatakan bahwa PANCASILA merupakan sumber dari segala sumber hukum; ini memberikan makna bahwa secara materiil. Substansi dari segala bentuk peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah dengan sila silanya yang tertuang dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat, yaitu 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila sila Pancasila itu terdiri dari nilai-nilai dan norma-norma yang positif sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia, dan nilai serta norma yang bertentangan, pasti akan ditolak oleh Pancasila,.... (Aloysius Hardoko). Nilai nilai yang ada pada butir butir sila ke dua pengamalan Pancasila diantaranya ; - pada poin 6 berbunyi: menjunjung tinggi nilai nilai kemanusiaan dan pada poin 7 berbunyi : gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.

Nilai-nilai yang digali dari budaya bangsa Indonesia sebagai kekayaan luhur yang ada sejak bangsa Indonesia ada. Oleh sebab itu, sebagai sebuah bentuk kekayaan bangsa berdasarkan penjelasan di atas pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir/pemikiran yang sedalam-dalamnya dari

bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia ( Dardji Darmodiharjo, 1988)

Sejarah Indonesia telah mencatat bahwa di antara tokoh perumus Pancasila itu ialah, Mr.Mohammad Yamin, Prof Mr Soepomo, dan Ir Soekarno. Mereka telah berjasa dalam merumuskan dan menggali nilai-nilai luhur budaya bangsa yang terpendam menjadi sebuah falsafah hidup bagi bangsa Indonesia. Sehingga dapat dipahami, mengapa Pancasila itu sakti dan selalu dapat bertahan dari segala guncangan di negara ini.

Merdeka belajar dalam kampus merdeka tidak berarti adanya ***kebebasan yang tak terbatas (absolut), tetapi merdeka belajar yang tidak tak terbatas***, nilai-nilai dasar bangsa Indonesia itulah yang membatasi dan menjadi batasan dalam menjalankan proses pembelajaran pada program merdeka belajar di kampus merdeka. Program merdeka belajar memang menjadi hak bagi mahasiswa untuk dijalankan dan menjadi kewajiban bagi perguruan tinggi selaku pelaksana dalam kampus merdeka.

Beberapa program dalam pelaksanaan merdeka belajar - kampus merdeka diharapkan dapat dilakukan dengan sistem pembelajaran dalam pendidikan yang tidak mengesampingkan nilai-nilai dasar dalam berbangsa dan bernegara. Hasil (Output) yang dari proses pembelajaran merdeka belajar dapat mencetak sumber daya manusia yang mempunyai wawasan IPTEK sekaligus wawasan kebangsaan Indonesia.

## **MERDEKA BELAJAR DI KAMPUS MERDEKA**

Pendidikan merupakan bagian terpenting dari kehidupan, yang harus selalu sejalan dengan perkembangan zaman. Pendidikanlah yang akan menjadi bekal dalam kehidupan manusia dalam menghadapi berbagai tantangan zaman yang terus berkembang. Hal ini sejalan dengan konsep dalam ajaran Islam bahwa menuntut ilmu itu seumur hidup, oleh karena itu sebagai seorang muslim selain diperintahkan untuk menuntut ilmu, kita juga diperintahkan untuk mengamalkan, serta mengajarkan ilmu.

Pada masa sekarang, zaman telah semakin berubah yang ditandai dengan arus kemajuan teknologi yang semakin canggih hingga dapat menciptakan era yang semakin mengglobal serasa dunia ini tanpa batas. Oleh karenanya pendidikan tak boleh ketinggalan zaman, pendidikan harus sejalan seiring dengan setiap fase kehidupan yang terus berkembang, yang salah satunya dilakukannya



melalui sistem pendidikan merdeka belajar yang tidak tak terbatas agar perubahan yang diharapkan dapat ke arah yang lebih baik.

Program Merdeka belajar - Kampus merdeka adalah merupakan kegiatan umum kemanusiaan dalam bidang pendidikan yang diharapkan ke depannya dapat mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan siap menghadapi situasi yang selalu berubah.

Perguruan tinggi diharapkan mampu melakukan inovasi inovasi dalam setiap proses pembelajarannya Yakni pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa agar mendukung tercapainya lulusan yang berkualitas yang siap menghadapi situasi zaman yang terus berubah. Pemerintah juga mengambil fungsi dalam pembaharuan pendidikan, dan disinilah pemerintah menciptakan konsep kampus merdeka belajar yang memberikan kebebasan selama tiga semester untuk melakukan tindakan yang membutuhkan pengalaman belajar maupun pengalaman sosial, dengan tidak menyampingkan teknologi dan tiga semester ini dilakukan diluar program studi.

Hal ini dilakukan untuk dapat melahirkan lulusan terbaik dari perguruan tinggi yang akan terjun menjadi agen perubahan terbesar dalam kemajuan peradaban. Mahasiswa tidak hanya menjadi lulusan terbaik yang pandai dalam berteori akan tetapi mampu merealisasikan teori. Terjun kelapangan dengan bekal ilmu yang dalam untuk terobosan yang relevan, demi kemajuan pendidikan yang tidak pernah berkesudahan. Untuk dapat terlibat dalam kebijakan ini harus mahasiswa yang berasal dari program studi yang terakreditasi, dan aktif yang terdaftar pada PDDikti.

Bentuk kegiatan umum pada konsep kampus merdeka ialah: pertukaran pelajar, magang, Asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, proyek independen, membangun desa/kuliah kerja nyata tematik (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).

Adapun pokok kebijakan pemerintah terkait dengan kampus merdeka belajar sebagai terobosan terbaru ialah:

- a. Pembukaan program studi baru dengan arahan kebijakan saat ini:
  - 1) PTN dan PTS diberi otonomi untuk membuka prodi baru jika:
    - a) Perguruan tinggi tersebut memiliki akreditasi A dan B
    - b) Prodi dapat diajukan jika ada kerjasama dengan mitra perusahaan, organisasi nirlaba, institusi multilateral, atau universitas Top 100 ranking QS
    - c) Prodi baru tersebut bukan di bidang kesehatan dan pendidikan

- 2) Kerja sama dengan organisasi mencakup penyusunan kurikulum, praktik kerja, dan penempatan kerja. Kementerian akan bekerja sama dengan PT dan mitra prodi untuk melakukan pengawasan.
  - 3) Prodi baru tersebut otomatis akan mendapatkan akreditasi C prodi baru yang tengah diajukan oleh PT berakreditasi A dan B akan otomatis mendapatkan akreditasi C dan BAN-PT
  - 4) Tracer studi wajib dilakukan setiap tahun.
- b. Sistem akreditasi perguruan tinggi dengan arahan kebijakan:
- 1) Akreditasi yang sudah ditetapkan oleh BAN-PT tetap berlaku 5 tahun dan akan diperbaharui secara otomatis. Perguruan tinggi yang terakreditasi B atau C dapat mengajukan kenaikan akreditasi kapanpun secara sukarela untuk menjadi badan hukum tanpa ada akreditasi minimum
  - 2) PTN dapat mengajukan
  - 3) PTN dapat mengajukan
  - 4) Peninjauan kembali akreditasi akan dilakukan BAN-PT jika ada indikasi penurunan mutu, misalnya:
    - 3) Adanya pengaduan masyarakat (disertai dengan bukti yang konkret)
    - 4) Jumlah pendaftar dan lulusan dari PT/Prodi tersebut menurun drastis lima tahun berturut-turut (ketentuan lebih lanjut tentang penurunan kualitas akan diatur melalui peraturan Dirjen terkait)
  - 5) Akreditasi A akan diberikan bagi prodi yang berhasil mendapatkan akreditasi internasional. Akreditasi internasional yang diakui akan ditetapkan melalui keputusan menteri.
  - 6) Pengajuan re-akreditasi PT dan Prodi dibatasi paling cepat 2 tahun setelah mendapatkan akreditasi yang terakhir kali. Tracer study wajib dilakukan setiap tahun
- c. Perguruan tinggi negeri badan hukum, dengan arahan ke depannya:
- 1) Persyaratan untuk menjadi BH (Badan Hukum) dipermudah bagi PTN BLU (Badan Layanan Umum) & Satker (Satuan Kerja)
  - 2) PTN BLU dan Satker dapat mengajukan perguruan tingginya permohonan menjadi BH kapanpun apabila merasa sudah siap
- d. Hak belajar tiga semester di luar program studi, dengan arahan kebijakan:
- 1) Perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat mengambil atau tidak):
  - 2) Dapat mengambil sks di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks)
  - 3) Ditambah lagi, dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan 20 sks)
  - 4) Dengan kata lain sks yang wajib diambil di prodi asal adalah sebanyak 5 semester dari total semester yang harus dijalankan (tidak berlaku untuk prodi kesehatan).

Terkait dengan SKS ada perubahan definisi atau paradigma, yakni:

- SKS merupakan jam kegiatan
- Semua jenis kegiatan (belajar di kelas dan diluar kelas seperti magang, pertukaran pelajar, proyek di desa dan sebagainya) harus dipandu oleh seorang dosen yang telah ditentukan oleh PT
- Mahasiswa dapat mengambil daftar kegiatan selama 3 semester tersebut dengan pilihan program dari pemerintah dan program yang disetujui rektor. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020)

#### **Daftar Pustaka :**

- CNN Indonesia. (2020). Kampus Merdeka ala Mas Nadiem Makarim di Era Revolusi Industri 4.0. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan
- Rifai'i, M. (n.d.). Ilmu Fiqih Islam Lengkap. Semarang: CV Toha Putra.
- Conciencia, Kebudayaan. (2020). Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. XIX (2), 112, 131. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/conciencia.v19i2.4323>
- Farabi, M. Al. (2018). Pendidikan Orang Dewasa dalam Al-Qur'an. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung Alfabeta.
- Jelantik, A. K. (2019). Dinamika Pendidikan dan Era Revolusi Industri 4.0. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Joenaidy, A. M. (2019). Konsep dan Strategi Pembelajaran di Era Revolusi Industri 4.0. Yogyakarta: Laksana.
- Kemendikbud RI. (2020). Bebas Memilih 3 Semester di Luar Prodi, Kampus Merdeka 4/4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). Merdeka Belajar: Kampus Merdeka.
- Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, CV Mandar Maju, 2010, ISBN: 978-979-538-213-3 Bandung.
- Lubis, R. R. (2018). Identifikasi Perilaku Dan Karakteristik Awal Peserta Didik (Konsep dan Pola Penerapan Dalam Desain Instruksional). Hikmah, 15(1),7.
- Makdori, Y. (2020). Kemdikbud Rilis Konsep Kampus Merdeka untuk Perguruan Tinggi.
- Nurhayani Siregar, Rafidatun Sahirah, Arsikal Amsal Harahap, (2020) KONSEP KAMPUS MERDEKA BELAJAR DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0, Fitrah: Journal of Islamic Education (FJIE) Vol. 1 No. 1 Juli 2020 P-ISSN: 2723-3847, E-ISSN : 2723-388X Available online at <http://jurnal.staisumatera-medan.ac.id/index.php/fitrah>

Zainuddin Ali, Filsafat hukum, Sinar Grafika, 2014, ISBN. : 979-3421-50-9, Jakarta.

Undang Undang No. 12 Tahun 2011 Jo. Undang undang No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Nomor: 12/E/KPT/2021 Tentang PO BKD.

### **Profil Penulis**



Bambang Panji Gunawan, SH. M.Hum. Dosen di Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo

# Pancasila, Kesejahteraan dan Pendidikan Karakter

**Nur Aida**  
**STIE Gempol**

17 Agustus selalu diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam kemerdekaan terdapat kata merdeka dimana merdeka berasal dari bahasa Sanskerta *Maharddhikeka* yang berarti kaya, sejahtera, dan kuat dan bebas dari penjajahan, didalamnya mencakup kemerdekaan setiap individu dimana setiap warga negara Indonesia mempunyai hak asasi yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun disamping setiap warga negara juga memiliki derajat yang sama termasuk sama dalam mendapatkan akses pendidikan.

Menurut (Sujana, 2019) pendidikan adalah upaya untuk membantu jiwa anak-anak didik baik lahir maupun batin, dari sifat kodratnya menuju kearah peradaban manusiawi yang lebih baik, sebagai contoh dapat dikemukakan; anjuran atau arahan untuk anak duduk lebih baik, tidak berisik agar tidak mengganggu orang lain, mengetahui badan bersih seperti apa, rapih pakaian, hormat pada orang yang lebih tua dan menyayangi yang muda, saling peduli satu sama lain, itu merupakan sebagian contoh proses pendidikan untuk memanusiakan manusia.”

Kemerdekaan dan pendidikan bagaikan mata uang yang tidak bisa dipisahkan karena kemerdekaan merupakan ruang kebebasan untuk mejadikan negara menjadi lebih baik karena negara sudah tidak dibelenggu dan menjadi tanggung jawab dari semua elemen negara untuk mengisinya dengan memberikan pendidikan yang sebaik baiknya dan akses yang merata ke semua masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam UUD 45 asal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, Merujuk pada roh kemerdekaan dalam hal kesamaan derajat dan bunyi UUD 45 tersebut mestinya semua anak dan pemuda Indonesia sudah bisa akses dan mendapatkan pendidikan namun faktanya berdasarkan data dari Susenas tahun 2019, jumlah anak tidak sekolah (ATS) usia 7-18 tahun mencapai 4,34 juta anak sementara tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap dunia pendidikan tergolong masih rendah. Berdasarkan data BPS, jumlah siswa di Indonesia yang melanjutkan ke perguruan tinggi meningkat setiap tahunnya, yakni pada tahun

ajaran 2010/2011 terdapat 1,08 juta mahasiswa baru dan di tahun 2014/2015 mencapai 1,45 juta mahasiswa baru. Berbicara tentang akses Pendidikan ke tingkat perguruan tinggi juga masih jauh dari panggang dimana hanya 8,15 persen dari total penduduk usia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikannya ke tingkat perguruan tinggi. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi di Indonesia tahun 2018 juga cukup mengkhawatirkan, yakni hanya mencapai 32,5 % dan angka ini tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Singapura 78%, dan Malaysia 38%. Data ini harus menjadi bahan renungan untuk kita semua betapa banyak anak-anak dan pemuda-pemuda yang masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendidikan baik pendidikan dasar, menengah, atas dan perguruan tinggi.

BPS memperkirakan, Indonesia akan menikmati era bonus demografi pada tahun 2020-2035 dimana pada masa itu jumlah penduduk usia produktif (15-65 tahun) diproyeksikan ada pada grafik paling tinggi sepanjang sejarah, mencapai 64 % dari total jumlah penduduk namun bonus demografi ini harus diimbangi dengan kualitas yang baik karena keadaan ini bagaikan dua sisi mata uang, satu sisi akan menjadi sebuah keuntungan kalau para pemuda kita *well educated* sehingga mereka mempunyai *advantage* dan bisa membawa kehidupan yang lebih baik bagi diri, keluarga dan negara namun bisa menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan apabila mereka tidak *well educated* karena akan menjadi beban negara.

### **Pendidikan dan Kesejahteraan Ekonomi**

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dan cita-cita dari setiap negara. Tingkat kesejahteraan suatu negara merupakan salah satu tolak ukur untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di negara tersebut, (Gustyarini, 2019) dan menurut Menurut (Kakisina, 2011) menjelaskan bahwa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bisa dilakukan dengan meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan, dan faktor-faktor yang mempunyai korelasi positif dengan tingkat pendapatan salah satunya adalah tingkat pendidikan dan negara jelas mengemban amanah untuk itu melalui sekolah yang bisa diakses oleh semua siswa, perguruan tinggi yang bisa diakses oleh semua pemuda. Mustahil bagi suatu kelompok manusia bisa berkembang sejalan dengan aspirasinya untuk mencapai kemajuan, kesejahteraan dan kebahagiaan tanpa mendapat pendidikan karena pendidikan merupakan kebutuhan mutlak dan sepanjang jaman

Sebuah penelitian menemukan fakta bahwa mereka yang mempunyai latar belakang pendidikan tinggi mempunyai penghasilan 25% lebih tinggi

dibandingkan yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan tinggi . Menurut (Sen, 1999) pendidikan membuka *social opportunities*. Peluang tersebut selanjutnya akan menjadi jalan untuk memerdekakan diri dan menciptakan kualitas hidup yang lebih layak, taraf hidup yang menyenangkan. Pendidikan juga penting bagi warga sebagai modal awal untuk berperanserta secara lebih efektif dalam aktivitas ekonomi-politik-kultural secara lebih luas (Sen, 1999). Tanpa Pendidikan akan menimbulkan kebuta aksaraan akan menjadi penghambat seseorang dalam berperan di kegiatan ekonomi yang mensyaratkan baca tulis sehingga pendidikan menjadi kunci utama bagi kemajuan dan kesejahteraan. Apalagi kemajuan tehnologi hanya akan bisa dinikmati oleh mereka yang berpendidikan karena mereka mempunyai kemampuan adaptasi yang lebih cepat terhadap perubahan.

**Sila kelima** dalam Pancasila berbunyi keadilan sosial yang adil beradab mengandung arti negara menjamin tidak akan ada kemiskinan di Indonesia dan terkandung adanya demokrasi ekonomi yang menjamin keadilan atas kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, adalah jelas negara mempunyai tugas mencerdaskan kehidupan masyarakatnya agar tercipta kemakmuran dan jalan untuk mnciptakan tujuan mulia itu adalah melalui Pendidikan.

### **Pancasila dan Pembentukan Karakter**

Dalam UUD 45 pasal 31 ayat (3) dikatakan menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indosesia.

Bangsa ini tidak hanya menginginkan generasi yang cerdas dari segi intelektual dan keterampilan tetapi yang lebih penting adalah generasi yang bermoral. Untuk membentuk generasi yang bermoral tersebut, kita bangsa Indonesia harus mempersiapkan diri dengan mempraktikan Pendidikan karakter sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional, (Rahmat, 2016) Orang yang berkompentasi tinggi namum karakternya tidak baik cenderung akan memakai kompetensinya untuk hal-hal yang merugikan masyarakat. Dengan demikian, apabila dalam satu masyarakat rusakana karakter meluas, maka bangsa tersebut akan digerogoti sendiri oleh warganya, atau dengan kata lain masyarakatnya akan melalukan tindakan merusak diri sendiri. Pancasila sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang maha esa termaktub arti adanya pernyataan pengakuan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa secara yuridis

constitutional ini, mewajibkan pemerintah/aparat Negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Sebuah pesan yang sangat jelas tentang pentingnya membangun karakter bangsa. Pendidikan yang tinggi saja tanpa diimbangi oleh karakter yang baik hanya akan menimbulkan masalah. Terbukti pada banyak kasus korupsi dimana pelaku korupsi banyak dari kalangan terdidik namun lemah dalam hal karakter.

Pendidikan karakter merupakan isu utama dalam rangka menghadapi apa yang disebut Indonesia Emas 2045. Sebuah momen 100 tahun Indonesia merdeka dan momen cita-cita besar untuk mencapai Indonesia sebagai negara maju, mampu bersaing dengan bangsa lain serta dapat menyelesaikan isu-isu yang mendasar seperti isu Pendidikan, korupsi, kemiskinan dll. Isu-isu ini hanya akan bisa diselesaikan oleh dan tergantung pada kualitas sumber daya manusia yang ada pada tahun 2045 yang mayoritas terdiri dari para pemuda, remaja sebagai generasi penerus dan pelurus bangsa.

Pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu tetapi juga nilai-nilai terutama karakter. Karakter yang ditanamkan pada diri generasi emas haruslah berbasis tiga aspek yakni nilai kejujuran, nilai kebenaran dan nilai keadilan. Pendidikan karakter menjadi isu penting ditengah kesadaran akan gagalnya Pendidikan dalam aspek pembentukan karakter dari peserta didik. Ukuran kegagalan bisa dilihat pada demoralisasi seperti pergaulan bebas, free sex, narkoba, premanisme dan perbuatan yang menyimpang dari moral agama menjadi bagian dari kehidupan remaja saat ini. Belum lagi kejahatan kerah putih berupa korupsi yang sebagian mengatakan korupsi bukan lagi tentang pelanggaran hukum namun korupsi sudah menjadi kebiasaan karena kondisinya yang sangat parah dan tahun 2019 indeks persepsi korupsi Indonesia ada pada nilai 40 dengan nilai tertinggi 100 dan ada di posisi 85 dari 180 negara. Korupsi jelas bertentangan dengan nilai **sila pertama** ketuhanan YME. Bangsa Indonesia ini dikenal sebagai bangsa yang religius tetapi nyatanya dalam kehidupan berbangsa kita sangat prihatin dengan makin maraknya korupsi yang terjadi hampir di semua lini, mulai dari masyarakat kecil sampai pada pejabat negara. Saat ini Indonesia kekurangan teladan kebaikan sehingga kehidupan aktifitas masyarakat tidak mencerminkan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sehingga kehidupan agama hanya sebagai baju pengaman di ruang ibadah setelah keluar dari ruang ibadah sudah lain urusannya. Korupsi juga bertentangan dengan **sila kedua** yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Korupsi menjadi perbuatan yang kerdil kemanusiaannya dan sekaligus biadab. Korupsi bertentangan dengan **sila ketiga** yaitu persatuan Indonesia, karena korupsi hanya demi persatuan keluarga dan teman-teman dekat terkait. Korupsi juga berlawanan dengan **sila ke empat** yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh



hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sebab korupsi menyalahi kesepakatan hasil musyawarah yang dilandasi hikmat kebijaksanaan. Korupsi menjadi perbuatan yang tidak bijaksana yang dilandasi persekongkolan segelintir orang tertentu. Akhirnya korupsi juga bertentangan dengan **sila kelima** yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan korupsi jelas menimbulkan rasa ketidakadilan bagi seluruh rakyat karena hanya menjadi kenikmatan bagi pelaku korupsi.

### Daftar Pustaka

- Gustyarini, N. I. D. (2019). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Jawa Tengah*. i–78.
- Rahmat, P. S. (2016). Peran Pendidikan dalam Membentuk Generasi Berkarakter Pancasila. *Jurnal Penelitian Pendidikan, 03(02)*, 2. <https://www.journal.uniku.ac.id/index.php/pedagogi/article/view/1161/863>
- Sen, A. (1999). *Development As Freedom*. Alfred A. Knopf.
- Sujana, I. W. C. (2019). Fungsi Dan Tujuan Pendidikan Indonesia. *Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar, 4(1)*, 29. <https://doi.org/10.25078/aw.v4i1.927>

### Profil Penulis



Nur Aida, lahir di Pasuruan, lulusan S1 Universitas Negeri Jember, Fakultas Manajemen dan S2 Program MM UGM Yogyakarta. Saat ini merupakan dosen Program Studi Manajemen STIE Gempol Pasuruan Jawa Timur.

Email : nur.aidaph@gmail.com;

# **NILAI KEARIFAN LOKAL BERSESUAIAN DENGAN LANDASAN AKSILOGIS FILSAFAT PANCASILA SEBAGAI PONDASI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM MERDEKA BELAJAR**

Asri Widiatsih  
Universitas PGRI Argopuro Jember

Di masa globalisasi sekarang kita harus berpijak pada budaya bangsa agar tantangan dan sekaligus peluang bisa diraih. Pancasila sebagai akar budaya bangsa tidak boleh tercabut karena menjadi jati diri dan pedoman hidup masyarakat Indonesia. Pancasila dapat membimbing kita untuk berfikir, bersikap, dan berbuat dalam kehidupan sehari-hari dalam menghadapi tantangan globalisasi di kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Keselarasannya, keserasian, dan keseimbangan hidup merupakan bentuk kebudayaan dengan proses pemanusiaan diri. Para pemikir bangsa telah merumuskan dengan singkat dan padat dalam Pancasila (Ideologi Pancasila). Profil Pelajar Pancasila merupakan ciri sumber Daya Manusia Unggul (SDM) dari Kebijakan Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemdikbudristekdikti) dengan melakukan langkah transformasi pendidikan. Penguatan pendidikan karakter sangat diperlukan untuk mewujudkan profil pelajar cerdas berkarakter Pancasila seperti yang diharapkan oleh Kemdikbudristekdikti.

## **Nilai Kearifan Lokal**

Setiap daerah memiliki potensi dan keragaman karya yang dihasilkan sebagai ciri khas daerah tersebut. Kearifan lokal di suatu daerah dapat mempercepat pembangunan berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Sementara kondisi perilaku modern di masyarakat, dalam kehidupan sehari-hari telah dipengaruhi nilai-nilai pragmatis-sekularisme-materialis yang dibawa oleh globalisasi melalui arus teknologi komunikasi secara masif dan canggih. Masyarakat menjadi bingung menentukan nilai-nilai yang menjadi pondasi karakter untuk berperilaku karena melemahnya pengaruh nilai-nilai idealisme-religius dari kearifan lokal yang masih bertahan,

Membangun karakter bangsa dapat dilakukan dengan melakukan transformasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai baik secara filosofis, ideologis, historis, dan

sosiokultural. Pembangunan karakter bangsa melibatkan berbagai pihak baik keluarga, lingkungan sekolah, serta masyarakat luas. Pembangunan karakter bangsa akan berhasil jika pihak-pihak yang berkompeten untuk mendorong pembangunan karakter dapat bersinergi. Masyarakat secara umum dengan kearifan budaya lokal masing-masing dapat berperan melakukan pembangunan karakter.

Nilai-nilai budaya yang baik diorientasikan pada nilai budaya di Indonesia yang dalam kenyataannya selalu berorientasi pada nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur kebudayaan bangsa. Inilah nilai-nilai budaya yang menjadi modal masyarakat Indonesia dalam beraktivitas dari masa dulu hingga sekarang.

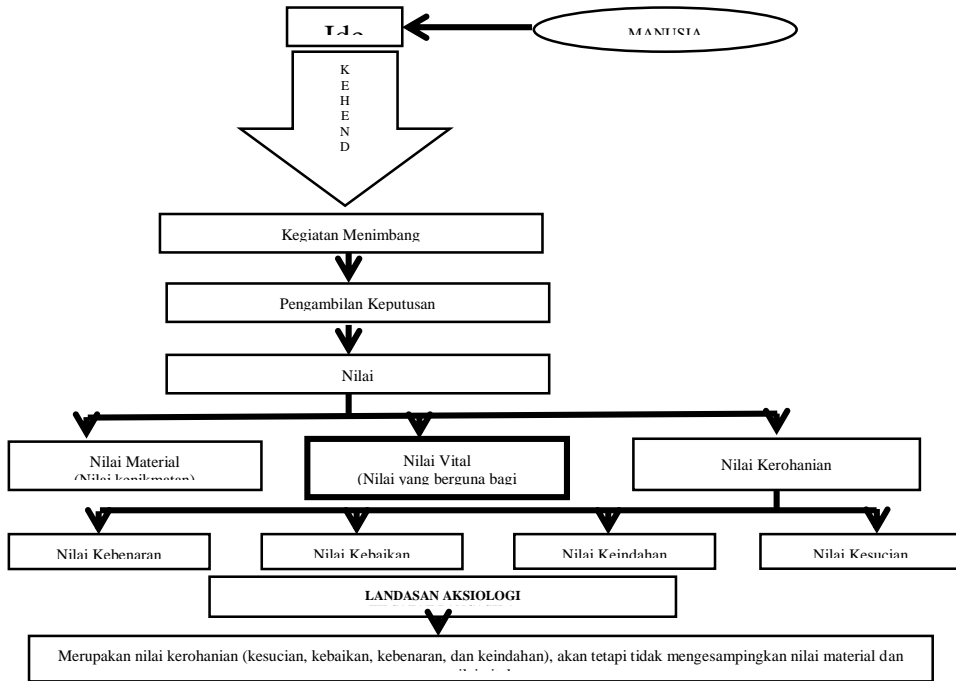
Pendidikan hendaknya membantu bangsa dan generasi muda memberi solusi untuk menghadapi perubahan di era globalisasi dalam mengadopsi nilai-nilai untuk dijadikan sebagai basis karakter. Solusi itu hendaknya menumbuhkembangkan multi-kecerdasan (spiritual, moral, sosial, kognitif dan kerampilan), kematangan moralitas dan komitmen untuk memegang teguh nilai-nilai yang diyakini (*believed values*), untuk menjadi nilai-nilai perilaku dalam kehidupannya secara kultural (*cultural values*) dan mempribadi (*personalized values*).

### **Landasan Aksiologis Filsafat Pancasila**

Manusia adalah makhluk yang dengan perbuatannya berhasrat mencapai atau merealisasikan nilai. Nilai sama dengan harga (Aristoteles dalam Erwin M, 2013: 26-27). Hidup itu mempunyai harga atau nilai. Nilai itu tidak hanya kenikmatan (kesenangan dalam lingkungan panca indera), nilai yang tertinggi bagi manusia ialah nilai dalam taraf kepribadian. Nilai merupakan sesuatu yang menarik bagi kita, sesuatu yang kita cari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai dan diinginkan, singkatnya sesuatu yang baik. Nilai tersebut mempunyai konotasi yang positif. Sebaliknya, sesuatu yang kita jauhi, sesuatu yang membuat kita melarikan diri adalah lawan dari nilai, yaitu non nilai.

Notonagoro dalam Erwin M (2013:27-28) mengelompokkan nilai menjadi tiga macam, yaitu (1) nilai materiil sebagai nilai yang berguna bagi jasmani seperti kesehatan, (2) nilai vital yaitu sebagai nilai yang berguna bagi kegiatan manusia seperti handphone, dan (3) nilai kerohanian yang dikelompokkan lagi menjadi empat nilai yakni: nilai kebenaran yang bersumber pada akal, nilai keindahan yang bersumber pada perasaan, dan nilai kebaikan yang bersumber pada kehendak, dan nilai religius yang merupakan nilai kerohanian yang tertinggi. Bertolak dari pandangan tersebut, dapat dirumuskan bahwa nilai erat kaitannya dengan kegiatan menimbang, yakni menghubungkan sesuatu dengan sesuatu

yang lain, yang kemudian dilanjutkan dengan memberikan keputusan, yang mana orientasi dari keputusan tersebut dapat diarahkan pada nilai material atau nilai kerohanian. Hal ini dinamakan landasan aksiologi filsafat Pancasila yang jika digambarkan menjadi seperti Gambar 1.



**Gambar 1. Landasan Aksiologi Filsafat Pancasila (Erwin M, 2013:28)**

Dalam konteks tersebut diatas, perlu dilakukan pelbagai upaya yang salah-satunya adalah dengan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai kearifan lokal. Oleh karena itu, perbincangan kearifan lokal tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan dan masyarakat yang menjadi pendukungnya (Sardjiyo, 2014).

### **Nilai Kearifan Lokal Berseduaian dengan Nilai Kerohanian dalam Landasan Aksiologis Filsafat Pancasila**

Penelitian Saryono (1998) tentang *Representasi Nilai Budaya Jawa dalam Prosa Fiksi Indonesia* (disertasi). Penelitian ini mendeskripsikan secara relatif, mendalam, dan myeluruh tentang representasi hayatan, renungan, ingatan, pikiran, gagasan, dan pandangan nilai budaya Jawa dalam teks prosa fiksi Indonesia yang meliputi wujud nilai religius, wujud nilai filosofi, wujud nilai etik, dan wujud nilai estetik. Penelitian Darmodjo (2005) tentang *Sistem Simbol dalam Manuba di Waropen Papua* (disertasi). Penelitian ini mendeskripsikan

dan menjelaskan sistem simbol yang terdapat dalam Manuba di Waropen Papua, yang meliputi bentuk simbol, makna simbol, dan fungsi simbol. Temuan makna simbol meliputi makna religi, etika, estetika, dan filosofi. Penelitian Yasin (2004) tentang *Representasi Pandangan Hidup Masyarakat Madura dalam Sastra Madura Modern* (disertasi). Penelitian ini mendeskripsikan tentang representasi nilai religius, nilai filosofi, nilai etis, dan nilai estetis masyarakat Madura yang terdapat dalam sastra Madura modern. Hal ini senada dengan temuan Widiatsih (2021) juga menunjukkan bahwa nilai kearifan lokal etnis Madura adalah nilai religi, nilai kepatuhan, nilai demokrasi, nilai kebersamaan, nilai keindahan.

Jika dihubungkan maka nilai-nilai kearifan lokal merupakan nilai kerohanian dalam landasan aksiologi filsafat Pancasila, dimana nilai religi merupakan nilai kesucian yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, nilai filosofi merupakan nilai kebaikan yang bersumber pada kehendak, nilai etis merupakan nilai kebenaran yang bersumber pada akal, dan nilai estetika merupakan nilai keindahan yang bersumber pada perasaan.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diambil sebuah teori substantif yaitu “Nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Indonesia bersesuaian dengan nilai-nilai kerohanian dalam landasan aksiologi filsafat Pancasila dengan simbol/wujud yang berbeda di setiap lokal/daerah”. Kita tidak perlu memperdebatkan atau memperlmasalahakan tentang nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat di berbagai etnis yang ada di Indonesia karena pada prinsipnya nilainya sama yaitu nilai aksiologis filsafat Pancasila yang merupakan nilai kerohanian Pancasila. Nilai kerohanian Pancasila inilah yang dapat menjadi dasar pendidikan karakter dalam Merdeka Belajar untuk mewujudkan profil pelajar cerdas berkarakter.

### **Daftar Pustaka**

- Dharmojo. 2005. *Sisetem Simbol dalam Manuba Waropen Papua*. Disertasi tidak diterbitkan. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Erwin M. 2013. *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Saryono, D. 1998. *Representasi Nilai Budaya Jawa dalam Prosa Fiksi Indonesia*. Disertasi tidak diterbitkan. Malang: IKIP Malang (Universitas Negeri Malang).
- Widiatsih, A.2021. *Reformasi Pendidikan Berbasis Budaya Lokal*. Yogyakarta: Deepublish.

Yasin, M.F. 2004. *Representasi Pandangan Hidup Masyarakat Madura dalam Sastra Madura Modern*. Disertasi tidak diterbitkan. Malang: Universitas Negeri Malang.

### Profil Penulis



Asri Widiatsih, lahir di Cilacap pada tahun 1976 dan merupakan staf pengajar di Universitas PGRI Argopuro Jember sejak tahun 2006. Alumni dari S3 Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Malang yang lulus tahun 2017. Di luar kampus adalah sebagai anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Jember, Pengurus Asosiasi Program Studi Teknologi Pendidikan se-Indonesia (APS-TPI), Pengurus PGRI Kabupaten Jember dan sebagai anggota Komite MTS Negeri 1 Jember. Penulis dapat dihubungi melalui WA. 081358377888 dan surel [asriwidi55@gmail.com](mailto:asriwidi55@gmail.com) serta bertempat tinggal di Perumahan Tegal Besar Permai Blok O Nomor 7 Kaliwates Kabupaten Jember.

# **BAHASA INDONESIA DAN PERSATUAN: QUO VADIS SUMPAAH PEMUDA**

**Jamila Lestyowati**

**BPPK – Kementerian Keuangan**

## **Pengantar**

Indonesia merupakan salah satu negara besar di dunia dengan berbagai keanekaragaman. Negara dengan ribuan pulau, suku, budaya dan bahasa. Sebagai negara yang kaya dengan keberagaman tersebut, tentu berimplikasi pada banyak hal antara lain potensi disintegrasi dan kolaborasi pada berbagai aspek.

Bahasa Indonesia merupakan salah satu unsur pemersatu bangsa Indonesia. Pertama kali Bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa nasional pada tanggal 28 Oktober 1928 yaitu saat peristiwa Sumpah Pemuda. Sebelum peristiwa berkumpulnya para pemuda itu, belum ada bahasa yang dapat menyatukan mereka. Ikrar sumpah para pemuda nusantara tersebut menjadi titik awal perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.

Alasan mengapa bahasa Indonesia disetujui menjadi bahasa persatuan pada saat sumpah pemuda adalah supaya bangsa Indonesia memiliki bahasa dapat menghubungkan semua komponen bangsa melalui bahasa. Pada saat itu penggunaan bahasa daerah dirasa tidak dapat menyatukan ide dan gagasan dalam rangka kemerdekaan.

## **Bahasa**

Istilah "bahasa" digunakan dalam banyak cara. Pengertian dasar yang berbeda dari istilah "bahasa" yang meliputi penggunaan sehari-hari, yaitu (1) Bahasa sebagai sistem, atau kode, di mana pesan dikirimkan dari pengirim ke penerima (Bahasa sebagai sistem), dan (2) Bahasa sebagai mode koordinasi spesifik yang memungkinkan lahirnya tatanan sosial manusia (Cummins, 2021). Bahasa merupakan budaya dari masyarakat yang berfungsi sebagai alat komunikasi. Bahasa merupakan alat untuk menyampaikan informasi. Masyarakat dan bahasa merupakan dua hal yang saling berkaitan. Jika suatu masyarakat

berkembang dengan baik, maka bahasa juga berkembang baik. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh masyarakat pemakainya melalui perhatian positif. Di sisi lain, jika masyarakat acuh terhadap bahasa, maka bahasa itu sulit berkembang atau bahkan hilang.

Bahasa adalah media untuk berkomunikasi dengan orang lain. Komunikasi akan berjalan dengan baik jika masing-masing pihak memiliki bahasa dan pemahaman yang sama tentang sebuah kata. Coba anda bayangkan jika setiap pihak menggunakan bahasa yang berbeda. Maka bisa dipastikan bahasa *tarzan* yang keluar. Memang menggunakan bahasa isyarat. Dengan gerakan anggota badan, pihak lain bisa memahami arti dan maksud yang kita inginkan. Tapi tentu saja model komunikasi seperti itu tidak akan efektif. Kisah yang sering terjadi adalah ketika kita bertemu dengan turis asing yang datang ke Indonesia, atau kita yang berada di luar negeri untuk suatu urusan. Jika kita tidak pandai dalam menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh orang asing tersebut, maka yakinlah, pembicaraan yang terjadi lebih banyak menggunakan bahasa isyarat.

Berbeda lagi jika kasusnya adalah sesama anak negeri. Sebagaimana kita tahu, Indonesia terdiri dari beragam suku dan bahasa. Setiap bahasa, yang kemudian kita sebut dengan bahasa daerah itu memiliki kosa kata yang banyak. Kadangkala ada beberapa kosa kata yang mirip antara satu daerah dengan daerah yang lain.

### **Bahasa Daerah di Indonesia**

Pada tahun 2019, Indonesia memiliki bahasa daerah sebanyak 801 bahasa, meningkat dari 668 bahasa pada tahun 2018. Dari jumlah tersebut, propinsi Papua memiliki bahasa daerah terbanyak yaitu 326, disusul Papua Barat sebanyak 102 bahasa, NTT sebanyak 71 bahasa dan Maluku sebanyak 62 bahasa. Sedangkan provinsi yang memiliki Bahasa daerah paling sedikit adalah DI Yogyakarta dan Kepulauan Riau. Keduanya hanya punya satu bahasa daerah. (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/14/papua-punya-bahasa-daerah-terbanyak-di-indonesia>)

Dulu saya kuliah di Jakarta dengan teman se-kost yang berasal dari tempat yang berbeda. Ada belasan mahasiswa yang tinggal serumah. Rata-rata penghuni berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sehingga praktis bahasa yang digunakan di kost adalah Bahasa Jawa. Namun sesama orang Jawa pun sering kami ledek-ledekan menggunakan kata yang sama yang mempunyai arti berbeda.



“*Wis mari kuliahe?*” tanya teman yang berasal dari Jawa Timur kepada teman lain yang berasal dari Jawa Tengah. Maka jawabannya adalah “*Memang aku loro? Aku sehat wae kok?*”

Kata “mari” dalam Bahasa Jatim berarti selesai, sedangkan di Jateng berarti sembuh.

Dan beberapa kosa kata lain yang memiliki arti yang berbeda. Misalnya “atos” antara Jawa dan Sunda.

Setelah meninggalkan Jakarta, saya kemudian tinggal di Medan. Belasan tahun di Medan, membuat saya memahami bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang luar biasa. Begitu datang ke Medan, saya disambut oleh teman yang berasal dari Jawa. Namun kemudian lingkungan kerja dan lingkungan rumah membuat saya tidak bisa lagi menerapkan bahasa Jawa secara permanen. Hanya pada saat-saat tertentu saja saya bisa menggunakan bahasa Jawa. Itupun setelah terlebih dahulu melihat situasi. Bahkan seringkali walaupun berada di lingkungan Jawa, namun saya lebih menyukai menggunakan bahasa Indonesia.

Hal awal yang saya pelajari begitu datang ke kota Medan adalah perbedaan pemahaman akan kata tertentu. Walaupun tetap menggunakan bahasa Indonesia, namun ada beberapa kata tertentu yang ternyata juga mempunyai perbedaan arti, misalnya kata kereta yang berarti sepeda motor. Sekarang saya tinggal di Yogyakarta. Menurut data tersebut DIY hanya memiliki satu bahasa daerah yaitu bahasa Jawa. Sedangkan Sumatera Utara memiliki lima bahasa daerah.

Mobilitas penduduk membuat urgensi penggunaan bahasa persatuan menjadi sangat dominan. Seseorang dengan suku dan bahasa tertentu bisa tinggal dan berinteraksi dengan orang dari suku dan bahasa yang berbeda dengan bahasanya. Oleh karena itu bahasa Indonesia adalah anugerah indah yang dimiliki bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia mampu menyatukan orang dengan latar belakang yang berbeda-beda.

### **Bahasa Pemersatu**

Unsur bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Selama berabad-abad Bahasa Melayu digunakan sebagai *lingua franca* di wilayah tanah air kita. Berdasarkan bukti-bukti sejarah yang ditemukan, seperti prasasti yang ditemukan di Palembang, Jambi dan Bangka, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa bahasa Melayu sudah dipergunakan sejak dulu di beberapa wilayah Indonesia khususnya di wilayah-wilayah Sumatera dan terdapat beberapa kerajaan besar yang berpengaruh pada saat itu (Repelita, 2018).

Bahasa Indonesia adalah bahasa yang bisa menyatukan perbedaan. Melalui bahasa Indonesia saya bisa berkomunikasi dengan orang lain di daerah yang tidak menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-harinya. Hal itu juga yang membuat saya dan keluarga juga menggunakan bahasa Indonesia di rumah selain Bahasa Jawa. Anak-anak saya pun akhirnya juga menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi di rumah, sekolah maupun di lingkungan. Hal ini kami lakukan karena lingkungan yang kami hadapi juga beragam.

Ketika kami berkumpul dengan orang lain dengan latar belakang suku dan bahasa daerah yang berbeda, maka bahasa Indonesialah yang menyatukan kami. Kosakata dalam bahasa Indonesia yang luas, bisa mengungkapkan semua yang ingin kami sampaikan. Walaupun kadang-kadang muncul istilah-istilah dalam bahasa daerah, maka setiap kami kemudian menerjemahkannya kedalam bahasa Indonesia. Justru disitulah kemudian kami jadi tahu ragam bahasa daerah lain. Maka tak heran, teman saya yang mempunyai marga purba atau harahap, sesekali bertanya dengan menggunakan bahasa jawa "*Piye mbak?*" atau "*emboh lah.*"

Akulturasi budaya memang menjadi hal yang niscaya ketika kita bergaul dengan orang lain dari kultur yang berbeda. Namun dari sana sungguh terasa indahnnya Indonesia. Selama lima belas tahun saya di Medan, walaupun kami berasal dari suku dan bahasa yang berbeda, tapi sungguh terasa berwarna. Keberagaman itu menjadikan kami sebagai sebuah kesatuan.

Dalam konteks kedudukannya sebagai bahasa nasional negara Indonesia, bahasa Indonesia memiliki fungsi: (1) lambang kebanggaan nasional, (2) lambang identitas nasional (3) Alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berlatar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda, dan (4) Alat perhubungan antar daerah dan antar budaya.

Sebagai simbol identitas nasional, bahasa Indonesia merupakan wujud nilai-nilai luhur yang mendasari rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Semangat kebersamaan dibangun melalui simbol-simbol bahasa. Tentu upaya untuk mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia perlu untuk terus digalakkan, misalnya melalui kongres Bahasa Indonesia. Kongres ini bertujuan untuk memelihara dan menjaga eksistensi bahasa Indonesia di tengah globalisasi dunia.

Bahasa juga menjadi bagian budaya dan sebagai wahana kebudayaan. Dari bahasa yang digunakannya seseorang dapat ditebak kebudayaannya, nilai yang dianutnya, atau keyakinan agama yang dianutnya. Dari bahasanya pula seseorang dapat diketahui sopan santunnya, sikap terbuka tidaknya, jalan

pikirannya, bahkan kejujurannya (Kawulusan, 1998). Dengan gambaran yang demikian itu, dapat dimaklumi adanya pernyataan bahwa “bahasa menunjukkan bangsa”.

### **Penggunaan Bahasa Indonesia**

Dalam keseharian, kelihatannya penggunaan bahasa Indonesia sudah mengalami degradasi. Lihatlah para anak muda kita. Terkadang saya sampai heran dan bingung mereka menggunakan bahasa apa dalam pergaulan. Bahasa alay yang mereka gunakan kadang-kadang tersasa sakit di telinga saat mendengarkan. Karena saat mengucapkan dan mendengarkan tidak ada kesantunan dalam berbahasa. Saya tidak menyalahkan penggunaan bahasa alay, prokem dan sejenisnya karena itu mungkin dipakai untuk menampakkan sesuatu identitas kelompok tertentu. Namun penggunaannya yang terasa berlebihan sehingga bahasa Indonesia menjadi terkalahkan.

Sebaliknya, ada yang membuat saya sangat bangga dengan bahasa Indonesai, yaitu bahasa yang lebih mudah dibandingkan dengan bahasa lain, baik bahasa asing maupun bahasa daerah. Siapapun akan mudah untuk mempelajarinya. Di Jepang ada komunitas orang Jepang yang mempelajari bahasa Indonesia secara rutin. Demikian juga dengan di Australia. Banyak mahasiswa Indonesia yang kuliah disana mengajarkan bahasa Indonesia kepada penduduk setempat. Bukan hanya itu, setiap tahun ada program perekrutan orang Indonesia untuk dikirim ke luar negeri untuk mengajarkan bahasa Indonesia kepada penduduk negara tersebut.

### **Penutup**

Setiap warga negara Indonesia harus bersama-sama berperan serta dalam membina dan mengembangkan bahasa Indonesia itu ke arah yang positif. Penggunaan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar perlu dioptimalkan, yaitu sesuai dengan kaidah bahasa dan kondisi pemakainya. Tidak harus menggunakan bahasa baku saat anda menawar barang di pasar atau bercanda dengan orang lain. Setidaknya ada tempat dan situasi yang harus disadari untuk mengetahui kapan harus berbahasa yang baik dan kapan harus berbahasa yang benar.

Bangga berbahasa Indonesia menjadi jargon yang perlu digaungkan. Semangat Sumpah Pemuda yang mengikrarkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan sangat relevan dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini. Jika pilihan politik, pendapat hukum, ideologi, pandangan sosial budaya belum dapat menyatukan kita, setidaknya kita masih memiliki persamaan, yaitu bisa

berbahasa Indonesia. Jika ada orang asing saja begitu asyik mempelajari dan menuturkan bahasa Indonesia, mengapa kita yang orang Indonesia justru menomorduakannya?

### Profil Penulis



Penulis adalah widyaiswara Kementerian Keuangan Jamila Lestyowati lahir di Lamongan, 1975. Pendidikan formal di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) lulus 1996, sarjana di Manajemen USU 2005 dan pascasarjana dari Ekonomi Pembangunan USU 2009. Selama lebih dari sepuluh tahun menjadi dosen di STAN dan aktif mengajar pada pelatihan baik di Kementerian Keuangan, Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah. Saat ini menjadi Widyaiswara pada Balai Diklat Keuangan Yogyakarta Kementerian Keuangan. Selain menjadi author, editor jurnal, penulis juga menjadi reviewer pada beberapa jurnal. Menjadi kontributor pada buku Lima Simpul Satu Cinta (Kumpulan Puisi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, 2020), *Ministry of Finance Organizational Fitness Index* (Kemenkeu, 2021), Buku Praktik Baik Penyuluhan Anti Korupsi (KPK, 2020), Manajemen Perubahan (2021), Administrasi Pendidikan (2021). Penulis juga menjadi Widyaiswara Berprestasi Nasional tahun 2021, dapat dihubungi melalui email [jlestyowati@kemenkeu.go.id](mailto:jlestyowati@kemenkeu.go.id)

# **MERDEKA BELAJAR DALAM PENGELOLAAN PLASMA NUTFAH SUMBER PANGAN BERKELANJUTAN**

**Wiwik Heny Winarsih**  
**Balitbang Provinsi Jawa Timur**

Istilah merdeka belajar mengemuka dalam Pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada peringatan Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2019. Jika dikaitkan dengan Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003; menimbang © bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan maka pola pembelajaran yang adaptif dengan perubahan zaman sangat diperlukan. Sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang diterapkan selama masa Pandemi Covid-19 memaksa seluruh peserta didik untuk lebih intensif belajar mandiri serta pandai dalam operasionalisasi perangkat gadget agar mudah dalam mengikuti pembelajaran virtual seperti *Google Classroom, Microsoft Teams, Zoom Meeting, Line, Telegram, W* serta memiliki akses internet yang memungkinkan bisa terhubung dengan menggunakan perangkat komunikasi seperti *smartphone, tablet dan iPad, personal computer, laptop, smart watch*, kamera digital dan sebagainya.

Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini memberikan pelajaran berharga bagi semua orang di segala usia; untuk kembali hidup teratur dan menjaga kebersihan diri. Cuci tangan yang telah diajarkan ayah bunda sejak masa kanak-kanak harus sering kita lakukan setelah bersentuhan dengan orang dan/atau memegang berbagai benda yang ada di sekitar terutama benda-benda publik. Olah raga dan berjemur di bawah terik matahari disarankan menjadi rutinitas untuk meningkatkan asupan vitamin D agar immunitas diri terjaga dengan baik. Selain itu yang tidak kalah penting adalah mengonsumsi makanan sehat yang kaya gizi sebagai sumber energi harian agar tubuh memiliki ketahanan yang kuat dalam melawan berbagai kuman penyakit yang mungkin masuk ke dalam tubuh. Pemahaman diri tentang pentingnya kesehatan harus dimiliki oleh setiap individu dan masyarakat untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan

manusia Indonesia yang sehat, cerdas, unggul, mandiri, dan sejahtera sejajar dengan bangsa lain yang lebih dulu maju.

Salah satu ciri bangsa maju adalah bangsa yang memiliki tingkat kesehatan, kecerdasan, kedisiplinan, serta produktivitas kerja yang tinggi. Leluhur bangsa kita telah mencanangkan pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa yang dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Keempat; yaitu *“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, **mencerdaskan kehidupan bangsa**, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”*. Program pembangunan manusia Indonesia seutuhnya menempatkan manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan menuju Indonesia emas tahun 2045; yang dikenal dengan Program Indonesia Emas 2045 menandai 100 tahun Indonesia Merdeka. Program Indonesia Emas 2045 harus didukung oleh segenap lini masyarakat karena merdeka belajar dan pembangunan pendidikan dalam konteks yang lebih luas mencakup berbagai dimensi yang meliputi dimensi Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Pertahanan Keamanan (Ipoleksosbudhankam). Pendidikan dasar Negara Pancasila harus ditanamkan sejak dini pada seluruh anak bangsa yang kelak memegang kendali estafet dalam mengisi kemerdekaan dan mewujudkan Cita-Cita Luhur Bangsa Indonesia yang berkarakter. Dalam Pendidikan karakter bangsa; ada empat aspek filosofi pendidikan yang ditanamkan yaitu olah hati, olah raga, olah pikir, dan olah karsa serta lima nilai utama; yaitu religiositas, integritas, nasionalisme, gotong royong, dan kemandirian (Renstra Kemendikbud 2020-2024).

Program Indonesia Emas 2045 didasarkan pada impian yang ditulis Presiden Joko Widodo dalam searik kertas saat mengunjungi Merauke, Papua, 30 Desember 2015; terdiri atas 7 poin impian Indonesia di tahun 2085 yaitu: (1) Sumber daya manusia Indonesia yang kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia, (2) Masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika, (3) Indonesia menjadi pusat pendidikan, teknologi dan peradaban dunia, (4) Masyarakat dan aparatur pemerintah yang bebas dari perilaku korupsi, (5) Terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia, (6) Indonesia menjadi negara yang mandiri dan negara yang paling berpengaruh di Asia Pasifik, (7) Indonesia menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dunia. Untuk mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang unggul dan Tangguh diperlukan sikap mental positif didasarkan pada butir-butir Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia; serta pemahaman yang baik dan

benar terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Dalam implementasinya, ketujuh impian Indonesia tersebut harus selalu didasarkan pada butir-butir sila dalam Pancasila agar visi Indonesia tercapai, yakni berdaulat, maju, adil dan makmur. Untuk mencapai impian Indonesia tersebut, pencapaian visi Indonesia 2045 didukung oleh 4 pilar utama, yaitu: (1) pembangunan SDM dan penguasaan Iptek, (2) perkembangan ekonomi berkelanjutan, (3) pemerataan pembangunan, dan (4) ketahanan nasional dan tatakelola pemerintahan sebagaimana tertuang dalam peta jalan pendidikan nasional dalam rangka menyiapkan generasi emas Indonesia Tahun 2045.

Strategi Pembangunan Pendidikan untuk mewujudkan Generasi Emas 2045 dilaksanakan berdasarkan tujuan-tujuan strategis pendidikan yang ditetapkan dalam RPNJP dan Nawacita. Arah pembangunan Pendidikan dan kebudayaan mengacu pada dokumen Sustainable Development Goals (SDGs) yang disepakati pada tanggal 21 Mei 2015 oleh para utusan dari 160 negara melalui the World Education Forum 2015 yang diorganisasi oleh UNESCO bersama UNICEF, the World Bank, UNFPA, UNDP, UN Women dan UNHCR, yang diselenggarakan di Incheon, Republic of Korea, 19 – 22 Mei 2015. Berdasarkan SDGs, tujuan ke 4 SDGs adalah Menjamin Kualitas Pendidikan yang Adil dan Inklusif serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Seumur Hidup untuk Semua. Manusia merupakan pusat pembangunan berkelanjutan karena tujuan akhir dari pembangunan berkelanjutan adalah *human wellbeing* atau manusia yang sejahtera lahir bathin. Manusia Sejahtera akan terwujud kalau manusia bisa dengan baik memperlakukan bumi sebagai tempat hidup sesuai dengan kemampuannya untuk mendukung, menghidupi dan menopang kehidupan manusia dengan segala aktivitasnya saat ini dan mewariskan bumi yang baik untuk generasi mendatang. SDGs menuntut perilaku manusia yang mendukung pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan bertanggung jawab (Alisjahbana dan Murniningtyas, 2018). Kita patut bersyukur bahwa alam Indonesia sangat kaya dan memiliki sumber plasma nutfah terbesar kedua di dunia setelah Brasil. Indonesia sebagai negara tropis memiliki keanekaragaman hayati yang tersebar baik di darat maupun di laut. Pengenalan plasma nutfah sebagai sumber pangan, pakan, energi, dan devisa perlu disosialisasikan kepada seluruh masyarakat luas dan diajarkan kepada anak-anak sejak dini agar tumbuh kepedulian dalam menjaga, memanfaatkan dan melestarikannya. Ketersediaan pangan yang cukup sangat diperlukan untuk menjamin kehidupan kebangsaan yang aman dan sejahtera. Negara wajib memenuhi kebutuhan pangan bagi seluruh rakyatnya. Pendidikan tentang budi daya tanaman pangan juga perlu diajarkan sejak dini pada lingkup keluarga serta pendidikan formal mulai PAUD sampai jenjang Pendidikan Tinggi dan Profesi.

Fungsi dasar bahan pangan adalah untuk tetap hidup sehat, tumbuh dan berkembangbiak. Untuk hidup sehat, cerdas, kuat, dan bahagia setiap dari kita memerlukan makanan yang bergizi baik dalam jumlah cukup sepanjang hidup; menerapkan pola hidup sehat serta cukup minum air. Saat ini panduan makan kita Bangsa Indonesia adalah Gizi Seimbang sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Gizi Seimbang. Isi piring dalam gizi seimbang terdiri atas empat kelompok bahan pangan; yaitu makanan pokok sumber karbohidrat, sayur, lauk, dan buah. Sebanyak  $\frac{2}{3}$  dari separo isi piring berupa makanan pokok sumber karbohidrat dan  $\frac{1}{3}$  berupa lauk sumber protein. Kemudian  $\frac{2}{3}$  dari separonya lagi berupa sayur dan  $\frac{1}{3}$ nya berupa buah. Keseluruhan dari sumber bahan pangan tersebut dapat tumbuh dan/atau dipanen sepanjang tahun oleh masyarakat Indonesia. Sepanjang bisa dikelola dengan baik dan penuh tanggung jawab, plasma nutfah sumber pangan kita bisa menjadi sumber devisa manakala bisa ditingkatkan produksi dan produktivitasnya. Target Indonesia sebagai lumbung pangan dunia di 2045 juga akan tercapai dengan dukungan penuh dari segenap pemangku kepentingan; didukung regulasi yang berpihak pada kesejahteraan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan. Sesungguhnya petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan; serta pesanggem dan nelayan adalah pahlawan-pahlawan gizi yang ada di garis depan dalam produksi pangan.

Makanan sehat dan kaya gizi diperlukan untuk menjamin proses tumbuh kembang berlangsung secara baik; mulai dalam kandungan sampai kelak dilahirkan dan terus tumbuh menjadi remaja, dewasa sampai usia lanjut. Setiap tahapan kehidupan seseorang memerlukan makanan sebagai sumber energi untuk terus hidup sehat, aktif dan menunjang aktivitas keseharian. Perlu dipahami bahwa dalam siklus kehidupan seseorang; kondisi kesehatan pada satu tahap dapat dipengaruhi oleh tahap sebelumnya. Anak-anak yang mengalami kekurangan gizi protein pada fase awal kehidupan pasca lahir dapat mengalami gagal tumbuh, kurus, dan stunting. Kondisi tersebut harus ditangani sejak dini melalui pemberian asupan makanan yang bergizi tinggi dan kaya protein.

Secara umum bahan pangan kita berasal dari sumber nabati dan hewani. Bahan pangan nabati berupa aneka biji-bijian, umbi, kacang, koro, sayur, buah, alga dan plankton yang secara umum dijadikan sebagai sumber karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Selanjutnya, bahan pangan hewani berupa daging, susu, telur, ikan, udang, kerang, kepiting, cumi-cumi, dan aneka hewan perairan lain baik yang telah berhasil didomestikasi dan dibudidayakan maupun yang ditangkap dari alam sebagai sumber protein. Masyarakat Indonesia yang tersebar pada berbagai pulau memiliki sumber-sumber bahan pangan lokal yang



potensial untuk dijadikan sebagai bahan pangan unggulan. Pengembangan potensi bahan pangan lokal seperti singkong, ketela, sagu, sukun, larut, ganyong, bentul, sorgum, talas, uwi, porang, dapat dijadikan sebagai sumber karbohidrat pengganti atau pendamping nasi. Selanjutnya berbagai sayur seperti bayam, sawi, kangkung, kenikir, kacang panjang, wortel, timun, buncis, lobak, selada air, daun singkong, daun papaya, kubis, kembang kul, brokoli, arcis, terong, kecipir, kembang turi, aneka koro, aneka sayur sawah merupakan sumber serat pangan yang baik sekaligus sebagai sumber vitamin. Aneka buah lokal kita juga sangat banyak ragamnya yang dapat tumbuh subur dan bisa dipanen hampir sepanjang tahun seperti papaya, pisang, nangka, nanas, tomat, alpukat, jeruk, mangga, manggis, langsep, duku, durian, manecu, rambutan, sirsat, semangka, blewah; dan masih banyak lagi termasuk apel batu, kesemek, juwet, belimbing, cempedak, ciplukan, arbei, strawberi, srikaya. Selanjutnya ada aneka ikan, unggas dan ruminansia yang bisa setiap saat dijadikan sebagai sumber protein hewani berupa daging, telur dan susu; sumber lauk dalam mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang sehat, cerdas, dan unggul. Kini saatnya Indonesia menguatkan diri membangun potensi lokal dan mengembangkan beragam sumber plasma nutfah potensial menjadi sumber bahan pangan bernilai tinggi secara berkesinambungan guna mendukung suksesnya Visi Indonesia 2045 menjadi lumbung pangan dunia serta membangun Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan Makmur. Semoga.

# Power Of Spiritual Pancasila

## Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang paling majemuk di dunia, baik dalam geografis, keanekaragaman suku bangsa, keanekaragaman adat dan budaya, serta keragaman keyakinan. Indonesia secara teoritis mempunyai potensi untuk menjadi negara rujukan dalam semua bidang, namun juga terbuka kemungkinan terjadi ketegangan dan konflik. Sebab pada kenyataannya, keberagaman etnik budaya dan keyakinan agama merupakan sebuah perbedaan yang sangat rumit untuk disamakan atau dipersatukan di negara manapun kecuali di Indonesia.

Keanekaragaman bangsa Indonesia dibingkai dalam Bhineka Tunggal Ika, yakni walaupun mempunyai ragam budaya, etnis, suku, golongan, Bahasa dan Agama namun tetap satu kesatuan bangsa Indonesia. Keanekaragaman di Indonesia ini tidak akan bisa Bersatu apabila golongan yang ada lebih mementingkan golongannya sendiri tanpa memperdulikan golongan yang lain. Untuk membangun persatuan bangsa Indonesia yang majemuk ini, diperlukan sikap toleransi, keseimbangan moderat dan keadilan, dari semua golongan serta menyadari sepenuhnya bahwa keragaman adalah sebuah hal yang tidak dapat dipungkiri dan dihindari di bumi ini.

Untuk menumbuhkan kesadaran sikap diatas, salahsatu ikhtiar agar para generasi bangsa Indonesia mampu menjadi jiwa patriot pertahanan negara dan bangsa Indonesia dalam kerukunan dan perdamaian bangsa Indonesia yang tercinta ini. Maka penulis memberikan tulisan yang bisa sebagai alternatif penguat melalui makna Power of Spiritual Pancasila.

Dasar Negara menurut Agama

Berbicara dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tentu tidak lain adalah Pancasila. Dimana Pancasila yang mengandung nilai-nilai Universal dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, itu digali dari bumi pertiwi dan disepakati sebagai consensus nasional untuk menjadi dasar NKRI dan menjadi payung kehidupan Bersama dalam berbagai perbedaan. Di sisi lain, terjadinya konflik dan ketegangan di beberapa Kawasan Republik Indonesia pada era reformasi membuktikan bahwa kurang hati-hatinya negara kita dalam mengelola kemajemukan bangsa ini, dan kalau kita biarkan dapat membahayakan

keutuhan bangsa ini, dengan demikian yang menjadi tantangan Bersama saat ini adalah bagaimana mewujudkan potensi dan symbol-simbol ke Bhineka an dalam prespektif agama melalui ketahanan sosial budaya tanpa mengorbankan cita-cita rakyat Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara sudah tidak relevan menurut kelompok agama yang tidak senang dengan simbol negara Indonesia karena Pancasila tidak sesuai dengan ketentuan Tuhan. Siapa bilang? Itu merupakan sebuah kesimpulan yang terburu-buru dan sebuah pemikiran yang sangat sempit dan dangkal. Karena Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia sebenarnya sudahlah sangat Agamis (sesuai Syariat) oleh karena itu, untuk membuktikan kesesuaian sila-sila atau butir-butir yang terkandung dalam Pancasila dengan Ayat-ayat Tuhan yang termaktub dalam kitab suci Al-Qur'an alKarim.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Pada sila pertama ini mengandung ajaran ketauhidan dalam pengertian keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana yang tercermin dalam Kitab Suci Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 22, Al-Baqarah ayat 163, Al Ankabut ayat 46 sebagai berikut:

- a. Tuhan kamu semua adalah Tuhan Yang Maha Esa, barangsiapa yang tidak beriman kepada hari akhirat, maka hati mereka termasuk orang yang mengingkari (keesaan Allah) sedangkan mereka sendiri adalah orang yang termasuk mempunyai sifat Sombong (sifat Syaitan) (QS. Al-Nahl: 22)
- b. Dan Tuhanmu sekalian merupakan Tuhan Yang Maha Esa, Tidak ada Tuhan (yang Benar) kecuali Dia (satu) yang mempunyai Sifat (Dzat) Pemurah di Dunia dan juga mempunyai Sifat/Dzat Penyayang di Akhirat (Al Baqarah: 163)
- c. Dan mereka semuanya (para umat terdahulu) mengatakan bahwa saya beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kalian bahwa Tuhan kami dan Tuhan kalian adalah Dzat Satu (QS: Al Ankabut: 46)

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

Sila kedua ini mencerminkan nilai kemanusiaan yang menjunjung tinggi sikap adil dan beradab, hal ini juga dalam al-Qur'an surat an-Nahl: 90 "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk berlaku adil, berbuat kebajikan, memberi kepada sanak kerabat, melarang untuk berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan. Allah memberikan pengajaran kepada kalian agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS: An-Nahl: 90)"

3. Persatuan Indonesia

Sila ketiga ini menggambarkan sebuah kehidupan yang rykun, damai, saling berdampingan dalam bingkai keanekaragaman bangsanya dengan dilandasi

persatuan serta kebersamaan, sebagaimana perintah Allah dalam surat Ali Imron: 103

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (Agama) Allah dan jangan bercerai berai (berpisah-pisah) dan ingatlah kalian semua pada nikmat Allah yang diberikan kepada kalian semua didunia serta nikmat Ketika dahulu (masa lalu) saling bermusuhan-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu menjadikan kalian saling bersaudara (Bersatu Kembali) karena nikmat Allah, dan kalian semuanya dalam kondisi ditepi jurang Neraka, kemudian Allah menyelamatkan kalian semua dari Neraka, demikian Allah memberikan peringatan dan pelajaran tentang bukti-bukti (ayat) kepadamu agar supaya kalian semua termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk-Nya. (QS: Ali Imron: 103).”

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan Sila yang memberi petunjuk dalam pelaksanaan kepemimpinan serta dalam mengambil sebuah keputusan itu harus secara bijak dengan tetap berdasarkan musyawarah. Hal ini sesuai dalam Al-Qur'an surat Shaad ayat 20 dan Surat Ali Imran ayat 159.
  - a. Dan kami kuatkan kerajaannya (Negara) dan kami berikan kepadanya ilmu hikmah (dalam pemerintahan) serta kebijaksanaan dalam menyelesaikan perbedaaan maupun perselisihan. (QS: Shaad: 20)
  - b. Dengan sebab rahmat Allah kalian berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya apabila kamu bersikap keras berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampunan bagi mereka (kepada Allah) dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu (Negara). Maka apabila kalian mempunyai keinginan yang besar, maka bertawakkallah (pasrah) kepada Allah, sesungguhnya Allah SWT senang orang yang mempunyai sifat Tawakkal (segala hal). (QS: Ali Imron: 159)
5. Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia  
Sila yang menggambarkan dan mencita-citakan terwujudnya kehidupan yang adil, Makmur bagi seluruh rakyatnya yang beranekaragam. Sesuai dalam Al Qur'an surat Al-Maidah ayat 8 dan surat an-Nisa' 135.
  - a. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum (suku), mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS: al Maa'idah: 8)
  - b. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau keluarga ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya

ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (QS: an-Nisa': 135).

### **Makna Power of Spiritual Pancasila**

Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi satu jua. Secara spiritual Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna walaupun di Indonesia sebagai Negara yang multicultural, dimana terdapat banyak suku, agama, ras, kesenian, adat, Bahasa, dan lain sebagainya namun tetap satu kesatuan yaitu sebangsa dan setanah air. Dipersatukan dengan Bendera, Lagu kebangsaan, mata uang, Bahasa dan Simbol negara Pancasila.

Prinsip dasar Pancasila yaitu menjaga realitas bangsa yang multicultural sebagai dasar Negara Republik Indonesia diatas segala hal yang berhubungan tentang martabat negara dan bangsa. Keanekaragaman di muka bumi ini merupakan salah satu bukti kekuasaan dan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa dan itu semua sudah menjadi ketetapan-Nya serta ada hikmah (spiritual). Sesuai ayat Al-Qur'an Surat Al-Hujarat ayat 13 dan Surat Al Baqarah Ayat 213.

1. Hai para manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu sebangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengawasi. (QS: al-Hujarat: 13)
2. Manusia itu adalah umat yang Bersatu (setelah ada perselisihan/perpecahan/peperangan) maka Allah mengutus para Nabi sebagai pember kabar gembira dan pemberi peringatan dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Kecuali orang yang berselisih tentang kitab yang diberikan Allah kepada Nabi, dengan bukti keterangan yang nyata, mereka dengki di antara mereka sendiri. Maka Allah memberikan petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan, itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus. (QS: al-Baqarah: 213)

## Biodata diri



Ifdlolul Maghfur, SEI, M.Ag pekerjaan Dosen Universitas Yudharta Pasuruan dan Bendahara Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Surabaya, Ustadz Ma'had Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, Katib Syuriyah MWCNU Waru Sidoarjo, Bendahara PW LTNNU Jatim, Direktur Bhirawa Publisir Universitas Merdeka Surabaya, dan Ustadz PP. Roudhatul Muta'allimin Wadungasri waru Sidoarjo : Email : ifdlolul2016@gmail.com/ maghfur2009@yahoo.co.id/ ifdhol@yudharta.ac.id/ hp. 081332256396

1. Buku : Spritualitas Barokah Mensenergikan Iman, Amal dan Islam 2013, Sistem Upah Dalam Islam 2014, Manajemen Keuangan Pesantren 2014, Ilmu Administrasi Birokrasi Publik 2014, Ekonomi Institusi : Teori dan Praktek 2015, Meningkatkan Prestasi Belajar Anak 2015 dan Dosen Merdeka 2021
2. Editor Buku : Sejarah Istighotsah 2016, Sejarah Mbah Mundir 2019, KH. Hasyim Latif Tentara Hizbullah 2018, Ahwa NU 2019
3. Penulis jurnal Malia, Murobbi, dan majalah Aula serta web. Halaqoh.net.

# Kewirausahaan Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila

Agung Purnomo  
Universitas Bina Nusantara

## Kewirausahaan

Negara Indonesia menantikan sekitar 4 juta wirausaha atau bisnis baru guna mendukung dan mengakselerasi pengembangan struktur dan fundamental ekonomi dan kesejahteraan nasional. Salah satu pendorong supaya nusantara menjadi suatu negara maju adalah progress positif wirausaha guna mengoptimalkan daya saing dan produktivitas bangsa Indonesia di masa modern (Putra, 2021). Tingkat kewirausahaan di nusantara masih dibawah rerata jika dikomparasikan dengan beberapa negara lain pada kawasan Asia Tenggara. Tingkat kewirausahaan Indonesia sekitar 3,47 persen dari total penduduk. Sedangkan, tingkat kewirausahaan negara-negara tetangga Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia dan Singapura, sudah berada di angka sekitar 4,26 %; 4,74 %; dan 8,76 %.

Proses mendirikan suatu wirausaha atau bisnis dikenal sebagai kewirausahaan atau kewiraswastaaan (*entrepreneurship*). Wirausahawan atau pengusaha (*entrepreneur*) sebagai perseorangan yang mengkreasi wirausaha baru dan menikmati imbalan sesuai resikonya. Pengusaha memainkan peran penting pada skala ekonomi dengan mendayagunakan inisiatif dan keterampilan yang dibutuhkan guna memenuhi suatu kebutuhan pasar dan memperkenalkan gagasan dan inovasi baru yang menarik ke dalam suatu pasar. Kewirausahaan dikenal berisiko sekaligus bermanfaat sebab mampu membangun pertumbuhan kekayaan, penghormatan, ekonomi, dan inovasi (Hayes, 2020). Kajian tentang kewirausahaan di nusantara terus progres dan berkembang (Purnomo et al., 2019).

## Ekonomi Kerakyatan

Kewirausahaan yang dibangun di Indonesia berlandaskan ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan sebagai suatu implementasi sistem ekonomi berlandaskan

kepada kebutuhan serta kesejahteraan segenap rakyat. Ekonomi kerakyatan bertujuan untuk memberikan manfaat bersama bagi segenap rakyat Indonesia. Ekonomi kerakyatan bertugas mengelola elemen produksi esensial yang menguasai dan diperlukan hajat hidup masyarakat Indonesia perlu dikuasai oleh negara guna menghindari oligarki serta penindasan rakyat sesuai Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 (Utami, 2021).

## **Pancasila**

Pancasila merupakan pandangan hidup dan dasar negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap warga negara Indonesia mengacu Pancasila sebagai pedoman pada segenap aktivitas yang dilaksanakan. Setiap warga negara Indonesia juga memiliki sikap yang merefleksikan nilai dari butir Pancasila (Nafisah, 2021). Pendidikan kewirausahaan berlandaskan kepada karakter dan nilai budaya bangsa sebagai salah satu elemen esensial dan fundamental guna membangun daya saing bangsa Indonesia di masa modern. Karena, Pancasila telah memuat dan mewakili nilai-nilai budaya dan karakter bangsa Indonesia (Hakim, 2012).

## **Kewirausahaan Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila**

Kewirausahaan Pancasila adalah suatu sistem kewirausahaan secara utuh dan bulat yang berlandaskan kepada kelima sila dalam Pancasila. Kewirausahaan Pancasila sebagai implementasi murni dan nyata dari pengalaman UUD 1945 yang dilandasi nilai-nilai Pancasila. Kewirausahaan Pancasila juga merupakan aplikasi Pancasila dan UUD 1945 pada ekosistem kewirausahaan berupa ketenangan, kepastian dan keamanan dalam berwirausaha. Konsep kewirausahaan Pancasila diharapkan dapat mengantarkan rakyat Indonesia ke gerbang kesejahteraan sesuai dengan cita-cita Pancasila (Aurelia, 2018; Wibowo, 2015).

## **Sila Pertama – Ketuhanan yang Maha Esa**

Suatu kewirausahaan berlandaskan keimanan serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebab, seluruh wirausaha yang dikerjakan sejatinya untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Wirausahawan mesti bersedia bekerja keras serta jujur dan yakin kalau wirausaha yang dikelola merupakan berkat Allah SWT yang diberikan Tuhan untuk wirausaha. Agar, sang wirausahawan sanggup membantu masyarakat dan sesama manusia dengan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Wirausaha yang dilaksanakan dengan saling menghormati kebebasan dan kerukunan antar umat beragama sehingga terbentuk suasana dan ekosistem wirausaha yang rukun dan damai (Nafisah, 2021; Wibowo, 2015).



## **Sila Kedua – Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab**

Kewirausahaan yang berbasis kemanusiaan yang adil serta beradab bagi masyarakat Indonesia sesuai dengan perkembangan jaman dan peradaban. Para wirausahawan perlu senantiasa membangun kreativitas, inovasi dan invensi guna memenuhi beragam kebutuhan kehidupan manusia. Wirausaha dengan saling menyayangi satu sama lain dan memahami derajat manusia yang sama. Wirausaha juga didorong guna senantiasa memiliki harga diri, kepribadian, kehormatan, perasaan, dan motivasi guna meraih prestasi dan produktivitas demi keadilan kemanusiaan yang beradab (Nafisah, 2021; Wibowo, 2015).

## **Sila Ketiga – Persatuan Indonesia**

Kewirausahaan yang berlandaskan semangat dan komitmen persatuan Indonesia. Wirausaha yang dilakukan oleh setiap wirausahawan sebagai warga negara dengan berusaha menjaga persatuan dan kesatuan disegenap area tanah air Indonesia yang menghindari diskriminasi suku, aliran politik, golongan, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan tempat lahir. Wirausaha perlu juga bersatu menjaga kebersamaan pada wirausaha, rela berkorban demi negara, menumbuhkan rasa cinta bangsa, serta membangun kepentingan rakyat dan negara di atas kepentingan golongan dan pribadi. Upaya wirausaha dengan menghindari tindakan berpotensi menimbulkan perpecahan pada masyarakat Indonesia (Nafisah, 2021; Wibowo, 2015).

## **Sila Keempat – Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan**

Suatu kewirausahaan yang bebas memilih usahanya secara bijaksana tanpa memaksakan kehendak kepada orang lain. Wirausahawan persuasif mendengar saran dan masukan dari para konsumen, staf dan pesaing untuk pengembangan produk dan jasa menjadi lebih baik. Wirausahawan yang terbuka untuk dialog dan menjaga musyawarah dalam membuat keputusan bisnis demi kepentingan bersama (Nafisah, 2021; Wibowo, 2015).

## **Sila Kelima – Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia**

Suatu kewirausahaan yang berlandaskan nilai-nilai keadilan sosial bagi segenap rakyat Indonesia. Wirausahawan memperlakukan staf dan konsumen secara adil tanpa pilih kasih. Wirausaha sosial yang memberikan manfaat bagi lingkungan dan ekonomi bangsa Indonesia. Wirausaha yang mengembangkan

perbuatan luhur berupa gotong royong, kekeluargaan, dan keseimbangan pada hak dan kewajiban sesama anak bangsa (Nafisah, 2021; Wibowo, 2015).

## Daftar Pustaka

- Aurelia, P. (2018). *Konsep Entrepreneurship Pancasila, Ini yang Digagas Universitas Pancasila*. Scholae.co.  
<https://www.scholae.co/web/read/1556/konsep.entrepreneurship.pancasila.ini.yang.digagas>
- Hakim, D. (2012). Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa. *Seminas Competitive Advantage II*.  
<http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/seminas/article/view/179>
- Hayes, A. (2020). *Entrepreneur*. Investopedia.com.  
<https://www.investopedia.com/terms/e/entrepreneur.asp>
- Nafisah, S. (2021). *Makna Pancasila sebagai Pandangan Hidup, Ketahui Isi dari Kelima Butirnya*. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.  
<https://bpip.go.id/bpip/berita/1035/256/makna-pancasila-sebagai-pandangan-hidup-ketahui-isi-dari-kelima-butirnya.html>
- Purnomo, A., Usman, I., & Asitah, N. (2019). Penelitian Kewirausahaan di Indonesia: Pemetaan Publikasi dalam Perspektif Scientometrik (1972-2019). *AdBispreneur*, 4(3), 207.  
<https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v4i3.25021>
- Putra, D. A. (2021). *Jumlah Wirausaha Indonesia Jauh di Bawah Malaysia dan Thailand*. Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/uang/jumlah-wirausaha-indonesia-jauh-di-bawah-malaysia-dan-thailand.html>
- Utami, S. N. (2021). *Ekonomi Kerakyatan: Pengertian, Ciri-Ciri, Dampak, Faktor Pendorong dan Wujudnya*. Kompas.com.  
<https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/19/162624169/ekonomi-kerakyatan-pengertian-ciri-ciri-dampak-faktor-pendorong-dan>
- Wibowo, W. (2015). Kewirausahaan Pancasila: Suatu Tinjauan Kebijakan Ekonomi Pemerintah, Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri, dan Orientasi Pendidikan Kewirausahaan Pancasila. *Jurnal Pendidikan Bisnis dan Manajemen*, 1(2).  
<http://journal2.um.ac.id/index.php/jpbm/article/view/1675/947>

## Profil Penulis



**Agung Purnomo, MBA.** Penulis puluhan buku kelahiran Sidoarjo ini adalah dosen tetap (*faculty member*) program studi Sarjana Kewirausahaan (*entrepreneurship*) di Universitas Bina Nusantara, Kampus Malang sejak tahun 2017. Muslim penggemar ice cream coklat dan film ini menyelesaikan pendidikan formal Sarjana di Universitas Brawijaya dan *Master of Business Administration in Creative and Cultural Entrepreneurship* (MBA CCE) di Institut Teknologi Bandung. Sejak tahun 2019 menjalani pendidikan Doktor Ilmu Manajemen di Universitas Airlangga. Agung banyak melakukan riset multidisiplin menggunakan pendekatan bibliometrik.

Email: [agung.purnomo@binus.ac.id](mailto:agung.purnomo@binus.ac.id).

URL : <https://about.me/agungpurnomo>.

Scopus: <https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57199228691>.

## **Bagian III**

# **PANCASILA DARI DAN DALAM RUANG RUANG PEMBELAJARAN**

**Madya Ahdiyati**  
**BKPSDM Kabupaten Bandung Barat**

Pancasila terlahir dari proses diskusi dan debat pendapat yang panjang dan seakan tak bertepi. Pancasila dirumuskan dari dialog dan tukar gagasan berbagai elemen bangsa dalam berbagai kesempatan. Pancasila merupakan konsensus hasil komunikasi komunal berbagai komunitas dari beragam latar belakang. Faktanya, Pancasila bukanlah sebuah medan pertempuran fisik atau perang antar pasukan atau pertarungan adu kekuatan melainkan sebuah ruang untuk mengakumulasi seluruh lintasan sejarah, falsafah hidup sebuah bangsa, entitas berbagai keragaman budaya, dan keberadaan seluruh perbedaan latar belakang suku, bangsa, ras, etnik, agama, bahasa dan adat istiadat. Selama ribuan tahun bangsa ini eksis dan selama ratusan tahun pula, bangsa ini terjajah, maka lahirlah berbagai keinginan, ide, imajinasi dan harapan. Dan dari ruang-ruang kemerdekaan inilah, kita belajar tentang banyak hal, dari keinginan untuk memerdekakan diri sebagai bangsa dan negara yang berdaulat, dari ide-ide tentang berbangsa dan bernegara yang menjadi ideologi bangsa yaitu Pancasila dan dari imajinasi-revolusioner untuk mendirikan sebuah negara kuat dan kokoh yang mewujudkan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia terlahirlah harapan untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

### **Pancasila dari Ruang Pembelajaran**

Ketika Soekarno, Muh. Yamin, dan Soepomo memaparkan tentang Pancasila dalam Sidang BPUPK pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, pada dasarnya sedang menghadirkan Pancasila sebagai **laboratorium dialog**. Bukan pemaksaan kehendak mayoritas terhadap minoritas atau keharusan untuk menjalankan salah satu agama dan membiarkan yang lainnya. Bukan pula

mengedepankan kaum tertentu dan kalangan tertentu serta memarjinalkan kelompok lain dan membiarkan pendapat-pendapat di pulau terjauh, terluar dan tidak terjangkau. Tidak juga dengan memprioritaskan teori ekonomi politik tertentu atau hukum ketata-negaraan dari timur atau dari barat. Tetapi terjadi sebuah proses metode ilmiah untuk menghasilkan sebuah *masterpiece* hasil laboratorium dialog tentang ideologi bangsa. Tentu saja hadir ketidak-setujuan, penentangan, kekhawatiran, diskusi panas dan lain sebagainya. Itu semua merupakan reaksi biasa sebagaimana ketika larutan-larutan kimia yang dicampur akan menghasilkan berbagai reaksi yang berbeda. Namun akhirnya melahirkan sebuah penemuan penting dari laboratorium dialog tersebut yaitu berupa kesepahaman tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka.

Kita telah terbiasa ketika Pancasila diajarkan sebagai sebuah kurikulum pembelajaran atau sebagai *co-curriculum* atau juga menjadi sebuah ekstra kurikuler dalam pendidikan (*teaching*) dan pelatihan (*training*). Tetapi tahapan membumikan Pancasila dengan melakukan pergeseran dari idealitas menuju realitas membutuhkan sebuah program non kurikuler yang menggunakan metode pembelajaran (*learning*). Artinya bukan sekedar dogmatis-apatis dan kognitif-apektif semata yang ditekankan dalam penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila tetapi perlu dilakukan ruang-ruang kegiatan untuk **unjuk gladi** dan **proses internalisasi** dan implementasi nilai-nilai Pancasila. Dalam kegiatan unjuk gladi, Pancasila tidak hanya diposisikan sebagai nilai dasar saja tetapi benar-benar mewujudkan dalam pemikiran, karakter, perilaku keseharian bahkan cara berpikir dan bertindak secara nyata dalam sebuah lingkungan atau masyarakat. Dan dalam kegiatan proses internalisasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila akan dilakukan berbagai kegiatan yang akan menghidupkan semangat patriotisme, nasionalisme dan cinta tanah air. Keduanya menghadirkan Pancasila dalam program non kurikuler sekaligus menjadi pengalaman yang tidak akan terlupakan bagi mereka yang mendapatkan pembelajaran (*learning*) Pancasila dengan cara yang berbeda.

Urgensi Pancasila masa kini adalah urgensi etis dan teologis bukan sebuah urgensi praktis dan pragmatis sebab Pancasila akan bernilai permanen sebagai ideologi pemersatu untuk menyatukan setiap elemen bangsa dan bukan hanya sekedar alat yang bersifat temporer untuk memerdekakan diri dari penjajahan semata. Artinya eksistensi dan esensi keberadaan Pancasila harus terus diperkuat dan jangan sekali-kali ditanggalkan atau dilupakan begitu saja. Pancasila telah mengalami tribulasi dan pengkhianatan berkali-kali namun tetap bertahan. Tetapi ujian yang sesungguhnya adalah ketika ruang pendidikan dengan model **pedagogi transformasional-andragogi transaksional** dibuka dan diterapkan, pengajaran tentang nilai semakin cair dan terbuka bebas (*global*).

Para peserta didik tidak hanya diserang perang budaya di luar kelas, akan tetapi mereka siap-siap dihabisi dengan kehilangan nilai (*value*), dekadensi moral (*moral*), gagap norma (*norm*), gegar budaya (*culture*) dan rusaknya ideologi (*ideology*) tepat di ruang di mana mereka sedang belajar. Demikianlah gelombang atas nama pedagogi transformasional-andragogi transaksional di satu sisi menghadirkan pola pendidikan yang terarah dan dapat mentransformasi (serta meningkatkan *performance*) para peserta didik agar lebih baik tetapi di sisi lain memberikan keterbukaan dan kesempatan untuk melumpuhkan, mematikan dan memusnahkan nilai-nilai termasuk Pancasila.

### **Pancasila dalam Ruang-ruang Pembelajaran**

Adakah hubungannya antara nilai-nilai Pancasila dengan intelektualitas atau adakah korelasi antara peningkatan intelektualitas seseorang dengan pengamalan Pancasila? Pancasila tentu saja hadir dari dan dalam ruang-ruang pembelajaran dan tentu saja melibatkan sisi-sisi intelektualitas. Kejeniusan yang melahirkan konsep Pancasila akan mengarahkan dan membimbing ke dalam pola pembelajaran yang sama yang melatih kecerdasan dan intelektualitas peserta didik. Tentu saja, Pancasila bukan konsep standar yang tidak bisa berkembang atau dianalisis secara modern dan kekinian, tetapi suatu ide yang bisa memberikan nilai tambah bagi intelektualitas seseorang di samping akan membawa sebuah konsep tentang nilai yang besar dan sangat berpengaruh. Pancasila mengajarkan bagaimana (*learn to know*) melakukan sesuatu, bertindak dan memutuskan sesuatu serta bersikap dan berjiwa secara Pancasila salah satunya dengan berketuhanan yang maha esa.

Pancasila juga hadir dalam ruang kreativitas (*learn to do*). Sebagai sebuah nilai, Pancasila bersifat absolut dan mutlak, tetapi dalam tataran implementasi, Pancasila dapat berupa ide, imajinasi atau kreativitas yang akan menumbuhkan kecintaan terhadap bangsa dan negara. Ruang kreativitas sangat terbuka untuk mengentaskan berbagai problematika bangsa. Di sini, Pancasila berperan sebagai konsep dan nilai untuk kemanusiaan yang adil dan beradab sekaligus pemersatu yang memberikan keindahan dari berbagai ragam perbedaan yang ada dalam bingkai persatuan Indonesia.

Sedangkan dalam ruang integritas (*learn to be*), Pancasila mewujudkan dalam nilai-nilai positif dan integratif. Kejujuran, akuntabilitas dan anti korupsi merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai Pancasila. Bersikap adil, menjauhi kedzaliman dan membela kebenaran merupakan tuntunan dari nilai-nilai Pancasila agar membentuk karakter bangsa yang kuat dan terpuji. Tujuan dan harapan para *founding fathers* dengan menetapkan dasar negara tentu saja adalah dengan menetapkan ruang integritas yang paling utama bagi seluruh rakyat Indonesia

sebagai tujuan dan harapan seluruh bangsa yaitu dengan terjaminnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan pokok pembahasan Pancasila dalam ruang solidaritas (*learn to live together*). Dalam masyarakat yang majemuk dengan dilandasi bhineka tunggal ika, sudah seharusnya mengedepankan kepentingan rakyat di atas segala-galanya dan mewujudkan keadilan sosial sebagai fungsi dan tugas utama seluruh rakyat Indonesia terutama mereka yang mendapat amanah sebagai pejabat publik, abdi negara dan wakil rakyat. Gotong royong, saling membantu, meringankan beban orang lain, peduli dan empati, serta senantiasa ringan tangan untuk menyelesaikan permasalahan orang lain merupakan wujud kongkret dari pembelajaran Pancasila tentang konsep hidup bersama dalam sebuah ruang solidaritas.

### **Pancasila dalam Ruang Merdeka Belajar**

Pertanyaan berikutnya, masih terbukakah ruang untuk penafsiran dan ijtihad Pancasila dan melahirkan para mujtahid Pancasila? Ataukah tidak ada ruang sama sekali untuk menafsirkan dan berijtihad tentang Pancasila? Sebuah pertanyaan yang kompleks dan akan melahirkan jawaban yang ambigu karena di satu sisi Pancasila harus dibela dengan segenap tumpah dan darah tetapi di sisi lain kondisi global dan situasi dunia menuntut agar dapat beradaptasi dan bisa berubah menyesuaikan dengan kondisi dan zaman. Pancasila terbukti dapat menjadi solusi dan *best practices* bagi permasalahan-permasalahan yang pernah terjadi. Dan diharapkan pula bisa mempertahankan diri dari tantangan dan problematika hari ini baik secara internal maupun eksternal. Tetapi untuk menghadapi tantangan masa depan yang sulit untuk diprediksi dan diperkirakan (*unpredictable* dan *uncertain*), kita akan melihat bagaimana ketahanan dan ketangguhan ideologi Pancasila yang akan diuji dalam menghadapi era disrupsi, dunia global dan tatanan dunia baru sebagai *next practices*. Namun tetap perlu kiranya akan keberadaan tafsir kontemporer tentang Pancasila tanpa mengurangi nilai dan kesakralannya dengan mengedepankan kepentingan masa depan bangsa yang akan menghadapi berbagai tantangan di antaranya disintegrasi bangsa, neo-komunisme, trans-nasionalisme dan ekstra-terorisme. Diharapkan lahirnya seorang mujtahid pancasilais sejati yang cinta tanah air dan rela berkorban demi nusa dan bangsa yang dapat membawa perubahan secara nilai, dogma maupun praktek pengamalan nilai-nilai Pancasila.

Hakikatnya Pancasila telah memerdekakan ruang-ruang pembelajaran dengan menyediakan ruang untuk intelektualitas, kreativitas, integritas dan solidaritas. Juga memberikan kesempatan untuk lahirnya mujtahid pancasilais sejati dengan menyediakan ruang kebebasan dalam memahami Pancasila dan akan (berperan)

menerjemahkan Pancasila secara normatif, murni dan tanpa mengurangi nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Selain itu terbuka lebar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi pembela Pancasila dari berbagai serangan, ujian, rongrongan dan pengkhianatan terhadap Pancasila. Atau bahkan hanya sekedar sebagai *social influencer*, selebgram atau *content creator* untuk memviralkan nilai-nilai Pancasila dengan media-media sosial yang dimiliki.

Maka sekarang mari kita nikmati ketuhanan yang berkebudayaan, kemanusiaan yang universal, persatuan dalam kebhinekaan, demokrasi permusyawaratan dan keadilan sosial dalam bingkai Pancasila sakti. Itulah refleksi, rekonstruksi dan kontekstualisasi Pancasila dalam perspektif teoretis-komparatif yang telah memerdekakan bangsa ini dan telah memberikan berbagai kemerdekaan dalam segala hal termasuk merdeka belajar. Tidak akan ada merdeka belajar tanpa kemerdekaan yang diraih dengan membela dan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara merdeka. Pancasila merdeka berarti jaminan untuk Merdeka Belajar.

### Daftar Pustaka

- Bolo, A., & dkk. (2016). *Mengalami Pancasila*. Bandung: Unpar Press.
- Holis, N., & Dkk. (2018). *Menenun Perahu Kebinekaan*. Yogyakarta: Penerbit Diandra.
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma.
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma.
- Kansil, & Kansil, C. (2011). *Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Latif, Y. (2019). *Negara Paripurna*. Jakarta: PT. Gramedia.
- MPR, P., & MPR, T. K. (2013). *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Riyanto, A. (2010). *Negara Kesatuan*. Bandung: Penerbit YAPEMDO.
- Santosa, H., & Dkk. (2002). *Sari Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Suryana, E., & Kaswan. (2015). *Pancasila dan Ketahanan Jati Diri Bangsa*. Bandung: PT. Refika Aditama.



## Biodata Penulis



Penulis lahir di Bandung, 41 tahun yang lalu dan diberi nama Madya Ahdiyati. Menyelesaikan Sarjana Ekonomi dan Magister Manajemen di Kota Bandung dan sekarang adalah kandidat Doktor Manajemen Pendidikan di Universitas Islam Nusantara Bandung. Diangkat menjadi PNS pada tahun 2006 di Pemerintah Kabupaten Bandung dari Formasi Umum dan sekarang sedang meniti karir dalam Jabatan Fungsional (JF) Widyaiswara Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat sejak tahun 2018. Hobi penulis adalah membaca buku dan traveling. Buku yang sering dibaca adalah novel dan buku manajemen. Melaksanakan Umroh (2016) dan pernah berkunjung ke Singapura, Malaysia, Thailand, China (2017), dan Mesir, Jordan serta Palestina (2018). Malang-Bromo, Lombok dan Bali adalah destinasi favorit di dalam negeri. Penulis dapat dihubungi melalui email [madyaabufathi@gmail.com](mailto:madyaabufathi@gmail.com)

# **MANAJEMEN INSTRUKSIONAL MASYARAKAT KELAS PELAJAR PANCASILA**

*(Instructional Management of Pancasila Classroom Society)*

**Supriyono**  
**Universitas Islam Balitar**

## **Pendahuluan**

Reformasi pendidikan Indonesia terus bergulir secara progresif. Progresivisme pendidikan masa kini melewati harapan John Dewey akibat perkembangan teknologi. Ruang kelas telah menjadi arena pemberdayaan kreativitas pembelajar melalui aktivitas hybrid tatap muka dan tatap maya. Kebijakan merdeka belajar memberikan ruang kebebasan inovasi kepada pendidik untuk menumbuh kembangkan kemampuan pembelajar secara progresif dan adaptif. Integrasi merdeka belajar dan pengembangan pelajar Pancasila memantik para akademisi dan praktisi pendidikan untuk berinovasi dalam pendekatan, metode, strategi, dan teknik pelaksanaan kebijakan di sekolah.

Tulisan ini menyajikan pemikiran manajemen instruksional masyarakat pembelajar yang disebut *Masyarakat Kelas (Classroom Society)* yang mengembangkan karakter pelajar Pancasila dengan praktik pendidik merdeka. Tulisan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi para pengambil kebijakan dan pendidik berinovasi dalam manajemen pendidikan dan pembelajaran merdeka belajar.

## **Merdeka Belajar**

Secara tangkas (*egile*), kebijakan merdeka digulirkan. Satu rangkaian yang saling terkait meliputi 4 pokok kebijakan pada episode I, kebijakan Organisasi Penggerak, Guru Penggerak, Sekolah Penggerak, dan Pelajar Pancasila yang berfokus kepada kualitas pembelajaran dan hasil belajar berbasis pembelajar. Merdeka belajar memberikan ruang kemandirian pembelajar dan kemerdekaan para pendidik, manajemen sekolah serta lingkungan pendidikan untuk menentukan sendiri cara terbaik dalam pelaksanaan pembelajaran. Sekolah diberikan keleluasaan menciptakan inovasi pembelajaran yang mampu mengembangkan potensi pembelajar secara optimal dan membangun karakter pelajar Pancasila.

Supriyono dalam buku *Dosen Merdeka* memberikan referensi *Panca Darma* Ki Hajar Dewantara dan konsepsi pendidikan abad 21. Asas kemerdekaan Ki Hajar Dewantara bermakna pembelajar berkesempatan melakukan eksplorasi ilmu pengetahuan dengan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan di bawah bimbingan pendidik. Proses pembelajaran memungkinkan pembelajar menumbuhkan rasa ingin tahu, menemukan sendiri jawaban dengan mengasah kemampuan berpikir secara aktif dalam bentuk interaksi masyarakat kelas. Pendekatan-pendekatan pembelajaran inkuiri, berbasis tugas, berbasis proyek, pembelajar aktif dan kreatif, dan pemecahan masalah merupakan penerapan dari asas kemerdekaan dan pendidikan abad 21. Pendidik berkewajiban mengidentifikasi dan mengelola potensi dan keunikan pembelajar sebagai *kodrat alam* mereka. Setiap pembelajar memiliki bakat, minat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Mereka adalah masyarakat pembelajar di ruang kelas fisik maupun virtual (*classroom society*) yang membutuhkan suasana belajar dengan sikap dan perilaku hormat menghormati, manusiawi, gotong royong, dan keberadaban sebagai perwujudan asas kemanusiaan dan asas budaya. Merdeka belajar merupakan proses bertumbuh dan berkembang pembelajar dalam masyarakat sekolah yang bermartabat untuk menjadi pribadi terbaik yang cakap dan berintegritas.

### **Pelajar Pancasila**

Konsepsi pelajar Pancasila dideskripsikan sebagai pelajar yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Karakteristik pelajar Pancasila ini tidak dideskripsikan secara rinci sehingga memberikan ruang bagi pendidik mengelaborasi dalam proses pembelajaran. Mereka perlu memerikan karakteristik pelajar berperikemanusiaan yang adil dan beradap, bersatu persatuan Indonesia, berkeadilan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Karakteristik pelajar yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia merupakan domain spiritualitas atas keyakinan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hubungan pembelajar dengan Tuhannya, karakter mulia, dan perilaku baik pada interaksi harmonis diantara pembelajar, pembelajar dengan pendidik, dan pembelajar dengan alam yang juga mampu berolah rasa. Karakter penalaran kritis dan kreatif dapat dikembangkan melalui aktivitas pembelajaran yang dinamis, kreatif dan inovatif. Karakter kemandirian dan gotong royong menumbuh kembangkan kompetensi *intrapersonal* dan *interpersonal*. Setiap pribadi pembelajar diharapkan kompeten dan mandiri. Mereka juga diharapkan mampu berinteraksi sosial dan tolong menolong yang menjadikan mereka

berberdikari dan berperikemanusiaan yang adil dan beradab. Secara inklusif hal ini juga mengembangkan karakter persatuan Indonesia, kemampuan bermusyawarah dan bermufakat secara hikmat dan bijaksana, dan berkeadilan sosial. Karakteristik kebinekaan global mengisyaratkan pengembangan kemampuan berkehidupan yang ber-Bhineka Tunggal Ika dan interaksi multikultural secara global. Konsepsi-konsepsi ini menjadi tantangan bagi para pendidik merdeka untuk mewujudkannya dalam aktivitas pembelajaran secara efektif.

### **Pendidik Merdeka dan Masyarakat Kelas Pelajar Pancasila**

Pendidik merdeka adalah pendidik yang mampu menemukan, menentukan, dan membuat inovasi sistem pembelajarannya sendiri secara efektif untuk menumbuh kembangkan kompetensi siswa secara holistik berbasis pada pembelajar. Pendidik merdeka memiliki kebebasan menciptakan pendekatan, metode, strategi, dan teknik pembelajaran. Kebebasan semacam ini tidak bisa dilakukan secara alamiah tanpa kompetensi yang memadai. Konsepsi merdeka belajar dan pelajar Pancasila mengandung kompleksitas unsur-unsur pedagogi, kompetensi inti dan kompetensi teknis, pengetahuan dan teknologi, dan manajemen serta supervisi pendidikan. Pendidik merdeka dituntut memiliki kompetensi inti dan kompetensi teknis yang memadai dan aplikatif di sepanjang zaman.

Arena pendidikan merupakan entitas masyarakat pembelajar, pendidik, dan penyedia layanan pendidikan. Ruang belajar tatap muka nyata dan tatap maya, pembelajar, pendidik, dan penyedia jasa pendidikan merupakan masyarakat kelas (*Classroom Society*). Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan berkarakter Pancasila, penciptaan ekosistem belajar masyarakat kelas pelajar Pancasila (*Pancasila Classroom Society*) dapat menjadi jawaban atas tantangan merdeka belajar. Hal dapat dilakukan dengan mempertimbangkan konsepsi *Panca Dharma* Ki Hajar Dewantara, Pendidikan Abad 21, dan G★GOLD Way yang diutarakan Supriyono dalam buku *Dosen Merdeka*. Konsepsi kehebatan dan keagungan manusia yang dianugerahkan oleh Allah dalam konsep *Greatness* berkesesuaian dengan makna asas kodrat alam dan prinsip abad 21 yang memperhatikan kapasitas, bakat, dan minat pembelajar yang beragam. Gardner menyebutkan bahwa manusia memiliki *multiple intelligence*. Kebebasan pembelajar untuk menyenangkan dan menentukan cara belajarnya dalam mengembangkan diri untuk memahami potensi diri sendiri, potensi kawan belajarnya, dan interaksi dalam belajar sejalan dengan konsepsi asas kemerdekaan dan *Gratitude*. Interaksi antar pembelajar dan tata cara berinteraksi dalam pembelajaran memerlukan kompetensi hubungan kemanusiaan dan budaya kelas yang harmonis yang

secara inklusif menjadi bagian dari proses pembelajaran. Kemandirian belajar, sikap dan perilaku saling menghormati, rasa saling menyayangi (*love*), perilaku tolong menolong atau gotong royong, praktik musyawarah mufakat secara bijaksana, ketaatan pada komitmen (*Obedience*), dan disiplin (*Discipline*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat kelas pelajar Pancasila. Pengembangan pengetahuan, keilmuan, dan intelegensi pembelajar dalam konsepsi abad 21 berpusat kepada pembelajar dan berfokus pada pengembangan kompetensi inti dan kompetensi teknis. Pada gilirannya, praktik manajemen instruksional masyarakat pembelajar Pancasila yang praktis, holistik, dan integrative sangat diperlukan.

### **Manajemen Instruksional Masyarakat Kelas Pelajar Pancasila**

*Perencanaan* pembelajaran masyarakat kelas pelajar Pancasila dapat dilakukan oleh pendidik merdeka dengan cara menyusun strategi perencanaan (1) pendidikan dan pembinaan kompetensi pembelajar, (2) unit pembelajaran, (3) pembelajaran efektif, dan (4) evaluasi pembelajaran. Pada poin pertama, asas kodrat alam dan kemerdekaan dapat di terapkan dengan mengidentifikasi kemampuan dasar peserta didik, kemampuan dominan peserta didik, motivasi, dan peminatannya. Setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Mereka berhak diberikan alternatif pilihan aktivitas pembelajaran untuk mencapai pribadi terbaiknya. Secara praktis pendidik merdeka mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik, menyusun strategi pembelajaran yang efektif, menentukan unit pembelajaran yang kontekstual, dan mengidentifikasi karakteristik bakat minat dan cara belajar mereka. Proses interaksi pembelajar di sekolah, interaksi di kelas, dan unjuk kerja pembelajaran merdeka belajar pelajar Pancasila merupakan rangkaian aktivitas masyarakat pembelajar atau kelas (*Classroom society*).

Masyarakat kelas pembelajar Pancasila bisa diorganisasikan dengan menciptakan sistem sosial di kelas melalui musyawarah dan mufakat untuk memahami tujuan pembelajaran dan proses pembelajaran (*goals*), membentuk organisasi kelas (*classroom organization*), menyusun peraturan kelas (*golden rules*), menciptakan peran dan tanggung jawab pemegang fungsi organisasi kelas (*roles and responsibility*), menciptakan prosedur interaksi kelas oleh para pembelajar itu sendiri (*procedures*), menciptakan instrumen perilaku interaksi kelas (*activator & consequences*), dan memberdayakan pembelajar untuk mampu berinteraksi dan berkomunikasi (*relation*).

Pendidik merdeka dalam pelaksanaan pembelajaran menciptakan suasana belajar yang hidup, menghidupkan, dan memungkinkan pembelajar belajar secara kontekstual. Pendidik merdeka haruslah tiba di arena belajar secara

disiplin dan menyambut kedatangan pembelajar dengan penuh suka cita, kewibawaan, kesantunan, dan pengayoman. Saat pembelajar tiba di sekolah pendidik menyambut dengan senyum, sapa, dan sikap hormat yang mendorong pembelajar menjadi pribadi yang berperadaban. Pendidik merdeka memfasilitasi pembelajar bermusyawarah membentuk organisasi kelas dengan memilih pemimpin kelas pada kurun waktu tertentu, semisal “*direktur kelas*” yang diberi tugas memimpin masyarakat kelas pembelajar Pancasila ini untuk belajar dan berinteraksi di kelas, Untuk memastikan kelas berjalan dengan baik dan mengatasi permasalahan di kelas dikembangkan komunikasi yang positif dan efektif dengan mengangkat “*manajer komunikasi kelas*”. Agar peralatan pelajaran dan sumber-sumber belajar dapat digunakan dengan efektif dan aman serta teratur maka diangkatlah “*manajer materials kelas*”. Para pembelajar dibiasakan untuk menciptakan kesepakatan atau aturan belajar (*golden rules*) mereka sendiri dan mengatasi permasalahan dengan menciptakan instrumen perilaku yang meliputi aktivator (*Activator*), perilaku (*behavior*), dan konsekuensi (*consequences*). Supriyono dan Dwi Pudjarso dalam materi *safety leadership* menyebutnya sebagai teori ABC yang dapat diterapkan dengan menciptakan aturan, membuat instrumen foto dan nama siswa yang diletakkan di tempat yang disepakati, membuat instrumen konsekuensi berupa buku peraturan, instrumen tiga bulatan *traffict light* merah, kuning, dan hijau, serta buku jurnal. Semisal ada pembelajar yang sampai baku pukul maka menjadi tugas “*direktur kelas untuk menghentikan*” dan tugas “*manajer komunikasi kelas*” untuk melakukan komunikasi dan memfasilitasi penyelesaian. Saatnya para pihak pembelajar mengerti penyebab dan kesalahan mereka, mereka dengan sesadar-sadarnya mengambil fotonya dan menaruh pada bulatan *traffict light* merah sebagai tanda pelanggaran berat dan menuliskan pada buku jurnal bahwa mereka telah melanggar dan dihari berikutnya sudah harus datang ke sekolah bersama orang tua menemui Guru untuk membuat komitmen tidak mengulangi perbuatannya. Inilah penerapan aktivator dan konsekuensi dengan contoh yang paling berat. Jika dalam beberapa waktu mereka sudah baik maka foto mereka akan berpindah ke bulatan *traffic light* kuning dan pada akhirnya masuk di hijau sehingga mereka menjadi warga *classroom society* yang sadar dan berkomitmen terhadap kehidupan pembelajaran yang aman. Berkenaan dengan metodologi dan strategi pembelajaran pendidik merdeka bisa secara kreatif bersama masyarakat pembejar Pancasila menciptakannya. Pembelajar Pancasila selain dimampukan untuk bereksplorasi, berkreasi, berinovasi, dan berintegritas juga dimampukan untuk melakukan evaluasi diri.

*Evaluasi* pembelajaran dapat dilakukan secara otentik dan pada akhirnya pembelajar mengetahui sendiri kelemahan, kelebihan, dan cara untuk mencapai pribadi terbaiknya. Mereka juga harus dimampukan untuk berkomunikasi *tree way communication*, sebagai contoh adalah saat pada akhir semester mereka

sendirilah yang berpresentasi kepada orang tuanya di hadapan gurunya dan melaporkan hasil belajarnya, menyampaikan analisis kelemahan dan kelebihan serta memberikan komitmen perbaikan pada semester berikutnya. Evaluasi diarahkan pada refleksi holistik pembelajar untuk mencapai pribadi terbaiknya sehingga mereka bisa beradaptasi dan berhasil dalam kehidupan yang terus bergerak dalam suasana *volatile, uncertain, complex*, dan *ambiguous*.

## Penutup

Pengembangan manajemen instruksional masyarakat kelas pelajar Pancasila dalam konteks tulisan ini memberikan inspirasi kepada pendidik merdeka untuk mensintesa konsepsi-konsepsi merdeka belajar, pelajar Pancasila, Panca Dharma Ki Hajar Dewantoro, G ★GOLD WAY, Pedagogi abad 21, implementasi nilai-nilai Pancasila, dan strategi-strategi pembelajaran. Akhir tujuan dari pendidikan dalam kerangka merdeka belajar dan pelajar Pancasila adalah memampukan pembelajar mencapai pribadi terbaiknya untuk mampu berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan berkehidupan global.

## Profil Penulis



Dr. Supriyono, M.Ed adalah dosen FKIP Universitas Islam Balitar dan Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Kewirausahaan, dan Kemahasiswaan. Ia berpengalaman mengajar pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan industri multinasional baik di dalam dan di luar negeri. Ia juga tersertifikasi pada bidang *Human Capital* pada industri pertambangan, Pendidikan, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia termasuk sertifikasi non gelar berbasis NLP. Saat ini ia juga berkhidmat pada organisasi-organisasi Islam dan pemberdayaan ekonomi di lingkungan pesantren termasuk Asosiasi Pesantren Indonesia Kreatif Koperasi KOTA SANTRI, Dewan Koordinasi Nasional De Porang, dan Badan Usaha Milik Pesantren. Ia aktif dalam organisasi profesi pendidikan diantaranya Forum Silaturahmi Dr. Supriyono, M.Ed adalah dosen FKIP Universitas Islam Balitar dan Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Kewirausahaan, dan Kemahasiswaan. Ia berpengalaman mengajar pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan industri multinasional baik di dalam dan di luar negeri. Ia juga tersertifikasi pada bidang *Human Capital* pada industri pertambangan,

Pendidikan, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia termasuk sertifikasi non gelar berbasis NLP. Saat ini ia juga berkhidmat pada organisasi-organisasi Islam dan pemberdayaan ekonomi di lingkungan pesantren termasuk Doktor Indonesia. Ia juga bertugas sebagai asesor nasional sekolah penggerak dan menjadi konsultan di Sekolah-Sekolah Islam di Jawa Timur diantaranya Hidayatullah Tahfidz Global Islamic Schools, Anharul Ulum Santripreneurial Islamic Boarding Schools, dan Bustanul Muta'alimin Entrepreneurial Islamic Boarding Schools.

## **Kepustakaan**

Al Qur'an Gardner, H (2021). Multiple Intelligence. <https://www.howardgardner.com/>. diunduh pada 28 September 2021 Jam 20:00

Hidayat, Y.M. (2019) Konsep Pendidikan Ki Hajar Dewantara. <https://kelasimpian.com/konsep-pendidikan-ki-hajar-dewantara>. Diunduh pada 20 Juni 2021 Jam 18:37

<https://www.kompasiana.com/christoperravael/61222ced06310e04e30a7ba2/makna-merdeka-belajar-bagi-siswa-dan-siswiindonesia#:~:text=Menurut%20Mendikbud%20Nadiem%20Makarim%2C%20arti,cara%20terbaik%20dalam%20proses%20pembelajaran>. Diunduh pada 26 September 2021 Jam 19:24

National Endowment for Humanity (2011) John Dewey:Portrait of A Progressive Thinker. <https://www.neh.gov/article/john-dewey-portrait-progressive-thinker>.Diunduh pada 20 Juni 2021 Jam 17:20

Supriyono (2016). Developing Character Education with Reference to Islamic Perspective: A Conceptual Review. *JARES*, (2016), 1(1): 1-32

Supriyono dan Pudjiarso, D (2021) Teori ABC: Activator, Behavior, and Consequences. *Materi Pelatihan KMMI Safety Leadership*. Blitar: Universitas Islam Balitar.

Supriyono (2021) Menjadi Pribadi Tangguh Cara G\*GOLD WAY. <https://www.youtube.com/watch?v=GTg1SmA08W4>. Diunduh pada 20 Juni 2021 Jam 18:37

Supriyono (2021) Pengembangan Kapasitas Kepala SMK dan SMA Se Probolinggo: Merdeka Belajar dan Supervisi Pembelajaran Berbasis G\*GOLD WAY. *Presentasi Workshop*. Probolinggo: Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur



Supriyono (2021) *Supervisi Pembelajaran Berbasis G\*GOLD Way. Naskah Webinar*. Jakarta: P4TK Bahasa

Supriyono (2021) *Menjadi Dosen Merdeka Cara G\*GOLD WAY*. Dalam Wahid, A, Dkk (Editor) *Dosen Merdeka: Peran Tantangan, Strategi, Transformasi dan Inovasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka*. Malang: UNISMA Press

# **MERDEKA BELAJAR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

Oleh : Dr. Lailatul Usriyah M.Pd.I  
UIN KHAS Jember  
Email: lailatulusriyah1978@gmail.com

Pada era revolusi industri 4.0 telah memiliki banyak tantangan hingga peluang bagi bidang pendidikan. Syarat utama untuk dapat melangkah lebih maju, maka bidang pendidikan harus memiliki inovasi serta dapat berkolaborasi. Begitu sebaliknya, apabila tidak mampu berinovasi dan berkolaborasi, maka bidang pendidikan akan tertinggal jauh di belakang.<sup>1</sup> Menjadikan manusia sebagai pembelajar, bukanlah suatu hal yang mudah, sebab pendidikan harus mampu menyeimbangkan antara pendidikan dengan perkembangan zaman.

Di era ini, diharapkan sistem pendidikan dapat mencetak generasi yang memiliki keterampilan dalam berfikir kritis, mampu memecahkan masalah, kreatif, inovatif, terampil dalam mengelola dan menyampaikan informasi, hingga mampu berkolaborasi. Sehingga, dalam bidang pendidikan sejatinya tidak hanya membutuhkan literasi lama seperti halnya membaca; menulis; serta menghitung saja, melainkan juga membutuhkan literasi baru. Dalam literasi baru, yang dibutuhkan oleh bidang pendidikan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: (1) Literasi data, literasi ini merupakan kemampuan dalam membaca, menggali, menganalisis, serta memanfaatkan informasi yang ada dalam dunia digital; (2) Literasi teknologi, literasi ini adalah kegiatan memahami cara kerja mesin hingga aplikasi teknologi (*Coding Artificial Intelligence & Engineering Principles*); (3) Literasi manusia, literasi ini berupa penguatan humanities, komunikasi, serta desain.<sup>2</sup> Dan beberapa dari kegiatan literasi ini, dapat dilaksanakan oleh seorang pendidik dan peserta didiknya.

---

<sup>1</sup> Muhammad Al Farizqi, dkk, “Model Pembelajaran Berbasis *Blended Learning* dalam Meningkatkan *Critical Thinking Skills* untuk Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0”, *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan STKIP Andi Matappa Pangkep*, Nomor 1 (05 Mei 2018): 85.

<sup>2</sup> Muhammad Yamin dan Syahrir, “Pembangunan Pendidikan Merdeka Belajar (Telaah Metode Pembelajaran)”, *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, Nomor 1 (April

Saat berpidato pada acara Hari Guru Nasional tahun 2019, Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia telah menyinggung konsep “Pendidikan Merdeka Belajar”. Konsep ini merupakan sebuah respon terhadap perkembangan zaman, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), tuntutan dunia usaha dan industri, dinamika masyarakat Indonesia, serta kebutuhan yang ada dalam sistem pendidikan pada era 4.0.<sup>3</sup> Maka dari itu, sangatlah relevan apabila kita menengok data muktakhir serta diskursus para scholar terkait metode pembelajaran di Indonesia. Untuk diskursus oleh scholar yang fokus meneliti di Negara Indonesia akan lebih dominan diuraikan oleh para *author*. Namun ada satu kepastian dalam era 4.0 ini, bahwasanya sebuah kebutuhan utama yang ingin dicapai dalam sistem pendidikan (lebih khususnya dalam metode pembelajaran) yaitu peserta didik terhadap penguasaan literasi baru. Namun, tetap tidak meninggalkan pembangunan karakter, seperti halnya kejujuran; religius; rajin; tanggungjawab; adil; disiplin; toleransi; mandiri; berani; dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Sehingga melalui Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah resmi menggulirkan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang memiliki tujuan untuk memberikan bekal dengan berbagai macam keahlian kepada para mahasiswa Indonesia.<sup>5</sup> Diharap dengan memiliki berbagai keahlian, mereka dapat memiliki kesiapan untuk memasuki dunia kerja yang semakin kompetitif di era 4.0 seperti ini. Karena merespon kebijakan tersebut, maka Kementerian Agama telah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 7290 Tahun 2020 Tentang Panduan Penerapan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dalam Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi.<sup>6</sup>

---

2020): 129, <http://dx.doi.org/10.36312/jime.v6i1.1121>

<sup>3</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Buku Paduan Merdeka Belajar*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, 2020), 8.

<sup>4</sup> Muhammad Yamin dan Syahrir, “Pembangunan Pendidikan Merdeka...”, 130

<sup>5</sup> Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020” Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Salinan PERMENDIKBUD 3 TAHUN 2020 FIX GAB.pdf ([kemdikbud.go.id](http://kemdikbud.go.id))

<sup>6</sup> Diktis Kemenag, “Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 7290 Tahun 2020”, Menteri Agama Republik Indonesia, 792b9ec00572bccd694b27be0e8e1b68.Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Dalam Kurikulum Prodi pada PTKI.pdf ([kemenag.go.id](http://kemenag.go.id))

Kebijakan MBKM ini, telah memberikan keluesan dan keleluasaan pada para mahasiswa dalam belajar.<sup>7</sup> Mereka dapat belajar tidak hanya pada satu program studi (prodi) yang telah diambilnya saja, melainkan juga dapat belajar di prodi lain baik itu dalam satu perguruan tinggi ataupun lintas perguruan tinggi.<sup>8</sup> Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Kiai Haji Achmad Siddiq (KHAS) Jember terus mendukung program kebijakan ini. Dalam menjalankan program MBKM ini, PGMI UIN KHAS Jember sangat memerlukan persiapan yang sinergi antar prodi, fakultas, serta universitas. Oleh sebab itu, semua komponen di perguruan tinggi, khususnya UIN KHAS Jember harus mampu berjalan bersama. Hal ini dilakukan guna dapat merumuskan sebuah kebijakan yang lebih bersifat operasional, hingga kemudian dikemas dalam bentuk pedoman teknis ataupun *Standard Operating Procedur* (SOP) sebagai pedoman dalam pengimplementasian program MBKM tersebut.

Dalam hal ini, pembelajaran di prodi PGMI UIN KHAS Jember sebagai salah satu pelaksana program MBKM telah memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, hingga mengembangkan kemandirian para mahasiswanya dalam mencari, menggali, dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan serta dinamika lapangan seperti halnya dengan interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, permasalahan yang riil, hingga target dan pencapaiannya. Selain itu, dilihat dari sisi proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), pembelajarannya berpusat pada mahasiswanya (*student centered learning*), hal ini adalah perwujudan yang sangat esensial dalam pembelajaran di kampus Merdeka.<sup>9</sup> Oleh karena itu, perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang serta melaksanakan pembelajaran yang inovatif guna memfasilitasi mahasiswa untuk dapat mencapai pembelajaran yang mencakup aspek kognitif, afektif, hingga psikomotorik secara optimal dan relevan.

Kebijakan kampus merdeka ini telah memiliki empat pokok kebijakan, di antaranya: (1) Kemudahan dalam pembukaan program studi baru; (2) Perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi; (3) Kemudahan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi PTN berbadan hukum; (4) Serta hak belajar tiga semester di luar program studi.<sup>10</sup> Dari ke empat kebijakan ini, tentu hal yang paling dirasakan oleh para mahasiswa PGMI UIN KHAS Jember adalah belajar tiga semester (di semester 5, 6, dan 7) di luar program studi baik di dalam ataupun

---

<sup>7</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Buku Paduan...*, 9.

<sup>8</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Buku Paduan...*, 5.

<sup>9</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Buku Paduan...*, 47.

<sup>10</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Buku Paduan...*, 6.

di Luar UIN KHAS Jember yang telah membuat dokumen kerja sama atau *Memorandum of Understanding* (MoU). Dan Perguruan Tinggi yang telah membuat Sistem Pendukung Keputusan (SPK) atau MoU dengan UIN KHAS Jember adalah Universitas Islam Malang (UNISMA), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN MALIKI) Malang, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Universitas Negeri Jember (UNEJ), serta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah (UIN SATU) Tulung Agung.

Dalam pelaksanaan MBKM, terdapat Struktur kurikulum khusus, di antaranya: Mata Kuliah Dasar Institut (MKDI) adalah 28 SKS; Mata Kuliah Fakultas (MKF) adalah 20 SKS; Mata Kuliah Utama Prodi (MKUP) adalah 86 SKS, dan Mata Kuliah Pilihan Prodi (MKPD) adalah 10 SKS. Dan dalam MBKM, peran pihak perguruan tinggi dalam permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang STANDAR Nasional Pendidikan Tinggi adalah memfasilitasi hak mahasiswa, di antaranya: (1) Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama dua semester atau setara dengan 40 SKS, (2) Dapat mengambil SKS di Program Studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak satu semester atau setara dengan 20 SKS.<sup>11</sup>

Setelah UIN KHAS Jember menyusun kebijakan ataupun pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi serta membuat dokumen kerja sama (MoU atau SPK), selanjutnya FTIK menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil oleh mahasiswa lintas prodi, selain itu pihak FTIK juga harus menyiapkan dokumen MoU/SPK dengan perguruan tinggi yang relevan. Sementara itu, pihak di tingkat jurusan atau prodi PGMI menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi Kampus Merdeka, selain itu prodi PGMI dalam lingkup satu UIN KHAS ataupun di kampus lain yang bersangkutan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Kebijakan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan PGMI, baik *soft skills* maupun *hard skills* agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman serta menyiapkan lulusan PGMI sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.

## DAFTAR PUSTAKA

Al Farizqi, Muhammad dkk, "Model Pembelajaran Berbasis *Blended Learning* dalam Meningkatkan *Critical Thinking Skills* untuk Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0", *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan STKIP Andi Matappa Pangkep*, Nomor 1. 5 Mei 2018.

---

<sup>11</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Buku Paduan...*, 11.

Diktis Kemenag. "Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 7290 Tahun 2020". Menteri Agama Republik Indonesia, 792b9ec00572bccd694b27be0e8e1b68. Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Dalam Kurikulum Prodi pada PTKI.pdf (kemenag.go.id)

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. *Buku Paduan Merdeka Belajar*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI. 2020.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020". Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Salinan PERMENDIKBUD 3 TAHUN 2020 FIX GAB.pdf (kemdikbud.go.id)

Yamin, Muhammad dan Syahrir, "Pembangunan Pendidikan Merdeka Belajar (Telaah Metode Pembelajaran)", *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, Nomor 1. April 2020. <http://dx.doi.org/10.36312/jime.v6i1.1121>

# **MERDEKA BELAJAR DI KAMPUS MERDEKA BERDASARKAN PANCASILA**

**Endang Muryani**  
**Universitas Merdeka Surabaya**  
**Jl. Ketintang Madya VII no.2 Surabaya**

Kampus merdeka merupakan perpanjangan dari program merdeka belajar yang masih selalu diperbincangkan di bidang pendidikan yang memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mencari pengalaman belajar di luar jurusannya. Hal ini merupakan langkah agar dapat terciptanya peningkatan kualitas pendidikan yang dicetuskan oleh menteri pendidikan Nadiem Makarim. (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020)

Perguruan tinggi diharapkan mampu melakukan inovasi inovasi dalam setiap proses pembelajarannya yakni pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa agar mendukung tercapainya lulusan yang berkualitas yang siap menghadapi situasi zaman yang terus berubah.

Hal ini dilakukan untuk dapat melahirkan lulusan terbaik dari perguruan tinggi yang akan terjun menjadi agen perubahan terbesar dalam kemajuan peradaban. Mahasiswa tidak hanya menjadi lulusan terbaik yang pandai dalam berteori akan tetapi mampu merealisasikan teori. Terjun kelapangan dengan bekal ilmu yang dalam untuk terobosan yang relevan. Demi kemajuan pendidikan yang tidak pernah berkesudahan. Untuk dapat terlibat dalam kebijakan ini mahasiswa harus berasal dari program studi yang terakreditasi, dan aktif yang terdaftar pada PDDikti.

Bentuk kegiatan umum ada konsep kampus merdeka ialah: pertukaran pelajar, magang, Asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, proyek independen, membangun desa/kuliah kerja nyata tematik (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,2020).

Merdeka belajar dalam kampus merdeka tidak berarti adanya kebebasan yang absolut, namun merdeka belajar yang ada batasan batasannya, nilai-nilai dasar bangsa Indonesia itulah yang membatasi dan menjadi batasan dalam

menjalakan proses pembelajaran pada program merdeka belajar di kampus merdeka.

Nilai-nilai yang digali dari budaya bangsa Indonesia sebagai kekayaan luhur yang ada sejak bangsa Indonesia ada. Oleh sebab itu, sebagai sebuah bentuk kekayaan bangsa berdasarkan penjelasan di atas pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir/pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia ( Dardji Darmodiharjo, 1988) Pasal 2 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang undang Nomor 15 Tahun 2019 menyatakan bahwa PANCASILA merupakan sumber dari segala sumber hukum; ini memberikan makna bahwa secara materiil. Substansi atau isi dari segala bentuk peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah dengan yang sila silanya tertuang dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam sila yang ke dua , yakni Kemanusiaan Yang adil dan Beradab menjadikan setiap warga negara punya kewajiban dan hak yang sama, juga dijamin haknya serta kebebasannya terkait hubungannya dengan Tuhan, orang lain, negara dan masyarakat. Demikian juga dapat menjadikan seseorang memiliki kemerdekaan menyatakan pendapat,serta berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 29 UUD 1945).

Butir butir sila ke dua “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” dalam Pancasila diantaranya:

- 1 Mengakui dan memperlakukan manusiasesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- 2 Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda bedaka, suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya.
- 3 Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
- 4 Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepo sliro.
- 5 Mengembangkan sikap saling tidak semena mena terhadap orang lain.
- 6 Menjunjung tinggi nilai nilai kemanusiaan.



- 7 Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
- 8 Berani membela kebenaran dan keadilan.
- 9 Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
- 10 Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

Hal ini dapat memberikan gambaran bahwa menempatkan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara serta sekaligus sebagai dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Nilai-nilai yang digali dari budaya bangsa Indonesia sebagai kekayaan luhur yang ada sejak bangsa Indonesia ada. Oleh sebab itu, sebagai sebuah bentuk kekayaan bangsa berdasarkan penjelasan di atas pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir/pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia ( Dardji Darmodiharjo, 1988)

Sejarah Indonesia telah mencatat bahwa di antara tokoh perumus Pancasila itu ialah, Mr.Mohammad Yamin, Prof Mr Soepomo, dan Ir Soekarno. Mereka telah berjasa dalam merumuskan dan menggali nilai-nilai luhur budaya bangsa yang terpendam menjadi sebuah falsafah hidup bagi bangsa Indonesia. Sehingga dapat dipahami, mengapa Pancasila itu sakti dan selalu dapat bertahan dari segala guncangan di negara ini.

Merdeka belajar dalam kampus merdeka tidak berarti adanya kebebasan yang tidak terbatas (absolut), tetapi merdeka belajar yang ada batasan batasannya, nilai-nilai dasar bangsa Indonesia itulah yang membatasi dalam menjalankan proses pembelajaran pada program merdeka belajar di kampus merdeka. Program merdeka belajar memang menjadi hak bagi mahasiswa untuk dijalankan dan menjadi kewajiban bagi perguruan tinggi selaku pelaksana dalam kampus merdeka. Kampus merdeka memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mencari pengalaman belajar di luar jurusannya.

Perguruan tinggi diharapkan mampu melakukan inovasi inovasi dalam setiap proses pembelajarannya Yakni pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa agar mendukung tercapainya lulusan yang berkualitas yang siap menghadapi situasi zaman yang terus berubah.

Pemerintah juga mengambil fungsi dalam pembaharuan pendidikan, dan disinilah pemerintah menciptakan konsep kampus merdeka belajar. Dimana salah satu dari konsep ini adalah memberikan kebebasan selama tiga semester untuk melakukan tindakan yang membutuhkan pengalaman belajar maupun pengalaman sosial, dengan tidak menyampingkan teknologi dan tiga semester ini dilakukan diluar program studi.

Mahasiswa tidak hanya menjadi lulusan terbaik yang pandai dalam berteori akan tetapi mampu merealisasikan teori. Terjun kelapangan dengan bekal ilmu yang dalam untuk terobosan yang relevan. Demi kemajuan pendidikan yang tidak pernah berkesudahan. Untuk dapat terlibat dalam kebijakan ini mahasiswa harus berasal dari program studi yang terakreditasi, dan aktif yang terdaftar pada PDDikti.

Bentuk kegiatan umum ada konsep kampus merdeka ialah: pertukaran pelajar, magang, Asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, proyek independen, membangun desa/kuliah kerja nyata tematik (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).

Adapun pokok kebijakan pemerintah terkait dengan kampus merdeka belajar sebagai terobosan terbaru ialah:

- a. Pembukaan program studi baru dengan arahan kebijakan saat ini:
  - 1) PTN dan PTS diberi otonomi untuk membuka prodi baru jika:
    - a) Perguruan tinggi tersebut memiliki akreditasi A dan B
    - b) Prodi dapat diajukan jika ada kerjasama dengan mitra perusahaan, organisasi nirlaba, institusi, multilateral, atau universitas Top 100 ranking QS
    - c) Prodi baru tersebut bukan di bidang kesehatan dan pendidikan
  - 2) Kerja sama dengan organisasi mencakup penyusunan kurikulum, praktik kerja, dan penempatan kerja. kementerian akan bekerja sama dengan PT dan mitra prodi untuk melakukan pengawasan.
  - 3) Prodi baru tersebut otomatis akan mendapatkan akreditasi C prodi baru yang tengah diajukan oleh PT berakreditasi A dan B akan otomatis mendapatkan akreditasi C dan BAN-PT
  - 4) Tracer studi wajib dilakukan setiap tahun.
- b. Sistem akreditasi perguruan tinggi dengan arahan kebijakan:
  - 1) Akreditasi yang sudah ditetapkan oleh BAN-PT tetap berlaku 5 tahun dan akan diperbaharui secara otomatis. Perguruan tinggi yang terakreditasi B atau C dapat mengajukan kenaikan akreditasi kapanpun secara sukarela

untuk menjadi badan hukum tanpa ada akreditasi minimum 3) PTN dapat mengajukan

- 2) Peninjauan kembali akreditasi akan dilakukan BAN-PT jika ada indikasi penurunan mutu, misalnya:
- 3) Adanya pengaduan masyarakat (disertai dengan bukti yang konkret)
- 4) jumlah pendaftar dan lulusan dari PT/Prodi tersebut menurun drastis lima tahun berturut-turut (ketentuan lebih lanjut tentang penurunan kualitas akan diatur melalui peraturan Dirjen terkait) Akreditasi A akan diberikan bagi prodi yang berhasil mendapatkan akreditasi Internasional. Akreditasi internasional yang diakui akan ditetapkan melalui keputusan menteri.
- 5) pengajuan re-akreditasi PT dan Prodi dibatasi paling cepat 2 tahun setelah mendapatkan akreditasi yang terakhir kali. Tracer study wajib dilakukan setiap tahun.

c. Perguruan tinggi negeri badan hukum, dengan arahan ke depannya:

- 1) Persyaratan untuk menjadi BH (Badan Hukum) dipermudah bagi PTN BLU (Badan Layanan Umum) & Satker (Satuan Kerja)
- 2) PTN BLU dan Satker dapat mengajukan perguruan tingginya permohonan menjadi BH kapanpun apabila merasa sudah siap

d. Hak belajar tiga semester di luar program studi, dengan arahan kebijakan:

- 1) Perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat mengambil atau tidak):
- 2) Dapat mengambil sks di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks)
- 3) Ditambah lagi, dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan 20 sks)
- 4) Dengan kata lain sks yang wajib diambil di prodi asal adalah sebanyak 5 semester dari total semester yang harus dijalankan (tidak berlaku untuk prodi kesehatan).

Terkait dengan SKS ada perubahan definisi atau paradigma, yakni:

- Sks merupakan jam kegiatan
- Semua jenis kegiatan (belajar di kelas dan diluar kelas seperti magang, pertukaran pelajar, proyek di desa dan sebagainya) harus dipandu oleh seorang dosen yang telah ditentukan oleh Perguruan Tinggi.
- Mahasiswa dapat mengambil daftar kegiatan selama 3 semester tersebut dengan pilihan program dari pemerintah dan program yang disetujui Rektor. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020)

## **Merdeka Belajar.**

Sesuai dengan kebijakan Nadiem, kata "Merdeka Belajar" digunakan sebagai filosofi perubahan dari metode pembelajaran yang terjadi selama ini ada. Mahasiswa diberikan kebebasan dalam memilih mata kuliah sesuai dengan keinginan, bila mata kuliah yang diinginkan tidak tersedia di program studi, mahasiswa dapat memilih di lintas prodi baik yang ada di internal perguruan tinggi maupun di perguruan tinggi lain dengan ketentuan dan pengarahan dari ketua program studinya.

Dalam pelaksanaan merdeka belajar di kampus merdeka mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, sinergi dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan buku panduan merdeka belajar di kampus merdeka. Teknis merdeka belajar di kampus merdeka mahasiswa, Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa mengambil atau tidak untuk mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS, dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS, Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi, membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra.

Sementara dari Fakultas Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Perguruan Tinggi seperti menyiapkan fasilitas daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi, Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya. menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan, Program Studi menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka, Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, bila ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring. Dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi meliputi merdeka belajar seperti : pertukaran pelajar, magang praktek kerja, asistensi mengajar di pendidikan, melakukan penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi proyek, dan membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik.

## **Pancasila.**

Gagasan pembelajaran dengan metode merdeka belajar selaras dengan Pancasila Yang ada disila ke dua, yakni Kemanusiaan Yang adil dan Beradab menjadikan setiap warga negara punya kewajiban dan hak yang sama, juga dijamin haknya serta kebebasannya terkait hubungannya dengan Tuhan, orang lain, negara dan masyarakat. Memberi kesempatan pendapat, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, butir butir sila ke dua “ Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” dalam Pancasila dikaitkan dengan merdeka belajar memperlakukan mahasiswa sesuai harapan untuk memperoleh dan penghidupan yang layak, memberikan hak untuk menentukan matakuliah yang ditempuh sesuai dengan norma yang diad di pertguruan tinggi. mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa. mengembangkan sikap saling tidak semena mena terhadap orang lain.

## **PROFIL PENULIS.**



Endang Muryani lahir di Surabaya 59 tahun lalu, Doktor dari Ilmu Ekonomi dengan konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia lulus tahun 2019 dari Universitas Merdeka Malang. Sebagai dosen tetap dan Dekan di Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Surabaya. mempunyai ID Scopus 57208741212 publish beberapa Manuskrip. Aktif di organisasi baik organisasi profesi maupun non profesi. Sebagai pendamping dan fasilitator UKM

## **Daftar Pustaka**

Kemendikbud RI. (2020). Bebas Memilih 3 Semester di Luar Prodi, Kampus Merdeka 4/4.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). Merdeka Belajar: Kampus Merdeka.

Lili Rasjidi, Ira ThaniaRasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, CV Mandar Maju, 2010, ISBN: 978-979-538- 213-3 Bandung.

Makdori, Y. (2020). Kemdikbud Rilis Konsep Kampus Merdeka untuk Perguruan Tinggi.

Nurhayani Siregar, Rafidatun Sahirah, Arsikal Amsal Harahap,(2020) KONSEP KAMPUS MERDEKA

Permerdiknas no 3 tahun 2020 tentang standar nasional

Panduan Merdeka belajar -kampus merdeka

# MERDEKA BELAJAR DAN TANTANGANNYA

Hairuddin K.

Universitas Megarezky

Merdeka belajar adalah salah satu program nasional yang dicanangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim. Merdeka belajar merupakan sebuah upaya menjawab tantangan Industri 4.0. Di Era industry 4.0 dunia pendidikan dihadapkan pada tantangan yang mensyaratkan perubahan yang sifatnya mendasar. Tak berubah berarti menjadikan bangsa ini tidak akan mampu mengejar ketertinggalannya. Menjadikan bangsa ini tidak mampu menembus elit negara-negara maju.

Dunia telah memasuki era industry 4.0 dimana seluruh aktivitas khususnya ekonomi dilakoni dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Duryat menyatakan “Era Industri 4.0 menawarkan efisiensi waktu dan sumber daya, penghematan biaya, kenaikan pendapatan, kelincahan (*agility*), maupun inovasi bagi industri (Duryat, 2020:678). Setiap bangsa harus menjawab tantangan baru revolusi ekonomi, revolusi Industri 4. Dunia pendidikan termasuk sector yang mesti berbenah dan mempersiapkan lulusan yang mampu berkompetisi.

Dunia pendidikan di era industry 4.0 tidak hanya berurusan dengan penguasaan literasi dasar membaca, menulis dan menghitung. Namun penguasaan literasi lanjutan seperti literasi data yang ditujukan pada kompetensi analisis dan penggunaan big data; literasi teknologi yang bertujuan pada penguatan kompetensi cara kerja mesin, aflikasi teknologi seperti Coding Artificial Intelligence dan engineering principles ; dan penguasaan literasi manusia yang terdiri dari penguatan kemampuan komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, kreatif dan inovatif.

Merdeka belajar berintikan terobosan terhadap permasalahan pendidikan yang selama ini cukup membelenggu kreativitas. Merdeka belajar berintikan paradigm relasi subyek-subyek antara peserta didik dan gurunya. “Dalam konsep merdeka belajar, antara guru dan murid merupakan subyek di dalam sistem pembelajaran. Artinya guru bukan dijadikan sumber kebenaran oleh siswa, namun guru dan siswa berkolaborasi penggerak dan mencari kebenaran. Artinya posisi guru di ruang kelas bukan untuk menanam atau menyeragamkan kebenaran menurut guru, namun menggali kebenaran, daya nalar dan kritisnya murid melihat dunia dan fenomena”. (Yamin & Syahrir, 2020 : 127).

Iklim pembelajaran yang termaktub dalam Merdeka belajar merupakan sebuah terobosan besar namun tentu saja problematika implementatif menjadi factor yang menarik untuk dipaparkan. Sejak lama, sosiologi memandang bahwa pendidikan memiliki fungsi latensi dalam struktur sosial. Sebuah fungsi untuk menjamin dan menjaga agar suatu struktur sosial bisa terus bertahan dan menjawab tuntutan zaman.

Berdasar fungsi latensi, merdeka belajar diharapkan dapat memberikan landasan bagi bangsa ini untuk bertahan dan beradaptasi terhadap iklim global yang terus berubah. Tahapan industry 1.0 ke industry 4.0 mensyaratkan perubahan yang mendasar agar warga bangsa memiliki kemampuan untuk menjawab tantangannya. Terobosan mesti dilakukan namun tak berarti tanpa tantangan.

Tantangan pertama terletak pada kultur birokrasi yang justru tidak memaksimalkan tugas pendidik. Hal ini tercermin dari pernyataan Nadiem sendiri : “Guru ingin membantu murid untuk mengejarkan ketertinggalan di kelas, tetapi waktu habis untuk mengejarkan administrasi tanpa manfaat yang jelas. Guru mengetahui potensi siswa tidak dapat diukur dari hasil ujian, namun guru dikerjar oleh angka yang didesak oleh berbagai pemangku kepentingan ....Guru mengetahui bahwa setiap murid memiliki kebutuhan berbeda, tetapi keseragaman mengalahkan keberagaman sebagai prinsip dasar birokrasi.”

Tantangan kedua, kesiapan pendidik dan peserta didik sendiri untuk dapat berubah. Model pengajaran yang tidak partisipatif dan kuno haruslah ditinggalkan. Pembelajaran di abad 21 memiliki perbedaan mendasar dibanding abad ke 20. Salah satunya adalah perbedaan relasi antara pendidik dan peserta didik. Pengajaran abad 20 mendudukan pendidik sebagai “*Classroom activity often focusses on the teacher as presenter and the students as audience.*” Dan Abad 21 pendidik : “*Classroom activity often focusses on students as participants and agents and the teacher as guide or mentor.*”(Singha, Ong, Mohtar, Sighn & Mostafa, 2020:1482)

Perubahan kultur ruang kelas mensyaratkan perubahan cara guru/dosen dalam memandang proses belajar mengajar. Para pendidik hendaknya mengubah perspektifnya dan kultur pertukaran ilmu pengetahuan yang mensyaratkan proses kolaboratif antar dirinya dengan muridnya. Keduanya menjadi mitra menjadi *co-developers* bagi masing-masing pihak. Bekerjasama untuk mewujudkan tujuan Merdeka Belajar yang telah dicanangkan. Merdeka belajar menjadikan peserta didik diharapkan memiliki penguasaan keterampilan 4 C (*Creativity, Critical Thinking, Communication dan Collaboration*). Keterampilan 4 C menjadikan peserta didik sebagai sosok yang independen dan inovatif dalam



menerima pelajaran dan memiliki kemampuan *problem solver* atas berbagai tantangan yang datang dari lingkungannya.

Tantangan ketiga, kesiapan manajemen sekolah atau kampus dalam mensukseskan program merdeka belajar. Pihak manajemen sekolah atau kampus harus mengubah tata kelola dan iklim pendidikan di institusinya masing-masing. Manajemen sekolah harus menyuburkan iklim *knowledge society*.

Rakhmat menyebutkan bahwa sekolah harus menciptakan *knowledge society* yang berisi beberapa poin : 1) Sekolah harus memberikan *universal literacy* pada tingkat yang tinggi-diatas literasi yang biasa (Bisa ditambahkan literasi numeric dan literasi computer saya ingin menyebutnya komputerisasi) 2) Sekolah harus menanamkan kepada anak didik pada semua tingkat dan semua usia motivasi untuk belajar dan dengan disiplin untuk terus menerus belajar 3) Sekolah harus terbuka baik kepada mereka yang sudah memperoleh pendidikan tinggi maupun kepada orang-orang yang karena sesuatu hal tidak dapat melanjutkan studinya pada waktu yang lalu 4) Diperlukan sekolah yang memberikan pengetahuan baik berupa substansi maupun proses-apa yang disebut orang Jerman sebagai *Wissen dan Konnen (knowledge dan capability)*. 5) Akhirnya, sekolah tidak lagi monopoli pendidikan. Pendidikan pada masyarakat pascakapitalis harus menembus seluruh masyarakat. Semua lembaga sosial seperti organisasi bisnis, agen pemerintah, non-profit, dapat menjadi lembaga belajar-mengajar. Sekolah menjadi mitra *employers* dan organisasi yang memperkerjakan 6) Sekolah harus menanamkan sikap terbuka dan kritis; seraya melatih para siswa untuk menerima, mengolah dan menyampaikan informasi. Hanya dengan sikap terbuka, anak-anak Indonesia dapat dengan bebas dan suka hati melanglang cyberspace 7) Sekolah harus dikelola secara profesional, dengan menggunakan teknologi informasi mutakhir. Fungsi guru hanyalah memotivasi, mengarahkan dan memberikan dorongan. Banyak fungsi guru tradisional harus diserahkan kepada teknologi informasi dan 8) Sekolah, seperti lembaga-lembaga bisnis, harus melakukan tiga analisis: analisis pasar, pengetahuan dan finansial.

Lembaga pendidikan tidak hanya berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan namun lembaga pendidikan harus memiliki kemampuan seperti layaknya perusahaan. Lembaga pendidikan harus mampu menyeimbangkan pencapaian target tujuan pendidikan dan bisnis. Merdeka belajar adalah upaya menjawab tantangan dunia yang semakin kompetitif. Dunia Industri 4.0 adalah sebuah dunia yang mengharuskan lembaga pendidikan untuk mempersiapkan mahasiswanya memiliki kemampuan bersaing dalam dunia kerja yang semakin canggih.

Merdeka belajar pada dasarnya berintikan gagasan penghormatan pada prinsip-prinsip kebebasan, kreativitas, inovasi dan emansipasi. Segala bentuk hambatan baik sifatnya birokratis maupun non-birokratis sedapat mungkin dihilangkan. Arena pendidikan akan menjadi media bagi optimalisasi potensi tidak hanya bagi peserta didik tapi juga pendidik.

Merdeka belajar adalah strategi yang memungkinkan bangsa ini untuk memasuki dan menguasai era digitalisasi yang sangat dinamis dan tentu saja memasuki fase industri 4.0 dimana era ini adalah era interaksi *Cyber Physical System* (CPS) dengan *Inter of Things and Service* (IoT dan IoS). Iklim global industri 4.0 yang kompleks, berjejaring dan terinterkoneksi menjadikan system pendidikan lama harus berubah.

Kontekstualisasi system pendidikan kita dengan perkembangan global adalah harga mati. Perkembangan global dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologinya yang sangat cepat membutuhkan system dengan daya adaptasi yang mumpuni. Ketidakmampuan dalam merespon trend global akan menjadikan bangsa ini menjadi bangsa pecundang. Kita tidak ingin, generasi bangsa ini menjadi penonton dinegerinya sendiri. Kita ingin menjadikan bangsa ini berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju.

Indonesia mesti menjawab tantangan ini. Indonesia mesti berbenah. Pembinaan yang terpenting adalah pembinaan disektor pendidikan. Sektor pendidikan mesti di rekonstruksi agar mampu menghasilkan lulusan yang melek era industry 4.0. Sebuah generasi yang akan membawa bangsa ini dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Generasi yang memiliki daya adaptasi, inovasi dan kolaborasi yang mumpuni ditengah persaingan di Era Industri 4.0 yang begitu cepat dan efisien.

Sebagai penutup, merdeka belajar adalah sebuah terobosan yang mesti didukung. Tentu saja, dibutuhkan waktu dan pengalaman agar seluruh stakeholder dunia pendidikan mengimplementasikan dan memaksimalkan program merdeka belajar. Dibutuhkan kerja kolektif dan kesadaran ingin berubah untuk mewujudkan *knowledge society* dimana kesadaran ditingkat sekolah atau kampus dapat menyebar dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan masyarakat dan bangsa.

### **Sumber Rujukan**

Duryat, Masduki. 2020. Opportunity Pendidikan : Transformasi di Era Disrupsi dan Revolusi Industri 4.0. Jurnal Wahana Karya Ilmiah. Vol 4.No 2 :678-688

- Rakhmat, Jalaluddin. 1997. *Catatan Kang Jalal ; Visi Media, Politik dan Pendidikan*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya
- Singha, Charanjit Kaur Swaran. Ong, Eng Tek, Mohtar, Tunku Mohani Tunku. Singh, Tarsame Singh Masa & Mostafae, Nor Azmi. 2020. *Quality Teachers of the 21st Century: An Overview of Theories and Practice. International Journal of Innovation, Creativity and Change*. Volume 13. Issue 1 : 1481-1494.
- Yamin, Muhammad & Syahrir. *Pembangunan Pendidikan Merdeka Belajar (Telaan Metode Pembelajaran)*. Jurnal Ilmiah Mandala Education. Vol. 6. No. 1 : 126-136
- <https://docs.google.com/document/d/1fLRN7GjrYybbDDtuvanAWDiRqVWnGFCJ/edit?usp=sharing&oid=102014251115324209017&rtpof=true&sd=true>

## Profil Penulis



Hairuddin K., lahir di Makassar 50 tahun yang lalu. Doktor Sosiologi ini menekuni bidang Sosiologi Kesehatan dan sebagai dosen tetap di Prodi S1 Keperawatan Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Megarezky. Selain sebagai dosen, juga diamanahkan sebagai Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama, Humas, dan Sistem Informasi. Sampai saat ini aktif menulis jurnal, baik nasional maupun internasional. Juga menulis beberapa buku, termasuk buku ajar, buku referensi, modul, dan sebagainya. Saat ini juga aktif sebagai penulis artikel maupun opini di berbagai media, baik media cetak, maupun media online. Hairuddin K. juga dapat dihubungi melalui e-mail : [hairuddinanti03@gmail.com](mailto:hairuddinanti03@gmail.com)

# MERDEKA BELAJAR DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Endang Tri Wahyurini  
Universitas Islam Madura

Terobosan baru dalam dunia pendidikan bangsa Indonesia diawal tahun 2020 adalah **Kemerdekaan Belajar** yang artinya “Memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai.” ini disampaikan oleh Nadiem Anwar Makarim Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat saat ini, telah membawa perubahan yang sangat pesat pula dalam berbagai aspek kehidupan. Pekerjaan dan cara kita bekerja berubah, banyak lapangan pekerjaan hilang, sementara berbagai jenis pekerjaan baru bermunculan. Dengan melihat semakin cepatnya perubahan sosial, budaya, perlompataan teknologi, persaingan dunia kerja yang semakin cepat di era Revolusi 4.0 maka diperlukan upaya perbaikan system bidang pendidikan.

Program Mereka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) diluncurkan sejak tahun 2020 oleh Nadiem Anwar Makarim Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar pendidikan di Indonesia mampu bersaing dan mencetak lulusan perguruan tinggi yang tangguh dan kompeten dalam menghadapi setiap perubahan. Regulasi yang mengatur adanya program MBKM ini adalah Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 18. Kebijakan ini bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai bidang keilmuan yang dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja. Mahasiswa diberikan kebebasan dan keleluasaan untuk belajar diluar kampus. Dengan konsep ini diharapkan pendidikan tinggi mampu mencetak generasi penerus yang mandiri dan berkualitas.

Dalam penerapan MBKM ini pimpinan perguruan tinggi dapat mencarikan mitra sesuai dengan program studi yang ada. Kolaborasi dan kemitraan harus dijalin dengan baik agar program ini bisa berjalan sesuai harapan. Dalam pembangunan

disegala bidang harus ada kerjasama antara pemerintahan, masyarakat dan perguruan tinggi sebagai media transformasi ilmu dan pengetahuan. Perguruan tinggi harus melakukan penjaminan mutu bahwa lulusan yang dihasilkan harus mendapatkan capaian yang diinginkan. Program MBKM ini diharapkan output mahasiswa yang berkompeten, berkarakter, beradab, jujur, berani, cerdas, mandiri, tangguh dan siap terjun didunia kerja atau industri.

### **Sumberdaya Kelautan dan Perikanan**

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia baik dari segi luas wilayah maupun jumlah pulaunya (17.508 pulau), dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia (18.000 km) sebesar lebih dari 10.000 buah dari pulau-pulau tersebut merupakan pulau kecil yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Indonesia sebagai negara maritim terbesar didunia mencapai lebih dari 70 persen yang membentang dari ujung utara Pulau Sumatra sampai keujung selatan Irian Jaya. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi sumber daya perairan yang sangat luas dan besar sehingga akan menjadi salah satu sumber pangan nasional serta sebagai garda depan peningkatan ekonomi masyarakat. Sejalan dengan Pratikto ( 2005) bahwa banyak pihak yang menyandarkan harapan pada sektor kelautan dan perikanan dalam memulihkan ekonomi. Hal inilah yang menjadi dasar pemerintah yang mengarahkan agar pembangunan di masa mendatang bertumpu pada sektor kelautan dan perikanan.

Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan laut dan atau kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya, kolam air dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia 2014). Dan Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai pemasaran yang dilakukan dalam suatu bisnis perikanan (Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia 2014).

Sumberdaya kelautan dan perikanan merupakan sumberdaya yang mampu pulih (*renewable*) jika di manfaatkan dan dieksploitasi, namun sumberdaya ini harus dikelola dan dimanfaatkan dengan baik yang berprinsip pada kelestarian dan keberlanjutan. Jika tidak dilakukan pengelolaan yang benar (*good management*) maka sumberdaya tersebut akan terjadi degradasi, deplesi bahkan bisa punah. Oleh karena sangat penting dilakukan manajemen yang baik dan tepat. Pentingnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara empiris ditunjukkan dengan tingkat pemanfaatan yang belum seimbang dan secara nasional berpotensi lestari MSY (*Maximum Sustainable Yield*).

## **Konsep dan Prinsip Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan**

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara terpadu (*Integrated Coastal Zone Management*) sangat penting dilaksanakan karena kondisi saat ini sumberdaya tersebut telah banyak mengalami degradasi dan eksploitasi berlebihan Dahuri et all (2001). Nikijuluw (2005) menjelaskan bahwa pengelolaan perikanan menurut UU 31/04 merupakan terjemahan bebas dari definisi pengelolaan perikanan menurut CCRF. Pengelolaan perikanan yaitu semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan dan konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang undangan di bidang perikanan yang dilakukan oleh pemerintah dan otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Pada pasal 2 UU 31 /04 menyatakan bahwa pengelolaan kelautan dan perikanan dilakukan berdasarkan azas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi dan kelestarian yang berkelanjutan. Pengelolaan ini tidak hanya untuk pengelolaan sumberdaya perikanan dilaut saja namun juga untuk perairan tawar maupun payau. Usaha perikanan itu meliputi budidaya, penangkapan, industry pengolahan dan pemasaran. Semua bidang dan aspek tersebut harus dikelola sesuai regulasi yang ada.

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan membutuhkan Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang baik adalah melibatkan semua *stakeholders*. Keterlibatan pemerintah, masyarakat dan akademik dalam pengelolaan sumberdaya perikanan merupakan langkah yang tepat dan benar. Hal ini melihat bahwa bidang akademik sebagai agent perubahan dan transfer ilmu pengetahuan sehingga dapat melengkapi usaha untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pengelolaan yang melibatkan semua pihak (*stakeholders*) ini disebut sebagai co management kelautan dan perikanan. Beberapa prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan antara lain prinsip kelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan, prinsip kelestarian budaya, prinsip ekonomi, prinsip partisipasi, prinsip akuntabilitas dan transparansi, prinsip keterpaduan dan prinsip persatuan dan kesatuan Satria *et all.*, ( 2002).

### **Merdeka Belajar dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan**

Pada awalnya konsep merdeka belajar dibuat untuk memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih dan menentukan tempat belajar dilapang yang kemudian dilanjutkan dengan konsep kampus merdeka. Dengan memberikan keleluasaan dan kebebasan untuk memperoleh kemerdekaan dalam belajar maka mahasiswa bisa meng-*eksplore* serta mencari wadah untuk bisa belajar lebih luas. Perguruan tinggi wajib mengarahkan dan membina

mahasiswa agar mendapatkan wadah belajar yang tepat. Kemitraan dilakukan dan disesuaikan dengan berbagai bidang ilmu yang terdapat diperguruan tinggi tersebut.

Salah satu sektor yang harus mendapatkan perhatian dan pengelolaan khusus adalah bidang kelautan dan perikanan. Mahasiswa bisa belajar lebih dekat secara teori maupun praktek melalui wadah yang ada. Sumberdaya kelautan dan perikanan masih membutuhkan perhatian khusus dan lebih agar bisa dimanfaatkan secara tepat dan memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Sejalan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan program MBKM saat ini sangat tepat jika pengelolaan kelautan dan perikanan menjadi sebuah wadah belajar mahasiswa. Sehingga mahasiswa bisa berkontribusi sumbang pendapat dan ide-ide emasnya untuk bisa mengembangkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Pada pelaksanaan merdeka belajar mahasiswa bisa melalui mata kuliah tertentu yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan, kegiatan magang terstruktur ataupun magang mandiri, Praktek Kerja Lapang/Industri (PKL) maupun dalam rangka penelitian tugas akhir. Mahasiswa bisa memperoleh ilmu pengetahuan sekaligus pengalaman langsung dilapang. Berbagai realita bisa ditemukan langsung bagaimana potensi, kendala dan kondisi nyata sumberdaya kelautan dan perikanan. Dengan kemerdekaan belajar ini mahasiswa bisa menemukan berbagai macam permasalahan dan berusaha mencari solusi yang tepat. Berbagai kolega dibidang kelautan dan perikanan bisa ditemukan sehingga mahasiswa juga bisa secara langsung maupun tidak untuk belajar secara luas disana. Dengan demikian sangat kompleks keilmuan yang bisa diperoleh mahasiswa dalam merdeka belajar ini. Output mahasiswa yang kompeten, tangguh, mandiri dan siap didunia kerja bisa diwujudkan dengan efektif dan nyata.

### **Daftar Pustaka**

- Arif Satria, Abubakar Umbari, Ahmad Fauzi, Ari Purbayanto. 2002. Pusat kajian Agraria IPB dan PT Pustaka Cidesindo.
- Dirjen Dikti. 2020. Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia. 2014. Departemen Kelautan dan Perikanan RI
- Rokhmin Dahuri, Jacob Rais, Sapta P. Ginting dan J. Sitepu. 2001. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.

Victor P.H Nikijuluw. 2005. Politik Ekonomi Perikanan. Jakarta: PT. Fery Agung Corporation (FERACO)

Widi Agus Pratikto, 2005. Menjual Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Departemen Kelautan dan Perikanan RI.

## Profil Penulis



Endang Tri Wahyurini, dilahirkan di Tulungagung 45 tahun yang lalu. Penulis sebagai Dosen di Prodi Agrobisnis Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Islam Madura sejak tahun 2002. Saat ini sedang menempuh program doctoral bidang Ilmu Pertanian di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Aktif dalam berbagai asosiasi profesi dosen, komunitas peneliti dan komunitas lingkungan, serta aktif sebagai pengelola Jurnal Agrosains dan menulis di beberapa jurnal nasional dan internasional. Anggota aktif TKPSDA (Tim Koordinasi

Pengelolaan Sumber Daya Air) WS (Wilayah Sungai) Madura- Bawean sejak tahun 2020, menjadi anggota aktif Tim Perumus IKPLHD (Indek Kualitas Lingkungan Hidup Daerah) Kabupaten Pamekasan sejak 2019. Menjadi pendiri dan Ketua Kelompok Peduli Mangrove Madura sejak 2018 sampai sekarang. Endang dapat dihubungi melalui email : [endangrini46@gmail.com](mailto:endangrini46@gmail.com) || IG: [triendangtri2](#) || FB : Endang Tri W || twitter: [@endangrini46](#)



# **Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi di era Merdeka Belajar Kampus Merdeka**

**Diah Puji Nali Brata**  
**STKIP PGRI JOMBANG**

Pancasila merupakan konsensus bersama sebagai dasar negara yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 alenia keempat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila antara lain ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia yang multi kultural sejak dulu, diharapkan dapat menguatkan integritas bangsa, solidaritas, dan demokrasi. Pancasila sebagai kontrak sosial dan pedoman hidup yang sempurna bagi bangsa Indonesia. Sehingga sebagai norma-norma yang disepakati secara sadar dan bersama harus dijadikan dasar kehidupan sosial dan dasar kenegaraan.

Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya wajib bagi seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali. Siapa yang menjadi motor penggerak, siapa yang bertanggungjawab, siapa yang mempertahankan dasar negara, jawaban secara etika dan moral adalah kita, kami, kamu, semua elemen masyarakat, dan lingkungan masyarakat. Negara Republik Indonesia bisa merdeka, salah satu syaratnya harus memiliki dasar negara, idiologi negara. Namun kenyataannya, Pancasila dengan segala nilai-nilai luhurnya masih belum dipahami dengan baik, masih ada yang belum hafal teks Pancasila, belum memahami makna yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila, apalagi mengatualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bagaimana kontribusi perguruan tinggi? Bagaimana peran dosen penggerak? Bagaimana peran mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa?. Tuntutan masyarakat pada perguruan tinggi adalah perguruan tinggi dapat mengembangkan mahasiswa yang unggul, mahasiswa yang memiliki nasionalisme yang tinggi, dan mahasiswa yang berkarakter. Perguruan tinggi seharusnya dapat memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan yang seluas-luasnya tanpa batas melalui proses yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun membimbing, mendidik, meneladani mahasiswa tidaklah mudah, dimulai dari mana, oleh siapa?

Pidato Bapak Presiden Jokowi berdasarkan kompas.com pada program pendidikan Lemhanas RI bulan Oktober 2021, menjelaskan jangan sampai mahasiswa didik mengenai kebangsaan dan Pancasila di dalam kampus, tetapi di luar kampus ada yang mendidik lagi menjadi ekstrimis garis keras atau radikal garis keras, jangan sampai di dalam kampus didik mengenai budi pekerti, tetapi di luar kampus menjadi pecandu narkoba. Perguruan Tinggi diharapkan dapat mencetak mahasiswa yang unggul, utuh, sehat jasmani dan rohani, serta budi pekerti yang baik. Dengan demikian dibutuhkan sinergitas dan komitmen yang tinggi dari civitas akademika untuk membentuk mahasiswa yang tangguh dan berwawasan global dan kokoh dalam menghadapi tantangan di luar kampus. Apalagi saat ini di era Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, menjadi tantangan dan harapan perguruan tinggi untuk mewujudkan hal tersebut.

Kebijakan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka (MB-KM) yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan dituangkan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, merupakan kebijakan untuk memberikan fasilitas dan hak mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, mampu berdaya saing sesuai dengan kebutuhan zaman, dan mampu menjadi pemimpin masa depan yang memiliki kebangsaan yang tinggi. Program yang dicanangkan dalam MB-KM adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk memperluas dan memperkaya wawasan dan kemampuannya di dunia nyata sesuai cita cita. (Tohir, 2020)

### **Urgensi Pendidikan Pancasila bagi Mahasiswa**

Berbagai persoalan bangsa yang terjadi saat ini, disebabkan kurang mengaktualisasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dan pandangan hidup bernegara, sehingga menjadi urgensi untuk merekonstruksi kembali Pendidikan Pancasila. Urgensi pendidikan Pancasila antara lain: (1) nilai-nilai Pancasila yang berkembang saat ini apakah masih ditemukan dalam kehidupan masyarakat atau sebaliknya?, (2) bagaimanakah dengan makna Proklamasi, penyebab lahirnya negara?, (3) penyimpangan –penyimpangan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, berdampak pada kelangsungan negara, (4) perubahan dan pengaruh budaya asing, (5) pengaruh iptek, dan (6) dekadensi moral (luntarnya ketaatan masyarakat terhadap norma norma sosial, dan elite politik mulai meninggalkan budaya santun, jiwa kenegaraan berkurang.

Pancasila sebagai ideologi dinamis, dapat berkembang berdasarkan zamannya, namun esensi dari falsafah negara harus bersifat statis sesuai dengan perjuangan para pendiri bangsa. Hal ini harus dipahami generasi penerus atau mahasiswa sebagai garda depan mempertahankan NKRI. Sudahkah mahasiswa

memiliki jiwa bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sudahkah mahasiswa sadar akan pentingnya dasar negara, sudahkah mahasiswa memahami bahwa Pancasila bukan turun dari langit. Pertanyaan besar yang memerlukan tindakan yang nyata, tindakan moral dari seluruh civitas akademika, sehingga sangat urgensi mahasiswa untuk memperoleh informasi akurat, pengalaman nyata, pemahaman kritis terkait Pendidikan Pancasila.

Urgensi Pendidikan Pancasila bagi mahasiswa antara lain: (1) agar mahasiswa tidak tercerabut dari akar budayanya sendiri, (2) agar mahasiswa memiliki pedoman atau penuntun dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan Pancasila, dan (3) agar mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa tidak terpengaruh paham paham asing yang negative. Dengan demikian Pendidikan Pancasila diharapkan dapat memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan membangun pemahaman masyarakat (kesadaran gaya hidup sederhana, cinta produk dalam negeri, semangat kesatuan persatuan nasional, norma-norma pergaulan, dan Pendidikan Pancasila diharapkan mahasiswa berperan dalam penguatan kesadaran nasional (Taufiqurrahman, 2018)

### **Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi di era Merdeka Belajar-Kampus Merdeka**

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi pasal 35 ayat 5, menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah Agama, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Pendidikan Pancasila difokuskan dalam membina pemahaman dan penghayatan mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. (Taufiqurrahman, 2018), menjelaskan tujuan Pendidikan Pancasila adalah (1) agar mahasiswa dapat memahami dan mampu melaksanakan jiwa Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan sebagai warga negara RI, (2) agar mahasiswa menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, (3) agar mahasiswa dapat memupuk sikap dan perilaku sesuai dengan nilai norma Pancasila, sehingga mampu menanggapi perubahan yang terjadi dalam rangka keterpaduan iptek dan pembangunan, dan (4) agar mahasiswa dapat memupuk sikap dan perilaku sesuai dengan nilai norma Pancasila, sehingga mampu menanggapi perubahan yang terjadi dalam rangka keterpaduan iptek dan pembangunan.

Urgensi Pancasila menjadi persoalan moral yang perlu menjadi perhatian dan kepedulian semua pihak sebagai warga negara. Komunitas pendidikan menjadi

prioritas untuk melakukan berbagai strategi dalam mendidik, membina anak bangsa, generasi penerus bangsa. Bagaimana memfasilitasi agar generasi bangsa tidak hanya paham, tidak hanya mengerti nilai-nilai Pancasila, tetapi juga sudah menjadi pembiasaan, menjadi milik diri untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana memfasilitasi dalam pembelajaran agar memunculkan kesadaran kritis, kecerdasan intelektual, kecerdasan kepribadian, dan humanis.

Menurut (RI, 2013), menjelaskan bahwa jika dilaksanakan jejak pendapat ke mahasiswa tentang suka dan tidaknya mata kuliah Pancasila, biasanya mahasiswa cenderung tidak menyukai dengan berbagai alasan yaitu mata kuliah tidak sesuai dengan program studinya, materi tidak *up to date*, metode pembelajaran monoton, tidak inovatif, tidak bervariasi sehingga menimbulkan kebosanan. Paradigma ini harus dirubah, harus direkonstruksi, bagaimana peran dosen di era MB-KM, sumber belajar sangat luas, pengalaman hidup yang nyata terbuka untuk mahasiswa. Kesadaran diri dosen untuk merekonstruksi kembali pola pembelajaran, sangat urgensi. Tangan dingin, jemari dosen untuk menorehkan konstruksi pembelajaran inovatif dan solutif sangat diperlukan, agar berkontribusi mencetak mahasiswa unggul dan berkarakter.

Strategi pembelajaran Pendidikan Pancasila yang perlu dikonstruksi dosen penggerak di era MB-KM adalah (1) meningkatkan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan yang berkaitan dengan hakekat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. (2) proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan *student centered learning*, untuk mengembangkan *knowledge, attitude, dan skill* mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalitasnya sesuai dengan program studinya, (3) mahasiswa melakukan pengamatan secara terbuka dan nyata, untuk mengembangkan kesadaran beripikir kritis, rasa nasionalisme, rasa kepedulian pada persoalan bangsa, dan (4) mahasiswa mempotret dan menganalisis melalui observasi langsung, media massa elektronik dan non elektronik yang berkaitan dengan pembangunan di Indonesia, jati diri bangsa Indonesia, HAM di Indonesia, suku bangsa di Indonesia, persoalan kemiskinan, konflik antar desa, konflik antar suku, kejahatan, korupsi, perkelahian antar pelajar, perkelahian antar mahasiswa.

Strategi pembelajaran yang memberikan kesempatan yang seluas-luas kepada mahasiswa untuk menemukan sendiri berbagai hal yang berkaitan dengan Pancasila, maka mahasiswa diharapkan mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Hal ini sesuai dengan pendapat (*Faculty, 2012*), menjelaskan bahwa upaya untuk memperluas keberlanjutan nilai persatuan

sebagai salah satu nilai-nilai Pancasila adalah pembelajaran di lingkungan keluarga, pengakuan belajar berbasis komunitas belajar, sistem sosial, dan komitmen individu terkait nilai persatuan. Lebih lanjut program dan tindakan di lingkungan formal adalah menciptakan komunitas pembelajaran (perguruan tinggi) melalui *learning community* untuk membangun kesadaran kolektif akan pentingnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

### Daftar Pustaka

- Faculty, L. (no date) 'NILAI-NILAI PANCASILA'.  
RI, D. D. (2013) 'Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila', p. 318.  
Taufiqurrahman (2018) *Pendidikan Pancasila*.  
Tohir, M. (2020) 'Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka'. doi: 10.31219/osf.io/ujmte.

### Profil Penulis



Diah Puji Nali Brata, lahir di Mojokerto. Doktor Manajemen Pendidikan ini menekuni bidang ilmu Manajemen Pendidikan dan sub bidang ilmu lainnya meliputi Kepemimpinan Pendidikan, Pendidikan Karakter, Pendidikan Kewarganegaraan, dan ilmu sosial. Dosen DPK di Prodi PPKn STKIP PGRI Jombang. Aktif di berbagai asosiasi profesi dosen dan komunitas peneliti. Menjadi reviewer di beberapa jurnal nasional serta aktif menulis buku. Profesi sebagai penulis buku non fiksi mulai ditekuni, buku yang sudah ditulis antara lain: *Kontruksi Pendidikan Karakter Sekolah Menengah Kejuruan* (2018), *Book Chapter Buku Referensi* antara lain Mahasiswa Almamater, dan Bangsa (2019), *Pengembangan SDM Di Perguruan Tinggi* (2020), *Sabda Cinta* (2021), *Lika-Liku Publikasi* (2021), *Pendidikan Pancasila* (2021). *Book Chapter* buku antologi kolaboratif dengan judul *I am Lecturer* (2020), dan *Makkah dan Madinah Perjuangan Menuju RumahNya yang Istimewa* (2020), *Dear Me* (2021), *Dear My Love* (2021), *Keluarga Tangguh* (2021), *Dosen Merdeka* (2021). Bu Dy bisa dihubungi melalui e-mail: [pujidiah37@yahoo.com](mailto:pujidiah37@yahoo.com) || FB: Diah Puji Nalibrata || IG: diahnalibrata

# **PANCASILA MERANGKAI MERDEKA BELAJAR DAN KEMERDEKAAN PENDIDIK MEWUJUDKAN KEUNGGULAN**

La Selo

Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Kendari

## **A. Implementasi Pancasila dengan Merdeka Belajar Menciptakan Kader Pemimpin Bangsa**

Pancasila sebagai ideologi bangsa merupakan karya besar semua nilai-nilai dasar yang muncul dan diciptakan anak bangsa sendiri dan telah teruji kebenarannya dari masa kemasa sebagai segala sumber nilai-nilai dasar mulai hukum, politik, pemerintahan, ekonomi, sosial budaya di tanah air. Oleh karena itu, Pancasila merupakan landasan dasar filosofis, yudiris/konstitusional, dan sosiologis. Pancasila juga merupakan hasil kajian dan analisis para tokoh bangsa untuk dijadikan arah, tujuan, dan pandangan hidup. Dalam perumusannya sebagai pandangan hidup beranjak dari segala nilai yang berkembang di masyarakat, sehingga pada akhirnya merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki bangsa. Widjaya (1991: 69) mengatakan bahwa pancasila memiliki nilai-nilai sebagai pandangan hidup bangsa, yakni: (1) merupakan pedoman, pegangan dalam menghadapi setiap masalah; (2) diyakini kebenarannya; (3) menimbulkan tekad untuk mewujudkannya.

Hamdayama, dkk. (2012: 121), bahwa pancasila sebagai sumber nilai memuat lima dalam penyelenggaraan negara yaitu: (1) pengakuan dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kehidupan manusia dan lingkungannya yang terjadi merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan tercipta karena kehendak-Nya; (2) menjunjung tinggi kemansiaan yang adil dan beradab. Manusia sebagai hasil ciptaan-Nya, maka kedudukannya memiliki derajat, harkat dan martabat yang sama. Sehingga dalam hubungan antar sesama utamanya antara hak dan kewajibannya diberlakukan memiliki rasa keadilan dengan memperhatikan nilai peradaban keluhuran bangsa; (3) menjamin dan menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara; (4) jaminan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, dari berbagai etnis/suku agama dan asal usul keturunan dengan keragaman berbagai budaya yang dijadikan peluang untuk bersatu mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa, sebagaimana

yang diamanatkan dalam UUD 1945 untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dengan kehidupan yang harmonis, merata baik materil dan spritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Notonagoro (1975) mengatakan untuk mewujudkan kehidupan bersama baik dalam masyarakat, bangsa dan negara harus terwujud keadilan sosial. Keadilan sosial meliputi tiga aspek yakni: (1) aspek keadilan distributif negara terhadap warganya; (2) keadilan legal yakni warga terhadap negaranya untuk mentaati aturan yang berlaku dan (3) keadilan komutatif, keadilan antar sesama warga negara, atau hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik.

Pancasila dilihat dari perspektif kehidupan berbangsa dan bernegara yang dikaitkan dengan ideologi hidup bangsa Indonesia setelah melalui tahapan reformasi, maka bangsa Indonesia tidak bisa di lepaskan dari nilai-nilai Pancasila (Kaelan, 2010:12). Oleh karena itu, bangsa Indonesia memiliki tekad melihat kehidupan kebangsaan sebagai visi bersama agar tidak terombang ambing, tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai Pancasila. Dari berbagai tantangan yang dihadapi bangsa dari masa kemerdekaan, Pancasila sebagai ideologi bangsa hingga pada masa awal reformasi ada yang berpandangan Pancasila merupakan jebolan pemikiran orde baru dengan landasan pemikiran penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, dengan melihat rentetan fakta sejarah, maka Pancasila telah teruji dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menyatukan kehidupan bangsa sebagai negara yang besar dengan peradaban luhur yang dimiliki bangsa sendiri. Dengan demikian, generasi muda sebagai generasi penerus calon-calon pemimpin bangsa Indonesia dalam fakta menunjukkan terdiri dari berbagai nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kebudayaan, berbagai nilai adat istiadat yang melekat selalu menempah diri memujudkan keunggulan sebagai bangsa yang merdeka sesuai nilai Pancasila.

#### **B. Titik Taut Pancasila, Merdeka Belajar, dan Kemerdekaan Pendidik.**

Negara terbentuk setelah memenuhi syarat-syarat yakni adanya rakyat, adanya wilayah, adanya kedaulatan dan adanya pemerintahan dan tujuan tertentu (Saleng, 1982:1). Ada beberapa faktor terpenuhinya organisasi negara Indonesia adalah (1) rakyat negara yaitu bangsa Indonesia; (2) wilayah negara Indonesia yaitu tanah air Indonesia yang terdiri dari 13.500 buah pulau besar dan kecil; (3) kedaulatan negara Indonesia telah ada semenjak proklamasi kemerdekaan Indonesia; (4) terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; Presiden RI memegang kekuasaan pucuk pimpinan pemerintahan dalam negara Indonesia; (5) untuk mewujudkan tujuan negara, masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila. Adanya kedaulatan dan tujuan tersebut terbentuk pada tanggal 18 Agustus 1945, maka secara formil negara Indonesia telah ada yakni negara

kesatuan berbentuk Republik. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945. Sila ketiga pancasila mengenai persatuan memiliki makna/nilai bahwa dalam wilayah negara Indonesia dengan berbagai keragaman kehidupan warga negara yang mendiami wilayah nusantara dipandang penting terwujudnya nilai-nilai persatuan untuk memperkokoh kehidupan bangsa dan negara sebagai perekat negara kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini pula yang mendorong kekuatan persatuan warga bangsa dalam menghadapi berbagai tuntutan kegiatan pembangunan sebagai kebutuhan bangsa dalam mewujudkan tujuan yang diharapkan. Dalam wadah negara kesatuan demi keberhasilan pembangunan perlu ditopang sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Tuntutan pengetahuan dan penguasaan teknologi secara konkrit mahasiswa diperlukan upaya untuk mencari ilmu khususnya diperguruan tinggi sehingga pada akhirnya ia memiliki penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebelum melakukan karya-karya nyata di masyarakat. Terciptanya kondisi tersebut, maka dosen sebagai pendidik mempunyai kebebasan dalam mengembangkan materi dan metode pembelajaran yang diajarkan pada mahasiswa sesuai dengan perkembangan IPTEK dan tuntutan kebutuhan masyarakat serta KKNl.

### **C. Merdeka Belajar Merupakan Rangkaian Nilai Pancasila**

Indonesia, sebagai bangsa yang telah merdeka, yang menunjukkan tidak ada lagi tekanan dari siapapun juga utamanya kehidupan bersama sebagai anak bangsa. Merdeka belajar juga merupakan kebebasan bagi setiap anak bangsa untuk mengikuti pendidikan, sesuai minat dan bakatnya untuk melanjutkan pendidikan di jenjang Pendidikan Tinggi. Dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengisyaratkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, khususnya Pendidikan Tinggi. Pada inti pokoknya adalah pengembangan sumber daya manusia untuk mewujudkan watak dan peradaban bermartabat, yang inovatif, trampil dalam berkarya, memiliki daya saing dipentas persaingan global melalui hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Civitas akademika/mahasiswa di Perguruan Tinggi memiliki kebebasan akademik/merdeka belajar (otonomi belajar) sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2012. Kebebasan akademik adalah merupakan kebebasan sivitas akademika dalam Pendidikan untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pendidikan dan pengajaran merupakan pengembangan potensi diri, kegiatan pembentukan karakter, bertaqwa, berakhlak mulia, pembentukan nilai, perilaku dan penguatan daya analisis, kreatif dan kemandirian. Kegiatan penelitian merupakan pencarian data dan informasi dengan metodologi tertentu



sesuai kaidah-kaidah ilmiah yang terkait dengan pengujian sesuai dengan bidang ilmu tertentu untuk mencari kebenaran ilmiah. Sedangkan pengabdian kepada masyarakat adalah merupakan penggunaan IPTEK untuk menemukan hal-hal baru, yang inovatif agar mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa dan negara yang berdaya saing di dunia global. Semua hasil yang diperoleh atas pelaksanaan Tridharma tersebut selalu didasari oleh nilai-nilai taqwa kepada Ketuhanan Yang Maha Esa serta etika dan nilai-nilai budaya dan norma yang berlaku. Hal-hal yang sangat krusial dan penting mendapatkan perhatian adalah sebagai berikut: Arti kebebasan wajib disertai tanggung jawab. Hal ini oleh karena kebebasan dan tanggung jawab merupakan unsur-unsur utama manusia merdeka.

Kemerdekaan belajar menumbuhkan kreativitas. Tanpa kebebasan, kreatifitas dalam menjalankan tidak akan berkembang. Tanpa kreatifitas, pembangunan tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan serta perikehidupan akan terjadi stagnan. Selain itu pula tanpa tanggung jawab akan menghasilkan kekacauan. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dibutuhkan adalah kebebasan yang bertanggung jawab, sehat dengan sistem konsitusi yang tegas dan pasti serta tegaknya hukum yang diposisikan sebagai panglima, utamanya dalam pengelolaan pembangunan diberbagai dimensi kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan bagi bangsa Indonesia adalah pembangunan yang dilaksanakan di atas kepribadian bangsa sendiri. Untuk itu dibutuhkan kegotongroyongan sesuai nilai-nilai dasar Pancasila, dan budaya luhur bangsa Indonesia serta totalitas aksi dan peran seluruh anak bangsa di atas kulit bumi yang bernama Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Jumanta Hamdayama, Heri Herdiawanto dan Fokky Fuad; 2012 Pancasila Suatu Analisis Yuridis Historis dan Filosofis, Penerbit Hartomo Media Pustaka Jakarta
- Kaelan, 2010. Pendidikan Pancasila untuk Mewujudkan Nilai-Nilai Pancasila, Rasa Kebangsaan dan Cinta Tanah Air sesuai dengan Sk. Dirjen Dikti Nomor 43//Dikti/Kep//2006, Edisi kesepuluh, Penerbit Paradigma Perum Nogotirto III Jl. Bromo C 97 Slema Yogyakarta.
- Kaelan, 2014; Pendidikan Pancasila, Pendidikan untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila, Rasa Kebangsaan dan cinta tanah air sesuai dengan SK Dirjen Dikti Nomor 43/Dikti/Kep/2006, Edisi Revisi kesepuluh. Penerbit Paradigma Perum.Nogotirto III, Jl. Bromo C97 Trihanggo Yogyakarta.
- Mappiare Saleng, A; 1981 Titik Taut Antara UUD 1945 dengan Ketetapan MPR RI 1973 dan Tahun 1978 UNHAS, Ujung Pandang.

Notonagoro; 1975, Pancasila secara Ilmiah Populer, Pancaran Tujuh Jakarta;

Widjaya, A.W 1991; Pedoman Pokok-Pokok dan Materi Perkuliahan Pancasila pada Perguruan Tinggi Tinggi, Cetakan ketiga Penerbit CV. Akademika Pressindo, Jakarta.

## Profil Penulis



Drs. La Selo, S.H., M.Si. Lahir di Desa Labunti, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, 29 Desember 1954. Pendidikan yang pernah ditempuh di SDN Labunti (1968), SMP Katolik di Raha (1972), SMA Negeri I Raha (1975), Sarjana Muda Ekonomi Unhas (1979), Sarjana Ekonomi Umum (S-1) Unhas (1982), Sarjana Hukum UMI (1992), dan Strata dua (S-2) LAN-UNHAS (1998).

Riwayat pekerjaan: PNS dpk. Depdagri Wilayah Indonesia Timur Makassar (1983-2000) Gol. III/a-IV/a dan pindah di Pemda Provinsi (2001) IV/b sampai pensiun PNS (2013) dalam pangkat Pembina Utama Gol. IV/e. Riwayat jabatan Kepala Subbagian Kepegawaian SELAPUTDA (1984-1985), Kepala Subagian Keuangan dan Kepegawaian Diklatwil. UP. (1986-2001), Kepala Bidang Pengembangan Pegawai BKD Provinsi (2003-2008), Wakil Kepala Dinas Sosial Provinsi Sultra (2008), Kepala BAPEDALDA Provinsi Sultra (2008-2009), Staf Ahli Gubernur Sultra (2009-2013) dan Ketua Forum Staf Ahli Kepala Daerah (2009-2011). Ketua LPM STIPER Kendari (2013-2014), Pembantu Ketua Bidang Akademik STIPER Kendari tahun 2014 hingga sekarang. dosen FE UMI Makassar (1982-2003), dosen FH UMI (1991), dosen di Akademi Pelayanan Makassar (1979), dosen Diklat AMDAL UNHALU 2008, dosen STIPER Kendari mulai 2013 sampai sekarang, Ketua Tim Penyusun Statuta STIPER Kendari (2019).

Riwayat mengajar/melatih/dosen: Pelatih Inti Perencanaan dan Tatalaksana Pembangunan Daerah untuk Wilayah Timur Indonesia (1984-1998). Dosen/pengajar (ketua tim) Diklat Kepemimpinan di Makassar hingga di Kendari: SEPADA/ADUM, SEPALA/ADUMLA, SEPADYA/SPAMA, Diklat Teknis dan Fungsional Kegiatan workshop: pembawa makalah Pengelolaan LH Teluk Bone (1998), pembawa makalah Startegi Pembangunan Ekonomi yang berwawasan Nusantara Menjaga Ketahanan Nasional dalam Memperkokoh NKRI (2010) Unhalu.

# PANCASILA SEBAGAI SUMBER TERTIB HUKUM DALAM PROSES MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Oleh :

Prof. Dr. Indrati Rini, SH., MS.

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya

Surabaya, 20 Oktober 2021

## Abstrak

Aplikasi nilai-nilai Pancasila sebagai sumber tertib hukum melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, harus sesuai dengan kompetensi dan kesiapan perguruan tinggi, baik dosen, mahasiswa, dan sarana-prasarana penunjangnya Pancasila sebagai dasar utama dalam pendidikan tinggi dilaksanakan berdasar *metoda aplikatif berkualitas*, dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia secara bertahap, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat pemangku kepentingan.

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) berkewajiban mewujudkan pembangunan hukum nasional sebagai bagian dari pembangunan nasional, termasuk pembangunan pendidikan tinggi. Pengaturan atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Sila-sila dari Pancasila tersurat dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan utama dalam hidup berbangsa dan bernegara. Pemerintah berkewajiban untuk menncardaskan kehidupan bangsa Indonesia, di antaranya melalui pendidikan tinggi. Sebagaimana diamanatkan bahwa “Kemudian daripada itu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, dan mencerdaskan kehidupan bangsa....”<sup>1</sup>

Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, sebagai kebijakan yang populer saat ini sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Fakta menunjukkan bahwa dalam era digitalisasi pendidikan tinggi, ternyata ada perguruan tinggi yang sudah siap dan adapula belum siap melaksanakannya,

Permasalahan yang muncul, yaitu metoda praktis apa yang dapat dilakukan dalam melaksanakan proses merdeka belajar kampus merdeka, yang berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ?

---

<sup>1</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Amendemen Keempat mengisyaratkan Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa menerbitkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di pendidikan tinggi, Keputusan Mendikbud No. 719/P//2020.

1

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yang berdasarkan pada norma hukum, terutama sumber data sekunder berupa peraturan perundangan-undangan dan dokumen hukum yang relevan, didukung oleh fakta riil yang ada di masyarakat. Metoda analisis berdasarkan metode deskriptif kualitatif merujuk pada data yang ada.

## **PEMBAHASAN**

Peraturan perundangan-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, termasuk norma hukum pendidikan tinggi. Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana ditentukan, bahwa “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara”.<sup>2</sup> Kedudukan dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis tertinggi dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, nampak terlihat bahwa nilai-nilai Pancasila kurang difahami dan dilaksanakan secara optimal, terutama dalam kehidupan di perguruan tinggi, bahkan cenderung tergerus oleh laju pesatnya perkembangan teknologi digital informasi dan komunikasi. Merdeka belajar kampus merdeka merupakan tawaran yang bebas dan terbuka untuk diaplikasikan, namun jangan sampai mengesampingkan nilai-nilai luhur Pancasila.

Sila-sila dari Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. “Secara historis Pancasila mengandung 45 butir-butir Pancasila, yang sebelumnya ada 36 butir untuk diamalkan”.<sup>3</sup> Ketentuan tentang perubahan butir - butir Pancasila ini berdasarkan pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang seharusnya diaplikasikan dalam proses Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

---

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala tertib hukum di Indonesia.

<sup>3</sup> Ketetapan MPR Republik Indonesia, Tap No. 1/MPR/ 2003, berisi butir-butir pengamalan Pancasila.

## 2

Merdeka Belajar Kampus Merdeka di pendidikan tinggi sebenarnya dirancang untuk mendorong otonomi perguruan tinggi dan memacu inovasi dalam budaya pendidikan tinggi. Budaya ini semestinya dilandasi nilai-nilai Pancasila melalui program-programnya. Dalam hal ini, mahasiswa diberikan hak untuk belajar tiga semester di luar program studi di kampus. Kebijakan ini tentu dilangasi kondisi darurat, seperti pandemi.

Perguruan tinggi diberikan fleksibilitas dan kemudahan, berupa proses akreditasi, pembukaan prodi baru, berbadan hukum, pemberian *competitive matching fund*, penguatan kolaborasi antar perguruan tinggi dan dunia usaha. Tujuannya yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, sehingga kebijakan kementerian diprioritaskan pada peningkatan kualitas pendidik, peningkatan bidang vokasi dan bidang-bidang lainnya.

Perguruan tinggi, baik PTN maupun PTS harus senantiasa melaksanakan tugas utama Tridharma Perguruan Tinggi berupa pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Di samping itu, juga mengaplikasikan unsur penunjang, di antaranya berupa praktek kerja/magang, proyek di desa, pertukaran dosen/mahasiswa, kewirausahaan, proyek independen dan kemanusiaan.

Terkait dengan proses Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang berlandaskan Pancasila, maka penting pula diaplikasikan “peningkatan daya saing dalam menghadapi globalisasi, sehingga perguruan tinggi mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan profesional, yang berbudaya dan kreatif untuk kepentingan bangsa”.<sup>4</sup> Di

samping itu, pengaplikasian nilai-nilai Pancasila dalam proses Merdeka Belajar Kampus Medeka harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan kualitas, relevansi menghadapi tantangan sesuai perubahan lokal, nasional, dan global".<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bahwa Pendidikan tinggi sebagai bagian terintegrasi dengan pendidikan nasional.

<sup>5</sup> Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, bahwa pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

### 3

Tataran nilai-nilai Pancasila bersifat filosofis-idealistic, ditetapkan berdasar hukum secara yuridis, dan diaplikasikan secara sosiologis pada tataran personal, sosial, dan institusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jati diri bangsa terlihat dari cara pandang dan perilaku nyata dalam hidup bermasyarakat, di antaranya saling menghormati kebebasan beragama, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menempatkan kesatuan dan persatuan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan, dan mewujudkan secara bersama-sama kemajuan yang adil dan merata.

Hukum berupa norma yang ada di masyarakat, sejalan dengan pernyataan bahwa "*Law is a social activity, it is possible to discover the principles and mechanism of its operation, and to predict when and how it comes into play in society*".<sup>6</sup> Aplikasi norma hukum Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pendidikan tinggi haruslah dilandasi pada kemampuan dan kesiapan masing-masing perguruan tinggi, sehingga dapat menunjang pengembangan pendidikan nasional.

## PENUTUP

### Simpulan

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar utama dalam pendidikan tinggi, khususnya dalam proses Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dilaksanakan berdasar *metoda aplikatif berkualitas*, sesuai dengan kemampuan dan kesiapan perguruan tinggi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia.

## Saran

Dalam mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila melalui program Belajar Merdeka Kampus Merdeka, agar disesuaikan dengan kompetensi dan kesiapan perguruan tinggi, baik dosen, mahasiswa, dan sarana-prasarana penunjangnya secara bertahap dan bermanfaat bagi masyarakat pemangku kepentingan.

---

<sup>6</sup> Black, Donald, 1973, *The Social Organization of Law*, Yale University, Academic Press. h.1.

## DAFTAR PUSTAKA

Black, Donald, 1973, *The Social Organizazion of Law*, Academic Press, Yale University.

Wackcs, Raymond, 2006, *Philosophy of Law*, Oxford University Press

Rahardjo, Satijipto, 1996, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

\_\_\_\_\_, 2009, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta

Undang-Undang Dasar Republik Indonesua 1945, Amandemen Keempat

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Ketetapan MPR Republik Indonesia, Tap. No. 1/MPR/ 2003 Tentang Butir-Butir Pancasila

Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011, Direvisi Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

# **DENGAN SEMANGAT PANCASILA KITA MAJUKAN PENDIDIKAN PROFESI BIDAN DI INDONESIA**

**Mustika Dewi**  
**Universitas Brawijaya**

## **Semangat Pancasila**

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, akan tetap kita pertahankan dan menjadi ciri khas bangsa. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi semakin pesat, namun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak hilang ditelan masa. Keteguhan iman, kejernihan pikiran, kebenaran dan kejujuran yang terkandung dalam Pancasila akan tetap bersinar sepanjang masa. Pancasila yang dirumuskan oleh para pendiri Negara ini tentu memiliki makna dan maksud tertentu ditengah kebhinekaan bangsa kita. Sebagai warga negara yang lahir dan hidup di bumi Indonesia yang beraneka ragam agama, budaya, dan bahasa membuat bangsa ini potensial sangat kaya raya dalam segala aspek. Pancasila hendaknya menjadi alat pengikat dan pemersatu bangsa yang besar ini.

Generasi Z yang merupakan penerus muda zaman sekarang yang lahir sekitar tahun 1995-2010, perlu diperkenalkan kembali dengan Pancasila. Mungkin sebahagian mereka tidak lagi mendapatkan mata pelajaran Pancasila ketika sekolah. Mulai dari sila pertama sampai sila kelima beserta butir-butir beserta nilai yang terkandung di dalamnya sebaiknya digaungkan kembali. Sungguh indah dan mulia nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Seperti sila kedua yang berbunyi “keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”. Makna mendalam adalah meliputi keadilan diseluruh aspek kehidupan anak bangsa. Termasuk kebebasan dalam belajar dan mengembangkan pendidikan yang ditekuni. Setiap warga negara berhak memilih pendidikan yang dia minati, berhak mengembangkan profesi yang dia tekuni, tentunya dengan dukungan dan perlindungan dari negara.

Pendidikan dibidang kesehatan dewasa ini berkembang sangat pesat, terlihat dari banyaknya didirikan Pendidikan Tinggi Kesehatan. Mulai dari pendidikan



kedokteran, kedokteran gigi, pendidikan keperawatan, pendidikan kebidanan, pendidikan farmasi, pendidikan gizi, pendidikan kesehatan lingkungan dan tenaga kerja, pendidikan kesehatan masyarakat dan lain-lain. Seperti layaknya bunga di taman, dengan beraneka ragamlah makanya tampak indah, apalagi jika ditata dengan rapi. Begitu juga dengan pendidikan tenaga kesehatan yang cukup banyak, semua memiliki ciri dan kompetensi masing-masing, namun mempunyai tujuan yang sama yaitu menjadikan bangsa Indonesia sehat jiwa dan raga. Dengan semangat Pancasila, kita majukan dan kembangkan pendidikan anak bangsa sesuai dengan bidang dan minatnya masing-masing. Tanpa perlu merasa lebih bernilai dan lebih baik daripada yang lain. Namun saling menguatkan dan bekerja sama dalam mengisi pembangunan dan kemerdekaan bangsa. Begitu juga dengan pendidikan profesi bidan di Indonesia, semua dapat berjalan tahap demi tahap menapaki sedikit demi sedikit kemajuan dalam strata pendidikan, tentunya tidak lepas dari dukungan berbagai pihak dan rekan-rekan lintas profesi, baik dari kedokteran, keperawatan serta lainnya.

Pendidikan profesi bidan masih tergolong pendidikan profesi yang baru. Sejak tahun 2008 pendidikan Sarjana Kebidanan didirikan pada beberapa perguruan tinggi negeri di Indonesia antara lain di Universitas Andalas Padang, Universitas Brawijaya Malang. Kedua instansi pendidikan di bawah Direktur Jendral Pendidikan Tinggi ini turut memperjuangkan pendidikan profesi bidan agar eksis dan berkembang menjadi profesi yang memberikan manfaat dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Pendidikan profesi bidan dengan batasan kompetensi memberikan asuhan kebidanan fisiologis diharapkan mampu bertugas sebagai bagian tenaga kesehatan. *Core* kompetensi bidan adalah memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, perlu ditingkatkan pendidikan profesi bidan.

### **Pendidikan Profesi Bidan**

Pendidikan bidan berkembang cukup lama dan membutuhkan waktu Panjang di Indonesia. Hingga saat ini kompetensi bidan lebih dispesifikasikan dan mendapatkan pengakuan dalam sistem perundang-undangan. Sekolah bidan zaman dahulu mulai dari pendidikan setaraf SMA pada level 2 hingga saat ini pada level 7 pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yaitu kerangka perjenjangan kualifikasi kompetensi. Pada dasarnya setiap profesi membutuhkan pengakuan untuk dapat bekerja dan memberikan manfaat untuk kemakmuran bersama. Pada dekade belakangan ini pendidikan bidan berkembang cukup pesat, beberapa pendidikan sarjana kebidanan dan pendidikan profesi bidan didirikan pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta lainnya di Indonesia. Dengan dukungan badan akreditasi nasional perguruan tinggi diharapkan mampu mempertahankan kualitas lulusan bidan

sehingga betul-betul memiliki kompetensi dalam memberikan pelayanan kebidanan dengan baik kepada masyarakat.

Tantangan bagi seluruh bidan adalah memperbaiki dan mempertahankan kompetensi yang dimiliki. Berdasarkan kode etik bidan Indonesia, seorang bidan berkewajiban mengembangkan diri melalui studi lanjut. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan melakukan analisis yang lebih baik dalam memecahkan masalah-masalah nyata yang ditemui pada pelayanan kesehatan. Bangsa kita terdiri dari beraneka ragam budaya dan memiliki nilai-nilai yang diyakini serta menjadi tradisi pada daerah masing-masing. Bidan diharapkan mampu mengintegrasikan nilai dan budaya lokal yang masih melekat dan cukup kental pada sebahagian besar masyarakat untuk mendukung pelayanan kesehatan. Hal tersebut bukanlah pekerjaan mudah, butuh penguasaan terhadap konsep-konsep dasar pelayanan kesehatan. Dalam pendidikannya bidan dibekali ilmu kebidanan, ilmu komunikasi dan konseling, promosi kesehatan, epidemiologi klinik, dan ilmu-ilmu dasar lainnya. Ilmu pengetahuan tersebut diharapkan mendukung tugas utamanya dalam memberikan pelayanan kepada ibu dan anak berdasarkan *evidence based*.

Agar memiliki daya saing yang tinggi, dan berkontribusi banyak dalam pembangunan kesehatan, seorang bidan tentu harus meningkatkan kapabilitas dirinya. Jenjang pendidikan bidan sudah terbentang luas, kesempatan untuk memperoleh beasiswa untuk pendidikan bidan juga cukup memadai. Sekarang tugas masing-masing para bidan adalah mengupayakan pengembangan dirinya. Pemerintah telah mengalokasikan banyak biaya untuk kemajuan dibidang pendidikan, termasuk kerjasama pendidikan dengan universitas-universitas dalam dan luar negeri. Justru alokasi tersebut diinformasikan hanya sebahagian kecil yang diambil oleh peserta didik yang berkesempatan untuk melanjutkan pendidikannya. Banyak channel dan link yang bisa di akses untuk mendapatkan beasiswa pendidikan antara lain <https://beasiswalpdp.kemenu.go.id/>, <https://ltdikti6.kemdikbud.go.id/>. Dengan bertambah tingginya pendidikan bidan, bidan diharapkan ikut andil dalam pembangunan kesehatan nasional khususnya dalam menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Indonesia.

### **Peran bidan menurunkan angka kematian ibu dan bayi**

Penduduk Indonesia termasuk 5 (lima) negara dengan populasi terpadat di dunia. Indonesia merupakan peringkat keempat yaitu sekitar 275 juta jiwa menurut worldometers, dengan angka pertumbuhan penduduknya 1,07% pertahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki populasi penduduk yang sangat besar. Indonesia negara berkepulauan, dengan letak

geografis diantara dua benua yaitu benua Asia dan Australia. Hal ini juga yang mendasari multikultural masyarakat Indonesia. Kita menyadari tidak mudah untuk mengatur negara dan bangsa yang besar dan majemuk ini, termasuk dalam bidang kesehatan. Masalah angka kematian ibu (AKI) masih tinggi yaitu 305/100.000 kelahiran hidup (Supas, 2015) dan angka kematian bayi (AKB) 37/1000 kelahiran hidup (BPS, 2019). AKI dan AKB ini merupakan indikator kesejahteraan suatu bangsa. Masih banyak “PR” untuk kita semua, khususnya tenaga kesehatan dalam mengupayakan agar AKI dan AKB ini dapat ditekan serendah-rendahnya seperti negara-negara maju.

Penyebab lambat turunnya angka AKI dan AKB sangat fundamental. Sosial ekonomi yang masih tergolong rendah, kemiskinan dan pendidikan rendah masih mendominasi sebahagian besar masyarakat kita. Kondisi tersebut pada pelayanan kesehatan mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Hal tersebut dikenal dengan 4 terlambat, yaitu terlambat mendiagnosis, terlambat mengambil keputusan, terlambat merujuk, dan terlambat mendapatkan pertolongan yang sesuai. 4T ini perlu disikapi secara cermat oleh tenaga kesehatan dan sektor lainnya. Semua pihak diharapkan mengambil andil dalam mengupayakan percepatan penurunan AKI dan AKB. Kemampuan dalam melakukan deteksi dini kelainan dalam masa kehamilan, menolong ibu dan bayi dalam kondisi gawat darurat, serta mampu bekerja secara *tim work* haruslah dimiliki oleh bidan. Namun masalah AKI dan AKB tidaklah sederhana. Merupakan kumparan hitam yang harus iurai dan dijernihkan. Masyarakat kita sebahagian besar masih dalam taraf perekonomian menengah kebawah, dan bertempat tinggal di pinggiran kota atau di pedesaan. Mereka masih membutuhkan bantuan dalam kemudahan akses pelayanan kesehatan.

Masih banyak warga kita yang membutuhkan tenaga bidan dengan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di berbagai wilayah. Sebagaimana filosofi bidan yang menyatakan bahwa siklus reproduksi seorang perempuan mulai dari kehamilan, persalinan, nifas merupakan suatu hal yang fisiologis, namun masih rentan dan memiliki risiko. Maka perlu dilakukan pemantauan dan deteksi dini untuk mempertahankan kondisi fisiologis tersebut tetap dalam keadaan normal. Sebagaimana model pelayanan kebidanan di Indonesia yang bertemakan *partnership, women center, normality, dan continuity of care*. Pelayanan tersebut diberikan bidan kepada perempuan sepanjang siklus reproduksinya. Sebagai sahabat perempuan, bidan diharapkan dapat berperan dalam menurunkan angka kematian dan kesakitan ibu dan bayi di Indonesia.

Bidan memberikan pelayanan kebidanan setelah melalui proses perizinan dan memiliki legalitas praktik. Sistem perundang-undangan telah mengatur bahwa

seluruh bidan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) bidan. Untuk melaksanakan praktik kebidanan, seorang bidan juga mengurus Surat Izin Praktik Bidan (SIPB). Hal ini menjadi bukti legalitas bahwa bidan tersebut layak melakukan praktik pada tempat pelayanan kesehatan tertentu. Supaya pelayanan kebidanan pada praktik bidan memiliki mutu layanan yang senantiasa terjaga baik, maka dilakukan monitoring dan evaluasi praktik bidan mandiri. Program tersebut disebut dengan Bidan Delima. Bidan Delima merupakan sistem standarisasi kualitas praktik bidan serta terdapat kegiatan pembinaan dan pelatihan rutin dan berkesinambungan.

Peran bidan dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi dimulai dari memberikan edukasi pra nikah dalam rangka mempersiapkan kehamilan atau pra konsepsi, selama masa kehamilan, melahirkan, masa nifas dan perawatan bayi baru lahir. Bidan berperan penting dalam mendampingi seorang perempuan pada saat melahirkan putranya. Sungguh merupakan peranan yang berharga. Disaat bidan diberikan kepercayaan oleh para perempuan dalam membantu proses persalinan, perjuang melahirkan buah hati yang dinantikannya. Para bidan yang kompeten dan memiliki rasa empati yang tinggi akan mampu menyambut dan mempersiapkan generasi penerus bangsa ini, yang akan menggantikan posisi-posisi penting dalam pemerintahan negara kita nantinya.

Profesi bidan ingin bergerak maju lebih jauh, memberikan manfaat untuk negeri. Bidan memerlukan dukungan dan bantuan semua pihak untuk melakukan itu, memberikan andil dalam memakmurkan masyarakat Indonesia hingga dipolosok nusantara yang sangat luas. Marilah kita dukung pendidikan profesi bidan. Profesi yang lahir semenjak peradaban dunia ini ada, dan akan terus ada hingga nanti.

### Profil Penulis



sekarang.

Nama Mustika Dewi, SST., M.Keb. Alamat Rumah Jalan Baiduri Pandan 1/22 Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Jawa Timur. Alamat e-mail, [mustikadewi@ub.ac.id](mailto:mustikadewi@ub.ac.id). *Mobile phone* 08126719106. Saya menyelesaikan Pendidikan Diploma IV Bidan Pendidik tahun 2007 di Politeknik Kesehatan Padang, dan S2 Kebidanan di Universitas Andalas Padang pada tahun 2014. Bekerja sebagai dosen di Program Studi Profesi Bidan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang sejak 2016 sampai

Pengalaman menulis buku dengan judul Pencegahan Stunting dan Pemantauan Tumbuh Kembang Balita di Rumah, dan Praktik Budaya Masa Nifas dan Bayi Baru Lahir pada Pelayanan Kebidanan Berkelanjutan di Masyarakat, Dosen Merdeka, dan Buku Ajar Remaja dan Pra Nikah. Ifit dapat dihubungi melalui *e-mail*: [mustikadewi@ub.ac.id](mailto:mustikadewi@ub.ac.id) || FB: Mustika Dewi || IG: mustika6163

# **PANCASILA UNTUK "KEMERDEKAAAN EDUKASI" BERBASIS KETUHANAN, KEADILAN DAN KEMANUSIAAN**

Oleh: Siti Marwiyah  
Rektor Universitas Dr. Soetomo Surabaya

*Ad astra per aspera* atau Mencapai bintang melalui pengorbanan

## **Pendahuluan**

Kata mutiara itu menunjukkan, bangsa manapun di muka bumi ini, jika ingin mencapai bintang atau kejayaan haruslah berani dan rela berkorban.

Segala aktifitas kehidupan bermasyarakat dan berbangsa ini harus berpijak pada ideologi bangsa, yakni Pancasila. Dari Pancasila inilah, setiap subyek bangsa diwajibkan atau diharuskan meluruskan pikiran, sikap dan perilakunya yang benar atau perilaku yang tidak mendatangkan kesulitan dan penderitaan bagi lainnya, dan sebaliknya mendatangkan kebahagiaannya.

Kalau manusia negeri ini terjerumus dalam perilaku yang mendehumanisasikan diri dan sesamanya, maka ini berarti dalam dirinya kehilangan "kemerdekaan edukasi". Kemampuan atau kemampuannya untuk mendidik diri menjadi pemerdeka tidak ditunjukkannya. Disinilah dirinya layak disebut sebagai manusia yang kehilangan Pancasila, yang mengakibatkan memperoleh "kemerdekaan edukasi". Sehingga kemana-mana atau dimana-mana tampak tidak menampilkan perilaku berbasis ketuhanan, keadilan, dan kemanusiaan.

Dalam ranah itu, terbaca bahwa manusia yang memilih jalan berseberangan dengan ideologi atau kurang menjiwai Pancasila masih sangat banyak, yang mengesankan kalau mereka belum totalitas "meng-Indonesia". Semestinya, Pancasila sebagai falsafah pandangan hidup bangsa, seyogyanya dicerminkan ke

dalam prinsip-prinsip nilai dan norma kehidupan dalam berbangsa, bernegara dan berbudaya.<sup>12</sup>

Landasan kuat secara ideologis yang idealitasnya menjadi “kiblat”, bahwa Pancasila sebagai dasar negara ini merupakan filsafat kenegaraan bangsa Indonesia secara istimewa yang menjadi landasan utama semua sistem penyelenggaraan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Ketika di masyarakat masih banyak kondisi buruk atau tidak mencerminkan diri sebagai subyek yang merdeka secara edukatif, maka diantara yang perlu dipertanyakan adalah ketaatan ideologisnya

## Pembahasan

Dalam ranah teoritis, setiap subyek bangsa sebenarnya diajari, bahwa pembentukan sumber nilai yang mawadahi sumber sistem falsafah kebangsaan berjalan dalam sejarah panjang yang melibatkan kaum cendekia dan benar-benar *primus inter pares*, di samping masyarakat. Proses yang demikian panjang ini menjadi tidak sia-sia atau tidak sampai kehilangan makna karena dogma yang terkandung dalam Pancasila berisikan tentang ajaran kemuliaan dan memuliakan hidup dan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, seperti bagaimana menjadi manusia yang mampu “memanusiakan manusia” atau membuat “Tuhan selalu hidup setiap aktifitas manusia”, sehingga diidealisasikan manusia tetap berjalan di jalan yang benar. Dalam ranah demikian, Pancasila merupakan lima dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik,<sup>13</sup> yang membuat manusia mengabdikan pada kebaikan.

Menurut Teguh Prasetyo bahwa Pancasila mempunyai fungsi konstitutif dan regulatif.<sup>14</sup> dengan ditetapkannya Pancasila sebagai *philosophische grondslag (grundnorm)* maka pembentukan hukum, penerapan hukum dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Disamping itu posisi yang demikian telah menjadikan Pancasila sebagai dasar dari sistem hukum bangsa Indonesia yang mencakup 4 hal yaitu, *philosophical, political, cultural, dan sociological*.

---

<sup>12</sup> Laboratorium Pancasila IKIP Malang, *Refleksi Pancasila dalam Pembangunan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1997). 243.

<sup>13</sup> Maulana Arafat Lubis, *Pembelajaran PPKN*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), 23, dan lihat Ari Tri Soegiti, dkk, *Pendidikan Pancasila*, (Semarang: Unnes Press, 2016), 2.

<sup>14</sup> Teguh Prasetyo, Ari Pornomosidi, *Membangun Hukum Berdasar Pancasila*, (Bandung: Nusa Media, 2014). 36,

Kita memang harus terus belajar banyak. Misalnya dari Sunan Drajat, dalam episode perjuangannya telah memformulasikan resep kecerdasan sosial yang sejatinya berensi doktrin ideologi Pancasila. Resepnya ini dijadikan ruh dalam aktivitas dakwahnya dengan ungkapan sederhana seperti *"berilah tongkat kepada orang buta; berilah pakaian kepada orang yang telanjang; berilah makan kepada orang yang kelaparan; dan berilah perlindungan kepada orang yang kehujanan"*.

Konstruksi keteladanan moral spiritual yang bertajuk resep kecerdasan sosial itu ditujukan bukan semata pada "peziarah pluralistik" lokal yang mengunjunginya, tetapi juga elemen elit negara tentang makna kehidupan sebagai individu dan pemegang amanat publik berbasis menghidupkan atau membangkitkan ruh Pancasila.

Jika kita baca dengan kebeningan hati, dalam resep Sunan Drajat itu, elit negara mempunyai tanggungjawab besar untuk membuktikan perannya sebagai pengamal dan pembumi utama Pancasila. Masalahnya, apakah mungkin mereka bisa menegakkan resep itu kalau mereka disibukkan mengkhianati dan mendistorsi Pancasila, atau tergelincir jadi "teroris" yang menghancurkan makna agung Pancasila?

Cendekiawan muslim Azzumardi Azra (2010) yang pernah mendapatkan penghargaan dari Ratu Inggris atas prestasinya dalam pencerahan pluralisme melontarkan gugatan, bagaimana kita bisa berbicara tentang "Ketuhanan Yang Maha Esa" ketika dalam berketuhanan terdapat fakta adanya sebagian warga yang dari waktu ke waktu memaksakan kemauannya sendiri atas nama Tuhan. Bagaimana kita bicara tentang "kemanusiaan yang adil dan beradab" ketika warga dari satu tempat ke tempat lain, karena sebab-sebab yang sepele, sangat mudah mengamuk, menghancurkan harta benda, dan mencabut nyawa.

Bagaimana pula kita sanggup berbicara tentang "persatuan Indonesia" ketika banyak orang dan kelompok lebih mementingkan diri dan kelompoknya melalui tindakan melanggar hukum seperti korupsi dan mengorbankan solidaritas terhadap warga lainnya, atau Kemana-mana suka menghancurkan hak-hak kemanusiaan manusia lainnya?

Bagaimana bisa kita lantang berkhotbah tentang "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan" jika banyak atau komponen struktural dan politisi melakukan manipulasi politik lewat proses demokrasi; tidak mencerminkan sikap hikmat, bijaksana, dan sosok representasi yang akuntabel?



Kalau refleksinya dikembangkan: bagaimana pula bisa kita berbicara tentang "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", sementara jumlah rakyat yang terjajah kemiskinan masih puluhan juta orang, sementara kehidupan serba materialistik, hedonistik, dan permisifistik kian merajalela dan mengabsolut?

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang. Jumlah ini hanya menurun tipis 0,01 juta orang dibanding September 2020. Namun, jika dibandingkan pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin naik 1,12 juta orang. Kalau berdasarkan persentasenya, penduduk miskin di bulan Maret 10,14 persen, Jumlah penduduk miskin di perkotaan naik 0,01 persen poin. Sementara di desa mengalami penurunan 0,10 persen poin. Adapun kategori penduduk miskin adalah masyarakat yang pengeluaran per kapitanya di bawah garis kemiskinan (GK) atau kurang dari Rp 472.525 per kapita per bulan. Garis kemiskinan pada bulan Maret ini naik dari Rp 458.947 di bulan September 2020. Penyumbang terbesarnya berada pada kategori GK makanan, dengan share sebesar 73,96 persen. Komoditas yang berpengaruh besar terhadap GK makanan adalah beras dengan kontribusi mencapai 20,03 persen di perkotaan dan 24,06 persen di pedesaan. Maka itu supaya pengeluaran masyarakat keluar dari garis kemiskinan, caranya adalah bagaimana mengendalikan harga-harga yang paling banyak dikonsumsi penduduk miskin supaya GK tidak naik terlalu cepat. Sementara itu, indeks kedalaman kemiskinan menurun dari 1,75 poin di bulan September 2020 menjadi 1,71 poin di bulan Maret 2021. Indeks kedalaman kemiskinan adalah indeks yang digunakan untuk mengukur seberapa dalam kemiskinan yang dirasakan penduduk.<sup>15</sup>

Di tangan realitas sosial, selalu ada gugatan. Gugatan itu tidak sulit terbaca secara jernih senyatanya oleh elit kekuasaan dan komunitas cendekia bangsa ini, pasalnya problem besar dan berat masih mengeksaminasi dan bahkan menghegemoni kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan Indonesia yang secara kriminogen sebagian berakar dari sepek terjangnya.

Jika kita mencermati dengan jernih, kita masih menjadi bangsa yang "kaya" dengan penyakit laten yang membuat citra Indonesia tetap layak disebut sebagai negara yang hanya mempunyai impian besar, tetapi mudah terganjal dalam mewujudkannya akibat tidak gigih dan konsisten dalam membukumkannya. Kondisi demikian inilah yang membuat kita hanya bisa "mabuk" impian, sementara dalam keseharian, khususnya elitnya, hanya sibuk memproduksi janji dan "mengeksplorasi" perbuatan palsunya.

---

<sup>15</sup> [BPS: Ada 27,54 Juta Penduduk Miskin di Indonesia Hingga Maret 2021 Halaman all - Kompas.com](#)

Cita-cita menjadi bangsa besar sering sekali diucapkan elemen pemimpin yang berapi-api saat berpidato atau berjanji pada rakyat.<sup>16</sup> Saat berkampanye di hadapan konstituen misalnya, mereka seperti akan mengerahkan segala kemampuannya untuk "merias" bumi pertiwi ini dengan berbagai bentuk karya istimewa, yang bermanfaat bagi Indonesia ke depan.

Ketika disuruh menandatangani kontrak politik, mereka berani membubuhkan tanda tangan sebagai *syahadah* kekuasaan kalau dirinya kelak, saat terpilih menjadi elemen di pemerintahan atau pilar-pilar utama eksekutif, legislatif, dan yudikatif, akan menciptakan zaman keemasan atau perubahan besar yang menandakan kejayaan dimana-mana.

Sayangnya, setelah terpilih dan disumpah atau bersumpah untuk mengamalkan Pancasila seperti janji setia menjaga amanat rakyat, ternyata janji ini diingkarinya. Mereka tergelincir menjatuhkan opsi jadi agen "terorisasi Pancasila". Mereka yang menempati pos strategis ini tergiur dan tergiring memasuki wilayah "permufakatan jahat" atau mempermainkan amanat sebagai penjaga keadilan dan pembumi kesejahteraan rakyat.

Jabatan yang dikendarainya bukan digunakan melindungi dan menyejahterakan rakyat, tetapi digunakan mendehumanisasikan atau menyuburkan "teror" terhadap rakyat. Rakyat tak ubahnya obyek eksperimentasi yang terus menerus dibodohi dan dijadikan tameng pembenaran eksaminatif sistematis berbagai model sepak terjang berpola penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Pancasila yang secara substansial menggariskan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan kesejahteraan rakyat, sekedar dihafal dan digunakan oleh elemen strategis negara itu sebagai sekumpulan dalil apologis politis, dan bukan sebagai ruh moral-spiritual dalam kinerjanya.

Mereka itu merasa malu kalau harus mengimplementasikan Pancasila. Mereka juga dilanda ketakutan kehilangan investasi besar bagi keluarga, kolega, parpol, atau *neo-koncoisme*-nya, bilamana harus menegakkan doktrin keadilan, kebutuhanan, dan kesejahteraan rakyat.

---

<sup>16</sup> Fais Mubarak, *Mencari Pancasila di Tengah Manusia Alpa*, (Jakarta: LPPI, 2017), h. 7.

“*Zamen bundeling van olle krachtern van de natie*”, yang bermaknakan “tekad bersama untuk mendahulukan kepentingan bersama, masyarakat, bangsa, dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan sendiri”, adalah ungkapan Bung Karno di hadapan rakyat dan pejabat pemerintahan, yang dalam faktanya dieliminasi dimana-mana.<sup>17</sup>

Idealitasnya pesan Bung Karno itu mengajarkan, bahwa, dalam membangun bangsa, setiap orang yang dipercaya menduduki kursi yang membawa atribut atau identitar suara rakyat, haruslah mengutamakan komitmen kebangsaan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat, membebaskan kemiskinan.

Mereka pun seharusnya berjuang melawan berbagai ancaman asing dan penyakit internal yang cenderung mengoyak republik menjadi sebuah negeri keropos, dan mensucikan diri sesuci-sucinya agar tidak terjerumus dalam kaukus dan kolaborasi *para bandit* berpola pembenaran korupsi, penodaan keadilan, pembodohan rakyat, atau berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

Komunitas elit negara itu idealnya mampu jadi negarawan atau sosok elit yang bersikap cerdas dan humanitas seperti digariskan Pancasila dengan menunjukkan kapabilitas intelektual-spiritual, kemanusiaan, dan aseptabilitas moral-politiknya guna meninggikan hakikat makna tanggungjawab (kewajiban) kepada rakyat dan bukannya memilih jalan sebaliknya, yakni menjadikan rakyat sebagai kendaraan untuk memenuhi “birahi politik”-nya, kegilaan jabatan, dan nafsu kapitalistiknya semata.

Sayangnya, dewasa ini jalur “permufakatan jahat”, kompromi keji, atau kemenangan cara mempermainkan amanat masalah yang ditempuh atau dijadikan opsi menggiurkan sebagian elemen negeri ini. Mereka terbius dalam jargon dan kesempatan berlabel senyampang kebebasan atau kemerdekaan berucap dan berbuat bisa ditunjukkan semaunya, yang mengesakan kalau dalam kehidupan berbangsa ini tidak perlu kendali atau bisa menelanjangi ideologi sesuka hati.

Mereka itu masih membentuk atau mengemas dirinya sebagai oportunist yang gemar menciptakan peluang-peluang strategis yang membuatnya jadi selebriti kekuasaan kaya-raya atau menempati strata elitisme yang dikenal “*upper class*”, yang membuat rakyat jadi penonton yang merana. Rakyat memang jadi “merdeka belajar”, namun belajarnya adalah melihat, menelaah, dan barangkali meniru cara-cara yang berlawanan dengan garis ideologis.

---

<sup>17</sup> Ibid.

Kroni dan kepentingan eksklusif kaukus politik dan ekonomi berafiliasi dinasti misalnya dijadikan sebagai "kepentingan keluarga kontemporer" yang diabsolutkannya dengan mengalahkan amanat kerakyatan. Amanat rakyat telah dijadikannya sebagai obyek permainan utama dengan berbagai dalih yang sebenarnya membodohi masyarakat (publik). Kalau kaukus demikian tidak dihentikan sendiri oleh elit strategis bangsa dengan cara memenangkan doktrin Pancasila, maka kehancuran total negeri ini hanya menunggu waktu.

## Penutup

Pancasila secara general dan verbal memang menjadi ideologi yang sangat dicintai dan dibela, namun dalam ranah empirik, ideologi ini belum dijadikan kekuatan untuk membangun dan mewujudkan jiwa yang kuat. Kesadaran kolektif sebagai bangsa yang mempunyai ideologi Pancasila wajib dibuktikan ke ranah *das sein*, sehingga karut marutnya bangsa ini tidak menuju lonceng kematian bernegara, tetapi menuju pembaruan atau perubahan radikal.

Sejatinya, kesadaran kolektif itu pun akan mampu mengalahkan berbagai bentuk penyakit anomali, deviasi, malversasi, dan kleptokrasi kekuasaan, atau berbagai jenis virus yang menghambat dan menjegal aksi-aksi moral edukatif yang mencerdaskan setiap bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ari Tri Soegiti, dkk, *Pendidikan Pancasila*, Semarang: Unnes Press, 2016.  
Mubarok, *Mencari Pancasila di Tengah Manusia Alpa*, Jakarta: LPPI, 2017  
Laboratorium Pancasila IKIP Malang, *Refleksi Pancasila dalam Pembangunan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1997).  
Maulana Arafat Lubis, *Pembelajaran PPKN*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2018,  
Teguh Prasetyo, Ari Pornomosidi, *Membangun Hukum Hukum Berdasar Pancasila*, Bandung: Nusa Media, 2014,

## Internet

[BPS: Ada 27,54 Juta Penduduk Miskin di Indonesia Hingga Maret 2021 Halaman all - Kompas.com](#)

# **RELEVANSI PANCASILA DAN KITAB *TA'LIMUL MUTA'ALIM* DALAM MEWUJUDKAN MERDEKA BELAJAR**

## **Khasanah**

Pendidikan merupakan suatu proses yang dialami semua manusia, karena pendidikan adalah fase penyerapan ilmu pengetahuan ke dalam diri seseorang. Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan mempunyai peran yang sangat penting bagi individu, baik untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas diri, pengembangan keterampilan, dan untuk meningkatkan kualitas dalam hidup bersosial. Terlebih lagi pendidikan sangat penting dalam menentukan cara bermoral, berperilaku, dan berinteraksi. Oleh karenanya untuk mengetahui karakter seseorang salah satunya dapat dilihat dari pendidikannya. Walaupun tidak jarang ditemukan beberapa orang terpelajar dan berpendidikan akan tetapi mempunyai karakter yang berseberangan dengan yang seharusnya.

Pendidikan tidak hanya melulu soal transfer ilmu pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik, akan tetapi lebih kepada proses pengambilan pembelajaran dan hikmah dari segala sesuatu di sekitar lingkungan hidup. Sehingga tidak benar jika dikatakan bahwa pendidikan hanya terjadi di tempat-tempat resmi dan formal, karena proses pendidikan ini memiliki tempat, cara, tahapan, dan masa yang berbeda-beda. Di zaman digital sekarang ini seharusnya kecanggihan teknologi menjadi sarana untuk memudahkan setiap individu dalam memperoleh ilmu pengetahuan dari berbagai sumber. Hal ini senada dengan konsep merdeka belajar yang digaungkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim. Harapan dari merdeka belajar ini adalah lingkungan pendidikan mempunyai kemerdekaan dan kemandirian tersendiri dalam menentukan proses pembelajaran.

Makna kemerdekaan belajar jika dikaitkan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pancasila sebagai dasar negara, maka akan ditemukan beberapa poin persamaan yaitu, kebebasan. Hanya saja letak kebebasan ini berbeda dalam konteksnya saja, jika merdeka pada masa perjuangan sangat berkaitan erat dengan kebebasan yang dimaknai dengan penjajahan dari negara lain, maka merdeka dalam konteks merdeka belajar saat sekarang adalah lebih difokuskan pada proses pembelajaran yang tidak membelenggu, tidak terikat, tidak saklek dan monoton, akan tetapi

pembelajaran yang membahagiakan dan menyenangkan pendidik dan peserta didik. Selain Pancasila yang bisa dijadikan pedoman dalam mewujudkan merdeka belajar, dalam pendidikan yang berbasis Islam ada salah satu buku yang wajib dipelajari terkait pembelajaran, yaitu kitab *Ta'lim Muta'alim*.

Kitab *Ta'lim Muta'alim* merupakan salah satu kitab tentang nilai-nilai dan tata krama dalam proses pembelajaran sehingga tak jarang ada beberapa lembaga yang mewajibkan pengkajian terhadap kitab ini guna membekali para santri dan peserta didik dalam proses belajar. Kitab ini merupakan hasil karya dari tokoh pendidikan Islam yaitu Burhanuddin Ibrahim Al-Zarnuji al Hanafi (Saipullah, 2020). Secara garis besar dalam kitab ini memuat beberapa konsep tentang akhlak sebagai seorang pendidik dan peserta didik. Dengan mempelajari ini kitab ini maka tidak akan terjadi kesenjangan antara pendidik dan peserta didik, karena masing-masing sudah memahami dasarnya. Sebagai generasi milenial yang hidup di zaman digital sangatlah perlu untuk mempunyai dasar dalam berproses mendapatkan ilmu pengetahuan. Melihat beberapa kejadian yang muncul di negeri ini sebagaimana diberitakan oleh media masa yang menunjukkan ada seorang peserta didik yang memenjarakan pendidiknya, bahkan tidak jarang pula terjadi kekerasan yang dilakukan di lingkungan pendidikan. Berdasarkan latar belakang tersebut sangatlah penting kajian terkait relevansi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang mayoritas berlatar belakang Islam yang familiar dengan Kitab *Ta'lim Muta'alim* dalam turut serta mewujudkan merdeka belajar.

Studi tentang kitab *Ta'lim Muta'alim* sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Zaitun mahasiswa IAIN Palu, dalam penelitiannya berfokus pada implementasi pembelajaran Kitab ini terhadap pembentukan akhlak santri di Pondok Pesantren Al-Khairaat Madinatul Ilmi Dolo, (Gide, 1967). Dalam praktek pengimplementasiannya, menggunakan metode keteladanan dan bimbingan langsung, sehingga santri sebagai peserta didik dan ustadz sebagai pendidik dengan mudah dapat mengamalkan sesuai ajaran di dalam kitab tersebut. Kajian kedua dilakukan oleh Purbajati (Purbajati, 2019), fokus kajiannya terkait relevansi Kitab *Ta'lim Muta'alim* dengan pendidikan masa kini berdasarkan tinjauan faktor-faktor pendidikan. Hasil dari kajian ini menyimpulkan bahwa proses pembelajaran dipengaruhi oleh tiga hal besar dan mendasar, yaitu tujuan, metode belajar, dan lingkungan.

Dari berbagai kajian yang telah dilakukan tersebut terlihat bahwa masih minim yang melakukan kajian dikaitkan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan merdeka belajar, oleh karena itu kajian ini sangat penting dilakukan untuk menumbuhkan pribadi yang nasionalis, religius, dan

kontekstual sesuai kelIndonesiaan masa sekarang. Mengingat Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang artinya sebagai masyarakat baik pendidik maupun peserta didik Indonesia sangatlah wajib dan merupakan suatu keharusan untuk menerapkan dan mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila.

Pancasila dalam konteks pendidikan kaya akan nilai-nilai luhur, di antaranya adalah: nasionalisme, religiusitas, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Sedangkan kandungan nilai-nilai dalam Kitab *Ta'lim Muta'alim* dalam pendidikan antara lain: niat, metode belajar, dan lingkungan. Nasionalisme berarti sebagai pendidik dan peserta didik khususnya, dan sebagai warga masyarakat Indonesia umumnya mempunyai makna suatu sikap yang menjunjung tinggi cinta terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Jika dikaitkan dengan nilai yang terkandung dalam Kitab *Ta'lim Muta'alim* dalam hal lingkungan belajar maka hal ini akan seiring sejalan memberi kesempurnaan pemahaman, bahwa sikap mencintai lingkungan hidup dapat mempengaruhi proses pembentukan kepribadian peserta didik. Lingkungan yang nyaman memberikan dampak kesenangan dalam proses pembelajaran.

Religius merupakan salah satu sikap yang harus ada dalam jiwa masyarakat Indonesia baik sebagai pendidik maupun peserta didik dan sebagai masyarakat. Makna dari religius sendiri adalah sikap yang mendorong seseorang untuk berperilaku sesuai ketaatannya pada agama yang dianutnya. Dari sikap ini diharapkan para pendidik dan peserta didik mampu bertingkah laku sesuai ajaran agama yang telah diterimanya. Individu yang mempunyai sikap ini diharapkan dapat meminimalisir perilaku yang menyimpang, terutama perilaku yang menyalahi tata krama dalam proses pembelajaran. Menurut hemat penulis, alasan utama munculnya beberapa kasus terkait kekerasan dalam lingkungan pendidikan, dan kasus-kasus lain yang menyeleweng adalah disebabkan karena rendahnya sikap religiusitas dalam diri seseorang. Kesadaran dan pemahaman yang sempurna terhadap ajaran agama akan menjadi penunjuk bagi diri individu tersebut dalam menggapai tujuan hidupnya secara umum, dan sebagai petunjuk dalam menggapai tujuan proses belajar. Dalam kitab *Ta'lim Muta'alim* juga disebutkan bahwa niat dalam hal ini niat sama dengan tujuan. Tujuan mejadi faktor penting dalam pendidikan terutama zaman digital sekarang ini. Berangkat dari niat atau tujuan maka seseorang dapat menentukan arah terhadap sesuatu yang dilakukan. Sebagai pendidik dan peserta didik yang hidup di zaman yang dimanjakan oleh fasilitas keluasaan dan kebebasan akses informasi, maka penanaman sikap religius dan pemantapan niat belajar sangat diperlukan. Oleh karena itu kesadaran dalam sikap ini diharapkan mampu menanggulangi dan mencegah penyalahgunaan kecanggihan teknologi

informasi. Jika mesin kendaraan membutuhkan rem sebagai pengatur lambat cepatnya laju perjalanan maka sebagai manusia ciptaan Tuhan yang maha sempurna sikap religius menjadi sikap yang dapat mengendalikan keinginan manusia. Terutama menjadi mesin control dalam berperilaku, bertindak, berucap, dan berinteraksi.

Pemahaman terkait proses pembelajaran yang tidak hanya sebagai kegiatan interaksi antara pendidik dan peserta didik juga komunikasi timbal balik dalam suasana edukatif untuk mencapai tujuan belajar, juga menjadi fokus penekanan. Jika proses pembelajaran hanya dimaknai sebatas *take and give* maka akan menghilangkan peran seorang pendidik sebagai teman belajar, dan sebagai fasilitator pembelajaran. Fungsi seorang fasilitator adalah siap sedia ketika dibutuhkan dan dalam segala situasi. Sebagaimana masa Pandemi Covid-19 yang melanda hampir di seluruh belahan bumi ini telah memberikan dampak yang luar biasa, tidak terkecuali bidang pendidikan. Sebagai pendidik yang merangkap sebagai fasilitator pembelajaran maka harus bersiap sedia dengan segala kondisi pendidik dan peserta didik. Artinya dalam situasi seperti ini maka seorang pendidik harus bisa saling membantu dan bergotong royong dengan pihak-pihak terkait tidak terkecuali orang tua, untuk menyelenggarakan proses pembelajaran tetap berlangsung dan tujuan pembelajaran tercapai.

Selain itu penanaman kemandirian belajar juga harus digaungkan untuk mewujudkan merdeka belajar yang sesungguhnya. Sehingga timbul dalam jiwa peserta didik bahwa sumber ilmu pengetahuan tidak hanya terbatas pada buku bacaan saja akan tetapi sumber ilmu dapat diakses dari berbagai macam sumber. Selain itu peserta didik harus mempunyai pemahaman bahwa bukan hanya sosok pendidik yang dapat melakukan transfer ilmu akan tetapi siapapun bisa menjadi fasilitator, hanya saja yang membedakan adalah budi pekerti dan akhlaknya. Dari pemahaman ini diharapkan muncul sikap kehati-hatian peserta didik dalam mencari sumber ilmu pengetahuan. Tidak menjadi kalah penting dalam proses mewujudkan merdeka belajar adalah metode pembelajaran yang digunakan. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Ta'lim Muta'alim* bahwa metode belajar menjadi urutan kedua terpenting dalam proses pembelajaran. Karena metode belajar ini akan berperan dalam menentukan keberhasilan peserta didik dalam memperoleh pemahaman dalam belajar.

#### **Daftar Pustaka**

- Purbajati, H. I. (2019). Relevansi Kitab Ta ' lim Muta ' allim dengan Pendidikan Masa Kini ( Tinjauan Faktor-faktor Pendidikan ). *Ilmu Pendidikan Dan Pembelajaran*, 1(1), 1–32.
- Saipullah, S. (2020). Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Kitab Adab Al-'Alim



Wa Al-Muta'allim dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Karakter di Indonesia. *Tarbawiyah Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 4(1), 53.  
<https://doi.org/10.32332/tarbawiyah.v4i1.1929>

### **Profil Penulis**

Khasanah, lahir di kabupaten Seribu Satu Goa, Pacitan pada tanggal 9 Februari 1989. Dosen pada pada Jurusan Pendidikan Bahasa Arab STIT Al-Muslihuun Tlogo Blitar. Menyelesaikan studi S2 di Jurusan Ilmu Bahasa Arab (IBA) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM, 2020-2025), STIT Al-Muslihuun, kini juga aktif sebagai Filolog yang tergabung dalam group MANASSA. Beberapa penelitian telah ditulis dalam jurnal ilmiah dan buku. Salah satu karya dalam bentuk buku Antologi antara lain Mengurai Problematika Pembelajaran Online (Pustaka Learning Center, 2021).

# Merdeka Belajar untuk Pendidikan Profesi Kesehatan: Menyongsong Era Kenormalan Baru

Titi Savitri Prihatiningsih

Departemen Pendidikan Kedokteran dan Bioetika

Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM

## Era Kenormalan Baru

Awal tahun 2020 dunia dikejutkan oleh munculnya penyakit baru yang disebut COVID-19, singkatan dari Corona Virus Disease-19. Penyakit ini berawal dari satu kasus di Wuhan pada Desember 2019 yang dalam waktu 4 bulan telah menyebar ke seluruh dunia, sehingga pada bulan Maret 2021 WHO mengumumkan adanya pandemic COVID-19. Penyakit ini sangat mudah menular melalui pernapasan, melalui mata maupun melalui sentuhan tangan yang kemudian menyentuh mata, hidung dan mulut. Penyakit ini menimbulkan kesakitan dan kematian yang tinggi. Dalam waktu 18 bulan sejak ditemukannya, data pada bulan Juli 2021 dari WHO menunjukkan lebih dari 182 juta telah terdiagnosis dengan COVID-19 dan 3,9 juta jiwa mengalami kematian. Indonesia mengalami kondisi yang sama seperti di banyak negara. Data terakhir pada tanggal 5 November 2021, di Indonesia 4,25 juta telah terdiagnosis COVID-19 dengan 144 ribu mengalami kematian [1].

Sejak diumumkan sebagai pandemi, banyak negara termasuk di Indonesia, Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk *'work from home'* atau bekerja dari rumah dan *'school from home'* atau sekolah dari rumah. Kebijakan ini untuk menghindarkan terjadinya kerumunan dan kontak agar jumlah kasus dapat dikendalikan. Otomatis, seluruh perguruan tinggi – termasuk fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan menutup kampusnya dan menerapkan modus pembelajaran jarak jauh (PJJ). Diakui oleh banyak pihak bahwa semua institusi pendidikan tinggi tidak memiliki persiapan yang memadai untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh, karena menurut Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 51 Tahun 2018 Bab VII tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh perguruan

tinggi dan program studi untuk dapat menyelenggarakan PJJ serta harus mendapatkan ijin dari Menteri.

Sejak ditemukannya Vaksin COVID-19 dan diizinkan untuk digunakan oleh otoritas yang berwenang, program Vaksin COVID-19 telah dilakukan secara masal mulai awal 2021. Menurut data tanggal 5 November 2021, di Indonesia ada 122.852.096 penduduk atau 44,9% telah tervaksinasi dosis kesatu, dan 76.687.750 atau 28,0% telah tervaksinasi dosis lengkap [1]. Setelah program vaksin COVID-19 ini berhasil dijalankan terjadi penurunan angka infeksi yang tajam, termasuk jumlah kasus dan angka kematian di banyak negara, termasuk Indonesia. Sehingga, Pemerintah melakukan relaksasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari tingkat 4 ke tingkat 1 pada bulan November 2021. Institusi pendidikan tinggi diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Tentu, virus COVID-19 belum hilang sama sekali, sehingga masyarakat tetap diperintahkan untuk terus melakukan protokol kesehatan ketika melakukan berbagai aktivitas. Banyak ahli yang memperkirakan bahwa setelah ada kelonggaran untuk melakukan pembelajaran tatap muka, tampaknya penyelenggaraan pendidikan tinggi – termasuk pendidikan profesi kesehatan, tidak lagi akan kembali seperti semula yaitu pembelajaran tatap muka secara penuh. Pilihan yang akan dilakukan adalah melakukan pembelajaran bauran atau *blended learning*.

### **Merdeka Belajar untuk Pendidikan Profesi Kesehatan**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan hak kepada mahasiswa untuk selama 3 semester melakukan pembelajaran di luar program studinya, yang terdiri dari 1 semester atau 20 SKS menempuh pembelajaran di luar program studinya pada perguruan tinggi yang sama, dan paling lama 2 semester atau 40 SKS menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, atau pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) ini wajib bagi seluruh perguruan tinggi, walaupun ada relaksasi pada program studi profesi kesehatan. Ada delapan macam pembelajaran yang dapat dilakukan oleh mahasiswa di luar program studinya, seperti tampak pada Gambar 1 berikut ini [2].

Gambar 1. Bentuk Kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka [2]



Karakteristik pendidikan profesi kesehatan yang tidak dapat tergantikan oleh modus pembelajaran jarak jauh adalah 'magang di institusi pelayanan kesehatan' yang biasanya dilakukan pada tahap profesi atau tahap rotasi klinik. Selama magang, mahasiswa dipaparkan pada situasi nyata pelayanan kesehatan di rumah sakit, di puskesmas, di klinik pratama maupun di masyarakat. Mahasiswa akan berlatih untuk melakukan wawancara (*anamnesis*) secara langsung pada pasien dan keluarganya. Begitu pula pasien akan langsung berlatih untuk melakukan pemeriksaan fisik pada pasien, termasuk mengusulkan pemeriksaan laboratorium dan pencitraan, serta berlatih membaca dan menafsirkan semua hasil penafsiran untuk sampai pada kesimpulan diagnosis sebagai dasar untuk melakukan penatalaksanaan selanjutnya pada pasien. Untuk program studi dokter mahasiswa di tempatkan di wahana pelayanan kesehatan selama 4 semester minimal, sedangkan untuk pendidikan Ners selama 2 semester. Mahasiswa akan dirotasi ke berbagai departemen klinik maupun instalasi yang ada di rumah sakit agar terpapar oleh semakin banyak jenis kasus, berbagai kondisi pasien maupun sistem pelayanan di rumah sakit. Dengan demikian sesungguhnya program studi pendidikan dokter dan profesi kesehatan telah melaksanakan kegiatan MBKM dalam bentuk magang atau praktik kerja.

Kebijakan MBKM memberi peluang lebih besar untuk berinovasi bagi institusi pendidikan kedokteran. Kegiatan membangun desa dapat dilakukan mahasiswa pada waktu rotasi klinik atau stase di Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kedokteran Keluarga. Mahasiswa dapat ditempatkan di puskesmas di suatu wilayah dan diberi tugas untuk melakukan pendidikan kesehatan masyarakat, promosi kesehatan dan pencegahan penyakit dengan sasaran melakukan perubahan perilaku masyarakat ke arah perilaku hidup sehat. Selama

ditempatkann di suatu wilayah kecamatan, mahasiswa juga dapat melakukan proyek-proyek kemanusiaan. Sebagai contoh, ketika mahasiswa menemukan warga masyarakat yang menderita penyakit berat dan belum dilakukan upaya pelayanan kesehatan yang memadai, maka mahasiswa dapat menyusun proposal untuk menggalang dana dan mengupayakan pengobatan bagi pasien. Begitu pula ketika mahasiswa menemukan kondisi warga yang sangat miskin sehingga menempati rumah yang sangat tidak layak, maka mahasiswa dapat menyusun proyek kemanusiaan bekerjasama dengan dinas pekerjaan umum maupun perusahaan agar bisa membangunkan rumah yang layak menurut kriteria rumah sehat.

Untuk MBKB dalam bentuk kewirausahaan, mahasiswa dapat membuat proyek *start up* untuk membuat layanan '*telehealth*' atau '*telemedicine*'. Mahasiswa juga dapat membuat proyek untuk pengembangan layanan promosi dan edukasi kesehatan, baik melalui pemasaran sosial dengan teknologi digital maupun secara luring. Kegiatan pembelajaran ini dapat diintegrasikan dengan alokasi sks untuk skripsi. Proyek-proyek tersebut dapat diteliti dan laporannya ditulis dalam bentuk skripsi.

### **Bagaimana MBKM di era kenormalan baru?**

Di era kenormalan baru pembelajaran dapat berjalan secara tatap muka akan tetapi ada pembatasan-pembatasan, seperti jumlah mahasiswa dibatasi, mengurangi interaksi secara langsung, menjaga jarak dan tetap menerapkan protokol kesehatan. MBKM dalam bentuk magang di berbagai rumah sakit dan wahana pelayanan kesehatan lain. Untuk mengurangi penumpukan jumlah mahasiswa kedokteran pada satu rumah sakit atau puskesmas, maka konsep '*distributed learning*' dapat diterapkan di era kenormalan baru dengan modus *blended learning* atau pembelajaran bauran.

Definisi *distributed learning* menurut WFME (2021) adalah "*A varied and planned course of study, designed and developed to address the curriculum for students who are in different locations away from the central teaching institution, supported by teaching and supervisory staff who are also physically or virtually distributed across those locations, a whole-systems approach, including all teaching and learning, formative and summative assessments, feedback on learning, support for students and teachers, management, and quality assurance*" [3].

Dari definisi di atas terlihat bahwa konsep *distributed learning* memungkinkan bahwa mahasiswa dan proses pembelajaran untuk didistribusikan ke banyak lokasi, akan tetapi tetap mendapatkan bimbingan, pelaksanaan pembelajaran,

penilaian dan umpan balik dari dosen instruktur yang juga terdistribusi ke berbagai lokasi. Bila selama ini, mahasiswa tahap rotasi klinik hanya ditempatkan di rumah sakit pendidikan yang berada di sekitar kampus, maka dengan *distributed learning*, mahasiswa dapat ditempatkan di berbagai wahana pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Agar proses pembelajaran dan penilaian dapat berjalan secara terstandar, maka fakultas kedokteran penyelenggara program studi perlu meredesain ulang kurikulumnya disesuaikan dengan modus pembelajaran *distributed learning*. Fakultas kedokteran perlu menjalin kerjasama dan merekrut instruktur yang tersebar di berbagai rumah sakit, puskesmas dan wahana pendidikan lain di seluruh Indonesia.

Untuk dapat menerapkan *distributed learning* untuk pendidikan profesi kesehatan di era kenormalan baru tentu dibutuhkan infrastruktur IT yang sangat kuat dan disain instruksional yang sesuai. Victor dan Shannon (2016) menyampaikan tiga prinsip yang perlu dipenuhi bagi penyelenggara *distributed learning*, yaitu: (1) pembelajaran harus berpusat pada mahasiswa, sehingga seluruh proses, infrastruktur dan sistem support diarahkan untuk ini, (2) proses pembelajaran dilakukan secara bauran, dengan mengkombinasikan berbagai model secara daring maupun luring, (3) proses pembelajaran merupakan pengalaman sosial, sehingga kolaborasi dan interaksi dengan berbagai modus tetap perlu diupayakan [4].

#### Daftar Pustaka

- [1] H. Ritchie *et al.*, "Coronavirus Pandemic (COVID-19) the Data," 2021. <https://ourworldindata.org/coronavirus-data>.
- [2] D. J. P. Tinggi, *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020.
- [3] WFME, "Standards for Distributed and Distance Learning," 2021.
- [4] S. Victor and S. Hart, "Distributed Learning: A Flexible Learning and Development Model," *E-Learn World Conf. E-Learning Corp. Gov. Heal. High. Educ.*, vol. 2016, no. 1, pp. 281–290, 2016.

## Profil Penulis



Titi Savitri Prihatiningsih lahir di Jakarta tanggal 5 Juli 1966. Setelah menyelesaikan pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran UGM, melanjutkan pendidikan Masters in Medical Education (MMedEd) dan PhD in Medical Education di Centre for Medical Education, University of Dundee pada tahun 2003. Sejak itu, banyak terlibat di berbagai kegiatan pengembangan pendidikan, baik di tingkat institusi, ikut mendirikan Kantor Jaminan Mutu UGM, mendirikan Departemen Pendidikan Kedokteran yang pertama di Indonesia,

WD Akademik dan Dekan. Lalu di tingkat nasional, aktif sebagai Sekretaris Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran (AIPKI) dari tahun 2003-2011, Ketua Bidang Pendidikan AIPKI (2017-2019), Ketua Pokja Standar Kompetensi Dokter (2005-2007, 2017-2020), Tim MONEV Health Profession Education Quality Project (HPEQ) (2009-2011), Anggota Executive Council dan Assessor AUNQA, Ketua Bidang Pendidikan PB IDI (2018-2021), Penasihat PDNU, Ketua Umum ADIPROKESI (Asosiasi Dosen Profesi Kesehatan Indonesia). Di tingkat internasional, menjadi President South East Asia Regional Association in Medical Education (SEARAME) (2016-2023), anggota Executive Council World Federation for Medical Education (WFME) (2018-2023).

## **Bagian IV**

# **MERDEKA BELAJAR DALAM KONTEKS ERA MENDIKBUD KI HADJAR DEWANTARA DAN NADIEM A MAKARIM**

*Abdul Malik Iskandar,*  
Universitas Megarezky

### **Pengantar**

Sebuah ungkapan bijak mengatakan setiap pemimpin ada zamannya, dan setiap zaman ada pemimpinnya. Pemimpin menghadapi zamannya masing-masing. Bertindak dan berpikir sesuai zaman yang dipimpinnya. Tak ada zaman yang sama dengan pemimpin yang berbeda, begitu pula tidak ada pemimpin sama dengan zaman yang berbeda. Nahkoda menahkodai kapalnya sesuai keadaan laut dan ombak yang dihadapinya.

Ki Hhadjar Dewantara selaku mendikbud memimpin pendidikan sesuai keadaan milieu pendidikan waktu. Begitu juga Bapak Nadiem Anwar Makarim selaku Mendikbud memimpin pendidikan sesuai keinginan dan kebutuhan zamannya. Ki Hadjar Dewantara menghadapi penjajah kolonial Belanda sedangkan Nadiem Makarim Menghadapi pandemic *Covid – 19*.

Negara Republik Indonesia sebagai salah satu negara jajahan yang pernah di jajah oleh pemerintah kolonial Belanda, tak hanya menguasai dan menajajah negara Indonesia dari sisi politik, rempah-remah, hasil bumi tapi lebih dari pada itu termasuk menjajah dari sistem pendidikannya. Hanya kelompok masyarakat tertentu yang dapat mengenyam pendidikan secara leluasa dan merdeka. Kelompok masyarakat itu antara lain dari pemerintah kolonial sendiri, kelompok masyarakat yang menjadi antek-antek kolonial serta kelompok pribumi yang memiliki kekakayaan yang dapat membantu kolonial. Sedangkan kelompok masyarakat biasa tidak dapat mengakses pendidikan.

Zaman ini telah berlalu bersama dengan sejarahnya sendiri. Ada sosok di zaman ini yang mengukir sejarah manis dan tak terlupakan, sosoknya menjadi legenda



dalam perjalanan panjang sistem pendidikan Republik Indonesia , tanggal kelahirannya diabadikan sebagai hari Nasional Pendidikan, dia adalah Ki Hadjar Dewantara.

Cenkraman pandemi Covid-19 belum usai, begitupula sistem pembelajaran belum menemukan titik terang. Sejumlah simulasi pembelajaran telah diuji cobakan dan terus dicoba. Belum ada yang konsep dan implementasi serta patron yang dianggap pas dan kondisis saat ini. Merdeka belajar atas covid belum ada titik terang. Di saat yang sama kesulitan pembelajaran yang dialami murid dan guru semakin kencang teriakannya.

Adalah sosok menteri, yang dikenal sebagai menteri milenial, menjabat Mendikbudristek saat ini Nadiem Anwar Makarim yang sejak awal diragukan kapasitasnya oleh publik karena tidak memiliki *trad record* dalam dunia pendidikan Indonesia. Tapi sosoknya sangat dinanti dalam situasi sangat darurat ini.

Dalam tulisan kali ini, penulis mengetengahkan dua sosok mendikbud yang berbeda zaman. Satu zamannya telah berlalu, tapi namanya tak akan pernah berlalu. Dan yang satunya sedang menghadapi zamannya. Inilah Ki hadjar Dewantra dan Nadiem Makarim.

### **Merdeka Belajar di Era Ki Hadjar Dewantara**

Ki Hadjar Dewantara lahir dari keluarga kaya Indonesia. Selama masa kolonialisme Belanda , ia sangat dikenal karena keberaniannya menentang kebijakan pendidikan pemerintah Hindia Belanda pada masa itu , yaitu yang hanya membolehkan anak-anak kelahiran Belanda atau orang kaya yang dapat mengenyam bangku sekolah. Atas kritik yang tajam pada kebijakan pendidikan pemerintah Belanda tersebut, menyebabkan dia diasingkan ke Negeri Belanda.

Sepulangnya dari pengasingan dia diangkat menjadi Menteri Pendidikan di era Presiden Soekarno. Filosofinya di dunia pendidikan Indonesia yang masih segar dan tetap melegenda sampai detik ini adalah "*ing ngarso sung tulodo, ing madyo mbangun karso, tut wuri handayani*" (di depan menjadi suri tauladan, di tengah membangkitkan semangat, dibelakang memberi dorongan). Dengan semboyan pendidikan ini, memberikan dampak positif kemajuan pendidikan di Indonesia.

### **Merdeka Belajar di Era Nadiem Anwar Makarim**

Sedangkan di bawah komando Mendikbud saat ini bapak yang mulia, bapak Menteri, Nadiem Anwar Makarim, salah satu menteri oleh bapak Presiden RI disebut Menteri millenial. Yang saat ini tengah berjuang menghadapi ganasnya

pandemi covid 19. Dan di saat sama seluruh insan pendidikan tanah air masih menanti, menaruh harapan dan lompatan besar, ketuk palu sang menteri demi kemajuan pendidikan bumi pertiwi Indonesia .

Di saat yang sama sang menteri menghadapi masalah tak kalah besar dengan covid-19, yaitu menghadapi birokrat tulen dalam tubuhnya sendiri, dalam kementeriannya sendiri. Contoh kongkrit histori rekrutmen guru honorer PPPK (Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja ) yang semula diperuntukkan untuk guru honorer diatas 35 tahun, tapi dalam perjalanannya berubah menjadi rekrutmen yang tidak lagi memberi *lex specialis* ke guru dengan kategori syarat khusus. Hal ini dapat memantik kritik dan kemarahan dari kalangan guru honorer yang telah mengabdikan puluhan tahun (Perdana Kusuma, 2021).

Berbagai lembaga riset telah mengungkapkan hasil penelitiannya mengenai polemik kelas daring. Bagaimana mungkin ada kelas daring di pelosok-pelosok desa yang tak terjangkau jaringan internet dan minimnya infrastruktur listrik. Seperti laporan Lembaga Penjaminan Mutu (LPMP) Papua mendata ada 14 daerah sama sekali tidak melaksanakan pembelajaran jarak-jauh (daring) selama pandemic covid 19 ini.

Di Dodo (ibukota kepulauan Aru), sinyal internet lemah, apalagi di kampung-kampung, sinyal pun untuk menelpon susah. Kepulauan Aru terdiri dari 547 pulau. diwilayah ini ada 117 desa yang tersebar di 10 kecamatan dengan jumlah penduduk sekitar 113.000 jiwa dan sebagian besar warganya hidup dibawah garis kemiskinan. Diperparah lagi sejak masa pandemic ini.

Kelas konvensional (tatap muka) berbeda dengan kelas *on line*. Kelas konvensional disediakan oleh sekolah setiap tingkat satuan pendidikan masing-masing. Berbeda dengan kelas *on line* yang disediakan sendiri peserta didik. Walaupun ada akses internet tapi peserta didik tidak dapat menyiapkan *quota internet* tetap saja tidak dapat mengikuti proses pembelajaran. Inilah polemik kelas *on line*, sehingga pendidikan tidak dapat diakses oleh peserta didik secara merata.

Infrastruktur *Information Technology* (IT) khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan pada semua satuan pendidikan sejatinya telah kita miliki, sebagai properti dan *optional* cadangan di masa-masa sulit seperti sekarang. Sebab pendidikan adalah wadah membuka selebar-lebarnya pintu harapan masa depan anak tanpa kecuali. Seperti apa proses pendidikan pada wilayah 3 T, Terjauh, Terluar Tertinggal. Saya teringat sebuah pepatah Arab mengatakan: "*man arafa bu'da 'safari ista'adda*" artinya barang siapa mengetahui jauhnya perjalanan, maka bersiaplah.

## Kesimpulan

Zaman boleh berbeda, tapi melukis tintas emas prestasi sama. Jika bapak Ki Hadjar Dewantara berhadapan penguasa kolonial Belanda atas penindasannya kepada rakyat yang tidak membagi pendidikan secara merata, maka sekarang bapak Mendikbud RI, Nadiem Anwar Makarim berhadapan dengan keganasan Pandemi *Covid-19* yang menerjang sendi primer kehidupan yakni pendidikan, yang mengakibatkan anak-anak harapan bangsa, generasi estapet sedang menangis sejadi-jadinya di sudut-sudut pelosok desa terpencil gelap dan tak terkoneksi internet. Menarik ditunggu tintas emas apa yang akan tertulis dalam sejarah pendidikan Indonesia. Akankah ada adaftasi baru dan peluang pembelajaran buat mereka? Wallahu'Alam Bissawab.

## Daftara Pustaka

- Budi Widianarko, 2021. *Merdeka belajar Kampus Merdeka dan Roh "Universitas"*, Jakarta: Kompas, Opini Edisi Juni.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Jakarta: Gramdia Pustaka Utama
- John M, Echols & Hassan Shadily, 2007. *En English – Indonesia Dictionary*, Jakarta: Gramedia
- Iskandar, A Malik (2020) *Dua mendikbud Berbeda zaman*, Makassar: Opini Tribun Timur.
- Ifit Nofita sari, Jeni Susyanti, dkk, 2021. *Dosen Merdeka: Peran, tantangan, Strategi, Transformasi, dan Inovasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka*. Malang : Unisma Press.
- Perdana Kusuma, Sumardiansyah, (2021). *Kotak Pandora Seleksi Guru PPPK*, Jakarta: Opini Kompas edisi Oktober.

## Biografi



**Abdul Malik Iskandar**, lahir tanggal 14 Oktober 1969 di Kampiri, Citta, Soppeng. Lahir dari pasangan, Ayah tercinta, (Alm.) Iskandar dan Ibunda tercinta, St. Saenab. Anak ke 4 dari 9 bersaudara. Email: [abdulmalikiskandar00@gmail.com](mailto:abdulmalikiskandar00@gmail.com), WA 081144404999, 081354794987. **Hobi:** Membaca, Menulis dan Menyanyi (3M). **Keluarga:** Istri tercinta, Andi Ida Ivianty Saleh, S.Pdi, buah hati tercinta, Moh. Fiqran Al Fiqih Malik & Moh. Fadza Fauzan Malik. **Pendidikan :** Sekolah Dasar Negeri No. 6 Keppe (1983), Madsrah Tsanawiah Keppe (1986), PGAN Negeri Palopo (1989), Sarjana Tadris

Pendidikan Bahasa Inggris UIN Alauddin Makassar (1996), Gelar Magister Ilmu Komunikasi UNHAS (2009), memperoleh gelar Doktor Program Doktor Sosiologi UNM ( 2015), lulus Sandwich like (short course) dikti (2012 ) di *Northern Illinois University (NIU) -DeKalb City- USA*.

# **MERDEKA BELAJAR BERBASIS PANCASILA DI ERA SOCIETY 5.0**

**Nanis Hairunisyah**  
**Universitas Bhinneka PGRI**

Konsep Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) merupakan konsep yang dipersiapkan untuk menghadapi perubahan social, budaya, perubahan teknologi dan perubahan pilihan pada dunia kerja. Kebijakan baru dari pemerintah ini memberikan tantangan sekaligus kesempatan kepada dosen dan mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas, kapasitas, kepribadian dan mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan dan ketrampilan melalui kenyataan yang dinamis di masyarakat.

Kemerdekaan Belajar dan mengajar yang di diterapkan sejak tahun 2020 oleh Mendikbud ini diharapkan dapat mendorong perguruan tinggi untuk berkreasi agar dapat mengantisipasi dinamika perubahan yang sangat pesat di semua sector kehidupan. Melalui kebijakan ini diharapkan perguruan tinggi berperan sebagai agen perubahan dalam interaksi antara perguruan tinggi, dunia kerja dan masyarakat yang kehadirannya diharapkan sebagai sumber inspirasi untuk pembangunan masyarakat yang berperan dalam pelestarian budaya dan eksistensi Bangsa Indonesia

Bertolak dari pemikiran diatas, maka sangat penting bagi perguruan tinggi untuk menata kembali hati dan pikiran para civitas akademika untuk mengingat filosofi dari semua aspek kehidupan Bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Sebagai agen perubahan dan sumber inspirasi kemajuan bangsa, menjadi suatu keharusan bahwa semua kebijakan dalam berkreasi dan berinovasi untuk menyiapkan penerus bangsa harus dilandasi oleh nilai-nilai dari kelima sila dari Pancasila.

## **Budaya dan Pancasila**

Pancasila sebagai landasan berperilaku, landasan berbudaya bagi Bangsa Indonesia harus hadir dalam setiap perubahan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kehadiran Pancasila tidak sekedar menjadi simbol mati, tetapi harus dapat dirasakan, dinikmati dan digunakan untuk kemaslahatan Bangsa Indonesia. Perubahan pembelajaran yang menjadi konsekuensi dari kebijakan

MKBM juga berdampak pada perubahan kebiasaan belajar dan mengajar di perguruan tinggi. Akan sangat bijak jika sebelum terlaksannya program merdeka belajar, diadakan penyamaan persepsi antara dosen dan mahasiswa akan penerapan nilai-nilai dari Pancasila.

Adanya kultur dan kebiasaan yang berbeda dari mahasiswa menjadi tantangan dan peluang tersendiri bagi seorang pendidik dalam program MKBM. Budaya yang berbeda dari setiap mahasiswa mulai dari kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, asal daerah dan suku, kebiasaan sehari-hari dalam pergaulan, gaya hidup sehari-hari harus menjadi perhatian dosen dalam menerapkan metode pembelajaran dan menetapkan hasil pembelajaran. Bagaimana seorang pendidik mengejawantahkan nilai-nilai dari kelima sila Pancasila dalam kelas MKBM, disitulah akan tampak bagaimana Pancasila hadir dalam menyiapkan lulusan perguruan tinggi menjadi generasi yang unggul, tanggap menghadapi tantangan tanpa tercerabut dari akar budaya Bangsa Indonesia.

### **Society 5.0**

Perguruan tinggi sebagai sumber inspirasi dan agen perubahan berada di posisi strategis dalam menghadapi akibat revolusi industri 4.0. Seiring dengan kebijakan MKBM, peran dosen dalam pembelajaran lebih ditekankan pada mediator, katalisator dan pengambil kebijakan dalam memutuskan sumber belajar dan media belajar mana yang bisa digunakan oleh mahasiswa serta bagaimana model pembelajaran yang bisa dilakukan mahasiswa.

Pada era society 5.0 ini, kompetensi dosen tidak hanya sekedar memanfaatkan *internet of thing*, tetapi lebih berperan kepada bagaimana *big data* yang diperoleh dari internet tersebut bisa digunakan dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan kondisi riil dalam kelas. Hal ini bermakna bahwa peran seorang dosen pada era society 5.0 mengisi kesenjangan dan mengatasi perbedaan budaya yang ada di kelas dengan memilih, memilah sumber belajar yang dibutuhkan mahasiswa. Peran dosen di era society 5.0 ini semakin strategis dalam menciptakan generasi yang unggul, karena dosen harus mampu menyelaraskan antara tuntutan kemampuan literasi mahasiswa dengan perilaku/karakter mahasiswa yang mencerminkan profil mahasiswa Pancasila.

### **Keberhasilan Mahasiswa**

Puncak dari segala upaya pendidik, civitas akademika dan pengambil kebijakan adalah prestasi atau keberhasilan mahasiswa setelah menyelesaikan pendidikannya. Bahkan pada mata kuliah kewirausahaan, keberhasilan mahasiswa ini sudah bisa dilihat pada saat proses magang kewirausahaan. Mahasiswa yang berwirausaha mempunyai karakter kreatif, inovatif, pantang

menyerah, berani memulai dan mengambil resiko, selalu mempunyai inisiatif dalam setiap kondisi, cenderung menjadi pemimpin dan suka bekerjasama. Adanya kebijakan MKBM ini sangat mendukung suksesnya mahasiswa berwirausaha karena dengan MKBM ini mahasiswa bisa merasakan pengalaman yang berbeda manakala dia berada di perguruan tinggi lain. Memperluas pengalaman dengan budaya yang berbeda ini juga akan mejadi factor pendorong mahasiswa dalam menata diri, memperkuat karakter diri demi keberhasilan usahanya di masa depan. Sebagai seorang pendidik kita harus hadir memperkuat karakter mahasiswa tersebut dengan nilai-nilai Pancasila.

### Daftar Pustaka

- Dirjen Pendidikan Tinggi dan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka*. Cetakan ke 1. <https://doi.org/10.31219/osf.io/ujmte>
- Fukuyama. Mayumi. (2018). Society 5.0: Aiming for a New Human-centered Society. *Japan SPOTLIGHT*, August, 8–13.
- Howe, L. (2019). Business and economics. *Mark Twain in Context*, May, 161–170. <https://doi.org/10.1017/9781108617208.018>
- Sarif, M. S. (2017). Society 5.0 Qalb With Tawhidic Paradigm. *Journal of Education and Social Sciences*, 8(1), 208–217.
- Muhammad Rakhmat, H. (2015). *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan-academiaedu*. CV. Warta Bagja, Bandung

### Profil Penulis



Nanis Hairunisya, lahir di Probolinggo, Doktor Pendidikan Ekonomi ini menekuni bidang Pendidikan ekonomi dan sub bidangnya yaitu pembelajaran ekonomi, kewirausahaan, pemberdayaan bidang ekonomi, budaya masyarakat dan keberhasilan usaha, budaya/perilaku mahasiswa kewirausahaan. Dosen Pendidikan ekonomi dan magister Pendidikan IPS Universitas Bhinneka PGRI. Dia juga berkiprah sebagai narasumber motivasi kewirausahaan di Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan beberapa instansi pemerintah.

Reviewer di Jurnal terakreditasi Sinta dan jurnal internasional. Aktif menulis beberapa artikel di jurnal internasional maupun nasional, serta menulis beberapa buku. Aktif di berbagai asosiasi profesi dosen dan komunitas peneliti. Koresponden yang bisa dihubungi adalah [anisa889@gmail.com](mailto:anisa889@gmail.com)

# PENDIDIKAN MERDEKA KI HADJAR DEWANTARA SEBAGAI JALAN MEMBUMIKAN PANCASILA

Sita Acetylena  
IAI Al Qolam Malang

Ki Hadjar Dewantara sebagai guru bangsa sekaligus Bapak Pendidikan Indonesia telah memberikan konsep pendidikan dan konsep guru profesional yang berkarakter dan berwawasan kebangsaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan pendidikan Indonesia sangat dipengaruhi oleh pikiran-pikiran dan konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantara. Salah satu semboyan Taman Siswa yang digunakan oleh Pendidikan Nasional kita adalah *Tut Wuri Handayani* yang sekaligus dijadikan lambang pendidikan nasional Indonesia.

Dalam Dewantara<sup>1</sup>, pendidikan nasional menurut paham Taman Siswa adalah pendidikan yang beralaskan garis hidup dari bangsanya dan ditujukan untuk perikehidupan yang dapat mengangkat derajat negara dan rakyatnya, agar dapat dapat bekerja bersama-sama dengan bangsa-bangsa lain demi kemuliaan segenap manusia di seluruh dunia. Hal ini sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang termaktub pada pembukaan UUD 1945 yang berdasarkan Pancasila. Oleh sebab itu, pendidikan Indonesia harus bernilai Pancasila agar menghasilkan manusia-manusia yang Pancasila.

Seperti yang termaktub pada alinea keempat Pembukaan UUD Negara RI 1945 ada tiga konsepsional tentang Pancasila, yaitu (1) sebagai dasar negara, (2) sebagai Ideologi Negara dan (3) sebagai Filosofis Negara. Sebagai falsafah hidup bangsa<sup>2</sup>, Pancasila adalah nafas dan ruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, tujuan Pendidikan Nasional di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 yaitu menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis serta bertanggung jawab. Jalan utama pembentuk sumber

---

<sup>1</sup> Ki Hadjar Dewantara, *Bagian Pendidikan*, Yogyakarta : Majelis Luhur Tamansiswa, 1967

<sup>2</sup> Ketetapan MPR No.II/MPR/1979, Pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia dan dasar negara kita.



daya manusia yang berkualitas, berkarakter, beriman dan berjiwa pancasilais hanya dapat diwujudkan melalui pendidikan<sup>3</sup>.

Pendidikan yang bisa membumikan Pancasila pada generasi penerus bangsa adalah pendidikan yang berbasis karakter Pancasila dan harus dikelola dengan baik agar tujuan pendidikan tersebut dapat tercapai. Karakter akan membentuk takdir manusia dan kesejahteraan suatu bangsa<sup>4</sup>, oleh sebab itu karakter sangat penting dan bernilai bagi manusia dan peradaban masyarakat suatu bangsa<sup>5</sup>. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap kebangkitan sebuah bangsa dan berpengaruh pada perubahan sosial suatu bangsa<sup>6</sup>. Dalam proses pendidikan, peserta didik akan dapat mengembangkan potensinya menjadi kekuatan untuk melakukan perubahan ke satu kondisi yang lebih baik.

Pancasila sesungguhnya bukan rumusan mati yang hanya bersifat konseptual belaka, melainkan menjadi pedoman hidup bagi seluruh bangsa Indonesia yang bersifat praktis dan ada di dalam setiap diri manusia Indonesia dan menjadi bagian dari pola kehidupan nyata yang dilakukan sehari-hari. Pancasila sesungguhnya bersifat "imperative normative" artinya: nilai-nilai dari Pancasila itu dilaksanakan karena kesadaran diri dan atas kehendak diri sendiri pula yang memaksa untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, bukan sesuatu yang dipaksakan dari luar dirinya. Oleh karena itu, tuntutan untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila tersebut menjadi sesuatu yang wajib dan harus dilaksanakan oleh setiap manusia Indonesia di tengah masyarakat yang majemuk<sup>7</sup> dalam banyak hal.

Kemajemukan inilah yang selanjutnya menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang berbhinneka tunggal ika<sup>8</sup>. Setiap generasi penerus bangsa Indonesia hendaknya memahami benar karakteristik bangsa Indonesia yang berbhineka tunggal ika sehingga mampu hidup di tengah masyarakat yang penuh keberagaman, bukan keseragaman. Program pengamalan nilai Pancasila harus konkrit dalam bentuk

---

<sup>3</sup> Tujuan nasional pendidikan yang tertuang dalam Undang-undang Sisdiknas no.20 Tahun 2003

<sup>4</sup> Heraklitus dalam Lickona, *Pendidikan Karakter*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2012: 4.

<sup>5</sup> Lance Morrow dalam Lickona., *Pendidikan Karakter*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2012: 4.

<sup>6</sup> Zainuddin Maliki, *Sosiologi Pendidikan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2008, hlm 273

<sup>7</sup> Pursika, I Nyoman, *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran* Jilid 42 no 1, April 2009, hlm 3-4

<sup>8</sup> Rizal Mustansyir, *Bhinneka Tunggal Ika dalam Perspektif Filsafat Analitik*, dalam *Jurnal Filsafat*, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1995, hlm 52

perilaku nyata sesuai dengan butir-butir yang ada dalam setiap nilai dalam sila Pancasila, sehingga mencerminkan suasana ilmiah dalam wawasan nasional.

Namun pada kenyataannya, nilai-nilai Pancasila belum masuk dalam hati dan diri setiap anak bangsa Indonesia. Indikasi perilaku yang jauh dari nilai-nilai Pancasila juga sangat banyak, baik di kalangan pejabat, pendidik, masyarakat umum maupun generasi milenial saat ini. Di kalangan pejabat masih banyak terjadi tindak pidana korupsi<sup>9</sup> yang merugikan negara dan masyarakat.

Ki Hadjar Dewantara memiliki konsep pendidikan merdeka yang menginginkan setiap murid akan menjadi manusia yang merdeka lahir dan batin, baik sebagai individu ataupun sebagai bangsa. Pendidikan merdeka Ki Hadjar Dewantara yang berdasar pada asas Pancadarma dilaksanakan dengan Sistem Pendidikan Taman Siswa yaitu Sistem *Among*. Pelaksanaan sistem tersebut sebagai perwujudan dari Pancadarma Taman Siswa. Pelaksanaan Pendidikan Taman Siswa dijelaskan oleh Fudyartanta<sup>10</sup> bahwa pada sistem tersebut, setiap pamong sebagai pemimpin dalam proses pendidikan melaksanakan Tut Wuri Handayani, Ing Madya Mangun Karsa, Ing Ngarsa Sung Tuladha. Pendidikan Taman Siswa tidak memakai cara paksaan. Guru harus bersifat *momong*, *among*, dan *ngemong*. Anak-anak rusak budi pekertinya disebabkan selalu hidup dibawah paksaan dan hukuman, yang biasanya tidak setimpal dengan kesalahannya. Kalau para pamong melakukan hal tersebut maka pamong/guru tidak akan bisa membentuk orang yang punya kepribadian.

Ki Hadjar dalam Tauchid<sup>11</sup> menjelaskan bahwa guru adalah abdi sang anak, abdi murid, bukan penguasa atas jiwa anak-anak. Tiap-tiap orang Taman Siswa adalah peserta perjuangan Taman Siswa yang sadar, yang ikhlas mengabdikan kepentingan sang anak, pengabdian kepentingan nusa, bangsa dan manusia, untuk bersama-sama menegakkan perikemanusiaan.

Ajaran dan filosofi pamong Taman Siswa ini selaras dengan pernyataan pakar pendidikan dewasa ini yakni Johnson dari Amerika. Johnson<sup>12</sup> menyatakan

---

<sup>9</sup> Ramelan, *Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Legislasi vol 8 no.2 ISSN : 0216-1338, Juni 2011

<sup>10</sup> Fudyartanta. *Membangun Kepribadian dan Watak Bangsa Indonesia yang Harmonis dan Integral*. Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2010

<sup>11</sup> Mohammad Tauchid, *Perjuangan dan Ajaran Hidup Ki Hadjar Dewantara*. Yogyakarta: Majelis Luhur Perguruan Taman Siswa, 1963

<sup>12</sup> LouAnne Johnson, *Pengajaran yang Kreatif dan Menarik : Cara Membangkitkan Minat Siswa Melalui Pemikiran*. Jakarta : PT. Indeks, 2008

bahwa mengajar adalah profesi yang paling indah di dunia. Mengajar memberikan tantangan dan kesempatan yang tiada habisnya untuk berkembang. Jika anda adalah guru yang baik, Anda akan memberikan inspirasi, motivasi, dan tantangan kepada siswa...". Inilah yang ada dalam filosofi sistem among, *tut wuri handayani, ing madya mangun karsa, dan ing ngarsa sung tuladha*. Filosofi guru sebagai pamong dalam pernyataan Alexander Meikelijhon dalam Rochman<sup>13</sup>, mengatakan bahwa tidak seorang pun dapat menjadi guru yang sejati (mulia) kecuali jika ia menjadikan dirinya bagian dari anak didik yang berusaha untuk memahami semua sifat anak didik dan kata-katanya.

Selain itu, Taman Siswa memiliki asas mendidik dengan metode asah, asih, dan asuh.<sup>14</sup> Asah adalah menajamkan, artinya upaya untuk meningkatkan kualitas untuk memajukan. Asih adalah kasih sayang mencintai sesamanya. Artinya dalam hubungan pertemanan dan interaksi siswa dengan pendidik dan sesama siswa dilandasi rasa cinta kasih sayang. Asuh adalah memelihara dan melindungi. Artinya dalam interaksi siswa itu agar berkembang saling memelihara, saling mengasuh, saling mendidik, saling melindungi, agar semuanya dapat maju, dapat berkembang. Ki Hadjar menjelaskan bahwa guru adalah abdi sang anak, abdi murid, bukan penguasa atas jiwa anak-anak.<sup>15</sup> Inilah konsep pendidikan merdeka Ki Hadjar Dewantara dan sangat tepat untuk dilaksanakan demi membumikan nilai-nilai Pancasila di hati dan diri setiap anak bangsa Indonesia.

### Daftar Pustaka

- Dewantara, Ki Hadjar.1967. *Bagian Pendidikan*, Yogyakarta : Majelis Luhur Tamansiswa
- Fudyartanta. 2010. *Membangun Kepribadian dan Watak Bangsa Indonesia yang Harmonis dan Integral*. Jogjakarta : Pustaka Pelajar
- Johnson, LouAnne. 2008. *Pengajaran yang Kreatif dan Menarik : Cara Membangkitkan Minat Siswa Melalui Pemikiran*. Jakarta : PT. Indeks
- Lickona. 2012 *Pendidikan Karakter*, Yogyakarta: Kreasi Wacana

---

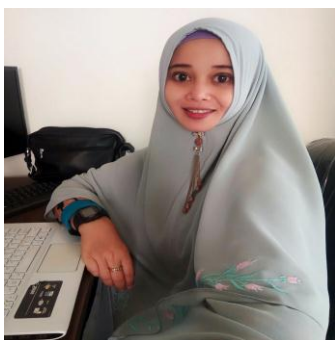
<sup>13</sup> Rochman, dkk. *Pengembangan Kompetensi Kepribadian Guru : Menjadi Guru yang Dicintai dan Diteladani oleh Siswa*. Bandung : Penerbit Nuansa Cendekia,2011

<sup>14</sup> Ki Hadjar Dewantara,1967, hlm 229

<sup>15</sup> Mohammad Tauchid, *Perjuangan dan Ajaran Hidup Ki Hadjar Dewantara*.Yogyakarta: Majelis Luhur Perguruan Taman Siswa, 1963, hlm 24-26

- Mustansyir, Rizal. 1995. *Bhinneka Tunggal Ika dalam Perspektif Filsafat Analitik*, dalam *Jurnal Filsafat*, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Maliki, Zainuddin. 2008. *Sosiologi Pendidikan*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Pursika, I Nyoman. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran* Jilid 42 no 1, April 2009
- Ramelan, *Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Indonesia*, *Jurnal Legislasi* vol 8 no.2 ISSN : 0216-1338, Juni 2011
- Rochman, dkk. 2011. *Pengembangan Kompetensi Kepribadian Guru : Menjadi Guru yang Dicintai dan Diteladani oleh Siswa*. Bandung : Penerbit Nuansa Cendekia
- Tauchid, Mohammad. 1963. *Perjuangan dan Ajaran Hidup Ki Hadjar Dewantara*. Yogyakarta: Majelis Luhur Perguruan Taman Siswa
- Ketetapan MPR No.II/MPR/1979
- Undang-undang Sisdiknas no.20 Tahun 2003

## Profil Penulis



Sita Acetylena adalah dosen tetap Pascasarjana IAI Al Qolam Malang, trainer pendidikan karakter, penulis buku pendidikan karakter, dan konsultan pendidikan. Saat ini, doktor ilmu sosial ilmu politik ini juga mengelola pendidikan Islam di Yayasan Kartikanawa Indonesia dari PAUD sampai Sekolah Dasar. Selain itu, juga menjadi direktur di LPK Kiraku (Kursus Bahasa Asing) yang fokusnya pada bahasa jepang untuk program kuliah dan magang ke Jepang. Sita dapat dihubungi di email : [sita@alqolam.ac.id](mailto:sita@alqolam.ac.id) , IG : [@sitaacetylena1](https://www.instagram.com/sitaacetylena1) , channel youtube : [youtube.com/c/sitaacetylena](https://www.youtube.com/c/sitaacetylena)

# **Pentingnya Penanaman Karakter Usia Sekolah Dasar Untuk Mensukseskan Merdeka Belajar**

(Puji Asmaul Chusna, STIT Al-Muslihuun Tlogo Kanigoro Blitar)

Pendidikan merupakan factor penting yang melekat pada kehidupan manusia. Sejak lahir hingga akhir hayat, melalui pendidikanlah manusia akan berproses untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 13 ayat 1 menjelaskan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Sekolah-sekolah pada saat ini menghadapi tantangan di dalam mendidik generasi muda yang merupakan penerus bangsa, dalam hal membentuk dan mengembangkan karakter. Seiring dengan system pendidikan tersebut, maka harus disesuaikan dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Seperti yang sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 bahwa mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Terlihat jelas bahwa pendidikan saat ini bukanlah hanya pada penekanan kemampuan intelektual yang mampu mengerjakan semua soal dalam ujian, akan tetapi juga harus memberikan perhatian khusus pada pentingnya penanaman karakter sejak usia dini. Saat ini penanaman karakter menjadi kebutuhan yang sangat utama dalam suatu system pendidikan, untuk membangun peserta didik yang cerdas dan berakhlak mulia.

Untuk pendidikan karakter yang umum memang kaitannya dengan perkembangan pergaulan anak-anak. Jika tidak sejak dini ditanamkan kebiasaan yang baik akan mempengaruhi banyak faktor. Pendidikan karakter jika tidak sejak dini ditanamkan juga akan berpengaruh pada lingkungan dan budaya. Penanaman karakter ini hendaknya dilaksanakan dalam semua jalur pendidikan. Guna mencapai kemaksimalannya dalam proses tersebut.

Karakter yang berkualitas perlu dibentuk dan dibina sejak usia dini. Usia dini, khususnya usia sekolah Dasar merupakan masa kritis bagi pembentukan karakter seseorang, penanaman moral melalui pendidikan karakter sedini mungkin kepada anak-anak adalah kunci utama membangun bangsa.

Karakter di sini adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap dan bertindak. Kebajikan tersebut berupa sejumlah nilai moral, dan norma, seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya, hormat pada orang lain, disiplin, mandiri, kerja keras, dan kreatif.

Pendidikan karakter di nilai sangat penting untuk ditanamkan pada anak-anak usia sekolah dasar karena pendidikan karakter adalah proses pendidikan yang ditujukan untuk mengembangkan nilai, sikap, dan perilaku yang memancarkan akhlak mulia atau budi pekerti luhur.

Dari sini, sudah sepatutnya pendidikan karakter dimulai dari dalam keluarga, yang merupakan lingkungan pertama bagi pertumbuhan karakter anak. Setelah keluarga, di dunia pendidikan karakter ini sudah harus menjadi ajaran wajib sejak sekolah dasar. Anak sekolah dasar masih dalam tahap perkembangan operasional konkret. Tahap dimana mulai berkembangnya kecerdasan mereka untuk berpikir logis dan sistematis. Sehingga pendidikan karakter pada anak usia sekolah dasar menjadi kunci dalam perubahan generasi muda yang lebih baik.

Pendidikan karakter sangat penting bagi dunia pendidikan karena perlu diketahui di era modern sekarang banyak anak-anak yang masih berada di bangku sekolah dasar memiliki karakter yang cukup buruk karena pengaruh teknologi yang sangat pesat dan semakin maju menjadikan perkembangan karakter anak semakin buruk.

Salah satu tempat untuk menanamkan karakter pada anak adalah sekolah. Sekolah merupakan tempat yang strategis untuk menanamkan karakter nilai-nilai budi pekerti. Karena semua anak akan mengenyam dunia pendidikan di Sekolah, sehingga yang didapatnya akan mempengaruhi pembentukan karakternya. Pengajaran karakter di sekolah diajarkan oleh seorang guru, oleh karena itu sebagai seorang guru harus berperan baik dan benar, agar nantinya anak-anak usia sekolah dasar bisa memiliki jiwa dan kepribadian yang unggul dalam bersikap, guru tidak boleh bersikap jelek karena peserta didiknya akan menirukan apa yang dilakukan gurunya tersebut. Selain itu guru juga perlu mengajarkan nilai-nilai agama. Jika anak-anak memiliki karakter yang baik, maka

besar kemungkinan Indonesia akan memiliki generasi muda yang unggul dan bermartabat nantinya.

Menurut Kemendiknas (2011) pendidikan karakter adalah usaha menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Harapannya, peserta didik mampu bersikap dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang sudah menjadi kebiasaannya.

Seperti kita ketahui saat ini seluruh dunia sedang menghadapi masalah yang besar yaitu meluasnya virus corona (COVID-19). Wabah (COVID-19), mengakibatkan terhambatnya banyak sektor kehidupan, yaitu sektor ekonomi, sektor sosial, sektor agama, bahkan pun sektor pendidikan. Semenjak pandemi COVID-19 meluas, pendidikan di Indonesia sistem pembelajarannya berubah. Perubahan sistem pendidikan yang dilakukan Pemerintah dengan melakukan kebijakan penerapan merdeka belajar.

Implementasi secara sederhana adalah pelaksanaan/ penerapan. Implementasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses penerapan, ide konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberi dampak, baik berupa pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Merdeka belajar merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar. belajar terjadi dalam beragam waktu dan tempat, adanya *free choice, personalized learning*, berbasis proyek, pengalaman lapangan serta interpretasi data. Seperti kita ketahui proses pembelajaran terkadang membosankan jika hanya di dalam ruangan (kelas) saja. Maka dari itu dengan konsep Merdeka Belajar ini diharapkan peserta didik tidak merasakan jenuh dalam proses pembelajaran yang di ikuti.

Konsep Merdeka Belajar ini peserta didik agar dapat menyesuaikan diri dalam memahami materi, memecahkan jawaban sesuai dengan kemampuannya, ibarat bermain game serta mampu memecahkan tantangan akan cepat naik level, jadi bukan lagi cara pukul rata kemampuan siswa. Merdeka Belajar ini juga dapat mengajak siswa/i agar menerapkan keterampilan yang sudah dipelajari dalam berbagai situasi.

Merdeka Belajar diharapkan mampu menghasilkan pengetahuan yang melampaui (tanpa batas) mengenai informasi. Peran guru pada konsep ini sebagai mentoring serta diharapkan memiliki kemampuan memecahkan masalah. Sedangkan pada penilaian bukan lagi menitik beratkan pada nilai, tapi proses berjuang.

Saat ini sekolah secara umum masih dikelola secara tradisional, belum memiliki kemampuan respon yang cepat dan akurat terhadap berbagai permasalahan kekinian yang menghadang sekolah. Pimpinan sekolah perlu didukung oleh system informasi manajemen yang komprehensif dalam mengendalikan sekolah secara optimal.

IT telah masuk ke sekolah namun dalam kondisi yang sangat variatif, dan belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat proses manajemen dan untuk memfasilitasi layanan pendidikan yang diharapkan. Dengan demikian, Dinas pendidikan diharapkan memperkuat memonitoring terkait terselenggaranya kurikulum melalui Proses Merdeka Belajar (PMB) yang dilakukan dengan dukungan aplikasi digital secara realtime menggunakan multimedia yang terkoneksi dengan baik.

Konsep Merdeka Belajar saat ini secara tidak langsung perlahan sedang dalam fase permulaan untuk pendidikan di Indonesia. Dimana hal ini terjadi karena pandemi COVID-19 sehingga mengharuskan pendidikan di Indonesia dengan belajar dalam jaringan (DARING). Proses pembelajaran digital dengan memanfaatkan smart phone yang merupakan hasil integrasi sistematis atas komponen-komponen pembelajaran dengan memperhatikan mutu, sumber belajar, dan berciri khas adanya interaksi pembelajaran lintas waktu dan ruang.

Pada jenjang Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah tentu dengan diterapkannya pembelajaran dari rumah sebenarnya masih kurang efektif, mengingat anak-anak SD/MI masih sangat membutuhkan bimbingan dan arahan yang banyak dari guru dan orang tua. Dan juga anak SD/MI daya tangkapnya masih berbeda dengan jenjang yang lain, sehingga kalau untuk SD/MI lebih efektif dengan sistem pembelajaran langsung karena siswa akan memahami, mengerti dengan penuh dan tertarik dengan apa yang dilihatnya dari penjelasan gurunya. Sehingga siswa dapat menerapkan apa yang menjadi patokannya.

Konsep Merdeka Belajar ini menuntut guru untuk kreatif dalam menyampaikan pembelajaran dengan konsep belajar dalam jaringan (DARING). Saat ini, guru melakukan pembelajaran didukung dengan beberapa video yang berkaitan dengan tema ataupun materi pembelajaran yang akan atau sedang diajarkannya melalui smart phone.

Sudah kita ketahui bagaimana bahaya smart phone jika tidak dibatasi dan diawasi, banyak orang tua yang mengeluhkan dalam proses implementasi merdeka belajar bagi anak usia sekolah dasar. Akan tetapi, Selalu ada kelebihan dan kekurangan dalam setiap pelaksanaan kebijakan dalam proses pembelajaran tersebut. Dengan perkembangan IT setiap elemen masyarakat



terutama orang tua dan peserta didik harus mampu menyaring segala informasi dan pemantauan anak disetiap kegiatannya. Dengan karakter yang sudah tertanam sejak dini, maka penerus bangsa akan mampu menyaring, bertahan dan bersaing dengan akhlak yang mulia.

Itulah mengapa Pendidikan karakter sangat penting diterapkan di sekolah dasar karena untuk mengembalikan karakter anak bangsa Indonesia yang sudah mulai luntur. Dengan dilaksanakannya pendidikan karakter di sekolah dasar, diharapkan dapat menjadi solusi atas masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat.

# **DIGITALISASI PENDIDIKAN**

## **(TANTANGAN DAN PELUANG MEWUJUDKAN PELAJAR PANCASILA)**

**Minto Santoso**  
**Universitas Islam Balitar Blitar**

### **Digitalisasi Pendidikan**

Sejauh ini digitalisasi pendidikan banyak dimaknai sebatas perubahan cara pembelajaran yakni penggunaan media-media pembelajaran digital maupun pembelajaran di dalam jaringan dengan menggunakan aplikasi teleconference. Lebih jauh dari itu digitalisasi pendidikan harusnya dipahami secara universal dan menyentuh segala aspek dunia pendidikan, diantaranya data base pendidik dan tenaga kependidikan yang terintegrasi, data peserta didik yang valid dan integratif, potret profil lembaga pendidikan yang valid, sistem pelaporan dan pengelolaan pembiayaan yang mudah diakses maupun sistem pelaporan hasil belajar peserta didik yang informatif mengukur ketercapaian kompetensi. Keberhasilan percepatan transformasi pendidikan tersebut setidaknya harus didukung lima faktor yaitu; SDM, infrastruktur, regulasi, anggaran dan kesiapan objek.

### **Pelajar Pancasila**

Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama: (1) Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia: Ada lima elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia: (a) akhlak beragama; (b) akhlak pribadi; (c) akhlak kepada manusia; (d) akhlak kepada alam; dan (e) akhlak bernegara; (2) Berkebinekaan global: Elemen dan kunci kebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan; (3) Bergotong royong: Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi; (4) Mandiri: Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri; (5) Bernalar kritis: Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksikan pemikiran dan proses berpikir, dan

mengambil Keputusan; (6) Kreatif: Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal.

### **Tantangan Digitalisasi Pendidikan Mewujudkan pelajar Pancasila**

#### **1. Sumber daya manusia**

Tantangan sumber daya manusia sangat tampak di tingkatan paling bawah yakni di satuan pendidikan. Mereka adalah guru dan operator. Masih banyak guru yang memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang rendah. Kebanyakan dari mereka adalah guru honorer terutama honorer swasta yang memiliki penghasilan yang cukup rendah sehingga mereka harus mencari sumber penghasilan yang lain. Keadaan ini menyebabkan mereka tidak cukup waktu untuk menambah kompetensi dengan membaca, mengikuti pelatihan ataupun yang lainnya. Selain guru honorer guru-guru yang tidak produktif karena usia menjadi penghambat percepatan digitalisasi pendidikan. Keengganan mereka untuk belajar dengan dalih akan pensiun atau tidak mau repot menyebabkan mereka sangat gagap dengan adanya perubahan digital yang akan diterapkan di dalam dunia pendidikan. Di samping para guru, operator-operator sekolah atau Madrasah banyak yang tidak cakap karena memang keterampilan yang dimilikinya bukan dalam bidang IT atau digital, sehingga dalam mengelola data baik itu data peserta didik, data guru ataupun data sekolah sering mengalami keterlambatan. Hal ini menjadikan proses validasi data yang diberikan menjadi terganggu.

Jika para guru enggan atau tidak cukup waktu untuk meningkatkan kompetensinya guna mendukung digitalisasi pendidikan, tentunya upaya pembaruan bahan ajar, kreativitas model pembelajaran, penemuan media pembelajaran, pengembangan kurikulum serta inovasi-inovasi di dalam pembelajaran sulit terwujud. Hal ini akan sangat mengganggu upaya mewujudkan pelajar pancasila.

Di samping itu kecakapan operator akan sangat mendukung tersedianya data yang valid mengenai profil lembaga pendidikan, data pendidik, tenaga kependidikan maupun data peserta didik beserta riwayat-riwayatnya. Ketersediaan data yang valid akan mendukung pemetaan kemampuan awal dan kemampuan dasar yang bisa digunakan sebagai acuan untuk mencapai target profil pelajar Pancasila. Di samping itu data yang valid akan meringankan tenaga pendidik sehingga mereka tidak disibukkan dengan hal-hal yang bersifat administratif sehingga mereka bisa fokus dalam melakukan pendampingan pendidikan dan pengajaran kepada peserta didik.

#### **2. Ifrastruktur:**

Selama ini infrastruktur menjadi problema paling pelik yang ada di dalam dunia pendidikan. Ketersediaan ruang belajar, sarana pendukung berupa

meja, kursi, papan tulis, dan media-media pembelajaran yang lain masih belum bisa terpenuhi secara maksima. Apalagi digitalisasi pendidikan membutuhkan dukungan infrastruktur yang sangat besar, pengadaan ruang komputer, perangkat digital (komputer, server, android dll), instalasi listrik, internet pusat data, LMS, dan jaringan tentu ini perlu menjadi perhatian yang sangat besar khususnya kepada pemerintah untuk mengupayakan pemerataan pendidikan yang ada di Indonesia. Apalagi ditambah dengan semangat masyarakat untuk berkontribusi dalam dunia pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah baru akan tetapi tidak didukung dengan infrastruktur pendidikan yang memadai sehingga ini juga menjadi problematika tersendiri yang harus dipecahkan di dalam dunia pendidikan.

3. Regulasi atau kebijakan: Selama ini yang terjadi kebijakan pemerintah berhenti pada standar nasional pendidikan saja. Ditambah transformasi informasi program pendidikan yang terbatas, diseminasi program pemerintah hanya bisa diikuti oleh pihak-pihak tertentu seperti pengawas, kepala sekolah maupun guru berprestasi. Karena informasi dan program tidak terdistribusikan sampai tingkatan paling bawah sehingga tidak bisa menyentuh pada seluruh lapisan pendidikan yang ada khususnya untuk daerah 3T ataupun lembaga yang dikelola oleh swasta maka diperlukan kebijakan yang pelaksanaannya harus terpantau dengan baik. Memang swasta memiliki kebijakan tersendiri dalam pengelola lembaga akan tetapi perlu adanya kontrol yang dilakukan oleh pemerintah agar pelaksanaan pendidikan yang ada di sekolah swasta bisa selaras dengan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah.
4. Tantangan dalam bidang anggaran tidak hanya mengenai anggaran yang diperbolehkan untuk digunakan memenuhi infrastruktur maupun operasional saja tetapi juga pengelolaan dan pengawasan penggunaannya. Ketatnya penggunaan dan pelaporan anggaran berimbas kepada program-program yang dapat mendukung terwujudnya profil belajar Pancasila terganggu misalnya kreatifitas siswa yang tidak terwadahi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu batasan yang diberlakukan untuk pengadaan infrastruktur baik itu bangunan ataupun sarana dan prasarana yang lain juga menghambat terpenuhinya fasilitas belajar di sekolah. Memang hal ini dimaksudkan supaya tidak terjadi penyelewengan penggunaan anggaran akan tetapi akan lebih baik jika dilakukan pengetatan pengawasan penggunaannya dengan adanya supervisi yang tidak hanya dilakukan secara administratif tetapi pendampingan dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kepada lembaga-lembaga pendidikan secara langsung.
5. Tantangan kesiapan objek pendidikan yakni siswa atau peserta didik dan orang tua. Masih banyaknya masyarakat kita khususnya wali murid yang belum bisa menerima perubahan yang ada di dalam dunia pendidikan baik itu kurikulum maupun metode-metode pembelajaran yang dilaksanakan

oleh pihak sekolah. Hal ini bisa disebabkan karena keterbatasan pola pikir masyarakat kita ataupun juga faktor ekonomi, sehingga ketika dilaksanakan digitalisasi pendidikan khususnya untuk pembelajaran mereka merasa keberatan karena harus menyediakan perangkatnya yang ada di rumah berupa hand phone/ smartphone maupun pendukungnya berupa jaringan kuota internet.

Ditambah lagi dengan kesibukan wali murid untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari sehingga tidak bisa mendampingi putra-putrinya belajar sendiri dengan menggunakan perangkat elektronik yang tidak menutup kemungkinan lemahnya pengawasan justru menjadi bumerang yang merugikan kepada peserta didik karena terjadinya penyelewengan.

Selain itu tantangan berat lainnya adalah penggunaan perangkat belajar oleh anak-anak kita yang kurang bijak. Perangkat digital yang dimiliki (handphone atau smartphone) lebih banyak digunakan untuk bermain game atau melihat tayangan-tayangan yang justru bertolak belakang dengan tujuan profil pelajar pancasila. Disamping itu hilangnya rasa solidaritas dan kepekaan sosial karena lebih mengedepankan individualitasnya.

### **Peluang Digitalisasi Pendidikan Mewujudkan pelajar Pancasila.**

Digitalisasi pendidikan merupakan satu peluang besar mewujudkan profil belajar Pancasila karena dengan globalisasi informasi yang bisa diakses dengan sangat mudah melalui perangkat digital yang dimiliki dapat meningkatkan banyaknya sumber literasi dan referensi yang bisa digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, maupun temuan-temuan yang ada di dalam dunia pendidikan. Tidak hanya bisa dilakukan oleh guru tetapi juga oleh peserta didik. Digitalisasi sangat memungkinkan otomatisasi di dalam proses pembelajaran ataupun juga memudahkan dalam upaya validasi, sinkronisasi, maupun integrasi data yang dimiliki baik itu untuk profil sekolah, pendidik tenaga kependidikan, maupun biodata dan riwayat peserta didik.

Digitalisasi pendidikan juga memungkinkan dengan mudah adanya kolaborasi antar peserta didik, antar guru, maupun antar lembaga pendidikan dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan berbagi konsep kurikulum, media pembelajaran, model-model pembelajaran program-program sekolah, administrasi pembelajaran, evaluasi pembelajaran, evaluasi pendidikan maupun kerjasama dan kolaborasi lainnya.

Digitalisasi pendidikan juga mendekatkan antara dunia pendidikan dengan dunia masyarakat baik itu masyarakat sosial, dunia industri maupun dunia kerja. Karena dengan digitalisasi pendidikan lembaga pendidikan akan mudah

mengakses informasi-informasi yang ada di industri dunia kerja maupun informasi dunia mengenai perkembangan sosial masyarakat. Sebaliknya dunia industri, dunia kerja dan masyarakat dunia juga akan lebih mudah untuk mengetahui informasi yang dimiliki oleh satuan pendidikan sehingga mereka lebih bisa mengenal secara mendalam potensi yang dimiliki oleh setiap satuan pendidikan.

## Daftar Pustaka

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2020. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020-2024. Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. <https://eppid.kemdikbud.go.id/dokumen/permendikbud-22-2020-renstra.pdf>
- Gumelar, D. R., & Dinnur, S. S. (2020). Digitalisasi Pendidikan Hukum dan Prospeknya Pasca Pandemi Covid-19. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 1(2), 111-122.

## Profil Penulis



Minto Santoso, lahir di Blitar 35 tahun yang lalu. Selain menekuni bidang pendidikan juga terlibat dalam kegiatan sosial dan politik diantaranya sebagai penyelenggara dalam pemilu. Dosen FKIP UNISBA Blitar ini juga tengah berkiprah sebagai praktisi di bidang Pendidikan berbasis *leadership and organization* sejak 2011, praktisi di bidang Pendidikan berbasis *Multiple Intelligences* sejak tahun 2010, Assesor Sekolah Penggerak Kemendikbud 2020 dan menjadi DPL pada Program Kampus Mengajar batch 2 tahun 2021, menduduki jabatan struktural di kampus sejak 2015 mulai menjadi kaprodi, kepala bagian kemahasiswaan hingga kepala bagian kewirausahaan. Minto dapat dihubungi melalui *e-mail*: [indonesiasentosa86@gmail.com](mailto:indonesiasentosa86@gmail.com) || FB: Minto Santoso || IG: @mintosantoso

# Pancasila Sebagai Fundamental Pembangunan Karakter Bangsa

Harry Yulianto

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar

Urgensi Pancasila sebagai fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) semakin dibutuhkan dalam menghadapi dinamika perubahan yang semakin pesat. Implementasi Pancasila sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena didalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Pada hakikatnya implementasi Pancasila didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagai suatu manifestasi untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional bangsa Indonesia.

Fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa Pancasila telah diabaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kasus pembaiatan generasi muda kepada NII menjadi bukti suatu indikasi adanya sekelompok masyarakat telah melupakan nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila. Mereka berasumsi bahwa Pancasila telah gagal menjadi Dasar NKRI. Selain itu, kejadian tindak kekerasan yang bermotif agama dapat menyebabkan potensi kerusuhan dan konflik sosial, juga gerakan terorisme maupun separatisme menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi memahami atau justru telah melupakan Pancasila.

Di era disrupsi teknologi, tantangan dan ancaman terhadap Pancasila semakin besar. Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa Pancasila sebagai fundamental bangsa Indonesia telah dimarginalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di bumi nusantara. Sehubungan dengan berbagai fenomena tersebut, maka tulisan ini akan membahas tentang Pancasila sebagai fundamental pembangunan karakter bangsa.

## Fundamental Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia ketika awal mula berdirinya NKRI. Pancasila menjadi dasar filsafat NKRI yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, dan tercantum didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun

1945, diundangkan dalam Berita Indonesia Tahun II No 7 bersama dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sepanjang perjalanan historisnya, implementasi Pancasila di berbagai periode pemerintahan telah banyak menghadapi berbagai permasalahan dan ancaman, namun pada akhirnya dapat diatasi oleh bangsa Indonesia sendiri. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki ajaran-ajaran yang mengandung nilai-nilai luhur bangsa. Pancasila memandang manusia sebagai individu dan makhluk sosial yang dikenal dengan konsepsi integralistik. Pancasila yang berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa, sehingga memenuhi ketentuan menjadi ideologi terbuka. Ideologi Pancasila dapat berkembang sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa.

Keterbukaan ideologi Pancasila didalam implementasinya berupa pola pikir yang dinamis. Dalam tingkatan nilai, terdapat ada tiga tingkat nilai yaitu: 1) nilai dasar yang tidak berubah; 2) nilai instrumental sebagai sarana mewujudkan nilai dasar yang dapat berubah sesuai keadaan, serta 3) nilai praktis berupa implementasi secara nyata. Pancasila sebagai dasar negara serta pandangan hidup bangsa Indonesia, pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis, fundamental dan menyeluruh. Hal tersebut berarti bahwa didalam setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan.

Nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila merupakan hasil saripati pemikiran yang dianggap paling tinggi maupun hasil pemikiran yang maksimal, bijaksana, serta positif. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila sangat berguna sebagai fundamental didalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi nilai-nilai Pancasila dilaksanakan didalam semua aspek kehidupan, baik di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial-budaya, maupun pertahanan-keamanan.

Implementasi Pancasila merupakan suatu bentuk aktualisasi nilai-nilai Pancasila didalam bersikap, berperilaku, berintegritas serta bermoral yang sangat tergantung pada kesadaran moral dari masing-masing individu warganegara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan implementasi Pancasila secara subyektif yaitu pelaksanaan Pancasila oleh masing-masing individu warganegara. Implementasi Pancasila secara subyektif berkaitan dengan kesadaran, kesiapan serta ketaatan individu untuk mengimplementasikan Pancasila didalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.



Aktualisasi Pancasila yang bersifat subyektif terkait dengan kondisi obyektif yakni norma-norma moral itu sendiri. Apabila nilai-nilai Pancasila secara subyektif telah dipahami, dihayati dan diinternalisasi didalam diri seseorang, maka individu tersebut telah memiliki moral pandangan hidup. Bila hal tersebut dapat berlangsung berkesinambungan didalam kehidupan keseharian individu, maka nilai-nilai Pancasila telah menginternalisasi dan mengintegrasikan kedalam diri seseorang, sehingga Pancasila telah terbentuk menjadi kepribadian bangsa Indonesia. Pada akhirnya, bangsa Indonesia memiliki suatu kepribadian atau karakteristik yang berbeda dengan kepribadian bangsa-bangsa lain, yakni nilai-nilai luhur yang terkandung didalam Pancasila.

### **Pembangunan Karakter**

Karakter merupakan watak, akhlak ataupun kepribadian individu yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebaikan yang diyakini dan digunakan sebagai fundamental dalam berpikir, bersikap dan bertindak. Interaksi individu dengan lainnya dapat menumbuhkan karakter masyarakat dan karakter bangsa. Oleh sebab itu, pengembangan karakter bangsa dapat dilakukan melalui pengembangan karakter individu warganegaranya. Namun, karena manusia yang hidup didalam lingkungan sosial-budaya tertentu, maka pengembangan karakter hanya dapat dilakukan dalam lingkungan sosial-budaya individu bersangkutan. Hal tersebut berarti pembangunan karakter bangsa hanya dapat dilakukan melalui suatu proses pendidikan yang tidak dapat melepaskan peserta didik dari lingkungan sosial-budaya masyarakat serta budaya bangsa, dimana lingkungan sosial-budaya bangsa yang telah terbentuk adalah Pancasila. Oleh karena itu, pembangunan karakter bangsa harus berlandaskan dan menganut pada nilai-nilai fundamental Pancasila.

Fenomena yang terjadi didalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia menunjukkan adanya degradasi serta disorientasi didalam pembangunan karakter maupun kepribadian Pancasila. Degradasi nilai dan moral Pancasila sebagai nilai fundamental dari pembentukan karakter bangsa terjadi pada berbagai lapisan masyarakat. Terdapat permasalahan utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia didalam pembangunan karakter bangsa, yakni: 1) disorientasi nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi dan ideologi bangsa; 2) keterbatasan instrumen kebijakan yang terintegrasi dalam mewujudkan esensial Pancasila; 3) pergeseraan nilai-nilai etika didalam kehidupan berbangsa dan bernegara; 4) pudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa; 5) ancaman disintegrasi bangsa; serta 6) melemahnya kemandirian bangsa Indonesia. Permasalahan tersebut telah memunculkan berbagai perilaku yang mencerminkan degradasi nilai-nilai dan moral Pancasila didalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di Indonesia.

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila harus dilakukan dengan melakukan langkah konkrit serta berkesinambungan. Nilai-nilai Pancasila sebagai nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia yang pada hakikatnya merupakan nilai-nilai interaksi didalam perilaku hidup manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karakter bangsa yang berlandaskan pada falsafah Pancasila artinya setiap aspek karakter harus menjiwai kelima sila Pancasila secara utuh dan komprehensif. Karakter bangsa merupakan atribut yang melekat pada bangsa secara menyeluruh yang ditunjukkan melalui pola pikir dan perilaku melekat pada budaya maupun nilai yang dianut oleh masyarakat untuk dijadikan sebagai dasar didalam bertingkah laku. Karakter bangsa dapat terbangun melalui kultur yang ada di tengah masyarakat. Sedangkan, kultur dikristalisasikan dan akan membentuk suatu falsafah hidup bersama, yakni Pancasila. Oleh karena itu, keberadaan nilai-nilai Pancasila perlu terus dibina, dikembangkan serta dilestarikan. Pembangunan karakter bangsa melalui aktualisasi nilai-nilai Pancasila ditujukan agar bangsa Indonesia mampu bersikap dan berperilaku dengan selayaknya, sehingga dapat mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia, serta mampu mengantisipasi secara tepat dan presisi terhadap ancaman maupun tantangan di era disrupsi teknologi.

## **Penutup**

Pembangunan karakter merupakan pembangunan segenap jiwa raga bangsa Indonesia melalui internaisasi nilai-nilai Pancasila didalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembangunan karakter juga sebagai bentuk perwujudan amanat yang tertuang didalam Pancasila dan UUD 1945. Karakter Pancasila yang dimiliki agar menjadi warga negara yang baik dan cerdas adalah karakter yang sesuai dan ditunjukkan perilaku yang terkait dengan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila, yaitu: nilai karakter yang religiusitas, kepedulian sosial, kemandirian, patriotisme, kebersamaan, demokratis, serta keadilan.

## **Profil Penulis**



Harry Yulianto, lahir di Sumenep 44 tahun yang lalu. Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Jember dan Program Magister Sains Universitas Gadjah Mada, saat ini sedang menyelesaikan Program Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas Hasanuddin. Ia menekuni bidang ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia. Selain sebagai dosen di Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, juga sebagai trainer profesional bidang HRM serta konsultan bidang

kebijakan publik pada instansi pemerintah. Aktif di berbagai asosiasi profesi dosen dan komunitas peneliti, paralegal, verifactor SINTA, reviewer jurnal nasional, penulis buku maupun artikel ilmiah. Harry Yulianto dapat dihubungi melalui *e-mail*: [harryyulianto.stieypup@gmail.com](mailto:harryyulianto.stieypup@gmail.com)

# PANCASILA, SUMBER KEKUATAN FILOSOFIS EDUKATIF YANG MEWUJUDKAN ERA PENCERAHAN

Oleh: Dr. Sulistyani Eka Lestari, SH.MH

Pengurus AP-HTN/HAN Jawa Timur

Email: [sulis\\_usb@yahoo.com](mailto:sulis_usb@yahoo.com)

## Pendahuluan

Dunia pendidikan sedang dituntut melakukan perubahan besar-besaran atau cenderung menuju ranah revolusi edukasi dengan diadakannya diskresi pemerintah tentang “merdeka belajar, kemerdekaan mengajar”. Kebijakan ini setidaknya dapat terbaca di satu sisi, bahwa di dunia Pendidikan harus ada perubahan yang bisa memberikan banyak manfaat terhadap subyek Pendidikan, khususnya kalangan pembelajarnya.

Idealisme diskresi itu logis, karena mulai dari dasar negara Pancasila, konstitusi (UUD 1945), hingga Undang-Undang dan produk hukum lain yang mengatur dunia Pendidikan menggariskan norma yang memerintahkan tentang pemedulian terhadap sumberdaya manusia Indonesia yang sedang mencari dan mendalami ilmu pengetahuan.

Dalam konstitusi kita (baca: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) diantaranya sudah disebutkan, bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Dalam pasal 28 C UUD 45 misalnya disebutkan: “*setiap orang berhak mengembangkan diri melalui kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*”.

Dalam konstitusi itu jelas menunjuk kata “setiap”. kata "setiap" ini secara hermeneutik menunjukkan pada pemaknaan non-diskriminasi, baik atas nama gender, etnis, budaya, agama, politik, maupun strata sosial-ekonomi. Dalam idealitas ini, hak egalitarianisme edukatif dalam kesempatan memperoleh pendidikan secara merdeka menjadi milik setiap warga masyarakat, baik

golongan kaya maupun komunitas akar rumput (*the grassroot community*). Kalau hal ini bisa dijalankan dengan baik dan benar, maka setidaknya-tidaknya, doktrin Pancasila tentang kemanusiaan dan keadilan dalam bidang Pendidikan menjadi terwujud.

Atas dasar pertimbangan filosofis edukatif itu, maka sekarang bagaimana dengan kita yang mendapatkan amanat edukatif? Sudahkah kita menjadikan Pancasila sebagai sumber kekuatan demikian ini?

## **Pembahasan**

Pancasila sudah lama mengisi kehidupan sejarah bangsa Indonesia. Ideologi ini tidak lahir secara instan, tetapi lahir dari suatu perjalanan panjang seiring dengan kehidupan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mengenal istilah Pancasila jauh sebelum Indonesia merdeka. Pancasila merupakan Ideologi bangsa Indonesia. Secara harfiah Pancasila terdiri dari dua kata yaitu "*Panca*" yang berarti lima dan "*sila*" yang berarti aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan sesuai dengan adab yang dijadikan sebagai dasar. Karena itu, Pancasila berarti rangkaian lima aturan tentang dasar-dasar atau prinsip-prinsip petunjuk perilaku dan perbuatan masyarakat bangsa Indonesia. Kelima sila tersebut kemudian berperan menjadi pandangan hidup, keyakinan, atau cita-cita bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai dasar dalam mengambil suatu keputusan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia.<sup>16</sup> Berbagai aspek penting yang dilahirkan atau diterapkan di Indonesia tidak lepas dari Pancasila. Pancasila digunakan menjadi landasan berpijak atau sumber membangun paradigma yang benar, termasuk dalam mengarahkan idealism Pendidikan nasional.

Secara historis, Pancasila, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, dalam perjalanan sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia telah mengalami persepsi dan interpretasi sesuai dengan kepentingan rezim yang berkuasa. Pancasila telah digunakan sebagai alat untuk memaksa (membentuk dengan tegas) rakyat untuk setia kepada pemerintah yang berkuasa dengan menempatkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat tidak diperbolehkan menggunakan asas lain sekalipun tidak bertentangan dengan Pancasila. Nampak pemerintah Orde Baru berupaya menyeragamkan atau menjadikan satu paham dan ideologi bermasyarakat dan bernegara dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang bersifat pluralistik (beragam). Oleh sebab itu, MPR melalui

---

<sup>16</sup> Tobroni dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM, Civil Society dan Multikulturalisme*, (Malang: Pusapom, 2007), hal. 8.

Sidang Istimewa tahun 1998 dengan Tap. No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4) dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara dari negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.<sup>17</sup> Hal ini menunjukkan, bahwa Pancasila harus dilaksanakan tanpa syarat oleh bangsa Indonesia. Setiap subyek bangsa, dari strata, etnis, atau pemeluk agama apapun di negeri ini, wajib mengamalkan Pancasila secara merdeka di ranah kepentingan atau sektor yang benar seperti dunia pendidikan. Setiap dunia pendidikan ini berkewajiban membentuk atau membangun atmosfer era pencerahan.

Sewaktu menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD pernah menyatakan bahwa terdapat problem serius yang melanda pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia, hukum dibuat dan ditegakkan seolah kehilangan nyawa, hukum dengan mudah dirasuki oleh kepentingan sesaat yang justru bertentangan dengan cita dan tujuan hukum (Pancasila).<sup>18</sup> Pernyataan ini setidaknya dapat diinterpretasikan, bahwa kondisi kehidupan bermasyarakat dan bernegara ini, (di dunia hukum ini sebagai contoh kasusnya) sudah kehilangan pencerahan akibat tidak semua subyek bangsa menjadikan Pancasila sebagai pijakannya. Ketika di dunia hukum ini kehilangan pencerahan, maka otomatis bidang laom yang ikut dituntut pertanggungjawabannya adalah dunia Pendidikan, karena dunia Pendidikan yang “memproduksi” setiap aparat atau pihak-pihak yang berhubungan dengan marwah negara hukum.

Dalam ranah itu, marilah mendidik diri untuk setia melandasi ide, sikap, dan perbuatan dengan ideologi bangsa, Pancasila merupakan ideologi yang “berharga mati” di negara ini. Bukan hanya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) saja yang bernilai “harga mati”. Dengan pertarungan apapun, Pancasila harus dibela sebagai ideologi negara. Dilihat dari aspek filosofis seluruh sistem hukum dan lainnya di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pandangan yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai *philosophische grondslag (grundnorm)*,<sup>19</sup> sehingga sistem ini tidak sampai kehilangan arah karena mempunyai landasan yang kuat. Hal ini juga membuktikan kemuliaan dan urgensinya Pancasila sebagai ideologi Negara, yang menuntut suatu konsekuensi logis dan praktis,

---

<sup>17</sup>Bambang Satriya, *Filsafat Pancasila*, (Jakarta: Nirmana Media, 2016), hal. 27.

<sup>18</sup>Mahfud MD, *Pancasila Sebagai Tonggak Konvergensi Pluralitas Bangsa*, Sarasehan Nasional 2011 “Impelementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menegakkan Konstitusionalisme Indonesia, (Yogyakarta dan Jakarta: UGM dan MKRI, 2011), hal. 17.

<sup>19</sup>Yopi Gunawan, Kristian, *Perkemangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hal.2.

bahwa misalnya pada aspek pembentukan atau pembangunan sistem Pendidikan hingga ke seluruh aspek kehidupan di Negara ini, Pancasila yang dijadikan sebagai sandaran atau rujukan utamanya atau Pancasila adalah sumber asasi atau fundamental perikehidupan bangsa, termasuk secara khusus dalam penyelenggaraan atau pengelolaan dunia pendidikan.

Saat ini MBKM misalnya adalah dikaitkan soal demokrasi dalam bentuk lain dalam dunia Pendidikan. Para pembelajar tentang tata pemerintahan dan kehidupan bernegara, tentulah sangat fasih dengan istilah demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “demos” yang berarti rakyat dan “kratos” berarti pemerintahan. Jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat, atau suatu pemerintahan dimana rakyat memegang kedaulatan yang tertinggi atau rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan Negara. Adalah Abraham Lincoln yang menyatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.<sup>20</sup> Lincoln ini bermaksud mengingatkan secara filosofis, bahwa rakyat merupakan kekuatan atau unsur kunci yang menentukan konstruksi negara dan ketatanegaraan, sehingga dalam kondisi apapun, rakyat harus terlibat di dalamnya sebagai pemilik kedaulatan, termasuk sebagai pemilik kedaulatan edukasi.

Stigma demokrasi Pancasila merupakan “demokrasi unggul” bukan tanpa logika. Bagaimana tidak distigma demikian, demokrasinya menggunakan ideology Negara sebagai pelapis dan pengasasinya. Tidak cukup dengan demokrasi saja yang secara idealitas diimplementasikan untuk, oleh, dan dari bangsa dan masyarakat Negara ini, tetapi juga demokrasi yang berideologis (Pancasila), sehingga ketika ini dijadikan nafas atau kekuatan dalam dunia Pendidikan, maka layak diekspektasikan jika nantinya dunia Pendidikan akan menghadirkan era pencerahan (golden era) secara massif.

“Demokrasi unggul” itu menjadikan kita seharusnya beda dengan bangsa-bangsa atau Negara-negara yang mengikuti atau mengiblati misalnya demokrasi liberalistik, karena demokrasi kita tidak sebatas pengakuan dan pemberian ruang berdaulat bagi rakyat dalam konstruksi penyelenggaraan kegiatan pendidikan, tetapi juga menyertakan ideologi Negara untuk memayungi dan menyediakan doktrin “berkeagungan” dalam setiap tahapan atau proses demi proses.

---

<sup>20</sup> Sunarto, *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, (Semarang: Unnes Press, 2012), hal. 43.

Dalam ranah hakekatnya demokrasi, termasuk demokrasi Pancasila menyentuh nilai-nilai dasar kehidupan tentang apa dan bagaimana sistem kehidupan itu akan dipergunakan dimana manusia sendiri menjadi subyek dan sekaligus dijadikan objeknya. Berikut adalah setidaknya lima indikator untuk mengukur demokratis suatu negara: *pertama*, akuntabilitas, Dalam demokrasi setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggung jawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya, ucapannya dan yang tidak kalah pentingnya adalah perilaku dalam kehidupan yang pernah, sedang bahkan akan dijalannya, *kedua*, rotasi kekuasaan. Dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai. Jadi tidak hanya satu orang yang selalu memegang jabatan, sementara peluang orang lain tertutup sama sekali, ketiga, rekrutmen politik yang terbuka, untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan, diperlukan suatu sistem rekrutmen politik yang terbuka. Artinya setiap orang yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan tersebut., *keempat*, Pemilihan umum. Dalam suatu negara demokrasi, pemilu dilakukan secara teratur. Setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih serta bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak nuraninya, dan *kelima*, menikmati hak-hak dasar. Dalam suatu negara yang demokratis, setiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk didalamnya adalah hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, hak untuk menikmati pers bebas. Selain lima indikator diatas sebagaimana pendapat diatas perlu diperhatikan adalah supremasi hukum untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis hukum harus ditegakkan masyarakat maupun penyelenggara Negara, sehingga tidak ada darinya yang dapat berbuat seenaknya sendiri dan melanggar atau merugikan hak seseorang atau sekelompok orang.<sup>21</sup>

Berdasarkan pemikiran itu, kita setidaknya paham bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi konstitusional, suatu demokrasi yang dijalankan atau diimplementasikan berdasarkan norma konstitusi. Norma konstitusi inilah yang mendasari tatanan hidup bermasyarakat dan bernegara (berpemerintahan), termasuk dalam dunia Pendidikan. sehingga siapapun yang menjalani kehidupan di bumi pertiwi ini, harus memijaki norma hukum yang berlaku. Demokrasi konstitusional ini merupakan perwujudan demokrasi Pancasila. Menurut Yudi Latif,<sup>22</sup> dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab social.

---

<sup>21</sup> Sunarto, *Op. Cit*, hal 44.

<sup>22</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna. Historisitas, Rasionalitas dan aktualitas Pancasila*, (Jakarta: Gramedia, 2011), hal. 383.



Norma konstitusi Indonesia secara tegas menunjukkan bahwa Indonesia tidak menganut paham demokrasi liberal atau demokrasi berparadigma Barat, melainkan menganut demokrasi Pancasila. Soal demokrasi Barat ini, Bung Hatta<sup>23</sup> pernah menyatakan bahwa kebebasan individu ini nantinya bisa mengakibatkan ketidakadilan dalam masyarakat, karena kedaulatan hanya berpusat pada para pemilik modal, Demokrasi Barat yang dilahirkan oleh Revolusi Prancis tidak membawa kemerdekaan rakyat yang sebenarnya, melainkan menimbulkan kekuasaan kapitalisme, sebab itu demokrasi politik saja tidaklah cukup untuk mencapai demokrasi yang sebenarnya yaitu kedaulatan rakyat. Haruslah ada pula kedaulatan ekonomi dan hukum, yang memakai dasar, bahwa segala penghasilan yang mengenal penghidupan orang banyak harus berlaku dibawah tanggungan orang banyak, yang juga didasarkan aturan yang mengikatnya. Demokrasi demikian ini salah satunya di sector Pendidikan.

Demokrasi dalam dunia Pendidikan menjadi kebutuhan asasi yang memang wajib hukumnya diimplementasikan secara konsekuen. Penilaian lain memang menyebutkan, bahwa demokratisasi telah berhasil membentuk pemerintah Indonesia yang demokratis karena nilai-nilai demokrasi yang penting telah diterapkan melalui pelaksanaan peraturan perundangan mulai dari UUD 1945. Memang benar bahwa demokratisasi adalah proses tanpa akhir karena demokrasi adalah sebuah kondisi yang tidak pernah terwujud secara tuntas. Namun dengan adanya perubahan-perubahan itui, demokrasi di Indonesia telah mempunyai dasar yang kuat untuk berkembang.<sup>24</sup> Bukti berkembangnya demokrasi ini akan bisa terbaca makin realistic dalam kebermanfaatan hidup bermasyarakat dan berbangsa kalau dalam dunia Pendidikan pun kesejatian demokrasi berhasil membumi. Membuminya demokrasi ini tentu akan dibuktikan oleh perubahan zaman, tidak hanya sejak gagasan ini diberlakukan.

## Penutup

Pancasila sebagai “tempat berpijak” dalam pembangunan semua sector kehidupan bermasyarakat dan berbangsa sudah merupakan “harga mati” yang bermanfaat terhadap kehidupan manusia Indonesia. Ketika masih banyak manusia negeri ini yang belum menunjukkan jiwanya sebagai democrat di berbagai aktifitas kehidupannya, maka hal ini menandakan bahwa Ketika mereka menjalani proses pembelajaran di dunia Pendidikan, mereka belum berhasil membumikan nilai-nilai demokrasi yang digariskan Pancasila.

---

<sup>23</sup> Zulkifli Suleman, *Demokrasi Untuk Indonesia, Pemikiran Politik Bung Hatta*, (Jakarta: Kompas, 2010), hal.12.

<sup>24</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Prima Grafika, 2008), hal, 135.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Satriya, *Filsafat Pancasila*, (Jakarta: Nirmana Media, 2016).
- MaHFud MD, *Pancasila Sebagai Tonggak Konvergensi Pluralitas Bangsa*, Sarasehan Nasional 2011 “Impelementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menegakkan Konstitusionalisme Indonesia, (Yogyakarta dan Jakarta: UGM dan MKRI, 2011),
- Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Prima Grafika, 2008)
- Sunarto, *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, (Semarang: Unnes Press, 2012).
- Tobroni dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM, Civil Society dan Multikulturalisme*, (Malang: Pusapom, 2007).
- Yopi Gunawan, Kristian, *Perkemangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, (Bandung: Refika Aditama, 2015)
- Yudi Latif, *Negara Paripurna. Historisitas, Rasionalitas dan aktualitas Pancasila*, (Jakarta: Gramedia, 2011).
- Zulkifli Suleman, *Demokrasi Untuk Indonesia, Pemikiran Politik Bung Hatta*, (Jakarta: Kompas, 2010).

## Profil Penulis



### Identitas

- Nama : Dr. Sulistyani Eka Lestari, SH.MH.
- Tempat/Tanggal Lahir : Tuban, 22 April 1962
- Agama : Islam
- NIP : 1962 0422 1987 03 2002
- NIDN : 0022 04 6201
- Unit Organisasi : Dosen Fakultas Hukum  
Universitas Sunan Bonang Tuban
- Alamat Kampus : Jl. dr Wahidin Sudirohusodo No.  
798 Tuban
- Alamat Rumah : Jl. Sunan Ampel No. 7 Tuban
- Nomor HP : 0823 3354 7054

## Riwayat Pendidikan

	Pendidikan	Tahun Lulus
a.	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Program Doktor Ilmu Hukum	9 Maret 2019
b.	Universitas Airlangga Surabaya Program Magister Ilmu Hukum	25 Februari 2002

c.	Universitas Airlangga Surabaya Program Sarjana Ilmu Hukum	18 November 1986
d.	SMA Negeri 1 Tuban	7 Mei 1980
e.	SMP Negeri 1 Tuban	22 November 1976
f.	SD 1 Rengel, Tuban	22 Desember 1973

### Pengalaman Kerja

No	Tahun	Pengalaman Kerja
1	1987	Dosen Kopertis Wilayah 7 Jatim DPK. Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang
2	2000	Kepala Biro Administras dan Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Sunan Bonang Tuban
3	2000-2012	Ketua Pokja III TP PKK Kabupaten Magetan
4	2005	Pembantu Rektor I
5	2005-Sekarang	Anggota Senat PT/Univ. Sunan Bonang
6	2010	Pembantu Rektor I
7	2013	Koordinator Acara Diseminasi dan Penanganan HAM di Pendopo Kabupaten Tuban
8	2014	Pembantu Rektor III
9	2015	Narasumber Dialog Interaktif Konsultasi Keluarga di Radio Pradya Suara FM
10	2015-2017	Tim Pos Pemberdayaan Keluarga yang merupakan kerjasama Univeristas Surabaya dengan Universitas Sunan Bonang
11	2016	Anggota AP-HTN Jatim, Koordinator Wil. Lamongan-Tuban
12	2018-Sekarang	Pembantu Rektor I
13	2018-Sekarang	Anggota Forum Pembantu Rektor Bidang Akademik Sejatim
14	18 Mei 2020	Tim pewawancara Seleksi Beasiswa Pertamina Foundation

### Pengalaman Penelitian

No	Tahun	Judul
Pelatihan		
1	27 Februari 2015	Workshop untuk Pelatihan Pendataan dan Pemetaan Keluarga Indonesia Tingkat Nasional (Yayasan Damandiri Jakarta)

2	17 Oktober 2019	Pelatihan Perancangan Per-Undang-Undnagan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
3	3 Agustus 2017	Penanya Akademik pada Ujian Terbuka di Program S3 Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
4	2018	Penanya Akademik pada Ujian Terbuka di Program S3 Ilmu Hukum Universitas Airlangga
<b>Penelitian</b>		
1	30 Juli 2019	Implementation of Government Regulation Number 21 of 2020 Concerning Large Scale Social Limitation in Covid 19 Prevention in Indonesia (Presenter in Iilomate Internasional Conference)
2	2018	Consumer Protection Low For Bank Customers
3	2020	The Implementation of Indonesia as a Rule of Law Based on 1945 Constitution after Avandements
4	2020	Maintaining The Construction of the Legal State Through Politics of Legal Renewal Based on Deuocrazy
5	2020	Reading the Probalitic Roots of Non Compliance with Contitunional Count Dacisons
6	2020	Kebijakan Ketenagakerjaan dalam Mengatasi Dampak Covid (Presenter pada Webinar I.C Unimal)
<b>Jurnal</b>		
1	2014	Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi (DIH, Jurnal Ilmu Hukum Pebruari 2014, Vo. 01, No. 19, Hal. 38-47)
2	2017	Kajian Hukum dan tindakan Bagi penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Mimbar Yustitia Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Volume 1, Nomor 1, Juni 2017)
3	2019	Urgensi Hukum Perizinan dan penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran

		Lingkungan Hidup (Masalah-masalah Hukum Jilid 48 No. 2, April 2019)
4	2020	Optimalisasi WhatsApp dalam Pembelajaran Daring pada Mata Kuliah Tata Negara di Era Covid-19 (Penguatan Tridharma Dosen Era Pandemi Covid-19 Dan New Normal Tendensi dan Tradisi)

# Penguatan Profil Pelajar Pancasila Melalui Merdeka Belajar

Oleh: Mahmud

Pengawas Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan

## Pendahuluan

Banyak tantangan dalam rangka mewujudkan generasi emas Indonesia tahun 2045. Salah satunya adalah masih adanya permasalahan kebangsaan yang dapat menjadi ancaman masa depan generasi emas bangsa Indonesia itu. Permasalahan itu meliputi: (1) disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila; (2) keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila; (3) bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; (4) memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa; ancaman disintegrasi bangsa; dan melemahnya kemandirian bangsa (Kemdiknas, 2010). Masalah yang tak kalah peliknya adalah degradasi karakter karena adanya contoh kurang baik dari orang yang lebih dewasa seperti guru, orang tua, pejabat dan lainnya. Kasus remeh temeh, misalnya budaya buang sampah sembarangan, budaya terlambat, budaya tidak sabaran, budaya merokok bahkan mungkin termasuk 'budaya korupsi'. Di lain pihak, kebijakan kurikulum pendidikan nasional selama ini justru masih kurang peduli terhadap penguatan pendidikan karakter yang komprehensif berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Masih belum jelas, profil pelajar yang bagaimana yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia?

Atas dasar itulah, dapat dipahami ketika Presiden Joko Widodo menetapkan Nawa Cita kedelapannya dengan mencanangkan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Perhatian Presiden tersebut kemudian ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Pencanangan ini ditindaklanjuti oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, dengan kebijakan merdeka belajarnya. Terkini, salah satu hal penting dalam merdeka belajar itu adalah penguatan pendidikan karakter dalam bentuk yang lebih lugas lagi, yakni menetapkan 'Profil Pelajar Pancasila' sebagai acuan dalam menyusun visi, misi, dan tujuan di satuan pendidikan. Lebih spesifik lagi dapat ditegaskan bahwa harus ada

penerapan pembelajaran dengan paradigma baru, yakni pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, baik kegiatan pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Oleh karena itu, implementasi penguatan profil pelajar Pancasila dalam merdeka belajar di sekolah/madrasah maupun di kampus menjadi keniscayaan, sebagai bagian ikhtiar mewujudkan generasi emas Indonesia tahun 2045 yang akan datang.

### **Masalah dan Indikator Keberhasilan Profil Pelajar Pancasila**

Salah satu masalah yang perlu segera dicarikan solusi oleh guru dan dosen adalah bagaimana menyelaraskan antara konten, level kognitif, dan konteks pembelajaran yang serasi dan selaras dalam pendidikan dan pembelajaran karakter. Pengalaman penulis, masih jamak ditemukan para pendidik yang bertahan berada dalam ‘zona nyaman’. Mereka mengajar hanya sekedar menghabiskan konten kurikulum dengan mengabaikan level kognitif, perbedaan karakteristik peserta didik, dan konteks pembelajaran yang bermakna; terlepas dari konteks tantangan dunia nyata, termasuk juga abai dalam dalam menyiapkan generasi emas yang memiliki nilai-nilai karakter Pancasila.

Problematika tenaga pendidik tersebut tentu bertolak belakang jika dihubungkan dengan kondisi kompetensi dan karakter peserta didik di Indonesia. Berdasarkan hasil *the Programme for International Student Assessment (PISA)* tahun 2018, Indonesia berada di peringkat ke 74 dari 79 negara pada kategori kemampuan membaca. Sedangkan untuk kategori penilaian kemampuan matematika dan kemampuan sains, Indonesia berada di peringkat ke 73 dan ke 71 dari ke 79 negara partisipan PISA. Jika dilihat dari capaian peringkat Indonesia yang cenderung konsisten di peringkat bawah, mulai dari tahun 2000 – 2018, dapat dikatakan bahwa kualitas pendidikan Indonesia masih berada di bawah standar masyarakat global negara-negara lain di dunia (Hewi: 2020).

Masih merujuk kepada skor PISA tahun 2018 tersebut, hanya 29% saja siswa Indonesia yang setuju bahwa ‘kepandaian adalah sesuatu yang bisa berubah banyak’. Hal ini berarti 71% siswa Indonesia lebih memilih ‘pola berpikir tidak berkembang’ dibanding dengan mereka yang memiliki ‘pola berpikir untuk berkembang’. Sementara itu, dalam aspek karakter misalnya, 41% siswa Indonesia dilaporkan mengalami perundungan beberapa kali dalam sebulan. Berita buruknya, siswa yang sering mengalami perundungan memiliki skor 21 poin lebih rendah dalam membaca, merasa sedih, ketakutan, dan kurang puas dengan hidupnya. Mereka juga memiliki kecenderungan membolos sekolah. Jadi, ada korelasi yang signifikan antara tingkat kemampuan literasi dan

numerasi dengan adaptasi, interaksi sosial, dan cara mengatasi masalah sehari-hari.

Untuk mengatasi masalah tersebut, terutama untuk membumikan nilai-nilai Pancasila, sebetulnya pemerintah sudah merintis sejak 1975, setidaknya jika dilihat dari aspek sejarah kurikulum pendidikan (Syamsul: 2019). Berturut-turut '*kurikulum pendidikan Pancasila*' ini mengalami pasang surut dengan bergantinya menteri dan kurikulum. Perkembangan tersebut dapat diikhtisarkan sebagai berikut: *Pertama*, Kurikulum 1975 yang secara tegas sudah menekankan Pendidikan Pancasila dengan mata pelajaran yang berdiri sendiri, yaitu Pendidikan Moral Pancasila (PMP). *Kedua*, Kurikulum 1984, Pendidikan Pancasila dijabarkan secara rinci dan ketat dalam butir-butir Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). *Ketiga*, Kurikulum 1994, Pendidikan Moral Pancasila (PMP) diganti dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) untuk memadukan Pendidikan Moral Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Akibat reformasi tahun 1998, terbitlah suplemen Kurikulum 1999 yang menghapuskan P4 dalam Pendidikan Pancasila. *Keempat*, kurikulum 2004 dengan ciri khas pendidikan dan pembelajaran PKn pada masa ini adalah memadukan tiga aspek kompetensi sekaligus: pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan karakter kewarganegaraan.

*Kelima*, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 yang memberikan otonomi bagi para pendidik untuk mengembangkan silabus pembelajaran berdasarkan Kompetensi Dasar (KD) yang diterbitkan oleh Pemerintah. *Keenam*, Kurikulum 2013 yang memunculkan kembali Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) PPKn dalam 'Kurtilas' ini meliputi aspek spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. *Ketujuh*, Kurikulum 2020 "Merdeka Belajar" yang bertumpu pada tiga poin utama, yaitu teknologi untuk akselerasi, keberagaman sebagai esensi, dan profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu, menjadi tugas para guru dan dosen bagaimana dapat membentuk peserta didik dan mahasiswa yang memiliki kompetensi dan karakter yang berbasis nilai-nilai Pancasila.

Secara umum, profil pelajar Indonesia yang ingin diwujudkan adalah pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (Kemdikbud Ristek, 2021). Dalam hal ini, ada enam ciri utama yang dapat dijadikan indikator keberhasilan profil pelajar Pancasila seperti berikut. *Pertama*, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dengan indikator: (1) akhlak beragama, (2) akhlak pribadi, (3) akhlak kepada manusia, (4) akhlak kepada alam, dan (5) akhlak bernegara.



Ciri *kedua* adalah berkebhinekaan global dengan indikator: (1) mengenal dan menghargai budaya, (2) komunikasi dan interaksi antar budaya, (3) refleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebhinekaan, dan (4) berkeadilan sosial. *Ketiga*, bergotong royong dengan indikator kunci: (1) kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. *Keempat*, mandiri dengan indikator kunci: (1) kesadaran diri dan (2) regulasi diri. *Kelima*, bernalar kritis dengan indikator utama: (1) memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, (2) menganalisis dan mengevaluasi penalaran dan prosedurnya, dan (3) refleksi pemikiran dan proses berpikir. Terakhir, *keenam*, kreatif dengan indikator utama: (1) menghasilkan gagasan yang orisinal dan (2) menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal.

### **Strategi Penguatan Profil Pelajar Pancasila dalam Merdeka Belajar**

Strategi penguatan profil pelajar Pancasila dapat diimplementasikan di sekolah/madrasah atau di perguruan tinggi melalui berbagai macam strategi. Strategi *pertama* adalah bagaimana seluruh civitas satuan pendidikan melakukan perubahan pola pikir positif dalam mengimplementasikan tuntutan pembelajaran Abad XXI melalui penguatan di bidang akademik. Berbagai kompetensi yang harus diasah dan selalu dibudayakan adalah berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Tidak kalah penting juga adalah penanaman, pembiasaan, dan pembudayaan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Satu lagi, penerapan budaya literasi dan numerasi serta *Higer order Thinking Skill (HOTS)* dalam pembelajaran dan penilaian. Pendek kata, perlu penerapan strategi pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang berbasis nilai-nilai Pancasila, melalui kegiatan pembelajaran di dalam maupun di luar kelas.

*Kedua*, melalui kegiatan nonakademik, misalnya kegiatan ekstrakurikuler atau Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang mendukung tumbuh kembangnya profil pelajar Pancasila. Misalnya kegiatan kepramukaan, Karya Ilmiah Remaja (KIR), Palang Merah Remaja (PMR), dan lain-lain. *Ketiga*, melalui kegiatan intrakurikuler/pembelajaran dengan ‘mengintegrasikan’ topik atau tema pembelajaran dengan pesan-pesan moral profil pelajar Pancasila. *Keempat*, melalui kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila berdasarkan tema tertentu yang tidak terikat dengan konten mata pelajaran. Khusus di perguruan tinggi, dapat pula berkolaborasi dengan pihak lain melalui penerapan kampus merdeka di luar program studi, khususnya keikutsertaan mahasiswa pada program membangun desa/Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik berbasis profil pelajar Pancasila (Dirjen Dikti: 2020).

Strategi berikutnya, *kelima*, mengondisikan lingkungan sosial dan afektif yang mendukung bentuk komunikasi dan interaksi yang pro terhadap implementasi profil pelajar Pancasila. Hal ini dapat diciptakan, misalnya, melalui praktik kepemimpinan guru/dosen/kepala sekolah/madrasah atau rektor yang kolaboratif dan kolektif koligial. Sekali-kali dapat pula diberikan penghargaan kepada mahasiswa dan para guru/dosen yang berhasil memperoleh prestasi akademik ataupun nonakademik di bidang implementasi profil pelajar Pancasila. *Keenam*, mengupayakan lingkungan fisik kaya akan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Misalnya dengan cara memajang karya tulis, lukisan, foto, benner dan sejenisnya terkait praktik nyata profil pelajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sangat bijak jika ditambah lagi dengan memperkaya sumber belajar di perpustakaan, baik cetak maupun elektronik, terkait profil pelajar Pancasila.

## Penutup

Jika nilai-nilai profil pelajar Pancasila tersebut dapat diimplementasikan secara massif, baik secara individu peserta didik/mahasiswa dan guru/dosen maupun oleh para *stakeholder* pendidikan, apalagi didukung oleh seluruh lapisan masyarakat secara luas, maka generasi emas tahun 2045 bukan lagi mimpi, tetapi sebuah kenyataan.

## Daftar Pustaka

- Arifin, Samsul. “Perkembangan Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Tahun 1994 – 2013 di Madrasah Ibtidaiyyah. Tesis. UIN Yogyakarta, 2019
- Hewi, La dan Shaleh, Muh. “Refleksi Hasil PISA (*The Programme For International Student Assesment*): Upaya Perbaikan Bertumpu Pada Pendidikan Anak Usia Dini). Jurnal Golden Age. Universitas Hamzanwadi. Vol. 04, No. 1, Juni 2020
- Ismail, Shalahuddin. “Analisis Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter dalam Mewujudkan Pelajar Pancasila di Sekolah”. Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial. Volume 2, Issue 1, Januari 2021
- Murtadlo, M. (2020, November 7). “Menakar Profil Pelajar Pancasila di Perguruan Tinggi”. <https://doi.org/10.31219/osf.io/jg8hx>. 10 Juli 2021.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 tentang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 7272 tahun 2019 tentang Pedoman Impelentasi Profil Pelajar Pancasila pada Pendidikan Islam.

Tim Penyusun Dirjen Dikti. *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020.

Tim Penyusun Balitbang dan Perbukuan Kemdikbud Ristek. *Panduan Pengembangan Kurikulum Operasional di Satuan Pendidikan*. Jakarta: Kemdikbud Ristek, 2021

### Profil Penulis



**Drs. Mahmud, M.Pd.I**, lahir di Pasuruan, 7 Agustus 1968. Tinggal di Jl. Trunojoyo, Bugul Kidul, Kota Pasuruan. Alumni S-1 IAIN Sunan Ampel Malang, 1993 dan S-2 IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008 ini juga pernah *nyantri* di Pesantren Ustadzul Mustaqim Pandaan (1982-1985) dan Pesantren Miftahul Huda, Malang (1986-1995).

Sehari-hari sebagai Pengawas Madrasah pada Kementian Agama Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Aktif juga sebagai Sekretaris PC Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kab. Pasuruan.

Buku pertamanya diterbitkan Pustaka Media Guru (2018), *Menggapai Haji Mabru: Catatan Inspiratif, Edukatif, dan Reflektif*. Disusul buku keduanya "*Kecerdasan Sosial dalam Al-Qur'an*", diterbitkan penerbit yang sama (2020). Buku ketiganya berupa antologi "*Dosen Merdeka: Peran, Tantangan, Strategi, Transformasi dan Inovasi Kebijakan Mereka Belajar Kampus Merdeka*", diterbitkan Unisma Press (2021). Penulis dapat dihubungi di Hp/WA 081336813222; email: mahmud7868@gmail.com.

# **Pancasila, Pesantren dan Nasionalisme: Konsep *Mur-Baut* Dalam Mencetak Santri-Mahasiswa berkarakter Religius-Nasionalis**

Oleh:

**M. Daimul Abror**

## **A. Pendahuluan**

Indonesia sebagai sebuah bangsa yang majemuk baik dari aspek suku, agama, budaya, etnis, bahasa maupun teritorialnya merupakan sebuah realita yang banyak menarik perhatian dunia internasional. Potret sebuah kebersamaan dalam keragaman yang terbungkus dalam wadah bangsa Indonesia pada perjalanannya mengalami pasang surut dalam kaitannya dengan perwujudan perdamaian dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. *Founding Fathers* bangsa ini sudah menyadari hal ini dengan menjadikan Pancasila sebagai Ideologi Negara Indonesia, dimana Pancasila dijadikan sebagai perekat atas beragamnya suku, agama, budaya, etnis, bahasa dan teritorial yang ada di Indonesia. Secara historis sikap *Founding Fathers* tersebut diantaranya dapat ditelusuri dari cuplikan pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, “Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara semua buat semua, satu buat semua, semua buat semua” (Shofa, 2016:34). Cuplikan pidato Bung Karno tersebut diperkuat oleh argumentasinya Suseno (2005), dimana menurutnya bangsa Indonesia dapat bersatu bila ada penghormatan terhadap keberagaman yang menjadi kenyataan sosial. Lebih tegasnya, Suseno mengatakan bahwa penegakan kesatuan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas setiap komponen bangsa.

Hubungan antara pesantren dan nasionalisme memang tidak bisa dipisahkan dari sejarah panjang perjuangan para kyai dan santri baik di masa perjuangan maupun pasca kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan ada ungkapan hari ini “jangan pernah ajari Pondok Pesantren tentang Nasionalisme”. Karena, keberadaan pondok pesantren

merupakan bagian integral untuk membangun Indonesia yang beragama, melalui nilai-nilai substantif keislaman (Noorhayati, 2017:7).

Artikel ini secara mikro berusaha menjelaskan konseptualisasi *mur-baut* yang di gagas oleh pengasuh pesantren ngalah sekaligus pembina Universitas Yudharta Pasuruan sebagai bentuk kaderisasi Santri-Mahasiswa pancasila, dimana Santri-Mahasiswa di Universitas Yudharta Pasuruan dicetak menjadi Santri-Mahasiswa yang religius sekaligus nasionalis. Sedangkan secara makro, artikel ini berusaha merajut nilai-nilai pancasila yang bersifat universal dengan praktek religius-nasionalis yang sudah diaplikasikan di Universitas Yudharta Pasuruan sebagai penjabaran dari konsep *mur-baut*.

## B. Pancasila dan Nasionalisme

Pancasila sebagai sebuah ideologi bangsa pada kenyataannya sejak era orde baru cenderung dijadikan sebagai kekuatan yang permisif terhadap kapitalis *measing*. Dimana Pancasila sering dijadikan sebuah legitimasi guna membungkam pemikiran-pemikiran kritis yang digagas dan dikembangkan oleh generasi muda. Dalam perspektif sejarah, dengan berpijak pada ideologi pancasila bahwa tahun 1955 Presiden Soekarno mampu menjadikan Indonesia sebagai negara yang memberikan jalan tengah, jalan ketiga, dalam menghadapi ketegangan akibat perang dingin dua blok sosialis-komunis dengan blok liberal-kapitalis (Hariyono, 2014).

Sedangkan pemahaman nasionalisme dalam konteks Indonesia, secara normatif dapat ditelusuri baik dari landasan ideologis maupun landasan konstitusinya. Dalam perpektif ideologis, konsep nasionalisme tersirat dalam sila ke-3 dan ke-5 Pancasila, bahwa Indonesia sebagai bangsa dan negara didasarkan pada semangat persatuan dan kesatuan guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Sedangkan berdasarkan UUD 1945 sebagai landasan konstitusi, konsep nasionalisme dapat ditelusuri dalam alinea ke-3 Pembukaan UUD 1945: “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Kemerdekaan adalah buah usaha dari upaya membebaskan diri dari belenggu penjajahan, yang masih berupa “jembatan emas” menuju cita-cita. Masa penjajahan Belanda memperlihatkan praktik penindasan, pembodohan, dan ketidakadilan. Oleh sebab itu, jelaslah bahwa suatu kehidupan kebangsaan yang bebas itu

seperti tercermin dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945: “untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Mengacu pada pemahaman terhadap alinea ke-3 dan alinea ke-4 pembukaan UUD 1945 tersebut, bahwa konsep nasionalisme tersebut selaras dengan konsep nasionalisme yang tertuang dalam sila ke-3 dan sila ke-5 Pancasila yang notabene sebagai landasan ideologis bangsa Indonesia.

Dari pemahaman konsep nasionalisme berdasarkan sila ke-3 dan sila ke-5 Pancasila, dan alinea ke-3 dan alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 tersebut, artikulasi dari pemahaman nasionalisme yang lebih operasional dapat ditelusuri dalam batang tubuh UUD 1945, yakni dalam pasal 27 ayat 3 yang menjelaskan bagaimana setiap warga negara berhak dan wajib dalam upaya pembelaan negara. Secara eksplisit klausul bela negara sebagai perwujudan gerakan nasionalisme dalam pasal 27 ayat 3 tersebut dipertegas lagi dalam pasal 30 ayat 1 dan ayat 2. Dimana dalam pasal ayat 30 ayat 1 menjelaskan bagaimana tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta secara aktif (partisipatif) dalam usaha (menjaga) pertahanan dan keamanan negara (sesuai dengan bidang keahlian masing-masing). Sedangkan pada pasal 30 ayat 2 lebih menekankan bagaimana usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan yang melibatkan semua komponen bangsa, yakni dari unsur pemerintah (TNI/POLRI) dan rakyat (Ilmuwan/pengusaha/organisasi masyarakat).

### **C. Santri-Mahasiswa Pancasila : Santri-Mahasiswa berkarakter Religius-Nasionalis**

Secara terminologis pesantren berasal dari kata *cantrik* yang diimbuhi awalan *pe-* dan akhiran *-an*. Karena pergeseran tertentu, kata *cantrik* berubah menjadi kata *santri*. Dengan mengacu pada tata bahasa Indonesia, fonem *-an* berubah menjadi *-en* sehingga lahirlah kata *pesantren*. Sedangkan kata pondok merupakan penyesuaian ucapan kata *funduk* dalam bahasa Arab yang berarti tempat menginap (Hayati, 2011:158). Sehingga pondok pesantren dapat diartikan sebagai asrama atau tempat menginap para santri dalam rangka belajar-mengajar agama Islam.

Sebagai salah satu lembaga pendidikan tertua yang ada di Indonesia, tentunya keberadaan pondok pesantren sangat dibutuhkan perannya untuk turut serta membantu pemerintah dalam melaksanakan pendidikan Nasional dalam rangka pembinaan empat macam tanggung jawab, yaitu:

Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Humaniora, Pendidikan Ilmu dan Teknologi, Pendidikan Keterampilan.

Dalam konteks di Pondok Pesantren, untuk pendidikan agama diajarkan secara *fullday learning* dengan menempatkan santri di asrama-asrama pesantren. Sedangkan untuk pendidikan pancasila, pendidikan humaniora, pendidikan ilmu dan teknologi, dan pendidikan keterampilan diajarkan di lembaga formal, mulai di tingkat sekolah dasar hingga universitas sebagai puncak tertinggi lembaga pendidikan formal.

Pondok pesantren selama ini merupakan lembaga pendidikan tertua di Nusantara yang tetap konsisten dalam mencetak kader-kader yang religius-nasionalis dalam rangka memupuk semangat nasionalisme dan merawat keutuhan bangsa dari ancaman disintegrasi bangsa. Pondok-pondok pesantren besar di Jawa Timur bahkan sudah beradaptasi dengan mendirikan sebuah kampus baik skala Sekolah Tinggi, Institut, maupun Universitas. Kampus tersebut sebagai wadah untuk mencetak kader-kader yang selain religius juga nasionalis. Diantaranya Pondok Pesantren Lirboyo Kediri yang mendirikan Institut Agama Islam Tribakti sejak 30 April 1965, Pondok Pesantren Tebuireng Jombang yang mendirikan Universitas KH. HAsyim Asy'ari pada tahun 1967, Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang yang mendirikan Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum sejak 9 September 2001, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Jombang yang mendirikan Universitas KH. A. Wahab Hasbullah sejak 30 Agustus 2013, Pondok Pesantren Ngalah Pasuruan yang mendirikan Universitas Yudharta Pasuruan sejak 18 Agustus 2002, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo mendirikan Universitas Ibrahimiyah sejak 14 Maret 1968, Pondok Pesantren Gontor Ponorogo mendirikan Universitas Darussalam Ponorogo sejak 4 Juli 2014, Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik mendirikan Institut Keislaman Abdullah Faqih sejak 13 Maret 2003, Pondok Pesantren Nurul Jadid Probolinggo mendirikan Universitas Nurul Jadid sejak 29 Oktober 2017, dimana universitas ini merupakan penggabungan dari tiga kampus yang sudah didirikan sebelumnya, Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Madura mendirikan Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien sejak 21 Juni 2002, Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo mendirikan Universitas Islam Zainul Hasan Genggong sejak 31 Desember 1968, Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan mendirikan Institut Pesantren Sunann Derajat sejak 11 Juni 2015 dan masih banyak lagi pesantren lainnya yang memiliki kampus meskipun masih level sekolah tinggi.

Tabel 1. Data Kampus di Beberapa Pesantren Besar di Jawa Timur

No	Nama Pesantren	Nama Kampus	Tahun Berdiri
1	Pondok Pesantren Lirboyo Kediri	Institut Agama Islam Tribakti	30 April 1965
2	Pondok Pesantren Tebuireng Jombang	Universitas KH. Hasyim Asy'ari	22 Juli 2013
3	Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang	Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum	9 September 2001
4	Pondok Pesantren Bahrul Ulum Jombang	Universitas KH. A. Wahab Hasbullah	30 Agustus 2013
5	Pondok Pesantren Ngalah Pasuruan	Universitas Yudharta Pasuruan	18 Agustus 2002
6	Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo	Universitas Ibrahimiyah	14 Maret 1968
7	Pondok Pesantren Gontor Ponorogo	Universitas Darussalam Ponorogo	4 Juli 2014
8	Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik	Institut Keislaman Abdullah Faqih	13 Maret 2003
9	Pondok Pesantren Nurul Jadid Probolinggo	Universitas Nurul Jadid	29 Oktober 2017
10	Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Madura	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien	21 Juni 2002
11	Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo	Universitas Islam Zainul Hasan Genggong	31 Desember 1968
12	Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan	Institut Pesantren Sunann Derajat	11 Juni 2015

*Sumber: diolah dari penulis dari berbagai sumber, 2021*

Santri-Mahasiswa yang di didik di beberapa pesantren yang didalamnya terdapat kampusnya tersebut realitasnya tidak hanya diberikan wawasan keagamaan tetapi juga diberikan wawasan tentang nasionalisme. Seperti salah satu contoh sederhana dari pengasuh salah satu pesantren di Pasuruan sekaligus pembina Kampusnya sering memberikan pesan kepada santri-



mahasiswanya, “*koen kabeh poro anak-anakku, hubunganmu ambek wong-wong kristen, katolik, hindu, budo, konghucu iku ibarate mur-baut seng iso nyingseti perdamaian Indonesia*” (hubungan kalian semua (para santri-mahasiswa) dengan orang-orang kristen, katolik, hindu, budha dan konghucu itu ibarat **mur-baut** yang menguatkan perdamaian Indonesia). Meskipun dengan bahasa yang sederhana, ternyata istilah **mur-baut** tersebut mengandung makna dan tujuan yang sangat dalam terutama kaitannya dengan bentuk penghormatan kepada sesama anak bangsa dalam rangka mewujudkan perdamaian di Indonesia. Realita ini pernah dibuktikan oleh Prof. Ir. Rolly Intan, M.A.Sc., Dr.Eng yang pada tahun 2016 mengadakan kunjungan ke Pesantren Ngalah sebagai bagian dari kerjasama antara Universitas kristen Petra dan Universitas Yudharta Pasuruan. Beliau sebagai seorang akademisi dan juga penganut agama kristen mengatakan, “Istilah “*mur-baut*” yang disampaikan oleh kyai sholeh dihadapan saya merupakan bentuk kesalehan sosial beliau terhadap orang lain yang nyata-nyata berbeda kepercayaannya, tetapi istilah tersebut mampu menyentuh hati nurani saya, dimana istilah tersebut saya rasa mampu merekatkan tali persaudaraan sebagai sesama anak bangsa yang cinta damai.”

#### D. Daftar Pustaka

1. Hariyono. 2014. *Ideologi Pancasila: Roh Progresif Nasionalisme Indonesia*. Penerbit In-Trans.
2. Hayati, Fitroh. 2011. *Pesantren sebagai Alternatif Model Lembaga Pendidikan Kader Bangsa*. MIMBAR, Vol. XXVII, No. 2 (Desember 2011): 157-163.
3. Noorhayati, S. Mahmudah., 2017. *Redesain Paradigma Pendidikan Islam Toleran dan Pluralis di Pondok Pesantren (Studi Konstruktivisme Sikap Kiai dan Sistem Nilai di Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo)*. Jurnal Pendidikan Agama Islam (*Journal of Islamic Education Studies*) Volume 5 Nomor 1 (2017). ISSN(p) 2089-1946& ISSN(e) 2527-4511.
4. Shofa, Abd Mu'id Aris.,2016. *Memaknai Kembali Multikulturalisme Indonesia Dalam Bingkai Pancasila*. JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 1, No. 1, Juli 2016. ISSN 2527-7057.
5. Suseno, Franz Magnis., 2005. *Berebut Jiwa Bangsa*, Jakarta: Kompas.
6. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

## Profil Penulis



M. Daimul Abror, lahir di Nganjuk 39 tahun yang lalu. Doktor Ilmu Administrasi ini menekuni bidang ilmu Administrasi Publik khususnya di bidang Pemerintahan Daerah dan Kebijakan Publik. Dosen di Prodi Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Kadiri Kota Kediri, ia juga tengah berkiprah sebagai Tenaga Adli di Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2021, Reviewer Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Universitas Dr. Soetomo sejak 2020 dan bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pasuruan untuk melakukan pendampingan sebagai tenaga ahli penelitian atau pendampingan aktivitas lainnya tahun 2019. Aktif sebagai anggota IAPA (Indonesian Association for Public Administration) dan Pengurus IAPA Jawa Timur sejak 2021. Selain itu juga sebagai Founder dan Pengelola Channel Youtube Sekolah Kebijakan Publik (<https://www.youtube.com/channel/UChPAayQyn6cfV3-Tnp-XTew>). Daim dapat dihubungi melalui *e-mail*: [daimabrор@unik-kediri.ac.id](mailto:daimabrор@unik-kediri.ac.id).